



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Perubahan RPJMD berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan Renstra PD;
- b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran yang termuat dalam perubahan RPJMD;
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
- d. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Indikator makro pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang harus dicapai pada Tahun 2023.
- (2) Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Indeks pembangunan manusia pada tingkat 77,75 (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh lima);
- b. Tingkat kemiskinan sebesar 5,90% (lima koma Sembilan puluh persen);
- c. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen);
- d. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5±1% (tiga koma lima kurang lebih satu persen);
- e. PDRB per kapita sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. LPE non migas dan batubara sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
- g. Nilai tukar petani sebesar 120,00 (seratus dua puluh koma nol nol);
- h. Indeks gini pada angka 0,308 (nol koma tiga ratus delapan);
- i. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 76,15 (tujuh puluh enam koma lima belas); dan
- j. Indeks reformasi birokrasi pada posisi B (72,00) (tujuh puluh dua koma nol nol).

(3) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam perubahan Renstra PD.
- (2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dalam menyusun perubahan Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan perubahan RPJMD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Desember 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-248/2021).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut dari bagian dari tuntutan reformasi politik di tahun 1998 dilakukan dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan terkait lainnya. Prinsip dasar desentralisasi adalah setiap daerah memiliki kewenangan (administratif, keuangan, dan bahkan politik) yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya. Namun kewenangan pembangunan yang dapat dijalankan tersebut harus tetap sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan kepada setiap daerah, untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun ke depan, dimana perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam perumusannya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 (lima) tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

2005–2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Selanjutnya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam RKPD serta Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Pada dasarnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 (tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan RKPD tahun 2020 pelaksanaan kebijakan RPJMD dilakukan pengendalian dan evaluasi yang antara lain memberikan rekomendasi agar dilakukan perubahan atas RPJMD. Sebagaimana dipahami bersama, sesuai pasal 342 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor. *Pertama*, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. *Kedua*, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. *Ketiga*, terjadi perubahan yang mendasar. Terjadinya perubahan mendasar dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen perencanaan adalah berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya telah mengakomodir keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang mana hal dimaksud belum tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai *omnibus law* yang dimaksudkan untuk memperbaiki iklim penyerapan tenaga kerja. Berbagai regulasi dan kebijakan sektoral di daerah perlu disesuaikan khususnya menyangkut kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional di daerah, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan nasional lain yang juga menjadi perhatian utama perubahan RPJMD adalah amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya. Mulai tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19 atau dalam kondisi terakhir ini adanya resesi global dan nasional berupa antara lain pembatasan aktivitas sosial dan berkurangnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara masif. Respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara nasional dan daerah telah direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya realokasi dan *refocusing* APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Hasil evaluasi kebijakan jangka menengah daerah sampai dengan tahun 2020 juga menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk

melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan yang telah atau sedang dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023, dengan memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional. Penjelasan hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN;

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD

memperhatikan sasaran RPJMN yang telah diselaraskan juga dengan arah kebijakan dalam RPJPN. Periode yang berbeda mengharuskan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memedomani dua RPJMN yaitu periode tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kebijakan RPJMD dilaksanakan secara tahunan melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik dalam setiap tahapan RKPD.

3. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan di dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak

langsung akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

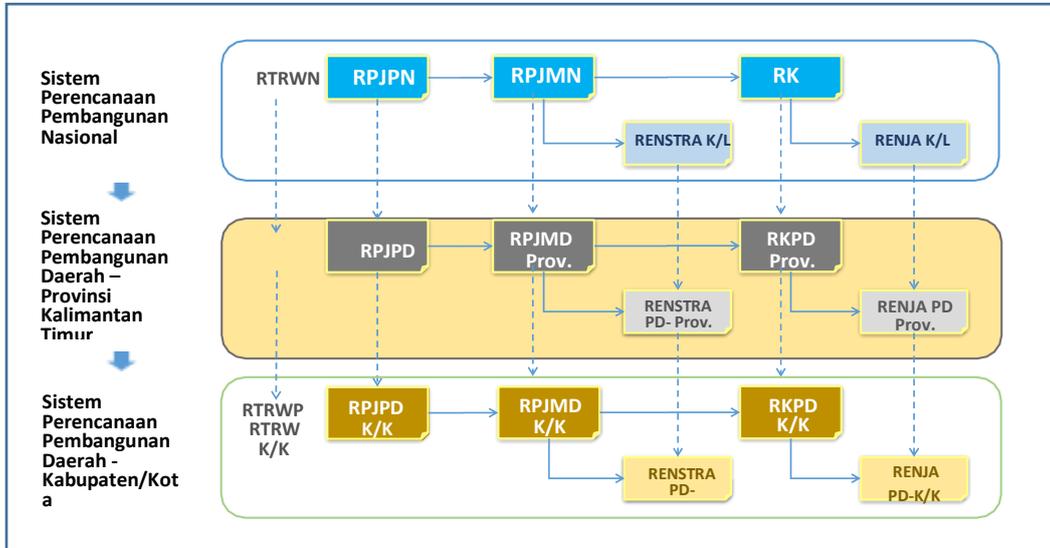
4. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral;

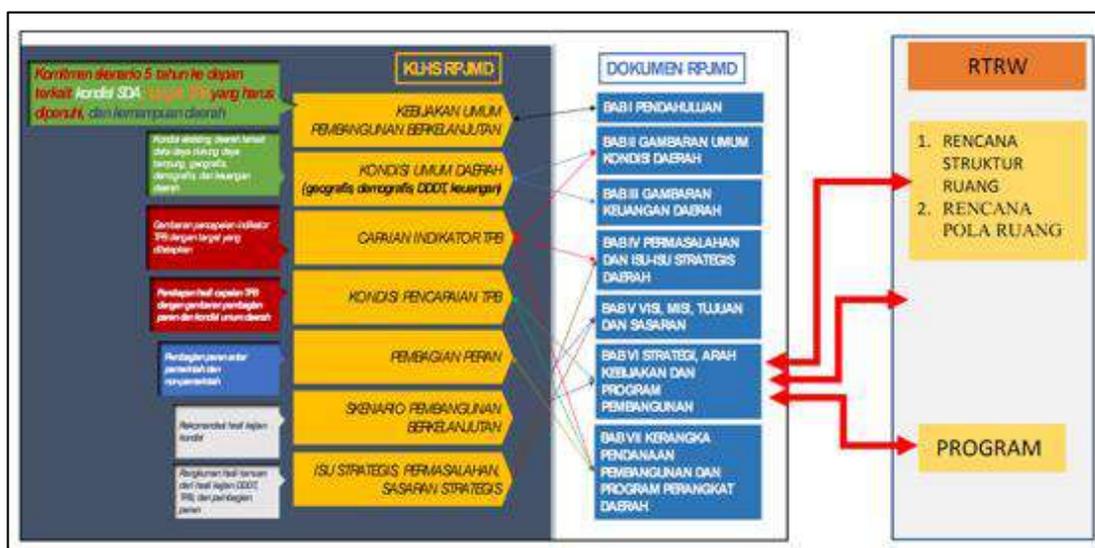
Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi maupun daerah, Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana sektoral tersebut diantaranya adalah: 1) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB), 2) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 5) serta Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antara para pemangku kepentingan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar I-1.



Gambar I - 1 Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. Hubungan ketiga dokumen ini harus sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengandaya dukung dna daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana diatur dalam RTRWP. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.



Gambar I - 2 Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD

Berdasarkan KLHS, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan merekam ulang kebijakan pembangunan tahunan yang telah dilaksanakan/direncanakan sampai dengan Tahun 2021 dan menyesuaikan/revisi kebijakan pembangunan pada periode tersisa yakni Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur

di sisa periode pembangunan yaitu pada RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023. Dalam menetapkan penyesuaian strategi dan arah kebijakan serta penentuan program pembangunan daerah, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan dua tahun berjalan serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Adapun sasaran penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
2. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam menghadapi gejolak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19;
3. Instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

#### 1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai tambahan untuk memudahkan, dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini juga memuat Lampiran yang menyajikan informasi detil terkait program dan pagu indikatif serta program per-urusan . Sistematika dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

- BAB I           PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4. Maksud dan Tujuan
  - 1.5. Sistematika Penulisan
- BAB II           GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.5. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/  
*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*
- BAB III          GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - 3.1. Kinerja Masa Lalu
  - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.3. Kerangka Pendanaan
- BAB IV          PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  - 4.1. Permasalahan Pembangunan
  - 4.2. Isu Strategis
- BAB V           VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
  - 5.1. Visi
  - 5.2. Misi
  - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- BAB VI          STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
  - 6.2. Tema Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
  - 6.3. Program Unggulan untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2023 (*Dedicated Program*)
  - 6.4. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan
  - 6.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
  - 6.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

7.2. Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Kinerja Utama

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagi Indonesia sumber daya alam yang demikian melimpah khususnya yang berada di luar Jawa termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, sudah lebih dari 6 (enam) dasawarsa dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi (*natural resources based economy*). Alasannya tentu saja karena sumber daya tersebut telah tersedia dan secara mudah dengan langsung mengekstraksi dan memperdagangkan tanpa adanya upaya pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Akses yang mudah terhadap sumber daya alam ditambah pertumbuhan penduduk, peningkatan standar hidup dan tersedianya pasar atas komoditas sumber daya alam telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung/ekstraktif ini disadari sangat rentan bagi laju pertumbuhan karena dipengaruhi oleh harga pasar atas komoditas, terlebih bilamana orientasinya ekspor. Apabila harga baik maka baik pula laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dalam dasawarsa terakhir Provinsi Kalimantan Timur menyadari kualitas pertumbuhan sama pentingnya dengan laju pertumbuhan tersebut. Kualitas pertumbuhan yang diharapkan tentu saja yang mampu menghemat (terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan) dan/atau menjaga keberlanjutannya (sumber daya alam terbarukan), salah satunya adalah dengan melakukan transformasi ekonomi.

Strategi jangka panjang yang secara bertahap dilakukan, yaitu potensi sumber daya alam terbarukan terus dikembangkan, baik dari sektor pertanian dalam arti luas maupun sektor jasa lingkungan, sehingga diharapkan akan menggeser struktur ekonomi ekstraktif terhadap sumber daya alam tidak terbarukan. Disamping itu hilirisasi komoditas sektor pertanian melalui pembangunan dan pengembangan industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) produk, terjadinya penciptaan tenaga kerja dan perlahan menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian ke struktur perekonomian yang lebih berkelanjutan termasuk secara merata dan berkeadilan menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang saat ini sedang dalam proses perubahan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang sebagai dasar dilakukannya perubahan setelah 2 (dua) tahun berjalan, dengan memperhatikan berbagai dinamika aspek pembangunan baik sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kalimantan Timur adalah salah satu dari lima provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah sebesar 12.734.692 hektar, Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2<sup>o</sup> 33' Lintang Utara (LU) dan 2<sup>o</sup> 25' Lintang Selatan (LS), 113<sup>o</sup> 44' Bujur Timur (BT) dan 119<sup>o</sup> 00' Bujur Timur (BT). Adapun batas-batas geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara,
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota, meliputi 103 Kecamatan dan 1.038 Desa/Kelurahan dengan informasi luas wilayah setiap Kabupaten/Kota sebagaimana disajikan dalam Tabel II-1.

Tabel II- 1 Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	KUBAR	1.370.992	16	194
3	KUKAR	2.598.808	18	237
4	KUTIM	3.105.171	18	141
5	Berau	2.173.519	13	110
6	PPU	292.373	4	54
7	MAHULU	1.944.941	5	50
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59
10	Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur		12.734.692	103	1.038

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

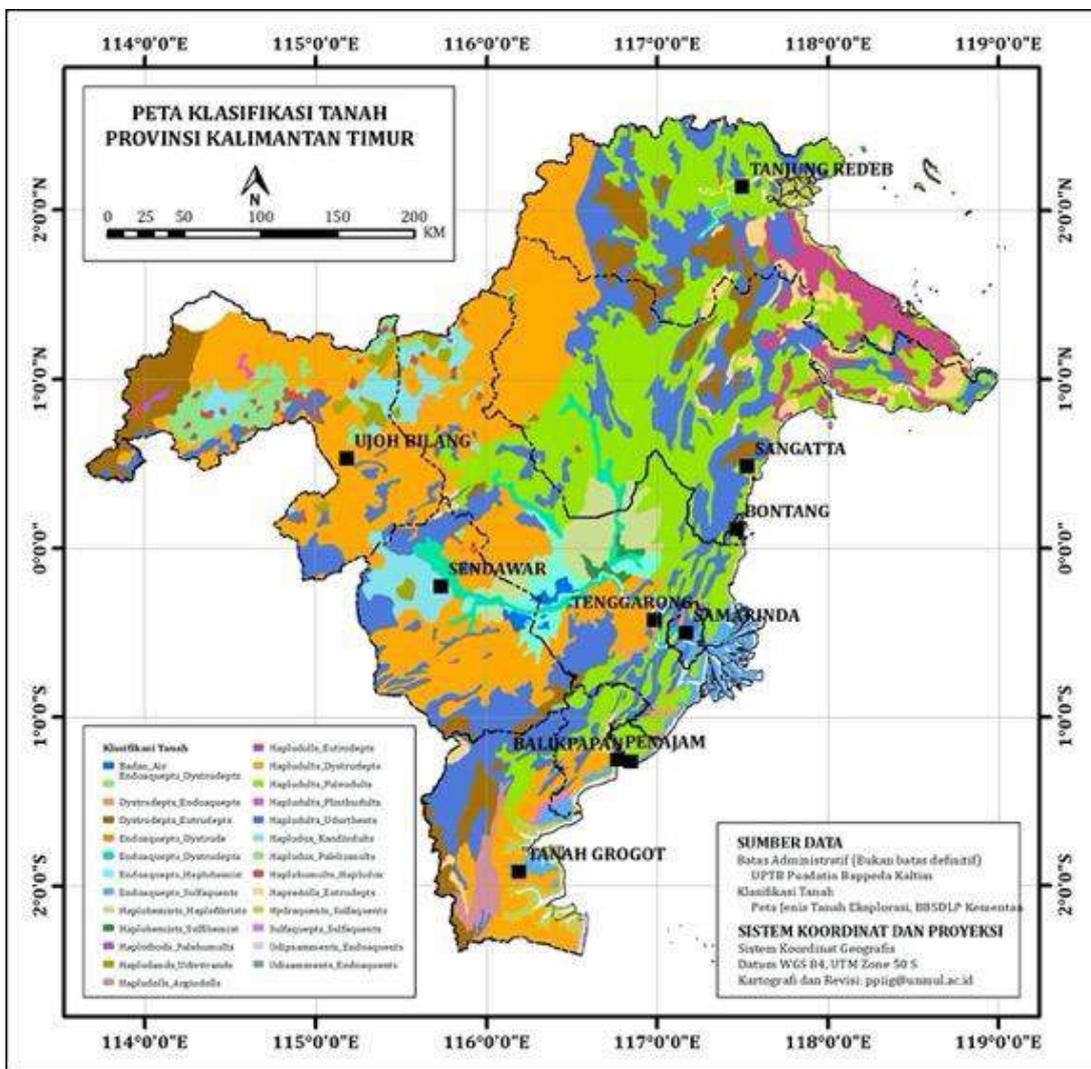
### 2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan keberadaan area dengan kelerengan bervariasi dari lahan datar (kemiringan lereng 0-2%) yang umumnya terdapat di daerah pantai dan daerah paparan banjir dari sungai besar, area kemiringan landai (2-8%), perbukitan dan dataran bergelombang dengan kemiringan sedang (8-15%), agak curam (15-25%) hingga curam (25-40%). Dengan kondisi topografi seperti ini, area yang datar dan landai yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan cukup terbatas, sementara pada wilayah yang memiliki konfigurasi lapangan yang bergelombang hanya cocok untuk ditanami tanaman tahunan atau diselamatkan sebagai kawasan konservasi.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Ketinggian wilayah Kalimantan Timur bervariasi mulai dari 10,23 - 174,63 mdpl. Hanya Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang terletak di ketinggian lebih dari 100 mpdl, sisanya cenderung terletak pada ketinggian yang lebih rendah yang artinya wilayah Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan.

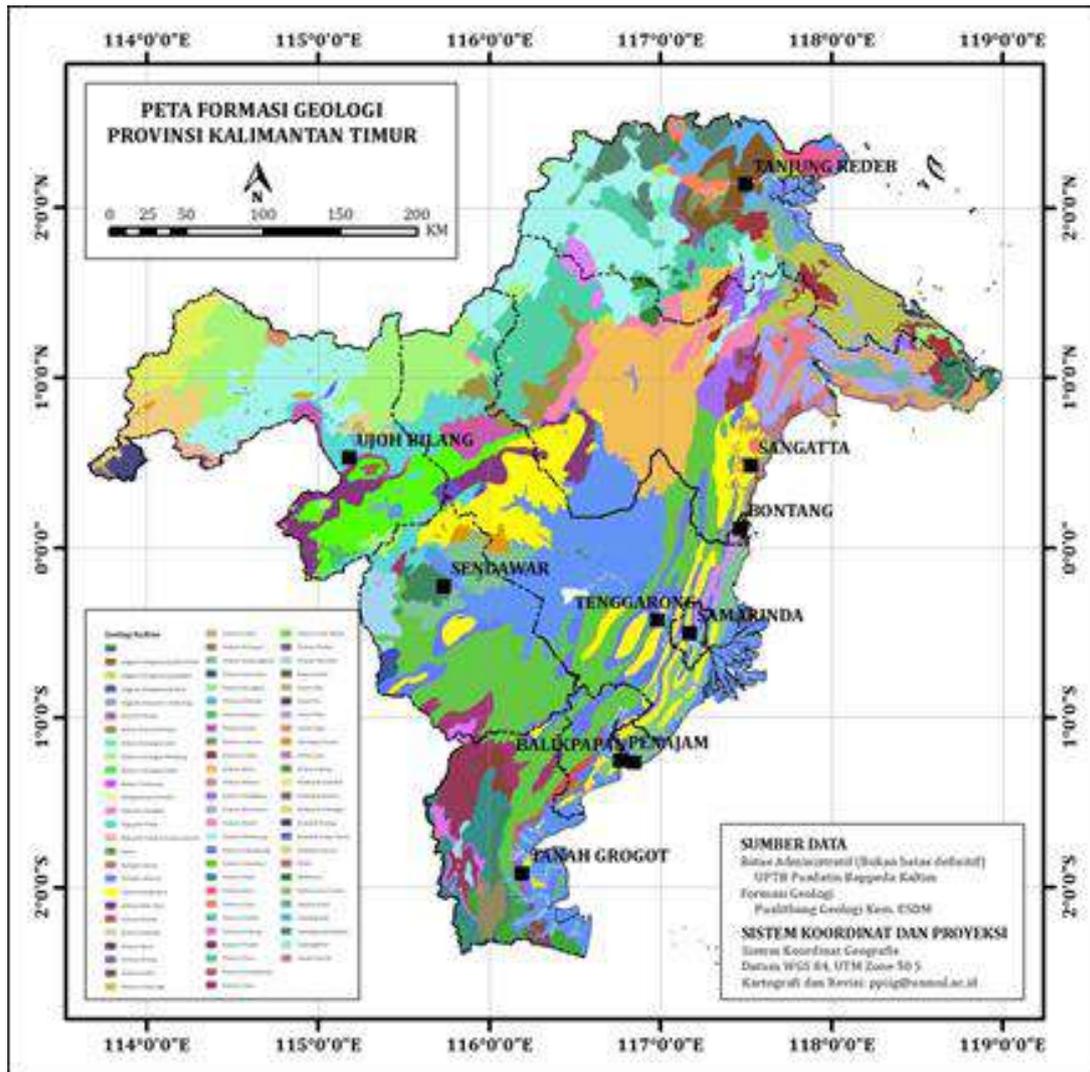
Berdasarkan Peta Klasifikasi Jenis Tanah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki total luas 12.526.165,42 Ha. Secara umum, tanah di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh jenis Ultisol yang diwakili oleh Hapludults. Gambar II - 1 menginformasikan klasifikasi 26 jenis tanah di Kalimantan Timur.



Gambar II - 1 Peta Klasifikasi Tanah Provinsi Kalimantan Timur  
Sumber: Kementerian LHK, 2018

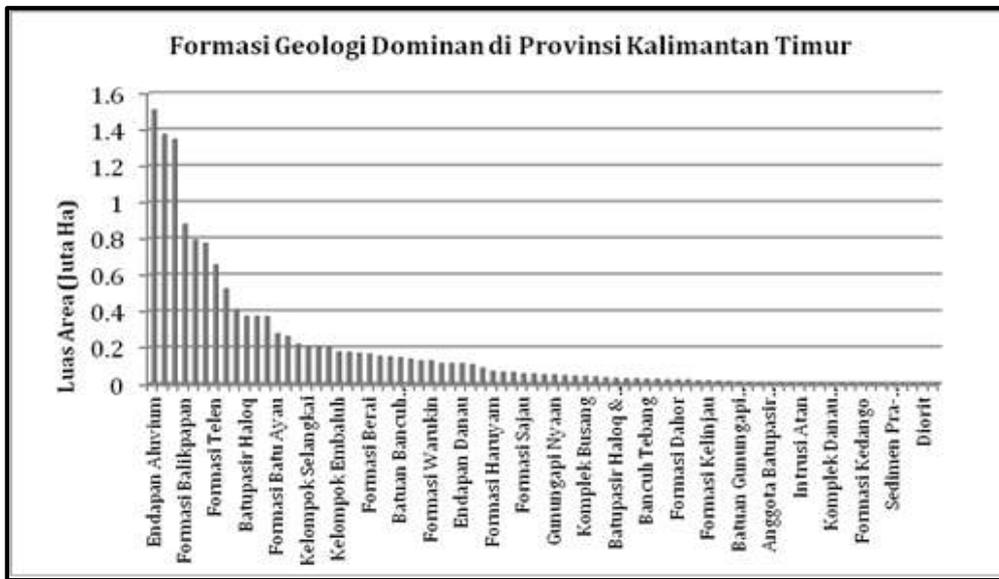
### 2.1.3. Geologi

Secara geologi, wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia (van Bemellen, 1949). Beberapa potensi mineral yang ada yaitu batubara, minyak dan gas bumi, emas dan lain-lain. Gambar II - 2 berikut ini adalah Peta Formasi Geologi Kalimantan Timur.



Gambar II- 2 Peta Formasi Geologi Provinsi Kalimantan Timur  
*Sumber: Kementerian ESDM, 2000*

Sesuai dengan yang ditampilkan pada Gambar II-3, formasi geologi paling umum yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan Alluvium yang mendominasi wilayah bantaran maupun wilayah paparan banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Formasi Pamaluan, Mentarang dan Balikpapan adalah formasi berikutnya yang paling sering ditemukan.



Gambar II- 3 Formasi Geologi Dominan di Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.1.4. Bentang Alam

Bentang alam menunjukkan gabungan beberapa ekosistem yang berada pada satu hamparan yang sama. Bentang alam di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas keseluruhan 12.729.632,60 hektar. Terdapat delapan tipe bentang alam di Kalimantan Timur, yaitu Bentang alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1) Perbukitan Struktural Kompleks Meratus, 2) Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, 3) Dataran Struktural Kompleks Meratus, 4) Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan, 5) Perbukitan Karst Kalimantan, 6) Dataran Fluvial Kalimantan, 7) Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam, dan 8) Dataran Pantai Kalimantan (Tabel II-2).

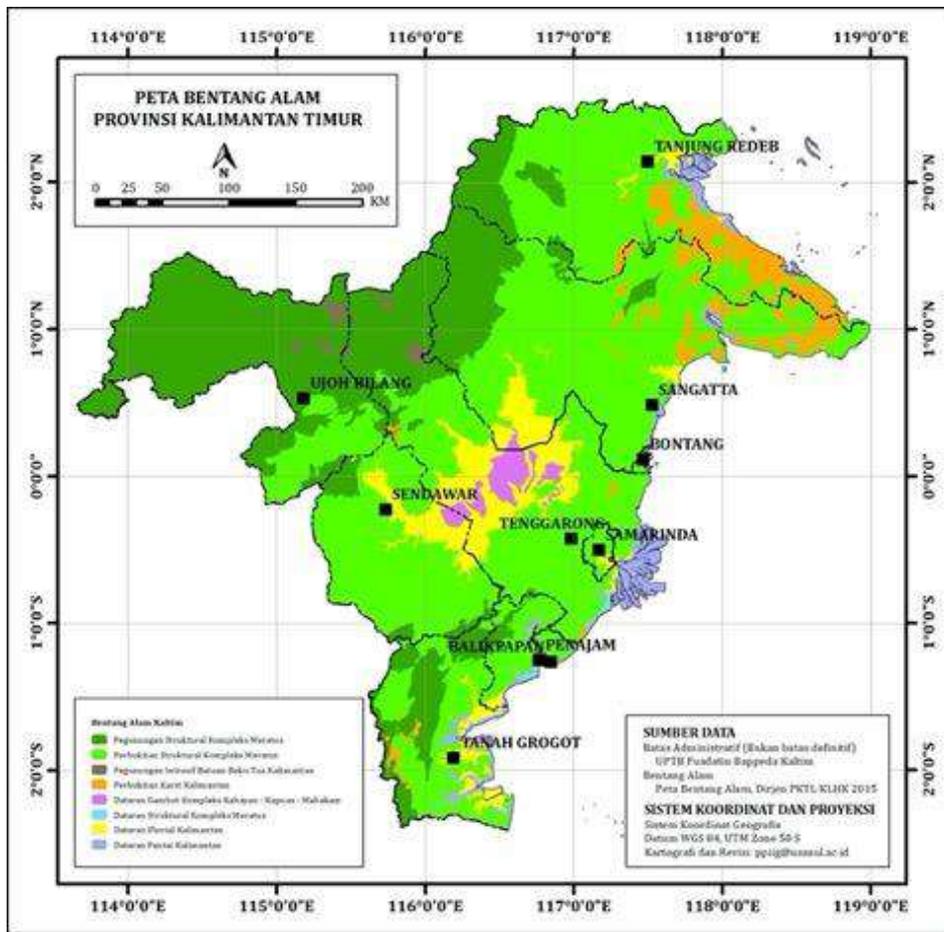
Tabel II- 2 Data Tipe Bentang Alam di Kalimantan Timur

Bentang Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	3.585.710,00	28
Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	6.957.250,00	56
Dataran Struktural Kompleks Meratus	18.374,10	0
Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan	74.709,50	1
Perbukitan Karst Kalimantan	629.008,00	2
Dataran Fluvial Kalimantan	934.912,00	9
Dataran Gambut Kompleks Kahayan - Kapuas - Mahakam	175.603,00	1
Dataran Pantai Kalimantan	354.066,00	3
Total*	12.729.632,60	100

*Sumber: Hasil Analisis Peta Ekoregion dengan Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Tim KLHS RPJMD Prov Kaltim, 2021)*

- *Jumlah luas wilayah dapat berbeda dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur karena perbedaan peta dasar*

Satu catatan penting bahwa meskipun banyak pegunungan dan perbukitan yang mengakibatkan topografi bergelombang, tetapi di Kalimantan Timur tidak terdapat gunung berapi. Peta II-4 berikut ini menggambarkan persebaran tipe bentang alam yang dimaksud.



Gambar II- 4 Peta Bentang Alam Provinsi Kalimantan Timur  
*Sumber: Kementerian LHK, 2018*

### 2.1.5. Hidrologi

Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Sungai Kedang Kepala, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyur, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan. Sungai-sungai tersebut, terlebih yang besar, sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta prasarana transportasi air dari pusat-pusat pemerintahan ke beberapa daerah pedalaman Kalimantan Timur yang masih memiliki aksesibilitas darat yang sulit.

### 2.1.6. Klimatologi

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam

kategori sedang. Tabel II-3 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II- 3 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,80	25,20	21,60
	- Maksimum	35	32	36,40
2	Kelembaban (%)	80	88	80
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012	1.011,8	1.012,4
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	5,00	7,00
5	Curah Hujan (mm)	1.970	3.674,20	2.437,9
6	Penyinaran Matahari (%)	50	51	54

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM (2021)

#### 2.1.7. Penutupan Vegetasi

Kalimantan Timur memiliki tipe vegetasi yang beragam. Vegetasi hutan Dipterocarpa memiliki luas terbesar dan tersebar merata di Kalimantan Timur dengan luas 5.971.910 Ha (47%), sementara Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah memiliki luas 2,002.050 Ha (16%) yang berada pada Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Vegetasi Hutan Batu Gamping Pamah di Karst memiliki luas 679.077 (5%) dan berada di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Vegetasi Mangrove memiliki luas 335.277 Ha (3%) yang berada di daerah pesisir Berau dan Kutai Kartanegara. Vegetasi Hutan Gambut memiliki luas 334.830 Ha (3%) dan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya Provinsi Kaltim juga memiliki beberapa tipe vegetasi unik dengan luas wilayah yang cukup kecil seperti Vegetasi Terna Tepian Sungai 227.264 Ha (2%), Vegetasi Hutan Batuan Ultrabasa 182.174 Ha (1%), Vegetasi Terna Rawa Gambut 144.506 Ha (1%), Vegetasi Hutan Kerangas Pamah 140.804 Ha (1%), Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau 138.089 Ha(1%), Vegetasi Terna Rawa Air Tawar 131.112 Ha (1%), Vegetasi Hutan Batugamping Pamah 86.703,10 (1%), Vegetasi Hutan Rawa Air Tawar 42.762,60 Ha (0%), Vegetasi Hutan Rawa Air Payau 39.223,30 Ha (0%), Vegetasi Hutan Tepian Sungai Payau 30.592,60 Ha (0%), Vegetasi Hutan Pantai 20.717,40 Ha (0%) dan Vegetasi Terna Rawa Air Payau 12.613,20 Ha

(0%). Seluruh tipe vegetasi ini membentuk wilayah Provinsi Kaltim dengan luas keseluruhan 12.729.665,20 Ha (lihat Tabel II-4).

Tabel II- 4 Data Tipe Vegetasi Alami di Kalimantan Timur

Ekoregion (Tipe Vegetasi)	Luas (HA)
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5.971.910,00
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	2.209.960,00
Vegetasi hutan pegunungan bawah	2,002.050,00
Vegetasi hutan batugamping pamah di karst	679.077,00
Vegetasi mangrove	335.277,00
Vegetasi hutan gambut	334.830,00
Vegetasi tera tepian sungai	227.264,00
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	182.174,00
Vegetasi tera rawa gambut	144.506,00
Vegetasi hutan kerangas pamah	140.804,00
Vegetasi tera tepian sungai payau	138.089,00
Vegetasi tera rawa air tawar	131.112,00
Vegetasi hutan batugamping pamah	86.703,10
Vegetasi hutan rawa air tawar	42.762,60
Vegetasi hutan rawa air payau	39.223,30
Vegetasi hutan tepian sungai payau	30.592,60
Vegetasi hutan pantai	20.717,40
Vegetasi tera rawa air payau	12.613,20
<b>Total*</b>	<b>12.729.665,20</b>

\* Jumlah luas wilayah dapat berbeda dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur karena perbedaan peta dasar  
 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023

Penutupan lahan vegetasi alami provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990 hingga 2015 menunjukkan pada vegetasi hutan mengalami penurunan luas setiap tahunnya, sedangkan semak belukar pada tahun 2000 hingga 2006 mengalami penambahan luas, pada tahun 2011 mengalami penurunan luas, dan pada tahun 2015 mengalami penambahan luas Kembali (lihat Tabel II-5). Situasi fluktuatif ini tentu saja terkait dengan pendataan tentang deforestasi dan degradasi hutan beserta dinamika tutupan vegetasi yang perlu untuk dioptimalkan guna mendapatkan data yang akurat dan reliabel.

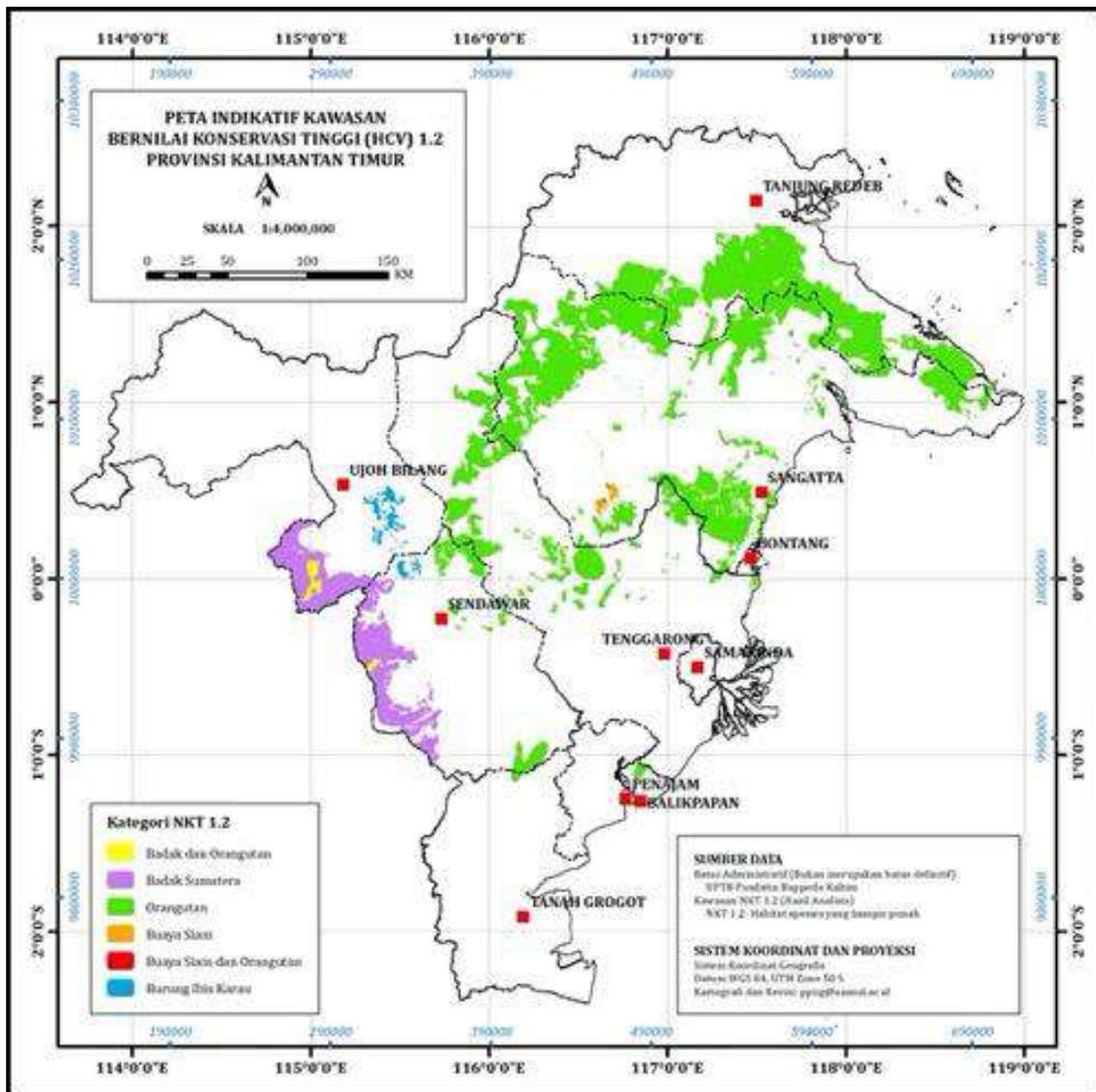
Tabel II- 5 Data Penutupan Lahan Vegetasi Alami di Kalimantan Timur

Tipe Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ribuan Ha)					
	1990	1996	2000	2006	2011	2015
Hutan	8.695,82	8.644,70	7.786,49	7.558,70	7.399,65	7.081,50
Semak Belukar	2.294,04	2.321,70	3.163,72	3.292,29	2.480,91	2.888,94
Perkebunan	286,16	302,77	255,06	338,81	528,79	1.107,17
Rawa	716,33	716,33	808,14	720,77	688,62	637,11
Pertanian	274,84	275,10	239,19	296,23	1010,25	367,41
Permukiman	67,76	67,74	69,24	74,06	77,54	80,13
Lahan Terbuka	171,93	178,54	180,08	221,53	308,09	322,02
Sawah	5,25	5,25	5,01	5,07	12,65	6,48
Tambak	69,31	69,31	76,21	103,88	104,85	117,36
Air	118,03	118,03	115,49	115,49	115,49	118,71
Jumlah	12.726,83	12.726,83	12.726,83	12.726,83	12.726,83	12.726,83

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023

#### 2.1.8. Keanekaragaman Hayati

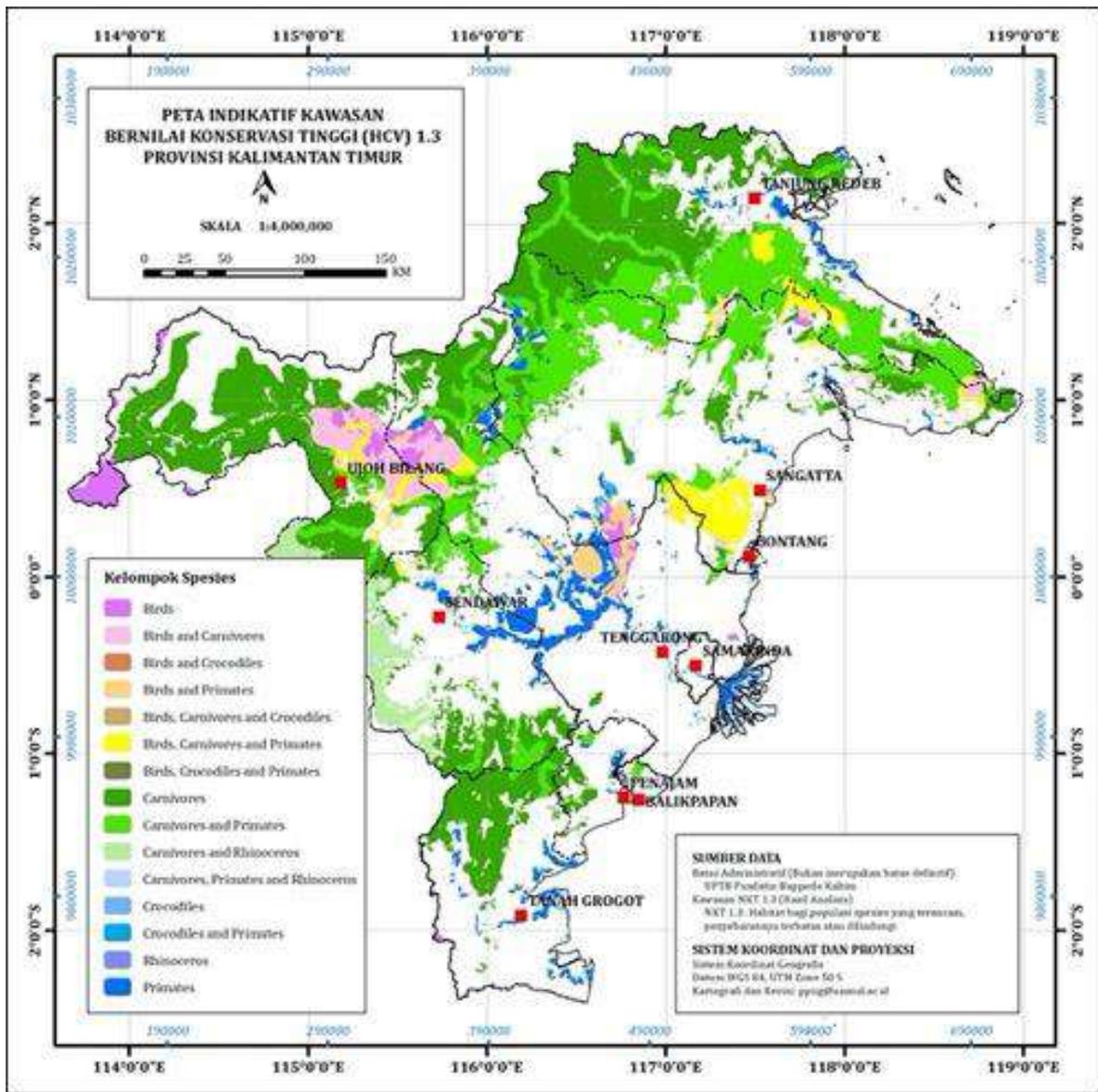
Karakteristik keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur digambarkan dengan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (Gambar II-5). Sebaran keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur di peta kawasan bernilai konservasi tinggi digambarkan khususnya pada NKT 1, NKT 2 dan NKT 3. Berdasarkan Peta Indikatif Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV), khususnya untuk nilai konservasi tinggi (NKT) 1.2 yang mewakili keberadaan spesies terancam punah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa wilayah konsentrasi satwa liar penting yang harus dilindungi, di antaranya orangutan (*Pongo pygmaeus*) di perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur, sebagian besar Taman Nasional Kutai hingga sebagian wilayah Kutai Kartanegara.



Gambar II- 5 Peta Indikator Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Aspek Satwa Liar dengan Status Konservasi Kritis/NKT 1.2.

Gambar II-5 menunjukkan peta habitat dan sebaran beberapa jenis penting yang tersedia. Jenis-jenis yang dimaksud adalah untuk Primata terdapat 2 species, Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus*), kemudian Badak (*Dicerorhinus sumatrensis*), Buaya Siam (*Crocodyllus siamensis*) dan Ibis Karau (*Pseudibis davisoni*), 20 jenis karnivora (*Martes flavigula*, *Viverra zangalunga*, *Prionodon linsang*, *Paradoxurus hermaphroditus*, *Paguma larvata*, *Arctictis binturong*, *Arctogalidia trivirgata*, *Hemigalus derbyanus*, *Hemigalus hosei*, *Cynogale bennettii*, *Herpestes brachyurus*, *Herpestes hosei*, *Herpestes semitorquatus*, *Neofelis diardi*, *Prionailurus planiceps*, *Pardofelis marmorata*, *Prionailurus bengalensis*, *Cotapuma badia*) dan peta sebaran burung endemik (*Endemic Bird Area*). Jenis-jenis di atas dilindungi karena berbagai faktor, antara lain: (a) langka dan terancam punah; serta (b) penyebarannya terbatas (*endemic*).

Sementara itu terdapat pula habitat alami Buaya Siam di wilayah Danau Mesangat, Kutai Timur. Di Kutai Barat, terdapat indikasi habitat alami Badak Sumatera dan Ibis Karau yang terindikasi hingga ke Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi habitat species-species penting di Kalimantan Timur sangat tergantung kepada kondisi habitatnya. Berikut ini gambaran peta sebaran species-species penting di Kalimantan Timur berdasarkan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV) 1.3 di Kalimantan Timur.



Gambar II- 6 Peta Indikatif Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Aspek Satwa Liar dengan Status Konservasi Endangered Species dan Dilindungi/NKT 1.3

### 2.1.9. Potensi dan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peta Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, wilayah pemanfaatan lahan yang paling luas adalah Kawasan Budidaya Perkebunan dengan luas 3.269.561,43 Ha (26%), Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 3.027.099,77 Ha (24%), Hutan produksi Terbatas (HPT) dengan luas 2.908.255,33 (23%) dan Hutan Lindung (HL) dengan luas 1.844.969,63 Ha (14%). Dari alokasi pola ruang dalam RTRW tersebut, diketahui penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan yang membentuk 48 % dari keseluruhan wilayah, diikuti kawasan budidaya non kehutanan (APL) sebesar 34% dan kawasan lindung sebesar 18%.

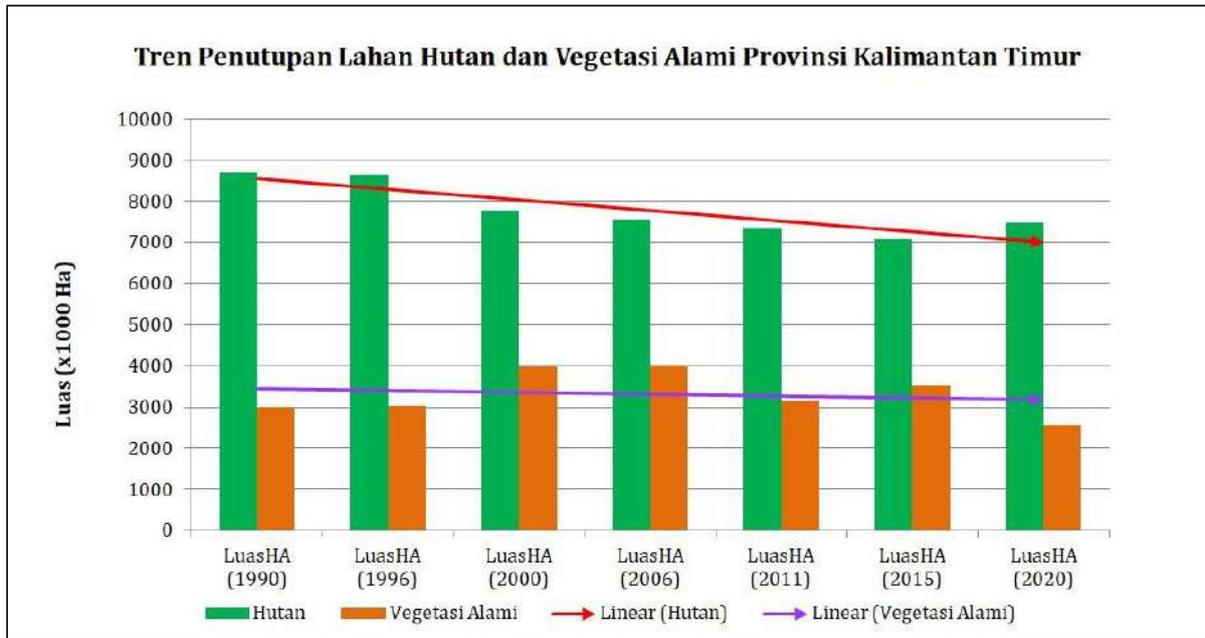
Tabel II- 6 Alokasi Pola Ruang di Kalimantan Timur

Alokasi Pola Ruang (Kawasan)		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung		
	1.1 Kawasan Suaka/Pelestarian Alam	438.390,32	3
	1.2 Hutan Lindung	1.844.969,63	14
2	Kawasan Hutan		
	2.1 Hutan Produksi Terbatas	2.908.255,33	24
	2.2 Hutan Produksi Tetap	3.027.099,77	23
	2.3 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	120.438,31	1
3	Kawasan Budidaya		
	3.1 Perkebunan	3.269.561,43	26
	3.2 Tanaman Pangan dan Hortikultura	412.095,94	3
	3.3 Pemukiman	396.266,13	3
	3.4 Kawasan Industri	32.887,50	0
	3.5 Kawasan Pariwisata Darat	97.422,93	1
	3.6 Kawasan Perikanan	91.548,69	1
4	Kawasan Lain		
	4.1 Tubuh Air	95.755,78	1
Total Luasan		12.636.343,97	100

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2016

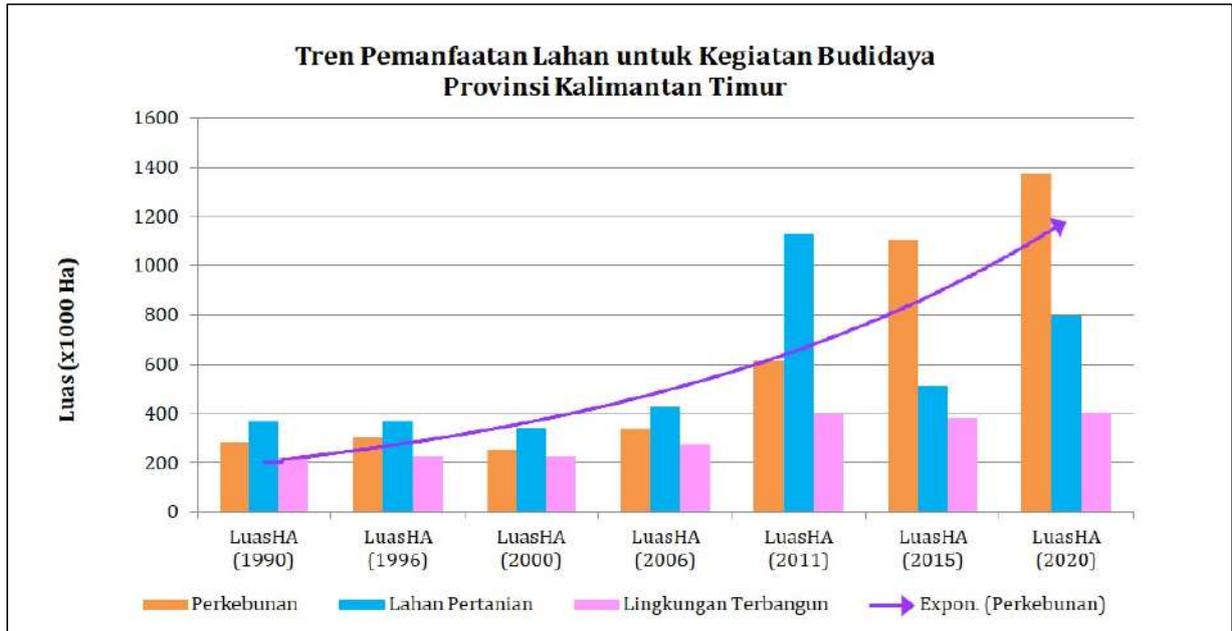
Kondisi penutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya mengalami penurunan, tren pada Gambar II-7 menunjukkan pada tahun 1990 luas hutan di provinsi Kalimantan Timur masih seluas 8,70 Juta Ha hingga pada tahun 2015 luas hutan tersisa hanya 7,08 Juta Ha. Dimana pada tahun 1996 Luas hutan provinsi kalimantan timur 8,64 juta Ha, Tahun 2000 Seluas 7,79 Juta Ha, tahun 2006 seluas 7,56 juta Ha, dan pada tahun 2011 luas hutan tersisa di provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,70 Juta Ha.

Penurunan drastis luas hutan pada tahun 1996-2000 tentunya juga merupakan imbas dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat itu.



Gambar II- 7 Tren Penutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur  
Sumber: Peta Penutupan Lahan 1990-2015, Dirjen PKTL, Kementerian LHK, 2016

Kawasan Budidaya/Areal Penggunaan Lain dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, permukiman, perikanan, pariwisata dan industri. Pada Gambar II-8 menunjukkan Tren Penutupan Lahan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990 hingga 2015 menunjukkan peningkatan tutupan walaupun terjadi penurunan pada tahun 2000. Penutupan lahan Rawa mengalami penurunan pertahunnya walaupun pada tahun 2000 mengalami peningkatan, penutupan lahan pertanian pada tahun 1990 hingga 2006 mengalami kenaikan dan penurunan yang sedikit, pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang sangat pesat hingga pada tahun 2015 mengalami penurunan luas kembali. Penutupan lahan sawah, permukiman dan tambak stabil dari tahun 1990 hingga 2015, sedangkan penutupan Lahan Terbuka mengalami kenaikan luas setiap tahunnya.



Gambar II- 8 Tren Penutupan Lahan Budidaya di Provinsi Kalimantan Timur  
 Sumber: Peta Penutupan Lahan 1990-2015, Dirjen PTKL, Kementerian LHK, 2016

2.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik, namun berpotensi mengalami bencana kebakaran, tanah longsor, banjir, angin topan, konflik sosial dan tenggelam. Potensi bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu.

Tabel II- 7 Kejadian Bencana per Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jenis Bencana								
		Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Banjir	Puting Beliung	Konflik	Kecelakaan Transportasi		Gempa Bumi dan Tsunami
								Udara	Sungai/Laut	
7	Paser	2	1	0	10	0	0	0	1	0
5	KUBAR	5	12	0	30	0	0	0	0	0
3	KUKAR	15	0	0	3	3	0	0	1	0
4	KUTIM	10	73	1	1	1	0	0	1	0
10	Berau	16	14	3	3	0	0	0	1	1
8	PPU	9	14	0	10	2	0	0	0	0
9	MAHULU	0	0	0	1	0	0	0	2	0
2	Balikpapan	29	9	12	6	0	0	0	0	0
1	Samarinda	34	17	30	71	0	0	0	1	0
6	Bontang	4	21	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	124	161	46	135	6	0	0	7	1

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2020

Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran dan disusul dengan banjir yang terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di daerah perkotaan dan pemukiman. Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 161 kali. Dimana jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak ialah di Kabupaten Kutai Timur yakni sebanyak 73 kali. Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami karena adanya risiko bencana gempa bumi. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi (akibat gempa bumi) terdapat di Kabupaten Berau.

Tabel II- 8 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur

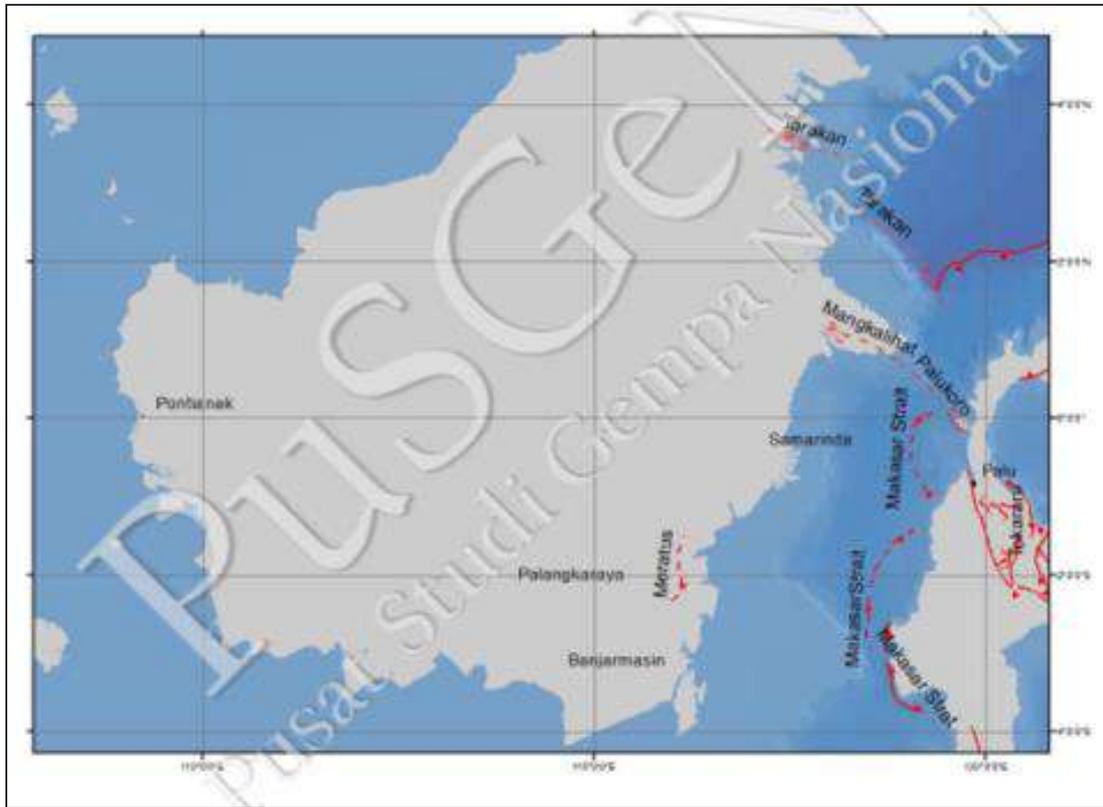
Kabupaten / Kota	Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Karhutla			Grand Total (Ha)
	Naik	Tetap	Turun	
Paser	53.548,43	948.128,53	107.793,34	1.109.470,30
KUBAR	53.661,60	808.009,41	286.069,83	1.147.740,84
KUKAR	164.187,85	2.069.062,14	621.391,79	2.854.641,78
KUTIM	255.386,48	2.572.842,60	259.048,86	3.087.277,94
Berau	78.936,99	1.886.857,88	206.878,27	2.172.673,13
PPU	14.495,26	195.034,22	84.515,91	294.045,40
MAHULU	43.949,93	1.828.131,91	72.853,10	1.944.934,94
Balikpapan	860,98	42.440,69	7.805,90	51.107,57
Samarinda	813,01	42.268,45	14.615,10	57.696,57
Bontang	4.434,17	11.400,67	410,18	16.245,02
Grand Total	670.274,71	1.0404.176,50	1.661.382,28	12.735.833,50

Sementara daerah banjir dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Kemudian daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kerugian terbesar akibat kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari banjir yang terjadi pada tahun 2017 dan mengakibatkan 7.007 unit rumah terkena dampak bencana. Sedangkan bencana kebakaran pemukiman melibatkan kawasan seluas 842,6 Ha dan 1.150 unit bangunan yang terdampak bencana.

Tabel II- 9 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Longsor di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Longsor			Grand Total (Ha)
	Naik	Tetap	Turun	
Paser	34.358,18	931.594,68	143.517,45	1.109.470,30
KUBAR	60.503,98	898.299,28	188.937,58	1.147.740,84
KUKAR	97.731,52	2.415.486,85	341.423,42	2.854.641,78
KUTIM	123.633,73	2.523.285,46	440.358,75	308.7277,94
Berau	25.358,25	1.912.914,75	234.400,13	2.172.673,13
PPU	14.370,34	225.588,95	54.086,10	294.045,40
MAHULU	3.118,76	1.900.932,76	40.883,42	1.944.934,94
Balikpapan	987,79	46.644,11	3.475,67	51.107,57
Samarinda	969,31	45.585,69	11.141,56	57.696,57
Bontang	265,84	15.279,10	700,08	16.245,02
Grand Total	361.297,71	10.915.611,62	1.458.924,16	12.735.833,50

Dari segi kebencanaan geologi, gempa tektonik bukan tidak pernah terjadi di Kalimantan. Terbukti pada 5 Juni 2015 terjadi gempa berskala 6 SR di Ranau, Sabah dengan korban 19 orang, longsor di Gunung Kinibalu dan kerusakan bangunan di Kota Ranau. Catatan BMKG juga menyebutkan gempa dengan magnitudo 5.7 pada 25 Februari 2015 dengan pusat gempa 413 km timur laut Kota Tarakan. Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN, 2018) menyatakan terdapat tiga zona utama sesar di Pulau Kalimantan yaitu Sesar Tarakan yang melintasi Pulau Tarakan, Sesar Mangkalihat yang membelah Tanjung Mangkalihat dengan arah hampir timur ke barat dan Sesar Meratus yang memanjang dengan arah utara-selatan di Kabupaten Paser. Hasil studi yang dilakukan PUSGEN pada 2018 menunjukkan tidak ada tambahan sumber gempa tektonik khusus untuk Pulau Kalimantan, sementara terdapat banyak tambahan sumber gempa di pulau-pulau lain.



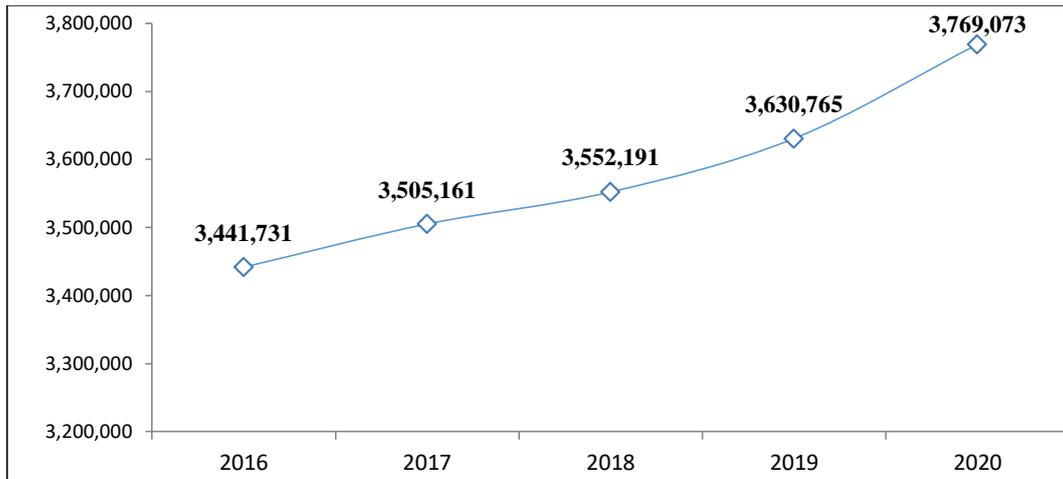
Gambar II- 9 Sebaran Sesar Aktif di Pulau Kalimantan  
*Sumber: Pusat Studi Gempa Nasional, 2017*

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan baru akan menyusun dokumen kajian pada tahun 2020 dan rencana pada tahun 2021 sehingga belum bisa menyajikan data Indeks Risiko Bencana 5 tahun terakhir. Adapun Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat adalah Indeks Risiko Bencana Tahun 2013 dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks 165 dengan kategori tinggi.

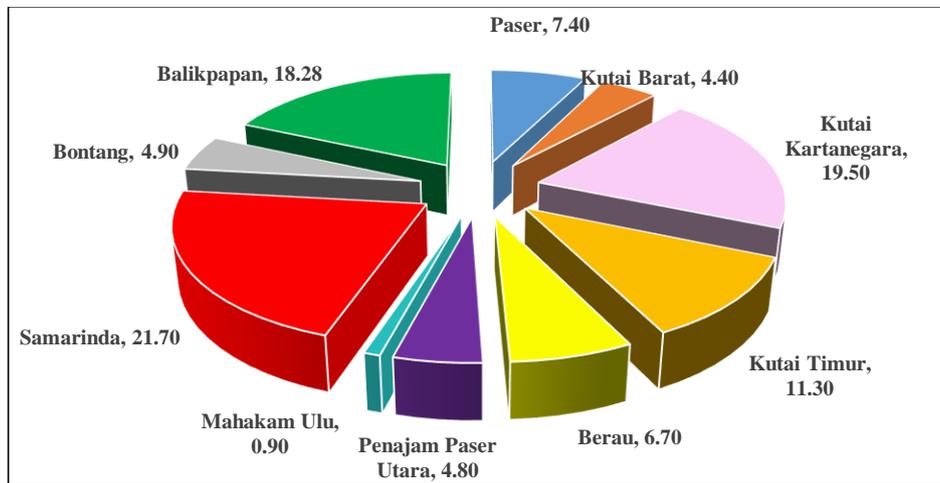
### 2.1.11. Kondisi Demografi

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.769.073 jiwa pada tahun 2020.



Gambar II- 10 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur  
Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,70 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,90%) Kabupaten Penajam Paser Utara (4,80%), Kabupaten Kutai Barat (4,40%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,90%).



Gambar II- 11 Distribusi Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,83 persen selama lima tahun sejak tahun 2016 – 2020. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 7,50 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 persen.

Tabel II- 8 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2016-2020) (%)
1	Paser	248.037	255.648	259.417	265.148	277.401	2,26
2	KUBAR	158.085	160.000	162.200	164.048	165.938	2,35
3	KUKAR	662.481	674.759	677.755	696.784	734.485	2,08
4	KUTIM	415.553	418.625	420.760	422.905	424.334	0,42
5	Berau	211.512	221.836	224.654	232.189	251.439	3,52
6	PPU	166.055	168.012	170.475	173.671	181.349	1,78
7	MAHULU	24.381	26.938	28.833	30.321	35.010	7,50
8	Balikpapan	618.128	633.196	649.806	670.505	697.079	2,43
9	Samarinda	763.729	769.632	778.883	793.576	817.254	1,36
10	Bontang	173.770	176.515	179.408	181.618	184.784	1,24
Kalimantan Timur		3.441.731	3.505.161	3.552.191	3.630.765	3.769.073	1,83

Sumber : DKP3A Provinsi KALTIM

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan

tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

Tabel II- 9 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Laki-Laki</b>					
7-12	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03
13-15	2,08	0,54	1,52	1,43	1,34
16-18	18,32	17,49	19,94	17,84	19,17
19-24	70,16	68,80	67,55	71,64	69,98
7-24	26,25	25,07	25,48	26,62	27,32
<b>Perempuan</b>					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26
13-15	1,55	1,05	0,12	0,48	0,43
16-18	19,70	19,50	16,05	18,40	16,66
19-24	71,01	70,47	72,30	67,62	70,38

7-24	25,11	24,23	24,96	24,19	25,10
Laki-Laki + Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	25,70	25,67	25,23	25,45	26,25

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II- 10 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur

Tidak / Belum Pernah Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,46	0,33	0,24	0,16	0,12
13-15	0,00	0,44	0,25	0,19	0,05
16-18	0,24	0,18	0,38	0,09	0,17
19-24	0,56	0,41	0,38	0,35	0,12
7-24	0,38	0,35	0,31	0,21	0,12
Masih Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	99,54	99,67	99,67	99,68	99,73
13-15	98,18	98,79	98,89	98,83	99,07
16-18	80,81	81,32	81,55	81,81	81,88
19-24	28,88	30,04	29,84	29,89	29,71
7-24	73,92	74,97	74,46	74,34	73,63
Tidak Bersekolah Lagi					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	25,70	24,67	25,23	25,45	26,25

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

#### 2.2.1.1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun kenaikan terus terjadi dari tahun 2016 hingga 2019 dimana nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 652,16 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 539,49 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 310,70 triliun. Namun pada tahun 2020 terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor, maka terjadi penurunan nilai PDRB migas hingga menjadi sebesar Rp 607,32 triliun, nilai PDRB non migas menjadi sebesar Rp 506,05 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara meningkat menjadi sebesar Rp 314,80 triliun.

Tabel II- 11 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)  
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2016	508.880.236	400.847.613	243.496.746
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.320.779	506.051.630	314.803.175

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang

disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun.

Tabel II- 12 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur (ADHB)  
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91.536,85	96.807,32	102.584,20	109.767,66	111.183,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.439,03	2.629,57	2.958,20	3.238,86	3.250,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.578,34	21.596,79	23.760,62	26.298,93	26.163,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	144.654,38	154.503,23	173.474,79	187.939,11	187.118,74
5	Perubahan Inventori	1.922,89	1.757,93	1.613,95	722,91	2.555,08
6	Net Ekspor Barang & Jasa	244.748,75	314.608,65	331.106,93	324.190,59	277.049,17
PDRB		508.880,24	591.903,49	635.498,68	652.158,06	607.320,78

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalan sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II- 13 Distribusi PDRB menurut Kelompok Pengeluaran  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,99	16,36	16,26	16,79	18,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,48	0,44	0,47	0,50	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,63	3,65	3,73	4,03	4,31

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,43	26,10	27,25	28,72	30,81
5	Perubahan Inventori	0,38	0,30	0,25	0,11	0,42
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	48,10	53,15	52,10	49,71	45,62

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II-16 menunjukkan Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,60 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -2,02 persen. Selain memiliki kontribusi tertinggi, Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang mengindikasikan bahwa penurunan nilai PDRB Kalimantan Timur baik dari sisi nilai maupun pertumbuhannya dikarenakan kegiatan ekspor barang dan jasa.

Tabel II- 14 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK Provinsi Kalimantan Timur

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,56	2,58	3,14	3,15	(0,44)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(4,04)	4,89	8,57	6,77	(1,28)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(13,03)	(9,79)	7,91	7,70	(2,02)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,04)	2,75	7,54	4,79	(1,54)
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	3,76	4,28	0,17	5,17	(4,60)
PDRB		(0,38)	3,13	2,64	4,74	-2,85

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kontribusinya pada tahun 2020 mencapai 25,56 persen dengan nilai PDRB lebih dari 120 triliun rupiah serta (Tabel II-17).

Tabel II- 15 Nilai PDRB ADHK Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  
(Milyar Rupiah)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	32.755,52	33.137,65	34.362,05	35.72,32	34.736,71
2	KUBAR	18.468,16	19.139,86	20.108,76	21.248,75	20.628,18
3	KUKAR	117.035,58	118.943,99	121.509,48	126.160,17	120.556,60
4	KUTIM	83.771,69	86.520,25	88.582,49	95.660,74	92.585,57
5	Berau	25.461,37	26.227,29	26.769,40	28.270,78	27.322,32
6	PPU	6.351,93	6.506,89	6.590,45	6.762,54	6.604,22
7	MAHULU	1.524,14	1.589,55	1.675,32	1.767,25	1.762,69
8	Balikpapan	73.221,46	76.032,08	79.807,11	83.678,77	83.097,89
9	Samarinda	39.744,72	41.274,97	43.323,57	45.485,74	45.000,47
10	Bontang	42.835,51	43.073,06	41.316,22	40.423,39	39.309,21

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab turunnya kinerja ekonomi adalah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, terdapat penurunan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti penurunan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami kontraksi. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar minus 4,44 persen. Sementara itu, ekonomi Kabupaten Kutai Timur dan Berau masing-masing terkontraksi sebesar 3,21 persen dan 3,35 persen. Wilayah kabupaten/kota lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif dibawah 3 persen.

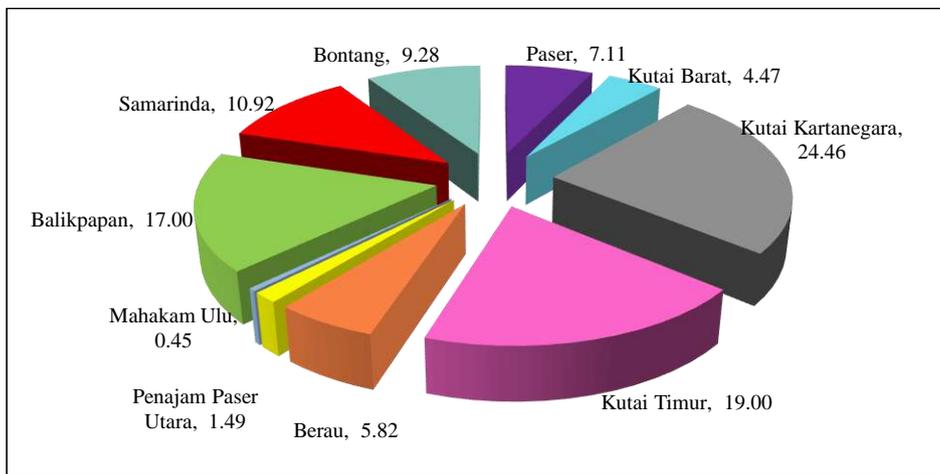
Tabel II- 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di  
Provinsi Kalimantan Timur (%)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-4,98	1,17	3,69	3,97	-2,77
2	KUBAR	-0,83	3,64	5,06	5,67	-2,92
3	KUKAR	-1,97	1,63	2,16	3,83	-4,44
4	KUTIM	-1,08	3,28	2,38	7,99	-3,21
5	Berau	-1,70	3,01	2,07	5,61	-3,35
6	PPU	-0,47	2,44	1,28	2,61	-2,34

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
7	MAHULU	3,41	4,29	5,40	5,49	-0,26
8	Balikpapan	4,92	3,84	4,97	4,85	-0,69
9	Samarinda	0,56	3,85	4,96	4,99	-1,07
10	Bontang	-1,39	0,55	-4,08	-2,16	-2,76

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,46 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 17 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.



Gambar II- 12 Distribusi PDRB Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 77,74 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II- 17 Tiga Kategori Dominan dalam Struktur Ekonomi Sektoral  
Kab/Kota Menurut PDRB ADHB Tahun 2020

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,97	Pertanian	12,48	Industri	5,84
KUBAR	Pertambangan	45,50	Pertanian	14,88	Konstruksi	12,11
KUKAR	Pertambangan	59,81	Pertanian	14,92	Konstruksi	8,56
KUTIM	Pertambangan	77,74	Pertanian	9,16	Industri	3,55
Berau	Pertambangan	56,43	Pertanian	11,64	Perdagangan	6,51
PPU	Pertambangan	25,83	Pertanian	21,96	Industri	16,46
MAHULU	Pertanian	75,18	Pertambangan	6,76	Konstruksi	6,48
Balikpapan	Industri	47,28	Konstruksi	16,53	Transportasi	9,85
Samarinda	Konstruksi	21,23	Perdagangan	17,09	Pertambangan	10,94
Bontang	Industri	79,60	Konstruksi	6,59	Perdagangan	3,31

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,41 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II- 18 Tiga Kategori Dominan dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran  
Kab/Kota Menurut PDRB ADHB Tahun 2020

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,74	PMTB	18,92	K. Ruta	14,43
KUBAR	PMTB	38,84	Net Ekspor	34,97	K. Ruta	17,32
KUKAR	Net Ekspor	45,05	PMTB	38,62	K. Ruta	12,90
KUTIM	Net Ekspor	71,56	PMTB	18,87	K. Ruta	7,17

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Berau	Net Ekspor	58,03	PMTB	23,19	K. Ruta	13,81
PPU	K. Ruta	42,83	PMTB	38,00	K. Pemerintah	12,32
MAHULU	Net Ekspor	33,10	PMTB	28,87	K. Ruta	24,21
Balikpapan	PMTB	42,28	Net Ekspor	28,92	K. Ruta	25,11
Samarinda	K. Ruta	45,37	PMTB	41,13	K. Pemerintah	12,97
Bontang	Net Ekspor	73,79	PMTB	13,14	K. Ruta	10,66

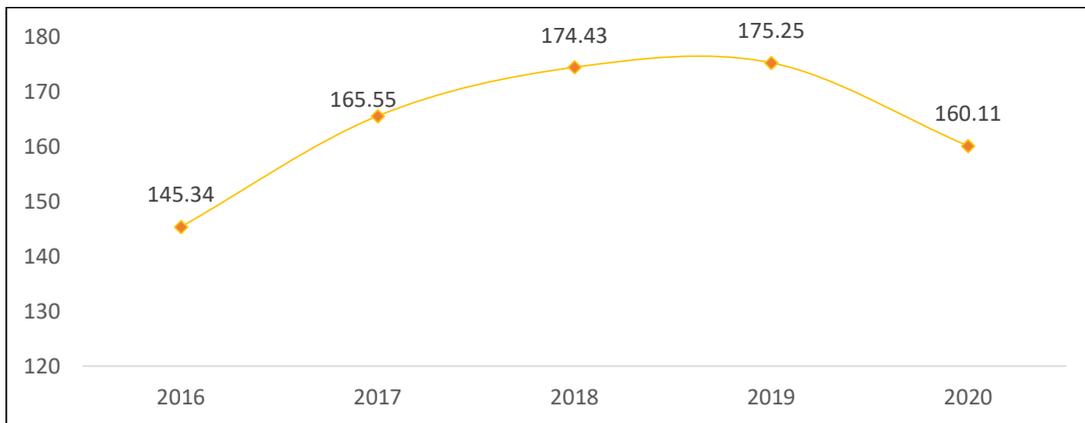
*Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021*

Pada tahun 2020, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 38,84 persen dan 42,28 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* masing-masing 42,83 persen dan 45,37 persen.

Kabupaten/kota yang porsi terbanyak merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 73,39 persen. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 71,56 persen dan 62,74 persen. Sementara itu, ekonomi wilayah Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 58,03 persen, 45,05 persen dan 33,10 persen.

### 2.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya. Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016-2019 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 175,65 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro.



Gambar II- 13 PDRB per Kapita ADHB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2020 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 312,15 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 296,16 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 185,65 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 55,70 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 75,04 juta.

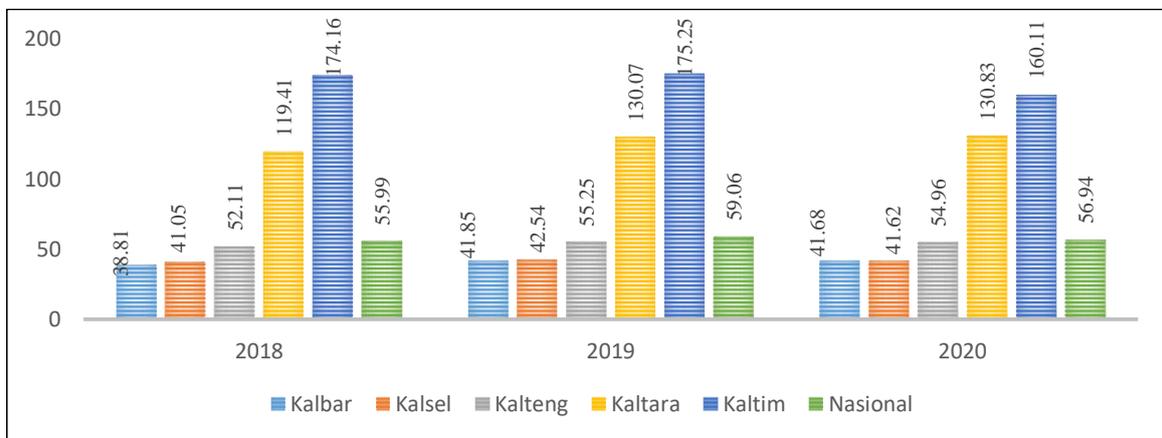
Tabel II- 19 PDRB per Kapita ADHB Kab/Kota di Kalimantan Timur (Ribu Rupiah)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	139.005,28	160.296,47	172.444,45	168.508,96	148.633
2	KUBAR	150.513,19	175.425,47	191.344,95	195.009,08	183.844

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
3	KUKAR	173.968,11	198.406,84	210.484,44	207.015,42	185.649
4	KUTIM	285.338,32	346.117,42	353.304,35	355.546,83	296.160
5	Berau	143.437,25	161.633,70	166.166,98	168.113,83	148.897
6	PPU	49.241,18	53.774,37	55.531,98	56.474,76	55.699
7	MAHULU	82.108,10	88.868,89	95.323,49	103.061,64	104.603
8	Balikpapan	128.124,63	137.916,47	148.758,73	156.276,67	155.977
9	Samarinda	63.560,52	69.291,63	74.489,27	78.566,95	75.036
10	Bontang	331.035,96	345.145,85	338.383,90	329.049,66	312.145

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2020 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 160,11 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



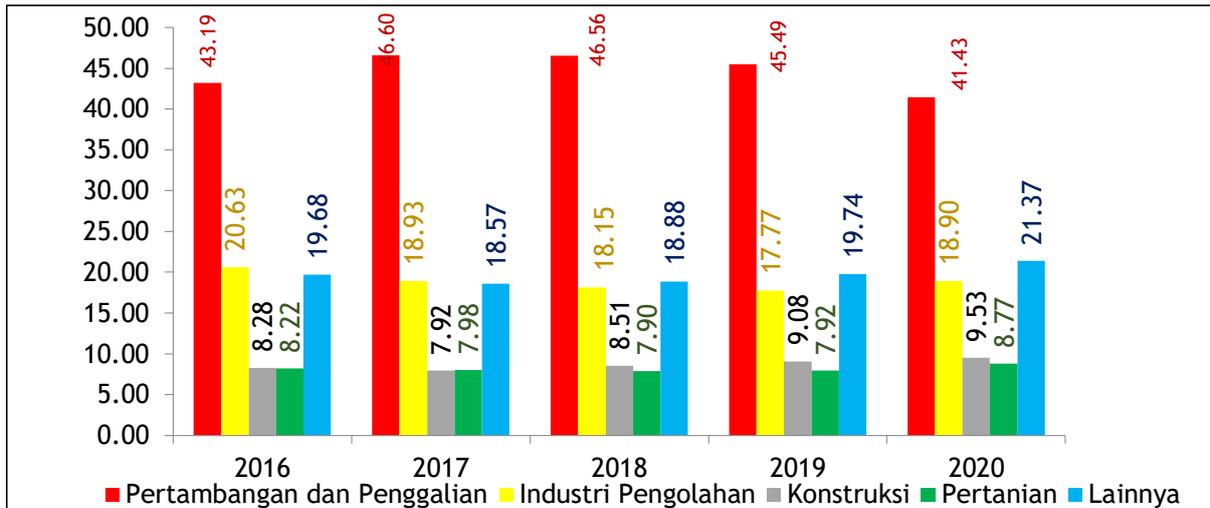
Gambar II- 14 PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.2.1.3. Struktur Perekonomian Wilayah

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalan serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi

Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,43 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian.



Gambar II- 15 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (%)  
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 8,04 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi

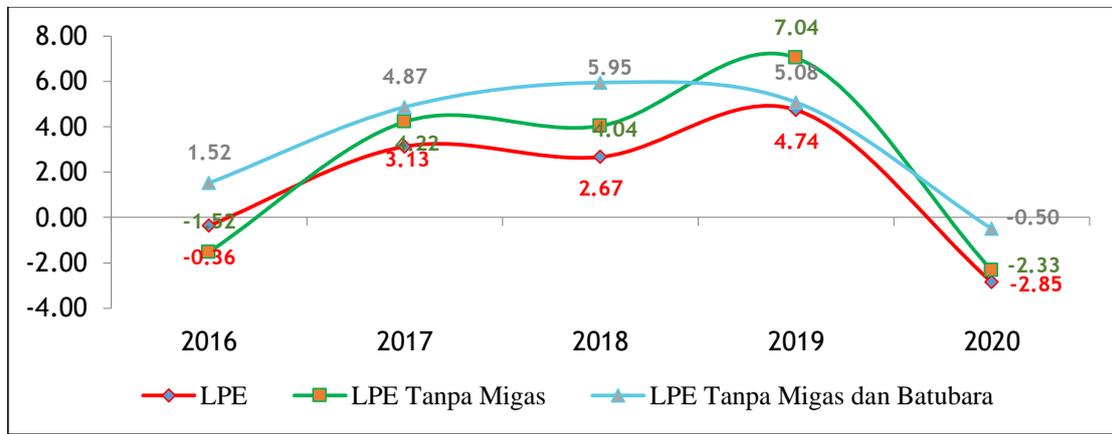
dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 6,46 persen.

#### 2.2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pernah mengalami kontraksi hingga negatif 1,20 persen pada tahun 2015, perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 6 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 4,77 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga 7,20 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,35 persen.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi -2,85 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha sehingga laju pertumbuhan ekonomi migas mengalami kontraksi sebesar 4,61 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen.



Gambar II- 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)  
 Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,65 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,16 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,99 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,89 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,12 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen. Namun hal sebaliknya terjadi pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,67 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawahnya bahkan mengalami kontraksi (negatif).

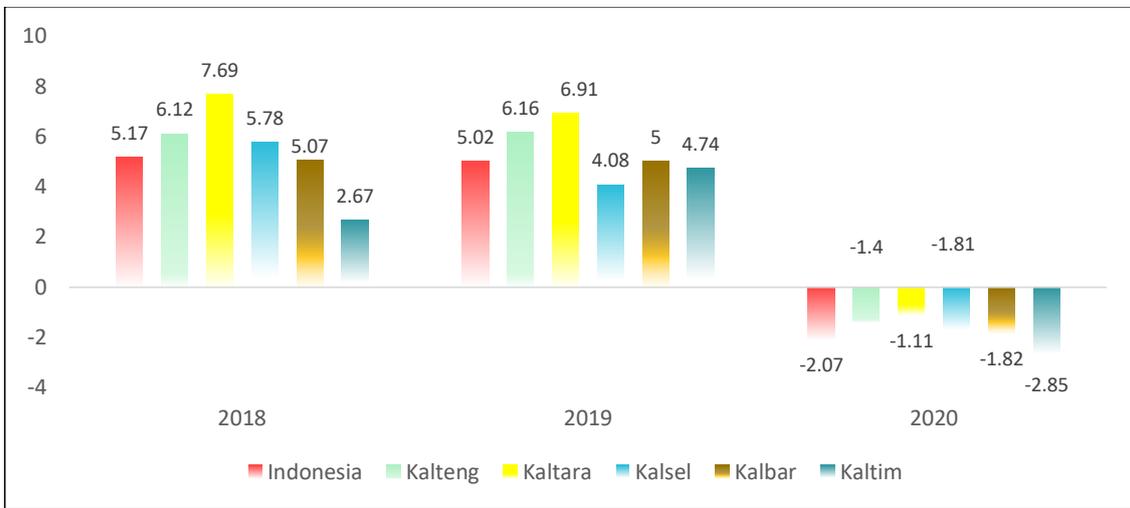
Tabel II- 20 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,46	5,66	6,14	3,91	(1,12)
B	Pertambangan dan Penggalian	(3,52)	1,79	1,07	6,89	(4,58)
C	Industri Pengolahan	5,46	2,80	0,69	0,03	(2,77)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,32	6,78	9,76	8,67	11,59
E	Pengadaan Air	6,57	8,37	3,22	4,84	6,58
F	Konstruksi	(3,86)	5,76	7,91	5,71	(1,27)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,20	8,22	7,16	5,24	0,93
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	6,46	5,80	2,34	(5,59)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	8,37	8,70	6,37	(5,32)
J	Informasi dan Komunikasi	7,45	7,79	4,38	6,86	6,96
K	Jasa Keuangan	1,84	(0,72)	4,05	3,17	2,47
L	<i>Real Estate</i>	(0,83)	3,35	4,83	2,12	0,80
M, N	Jasa Perusahaan	(4,25)	3,54	4,96	2,00	(2,68)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,27)	(3,47)	3,11	3,92	(3,97)
P	Jasa Pendidikan	7,06	6,73	7,73	3,78	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,31	7,16	8,05	6,43	19,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,81	6,44	9,02	7,91	(3,07)
Laju Pertumbuhan Ekonomi		(0,38)	3,13	2,67	4,74	(2,85)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Lapangan usaha dengan penurunan terbesar yaitu Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha Akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Jika dibandingkan secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara *yo yo* menempatkan Kalimantan Utara dengan kontraksi pertumbuhan terendah dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 1,11 persen, lalu diikuti Kalimantan Tengah sebesar 1,40 persen, Kalimantan Selatan sebesar 1,81 persen, Kalimantan Barat sebesar 1,82 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.

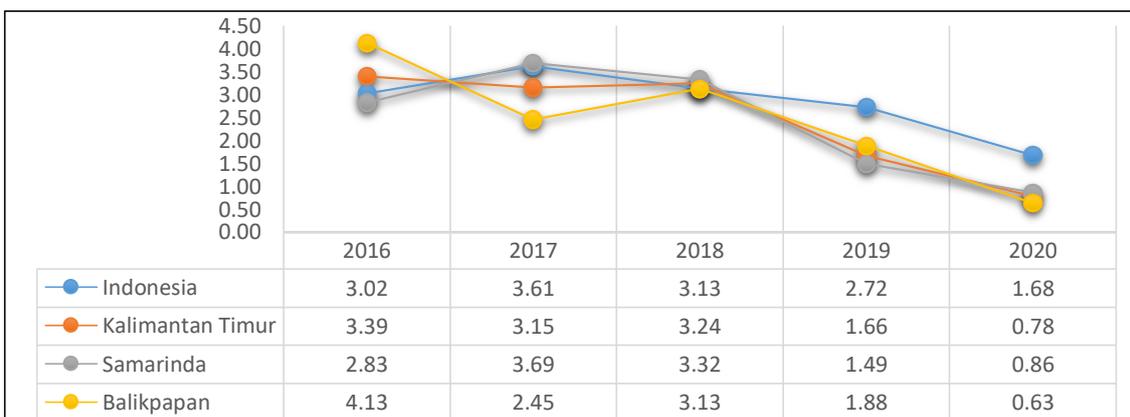


Gambar II- 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan Timur (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.2.1.5. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, hingga mencapai 0,78 persen pada tahun 2020. Tentu saja selain karena pengendalian inflasi yang cukup baik karena tahun 2019 pun sudah mencapai 1,66 persen, kondisi ini juga terpengaruh dari menurunnya daya beli masyarakat pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 termasuk didalamnya perubahan cara pembelian barang kebutuhan pokok masyarakat. Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.



Gambar II- 18 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan. Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 0,63 persen, dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 0,86 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,78 persen.

Inflasi berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yakni inflasi ringan (<10%), inflasi sedang (10%-30%), inflasi berat (30%-100%), dan inflasi sangat berat (>100%). Untuk studi kasus di tingkat nasional, secara umum Indonesia masih ditahap inflasi ringan. Sementara itu, pada cakupan provinsi seperti Kalimantan Timur, memang ada sedikit lonjakan atau diatas rata-rata inflasi nasional khusus di tahun 2016 dan 2018, tetapi keseluruhan, terangkum bahwa masih dalam kewajaran mengingat Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada wilayah terluar (Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi) untuk pemenuhan kebutuhan akan komoditas bahan makanan dan non-makanan.

Terkait dengan COVID-19 sejak awal 2020 lalu, memang ada sedikit pergeseran (transformasi) secara signifikan dalam hal perubahan tingkat konsumsi penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup tiap bulannya. Saat ini, mereka lebih condong untuk mengeluarkan pendapatan per kapita pada kebutuhan-kebutuhan makanan (tanaman pangan, vitamin, buah-buahan) untuk mencegah penularan pandemi ini. Sebagai informasi tambahan, perilaku pola konsumsi penduduk juga tercermin pada kebutuhan yang bersifat non-makanan, semisal jasa kesehatan, penggunaan layanan internet, dan yang berhubungan dalam rangka perbaikan imunitas tubuh.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah Indonesia di akhir maret 2020 silam, maka dominan penduduk tidak banyak yang berpergian ke luar daerah (Kota, antar Provinsi, dan bahkan ke Luar Negeri) dengan tujuan berhati-hati untuk tertular virus mematikan ini. Secara tidak langsung, perubahan sistematis ini memang berdampak pula bagi sektor-sektor atau kebutuhan yang berbasis non-makanan (jasa). Akan tetapi, walau bagaimanapun tren pengeluaran penduduk terhadap suatu komoditas tertentu, dapat menyebabkan gangguan

inflasi di waktu-waktu tertentu. Langkah strategis perlu diterapkan oleh pemerintah agar sektor-sektor yang mati suri tetap hidup, meskipun tidak berimplikasi langsung dan tumbuh seperti keadaan normal atau sedia kala.

#### 2.2.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,10 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi sebanyak 230,26 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 219,92 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 662.302 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa kondisi dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan pegawai, penurunan omset, hingga pembatasan produksi. Adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Tabel II- 21 Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230.260	6,10

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2020 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam

komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan dan daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel II- 22 Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2020

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	24,06	Beras	24,82
2	Rokok Kretek Filter	17,96	Rokok Kretek Filter	22,13
3	Telur ayam ras	6,98	Telur ayam ras	6,54
4	Daging ayam ras	5,53	Gula Pasir	4,58
5	Mie Instan	4,20	Mie Instan	4,29
6	Gula Pasir	3,43	Daging Ayam Ras	3,70
7	Tongkol/Tuna/Cakalalang	3,26	Bawang merah	2,80
8	Kue basah	2,99	Kue Basah	2,39
9	Bawang Merah	2,72	Tempe	2,27
10	Tempe	2,36	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,18

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,44 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,57 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, progress positif selalu ditunjukkan dari hasil program pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 menimpa.

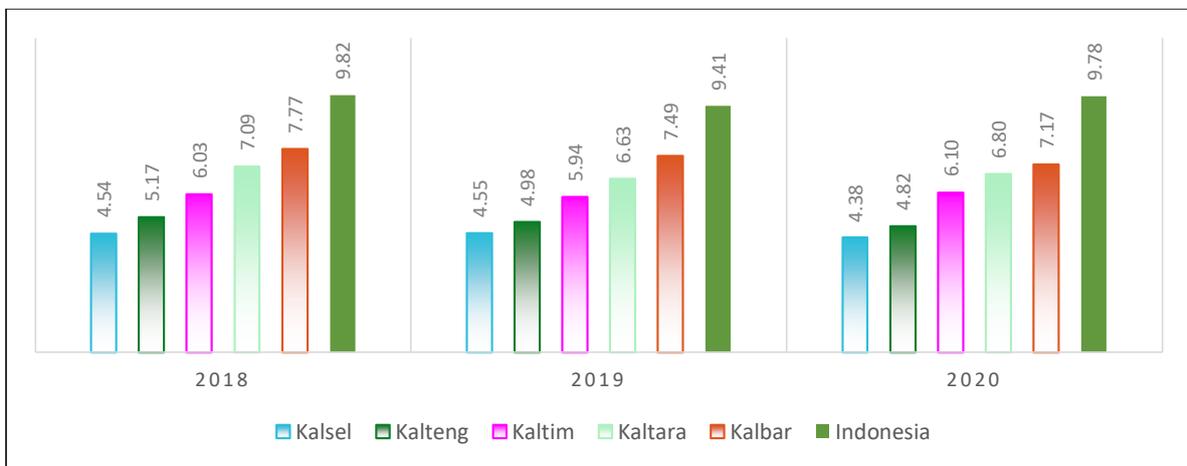
Tabel II- 23 Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur (%)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
2	KUBAR	8,65	8,72	9,15	9,09	9,29
3	KUKAR	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
4	KUTIM	9,16	9,29	9,22	9,48	9,55
5	Berau	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19
6	PPU	7,49	7,63	7,40	7,18	7,36
7	MAHULU	10,65	11,29	11,62	11,25	11,44
8	Balikpapan	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57
9	Samarinda	4,72	4,77	4,59	4,59	4,76
10	Bontang	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat menurun sebanyak 0,25 poin, sementara Kalimantan Timur meningkat sebanyak 0,50 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,19 persen.



Gambar II- 19 Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional  
 Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.920 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.980 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya

belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk Kalimantan Timur memberikan dampak peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 – 580 juta orang akan menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat menjadi 9,39 persen. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi disektor pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak COVID-19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk menumbuhkan perekonomian pasca COVID-19 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

Tabel II- 24 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur (Jiwa)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	23.170	25.300	25.140	25.450	26.770
2	KUBAR	12.650	12.800	13.490	13.450	13.780
3	KUKAR	55.820	56.570	56.560	56.340	58.420
4	KUTIM	30.170	31.950	33.020	35.310	36.980
5	Berau	11.470	11.860	11.330	11.620	12.300
6	PPU	11.660	12.000	11.760	11.520	11.930
7	MAHULU	2.880	3.070	3.250	3.190	3.260
8	Balikpapan	17.550	17.860	17.010	15.780	17.020
9	Samarinda	38.950	40.010	39.230	39.800	41.920
10	Bontang	8.600	8.750	8.100	7.470	7.910

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode September 2019 – Maret 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,991 pada keadaan September 2019 menjadi 1,015 pada keadaan Maret 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,242 menjadi 0,240 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2020, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,664 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,743. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,157 sementara di

daerah perdesaan mencapai 0,412. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

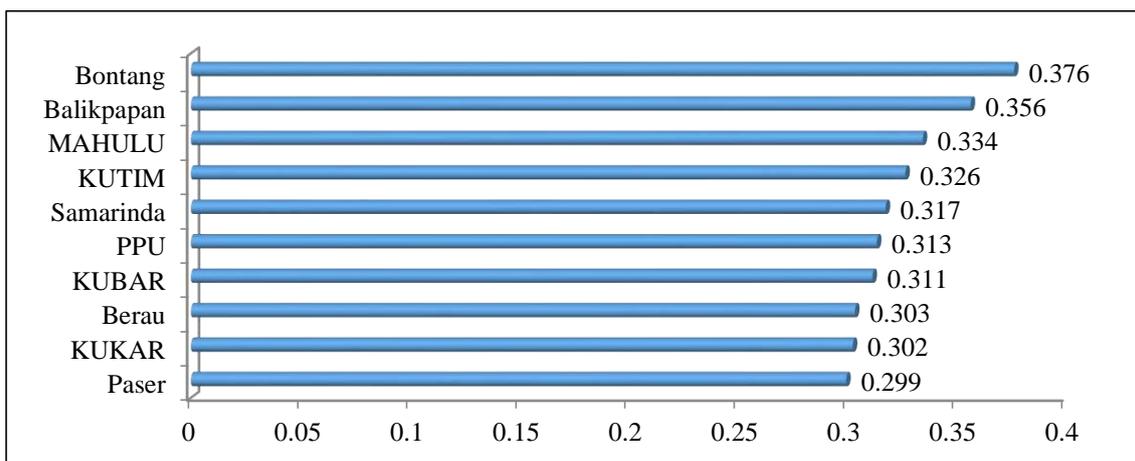
Tabel II- 25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur menurut Daerah (September 2019-Maret 2020)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	0,612	1,778	0,991
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,127	0,482	0,242
Maret 2020	0,157	0,412	0,240

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.2.1.7. Ketimpangan/Indeks Gini

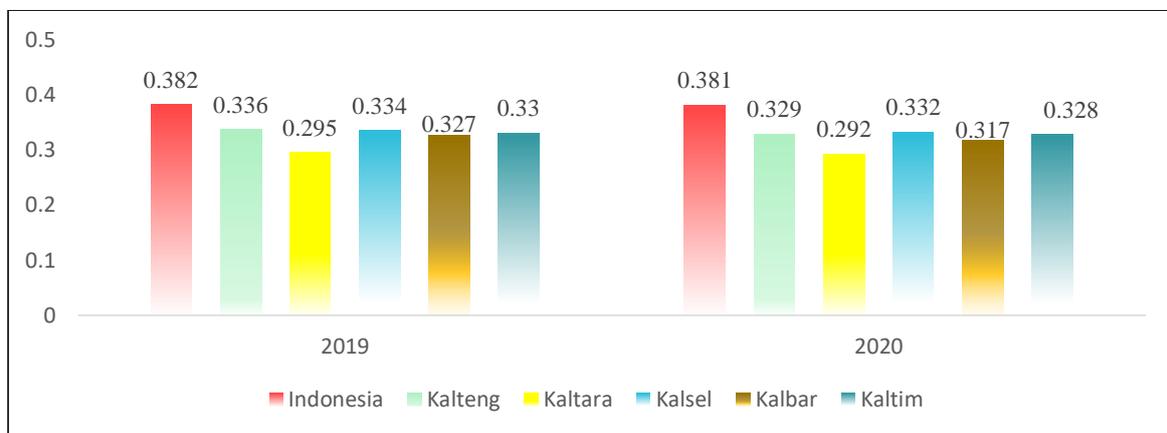
Indeks gini untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 masuk dalam kategori sedang, hanya ada satu kabupaten yang indeks ginya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser dengan capaian 0,299. Artinya ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Paser relatif rendah, jika dibandingkan ketimpangan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,376, artinya jarak antara si kaya dan si miskin di Kota Bontang lebih lebar dibanding kabupaten/kota lainnya.



Gambar II- 20 Indeks Gini menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2019

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,328. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,330. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,300. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,35. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,381 pada tahun 2020. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



Gambar II- 21 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

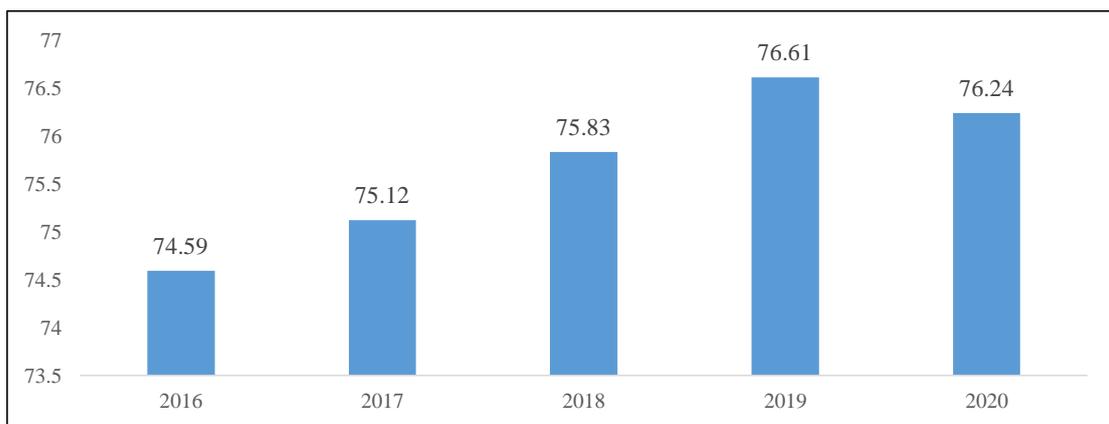
Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah disamping Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Desa Membangun.

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode 2010-2019, angka IPM Kalimantan Timur secara konsisten mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Meskipun begitu, capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Gambar II- 22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Penurunan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di

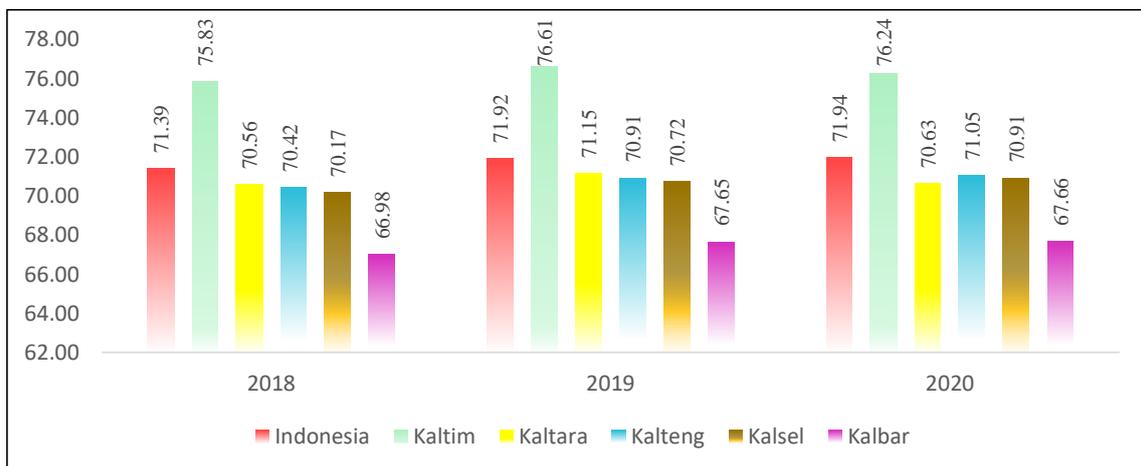
Kalimantan Timur terkoreksi turun. Kabupaten/Kota yang mengalami kecepatan penurunan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar 0,73 persen atau turun 0,49 poin dari 67,58 di tahun 2019 menjadi 67,09 di tahun 2020. Selain Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur juga mengalami penurunan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 0,49 poin dari 73,49 di tahun 2019 menjadi 73,00 di tahun 2020. Selain itu, jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,66 – 71,94. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi menyebar di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak negatif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.

Tabel II- 26 Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	71,00	71,16	71,61	72,29	72,04
2	KUBAR	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19
3	KUKAR	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
4	KUTIM	71,10	71,91	72,56	73,49	73,00
5	Berau	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71
6	PPU	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41
7	MAHULU	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
8	Balikpapan	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01
9	Samarinda	78,91	79,46	79,93	80,20	80,11
10	Bontang	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dengan interval berkisar antara 67,66 – 71,94.



Gambar II- 23 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

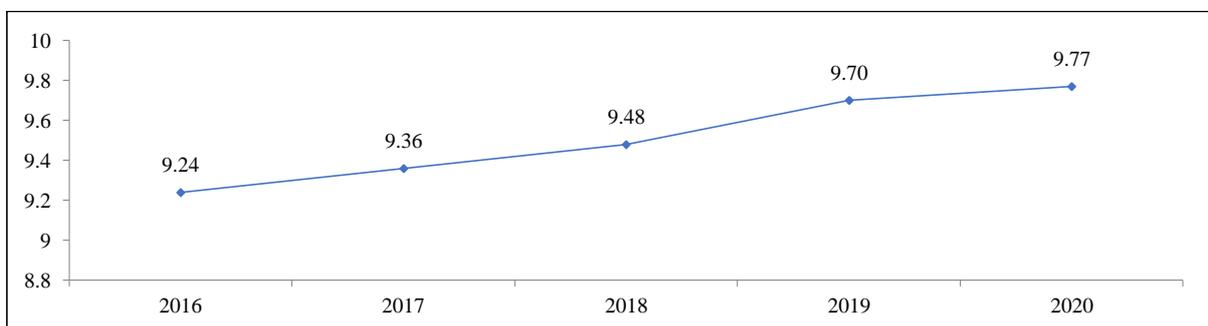
Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

#### 2.2.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

##### 1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2020 mencapai 9,77 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2020 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Gambar II- 24 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

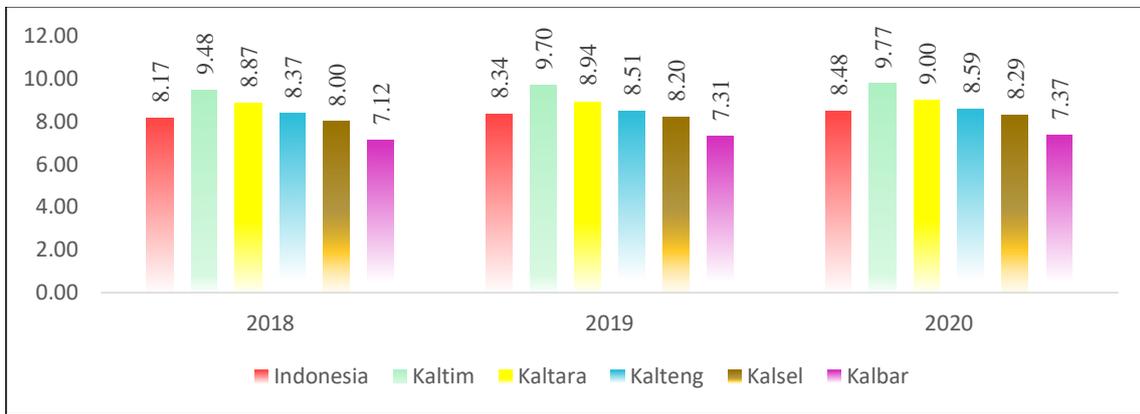
Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Bontang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,79 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 7,97 tahun pada tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih belum cukup untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dimana masih perlu waktu yang lama untuk mewujudkannya. Meskipun begitu, capaian ini patut di apresiasi karena terus meningkatkan progress layanan pendidikan bagi masyarakat Kaltim.

Tabel II- 27 Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,19	8,2	8,22	8,54	8,55
2	KUBAR	8,03	8,06	8,07	8,34	8,47
3	KUKAR	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22
4	KUTIM	8,72	9,06	9,08	9,18	9,19
5	Berau	8,78	8,96	8,98	9,25	9,52
6	PPU	7,6	7,95	8,03	8,16	8,28
7	MAHULU	7,37	7,68	7,69	7,89	7,97
8	Balikpapan	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68
9	Samarinda	10,33	10,34	10,46	10,47	10,48
10	Bontang	10,39	10,7	10,72	10,73	10,79

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,77 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,48 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,00 tahun dan 8,59 tahun.

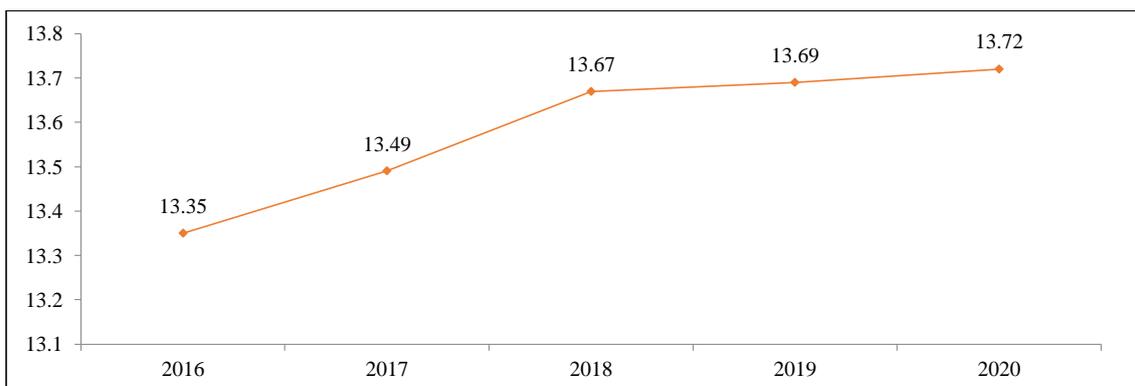


Gambar II- 25 Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

## 2. Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,72 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Gambar II- 26 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber; BPS Kalimantan Timur, 2021

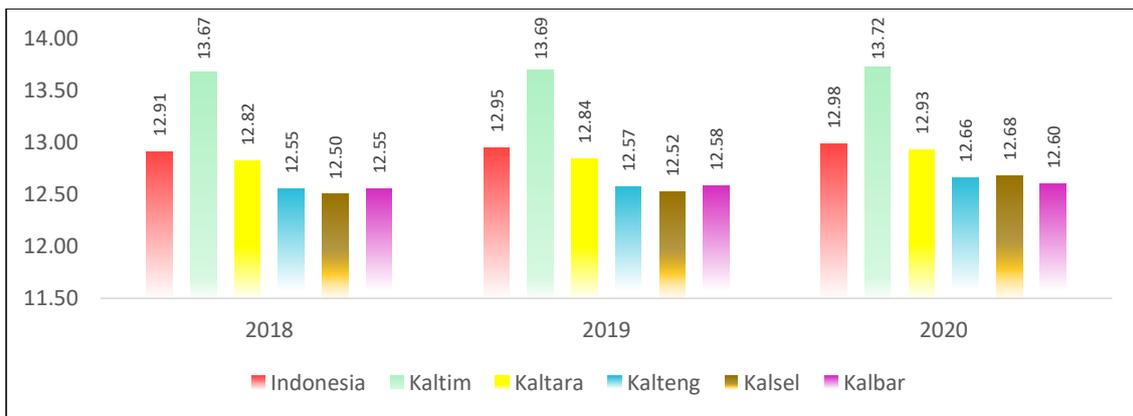
Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 14,89 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,51 tahun pada tahun 2020 merupakan capaian harapan lama sekolah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II- 28 Harapan Lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	12,96	12,98	12,99	13,00	13,10
2	KUBAR	12,75	12,82	12,88	12,89	12,90
3	KUKAR	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
4	KUTIM	12,44	12,48	12,65	12,78	12,89
5	Berau	13,18	13,29	13,3	13,31	13,32
6	PPU	12,46	12,53	12,54	12,55	12,56
7	MAHULU	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51
8	Balikpapan	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14
9	Samarinda	14,23	14,64	14,66	14,70	14,89
10	Bontang	12,79	12,88	12,89	12,90	13,03

Sumber : BPS, Kalimantan Timur, 2021

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2016-2020) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.



Gambar II- 27 Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia  
 Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

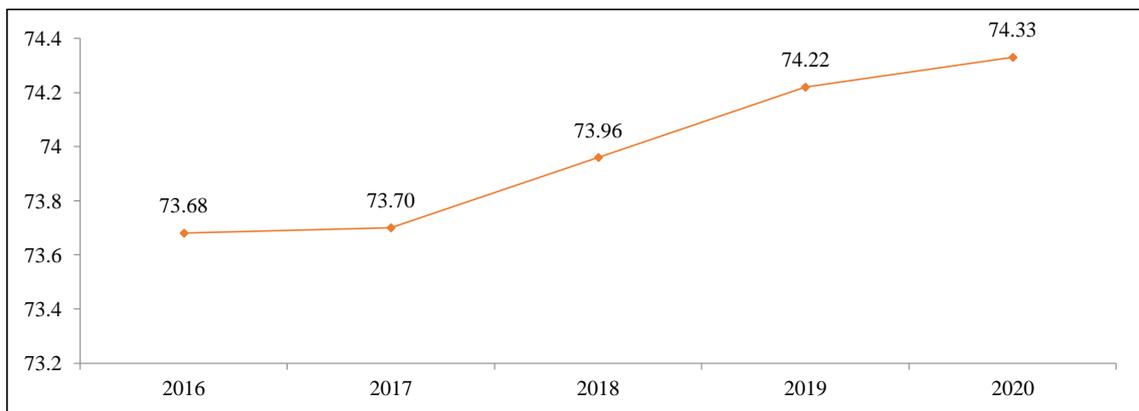
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

### 2.2.2.3. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang kesehatan :

#### 1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun. Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 74,22 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,33 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.



Gambar II- 28 Umur Harapan Hidup provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

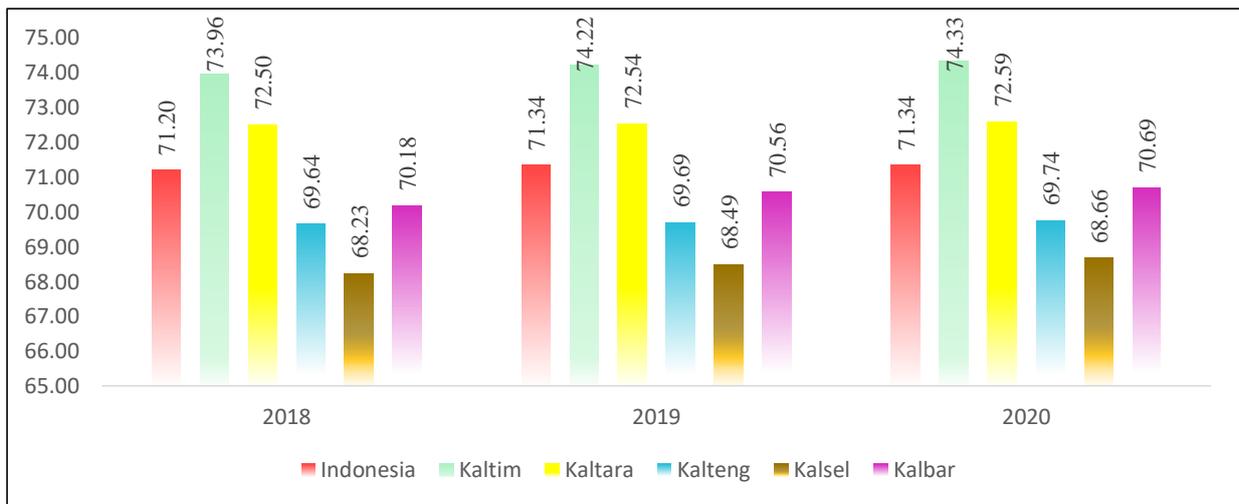
Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup mencapai 74,49 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,41 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

Tabel II- 29 Usia Harapan Hidup berdasarkan Kab/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	72,02	72,05	72,28	72,52	72,62
2	KUBAR	72,28	72,37	72,57	72,79	72,86
3	KUKAR	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
4	KUTIM	72,45	72,51	72,76	73,03	73,16
5	Berau	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06
6	PPU	70,8	70,82	71,05	71,30	71,41
7	MAHULU	71,19	71,25	71,56	71,90	72,10
8	Balikpapan	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49
9	Samarinda	73,68	73,71	73,93	74,17	74,27
10	Bontang	73,71	73,72	73,94	74,18	74,28

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun. Namun laju pertumbuhan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

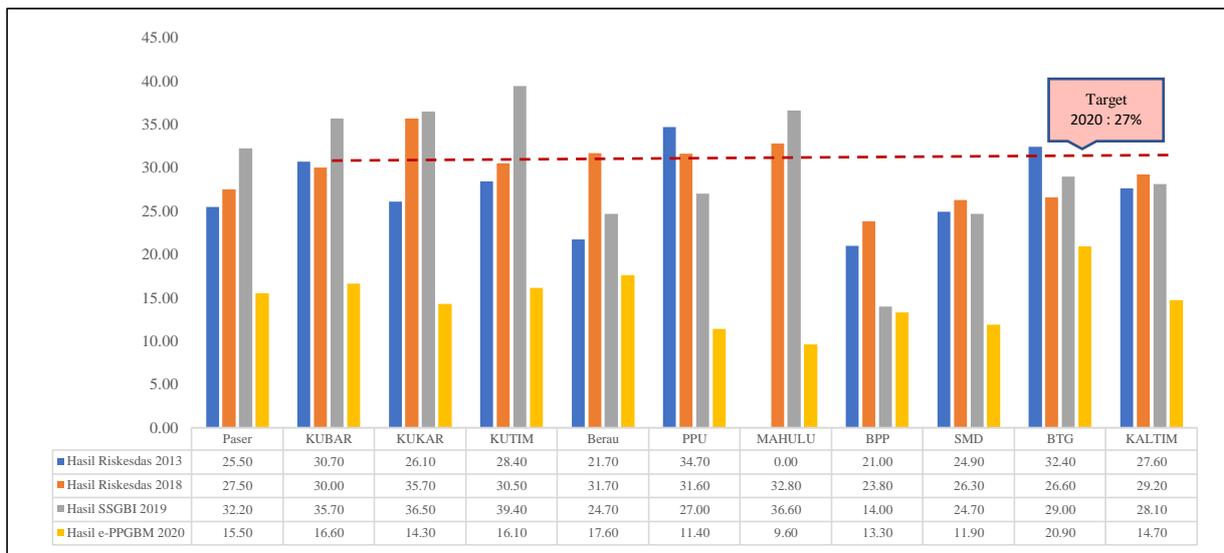


Gambar II- 29 Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia  
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

## 2. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

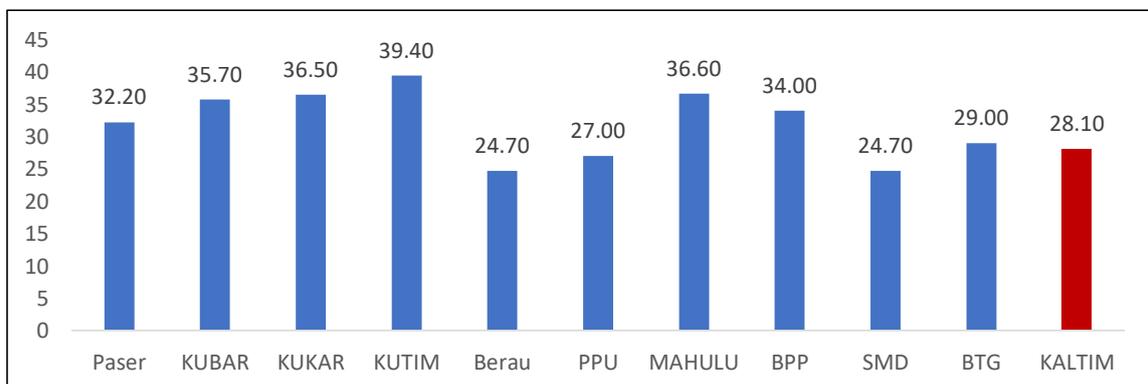
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017 – 2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian

ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0 – 11) bulan sudah mengalami penurunan.



Gambar II- 30 Tren Balita Pendek (*Stunting*) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020  
*Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021*

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.



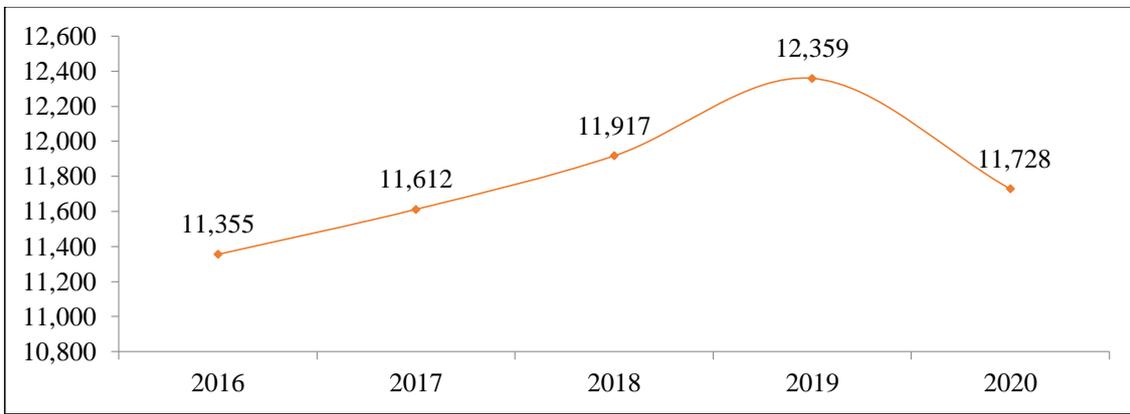
Gambar II- 31 Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berdasarkan hasil survei SSGBI  
*Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021*

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan *Major Project* sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah lokus stunting.

Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

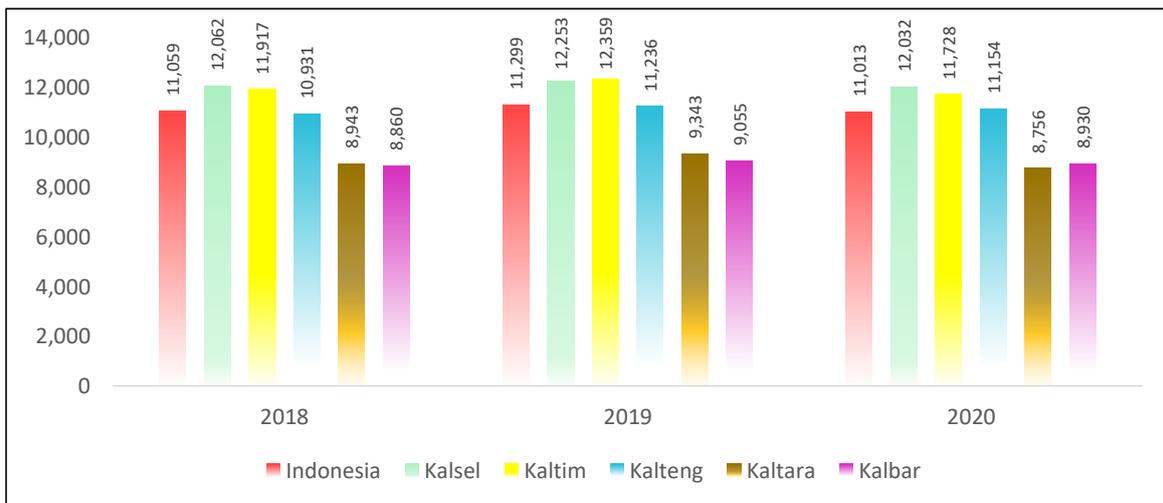
#### 2.2.2.4. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2020, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 11,73 juta per tahun, atau berkurang Rp 631 ribu dibandingkan tahun 2019. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena imbas negatif pada perekonomian masyarakat.



Gambar II- 32 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Ribuan Rupiah)  
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2020, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

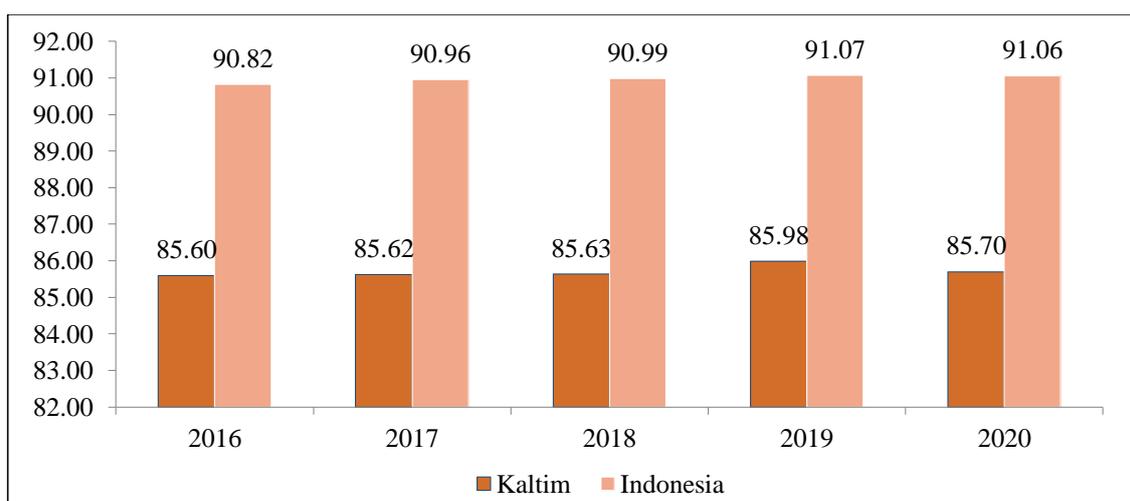


Gambar II- 33 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)  
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

#### 2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut *gender*, UNDP

merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar II-34 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 85,60 menjadi 85,98 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG.

Tabel II- 30 Indeks Pembangunan Gender berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	69,78	70,64	71,41	71,15
2	KUBAR	-	83,30	83,52	83,84	83,87
3	KUKAR	-	78,54	78,83	79,14	78,90
4	KUTIM	-	75,48	76,03	76,51	76,26
5	Berau	-	87,77	87,92	87,93	87,61
6	PPU	-	86,31	86,34	86,22	86,39
7	MAHULU	-	79,82	80,18	80,89	80,98
8	Balikpapan	-	89,74	89,76	89,71	89,65
9	Samarinda	-	89,26	89,42	89,41	89,27

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
10	Bontang	-	86,44	86,61	86,72	86,87
Kalimantan Timur		85,60	85,96	85,63	85,98	85,70

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,65 sedangkan Paser memiliki Indeks Pembangunan Gender terendah yaitu 71,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

#### 2.2.2.6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II- 31 Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	62,07	62,76	66,20	65,66
2	KUBAR	-	62,63	63,68	61,14	60,60
3	KUKAR	-	55,07	56,44	63,74	61,43
4	KUTIM	-	53,71	55,72	56,35	53,77
5	Berau	-	49,85	50,55	57,66	57,91
6	PPU	-	50,30	50,02	50,36	49,75
7	MAHULU	-	74,12	76,04	80,61	80,41
8	Balikpapan	-	65,52	66,33	69,11	68,97
9	Samarinda	-	70,84	69,61	66,29	70,65
10	Bontang	-	45,44	46,36	51,99	51,97
Kalimantan Timur		56,93	56,64	57,53	65,65	65,54

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,41 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,75 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

#### 2.2.2.7. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

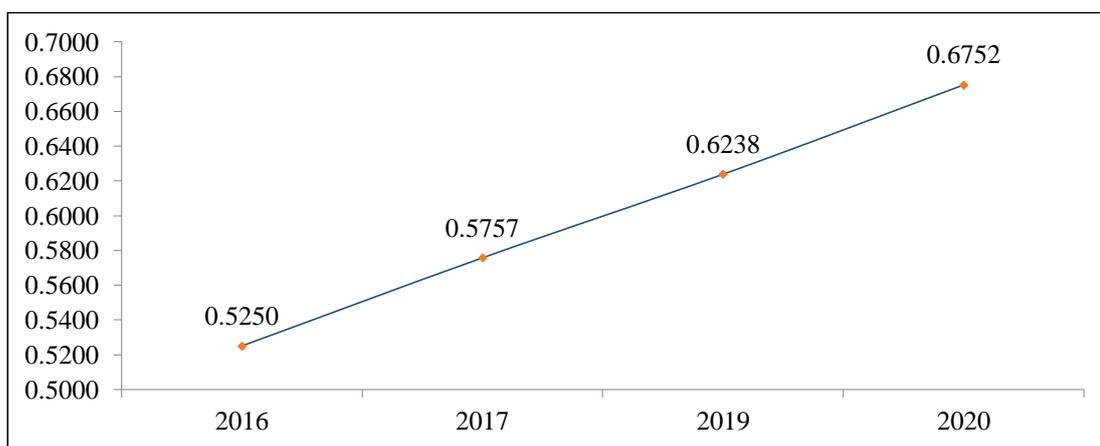
Pada tahun 2020, dari 1.038 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur masih terdapat 4 Desa sangat tertinggal yaitu 2 desa di Kutai Barat dan 2 Desa di Mahakam Ulu dan 129 desa tertinggal, hanya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memiliki Desa Tertinggal.

Tabel II- 32 Perkembangan Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	KAB/KOTA	2016					2020				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Paser	0	0	31	64	44	9	25	76	29	0
2	KUBAR	0	1	26	75	88	9	48	91	40	2
3	KUKAR	0	4	37	93	59	12	47	113	21	0
4	KUTIM	0	3	17	76	38	10	37	69	23	0
5	Berau	0	0	9	54	37	8	30	61	1	0
6	PPU	0	0	16	13	1	3	9	18	0	0
7	MAHULU	0	0	4	18	28	0	6	27	15	2
Kalimantan Timur		0	8	140	393	295	51	252	455	129	4

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan indeks 0,5250 pada tahun 2016 status tertinggal menjadi status berkembang pada tahun 2020 dengan indeks mencapai 0,6752. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur menempati Peringkat ke 9 di bawah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta yang menempati peringkat Pertama dan Kedua dengan Status IDM Maju. Sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya Provinsi dengan status IDM Sangat Tertinggal. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil.



Gambar II- 35 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Indeks Desa Membangun 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 mencapai Indeks Desa Membangun 0,6181 dengan status Berkembang, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Status Maju dengan indeks sebesar 0,7085.

Tabel II- 33 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020
1	Paser	0,5368	0,5856	0,6092	0,6664
2	KUBAR	0,5018	0,5233	0,5900	0,6660
3	KUKAR	0,5337	0,5815	0,6415	0,6846
4	KUTIM	0,5349	0,6037	0,6378	0,6782
5	Berau	0,5130	0,6097	0,6539	0,6999
6	PPU	0,6045	0,6505	0,6905	0,7085

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020
7	MAHULU	0,4969	0,5352	0,5862	0,6181
	Kalimantan Timur	0,5250	0,5757	0,6238	0,6752

Sumber : DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

#### 2.2.2.8. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada program pengembangan nilai – nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II- 34 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda	Peringkat
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Alat Musik Genikng Suliikng Dewa	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar	Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
2.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur	Nasional Nasional Nasional		

No.	Kabupaten/Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda	Peringkat
		Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu	Nasional		
3.	Paser	Tari Ngarang	Nasional		
4.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang	

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2021

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 611 Cagar Budaya, 9 Museum, 437 Komunitas Budaya, 157 Tenaga Budaya, dan 205 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II- 35 Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	96	1	58	0	6
2	KUBAR	12	1	81	25	19
3	KUKAR	132	2	69	25	0
4	KUTIM	57	0	7	4	7
5	Berau	167	3	7	0	0
6	PPU	17	0	24	3	7
7	MAHULU	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	55	1	29	0	29
9	Samarinda	28	1	122	87	0
10	Bontang	0	0	40	4	0
Kalimantan Timur		611	9	437	157	205

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2020

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini masih dibawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 53,74. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel II- 36 Dimensi Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	26,60	30,55
Pendidikan	73,85	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	76,82	72,84
Warisan Budaya	29,96	41,11
Ekspresi Budaya	33,86	36,57
Budaya Literasi	66,13	55,03
Gender	49,99	54,97
IPK	52,78	53,74

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2019

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

#### 2.2.2.9. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2018 IPP Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 52,17 pada tahun 2015 menjadi 54,83 pada tahun 2018. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat

8 secara nasional menurun dari peringkat tahun 2015 yang menduduki peringkat 6. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari dibawah 1 persen di tahun 2015 menjadi hampir 8 persen ditahun 2018.

Tabel II- 37 Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Domain : Pendidikan	70,00	73,33	73,33	73,33
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,70	10,81	10,92	10,72
2. APK Sekolah Menengah	94,55	95,32	95,52	94,35
3. APK PT	28,44	31,60	35,58	35,64
Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan	77,50	70,00	67,50	72,50
1. Angka Kesakitan Pemuda	5,81	4,83	6,15	5,37
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,47	0,97	1,37	0,93
3. Pemuda Merokok	22,09	22,59	20,80	20,80
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	0,80	4,82	7,99	7,99
Domain : Lapangan dan Kesempatan Kerja	30,00	65,00	40,00	35,00
1. Pemuda Berwirausaha	0,24	1,41	0,40	0,24
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	17,05	16,29	15,78	15,21
Domain : Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	43,33
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	77,25	77,25	70,55
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	3,63	3,63	4,87
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	6,21	6,21	5,12
Domain : Gender dan Diskriminasi	43,33	43,33	46,67	50,00
1. Angka Perkawinan Usia Anak	14,78	14,85	13,90	11,54
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	42,28	40,35	44,83	44,39
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	23,99	23,82	24,21	25,29
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	52,17	58,33	53,50	54,83
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,50

Sumber : Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap

menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel II- 38 Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63

Sumber : DISPORA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II- 39 Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	-	-	12,83	15,07	15,04
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	0,92	0,96	1,03	1,06
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20,63	18,93	18,14	17,82	18,90
1.4	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara terhadap PDRB (%)			7,16	7,46	8,24
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,53	0,55	0,56	0,63

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,54	1,45	1,48	1,52	1,67
1.9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,34	1,16	1,17	1,12	1,13
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,24	9,36	9,48	9,70	9,77
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,35	13,49	13,67	13,69	13,72
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,68	73,70	73,96	74,22	74,33
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
3.1	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal (%)	150	233	233	77	150
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	35	40	55	10	35

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan pendidikan lebih baik. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah (APS),

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin menurun partisipasi sekolahnya.

Tabel II- 40 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	99,54	99,67	99,76	99,68	99,73
13-15	98,18	98,79	98,89	98,21	99,07
16-18	80,81	81,32	81,55	82,07	81,88
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	110,04	108,07	108,02	106,84	105,75
SLTP	95,28	91,46	92,57	91,03	92,17
SLTA	95,38	99,51	96,08	94,96	95,23
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	97,13	97,43	98,40	98,41	98,44
SLTP	79,20	79,58	79,68	80,42	81,28
SLTA	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,75. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,75 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun bersekolah ditingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang

pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II- 41 Rasio Murid Guru dan Murid Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	355.154	23.076	15,39	214,85
Swasta	242	62.752	3.476	18,05	259,31
MI	133	28.103	1.633	17,21	211,30
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	442	127.805	8.603	14,86	289,15
Swasta	215	33.088	2.366	13,98	153,90
MTs	164	29.745	2.286	13,01	181,37

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	142	65.424	3.907	16,75	460,73
Swasta	80	12.593	957	13,16	157,41
MA	66	10.119	861	11,75	153,32
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	51.872	3.184	16,29	596,23
Swasta	129	29.263	1.935	15,12	226,84

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

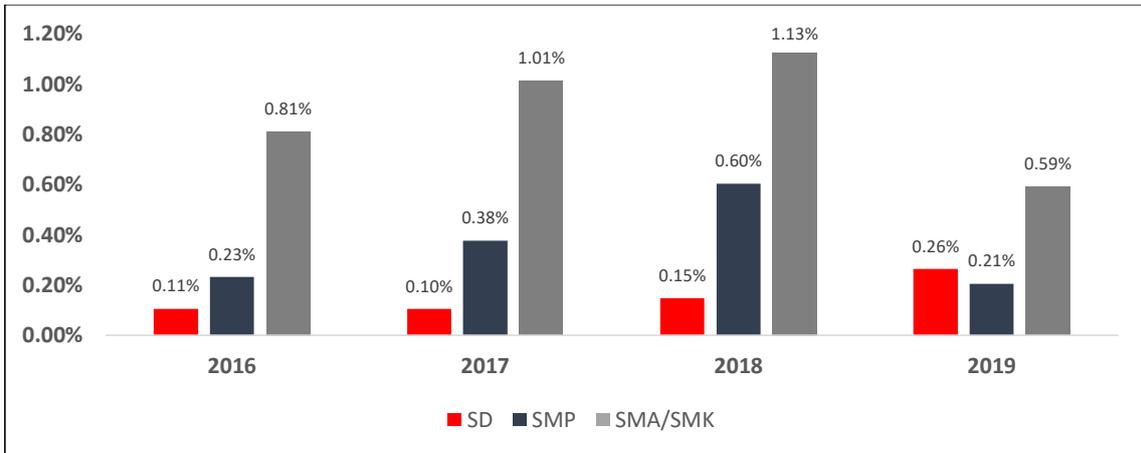
Tabel II- 42 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang Tersebar di 10 Kab/kota Tahun 2020

No.	KAB / KOTA	Sekolah Menengah atas (SMA)			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Sekolah Luar Biasa (SLB)		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Paser	17	13	4	12	4	8	1	1	0
2	KUBAR	22	17	5	14	7	7	1	1	0
3	KUKAR	51	35	16	43	17	26	5	1	4
4	KUTIM	22	21	1	25	13	12	3	1	2
5	Berau	19	15	4	14	8	6	1	1	0
6	PPU	10	7	3	10	6	4	1	1	0
7	MAHULU	7	4	3	2	0	2	1	1	0
8	Balikpapan	25	9	16	33	6	27	4	1	3
9	Samarinda	42	18	24	52	22	30	13	1	12
10	Bontang	11	3	8	14	4	10	6	1	5
Total		226	142	84	219	87	132	36	10	26

Sumber : Kementerian DIKBUD, 2021

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.108 pada tahun 2020 di semua jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), sudah cukup rendah, walaupun untuk jenjang Pendidikan menengah atas/kejuruan di tahun 2017 dan 2018 sempat berada di atas 1 persen, namun pada tahun 2019 angka putus sekolah di jenjang ini kembali turun menjadi 0,59 persen. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah sebesar 0,59 persen pada tahun 2019 antarlain disebabkan karena pada wilayah tertentu (wilayah terpencil) di beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tidak

memenuhi standar untuk dibangun unit sekolah baru. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat usia sekolah yang lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah.



Gambar II- 36 Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: Kementerian DIKBUD, 2021

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, jumlah mahasiswa mencapai 92.857 dengan jumlah dosen sebanyak 4.122 orang.

Tabel II- 43 Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	1.809	40.398
Swasta	49	2.313	52.459
Jumlah	54	4.122	92.857

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect*

pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban berat dalam menangani dampak akibat pandemi COVID-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak COVID-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca COVID-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

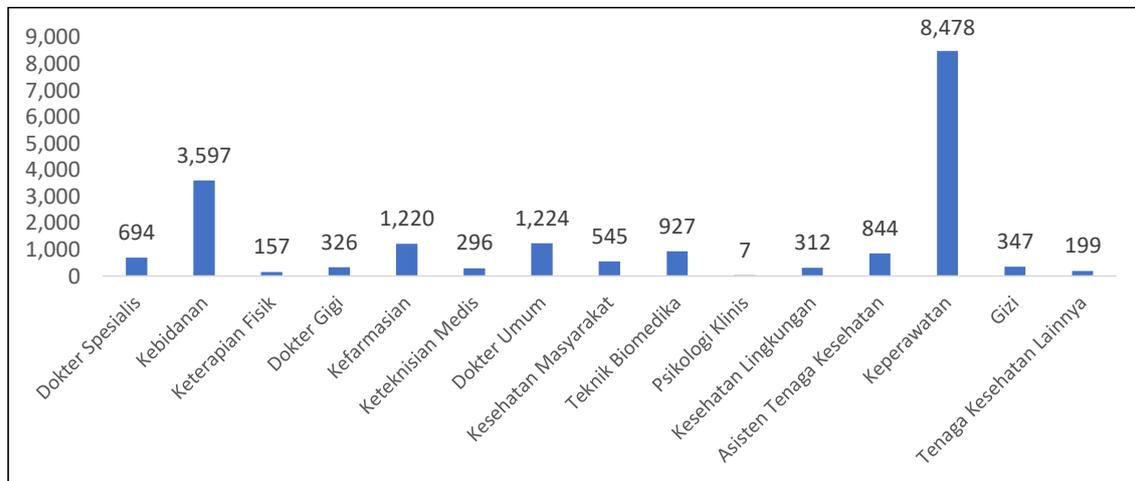
Tabel II- 44 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	44	44	54	53	57
2	Rumah Sakit Swasta	16	16	19	19	22
3	Dokter Umum	1.035	1.114	1.010	1.024	1.106
4	Dokter Gigi	323	320	309	314	320
5	Dokter Spesialis	583	678	503	597	649
6	Perawat	7.178	6.662	7.823	6.524	7.510
7	RS Bersalin	10	10	15	9	7
8	Puskesmas	180	186	186	187	187
9	Puskesmas Pembantu	669	714	716	716	730
10	Pedagang Besar Farmasi	47	47	48	49	52
11	Apotek	524	524	637	704	759

No.	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
12	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	90,12	88,2	96,34	96,39	97,46

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

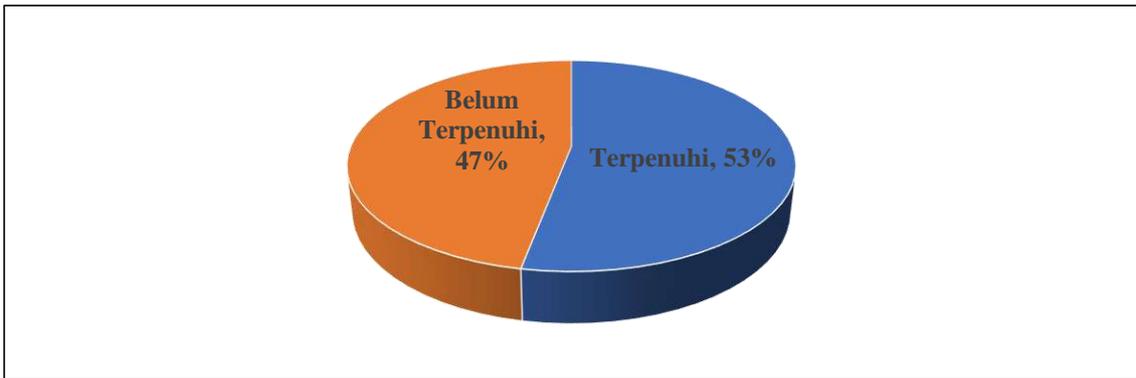
Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar II- 37 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020  
Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan

tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Gambar II- 38 Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020  
Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel II- 45 Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 (empat) Dokter Spesialis Dasar dan 3 (tiga) Spesialis Penunjang di Provinsi Kalimantan Timur

KAB/KOTA	Jumlah RSUD	Nama RSUD
Berau	1	RSUD Talisayan
Samarinda	2	RSUD Inche Abdoel Moeis
		RSUD KORPRI Prov KALTIM
KUKAR	1	RSUD Dayaku Raja
KUTIM	1	RSUD Sangkulirang
MAHULU	2	RS Gerbang Sehat MAHULU
		RS Nawacita Datah Dave
Paser	1	RS Pratama Batu Engau
PPU	1	RS Pratama PPU
Total	9	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

### 2.3.1.3. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan,

keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) bagi PMKS dan PSKS.

Tabel II- 46 Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Jumlah PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	Orang	247.167	243.459	n/a	251.234	251.234
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	n/a	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	0,01	0,01	0	0,01	0,01
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.690	76.000	78.387	78.387	81.247
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Orang	43.018	75,696	n/a	1.052	1.143
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	54,67	99,6	0	1,34	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	n/a	46.510	46.510
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	28.539	38.187	n/a	100	100

Sumber: DINSOS Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 243.459 orang menjadi 251.234 orang pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebanyak 7.775 orang. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan jumlah PMKS ini harus diiringi dengan peningkatan

penanganan PMKS menuju hidup yang lebih baik. Jumlah PMKS juga tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 47 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1,841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	379	-	679	-	2,981	-	95	-	164	-	489	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	192	-	1,017	-	608	-	240	-	54	-	851	-
9	Penyandang Disabilitas	673	-	947	-	1,294	-	281	-	1,824	-	696	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,091	-	180	-	1,990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2,807	591	169	43	5,950	1,267	981	214	47,301	9,748	1,211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2,477	412	3,288	612	781	192	25,304	5,941	1,011	214
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14,704	3,114	20,114	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647	3,291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1,697	378
JUMLAH		22.572	3.876	27,082	3,648	35,452	4,980	15,015	3,418	88,571	18,586	20,530	4,170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021



NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	-	52	-	-	-	34	-	-
21	Korban Bencana Alam	287	-	-	712	154	869	196	-
22	Korban Bencana Sosial	214	422	106	392	98	377	95	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	27	-	29	-	48
24	Fakir Miskin	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	337	-	-	-	581	-	11
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	72	27	1,697
JUMLAH		12.969	2.624	19.631	3.357	7.077	1.338	2.335	513

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021*

2.3.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dari sektor pekerjaan umum salah satunya adalah terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas.

Mengacu pada Target Nasional dalam RPJMN 2020-2024, target capaian akses air minum layak di tahun 2024 adalah 100 persen, yang terdiri didalamnya persentase akses air minum aman sebesar 15 persen. Permasalahan dalam pencapaian target tersebut dirasakan ketika capaian daerah aktual saat ini masih rendah, terutama terkait capaian pelayanan air minum perpipaan.

Tabel II - 49 Fasilitas dan Pelayanan Penduduk Terlayani Air Minum Perpipaan

No	KAB/KOTA	Sambungan Rumah (SR)					Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	18.743	19.050	19.050	21.551	23.599	24,21	38,29	38,29	37,16	43,79
2	KUBAR	9.987	10.012	10.012	11.009	9.565	34,25	34,35	34,35	34,24	28,84
3	KUKAR	69.942	68.035	68.035	73.203	67.017	63,25	63,39	63,39	58,68	49,52
4	KUTIM	20.656	15.945	15.945	20.122	30.335	31,67	33,13	33,13	15,43	38,08
5	Berau	16.120	16.517	16.517	23.738	18.101	44,34	44,70	44,70	81,59	54,87
6	PPU	5.339	5.470	5.470	7.845	10.399	14,19	15,87	15,87	34,79	30,13
7	MAHULU	n/a	n/a	n/a	1.554	1.656	n/a	n/a	n/a	12,00	22,49
8	Balikpapan	95.781	97.243	97.243	100.927	100.163	76,50	76,98	76,98	79,05	77,79
9	Samarinda	137.135	146.225	146.225	158.901	158.900	90,96	95,46	95,46	99,29	85,28
10	Bontang	22.970	23.999	23.999	22.953	28.464	84,37	87,05	87,05	51,10	97,96
Jumlah		360.996	396.673	402.496	441.803	448.199	51,7	51,5	54,3	54,59	62,64

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana sejak tahun 2017 sebesar 51,5 persen sampai pada tahun 2019 hanya mengalami peningkatan sebesar ± 3 persen menjadi 54,59 persen dan di tahun 2020 meningkat tajam menjadi 62,64 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, pemerintah provinsi dan juga oleh kabupaten/kota (melalui APBD II). Hal tersebut menggambarkan bahwa

Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan keandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air)

Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel II- 50 Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No	Potensi Spam Regional	KAB/KOTA Terlibat	Kebutuhan	Sumber Air Baku	
			Kapasitas L/Det	Nama	Kapasitas
1	KUKAR-Bontang	KUKAR, Bontang	450	Bendung Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM-Bontang	KUTIM, Bontang	150	Waduk Ex Tambang Indominco	> 100 L/DET (Masih Dalam Kajian)
3	PPU – Balikpapan	PPU, Balikpapan	Masih dalam Kajian	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	> 2.000 l/det

No	Potensi Spam Regional	KAB/KOTA Terlibat	Kebutuhan	Sumber Air Baku	
			Kapasitas L/Det	Nama	Kapasitas
4	KUKAR – Balikpapan	KUKAR, Balikpapan	Masih dalam Kajian	Waduk Batu Lepek	5.000 l/det
5	Paser – Balikpapan	Paser, Balikpapan	Masih dalam Kajian	Waduk Lambakan	12.000 l/det

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2020

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata kehilangan air *Non Revenue Water* (NRW) (Distribusi) berdasarkan data Audit BPKP Tahun Buku 2019 yaitu sebesar 22,70 persen. Dengan kapasitas produksi rata-rata sebesar 7.347,79 l/dt, kapasitas distribusi sebesar 6.805,98 l/dt dan kapasitas terjual 4.821,59 l/dt.

Tabel II - 51 Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-rata Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/ KOTA	Jumlah Unit	Kap Terpasang (l/dt)	Kap Produksi (l/dt)	Kap Distribusi (l/dt)	Kap Terjual (l/dt)	Idle Capacity (l/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Paser	8	360	307,00	290,43	179,57	59,00	22,16
2	KUBAR	12	298	212,00	189,00	151,90	90,00	12,73
3	KUKAR	33	1.667	1.532,00	1.376,00	923,00	135,00	33,00
4	KUTIM	17	640	427,60	421,30	322,10	212,40	12,29
5	Berau	18	548	442,50	374,00	344,00	130,00	17,54
6	PPU	5	340	134,00	134,00	124,00	206,00	25,76
7	MAHULU	12	157	47,00	47,00	47,00	110,00	-
8	Balikpapan	10	1.490	1.252,00	1.169,25	852,84	211,00	34,38
9	Samarinda	13	2.425	2.587,00	2.404,17	1.534,56	80,00	33,55
10	Bontang	4	470	406,69	400,74	341,62	63,31	12,93
KALTIM		132	8.395	7.347,79	6.805,98	4.821,59	1.296,71	22,70

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2020

Kehilangan air tertinggi terdapat di PDAM Kota Samarinda sebanyak 33,55 persen dan di Kota Balikpapan sebanyak 34,38 persen sedangkan kehilangan air terendah terdapat di PDAM Kota Bontang sekitar 12,93 persen dan PDAM Kabupaten Berau sebesar 17,54 persen. Penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua, dan belum akuratnya pencatatan meter water pelanggan, masih banyaknya *water meter* pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan *water meter* pelanggan. Pada umumnya PDAM telah berupaya untuk menurunkan NRW distribusi dengan melakukan penggantian *water meter* pelanggan yang rusak secara bertahap.

Menurut KLHS, dari segi jasa lingkungan, sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki arti penting bagi penyediaan air bersih, pencegahan erosi, pengendalian banjir dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagian dari jasa lingkungan tersebut direpresentasikan sebagai nilai konservasi tinggi (NKT) 4. Jasa ekosistem atau juga dikenal dengan jasa lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan dan aktivitas penghidupan masyarakat lokal yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung maupun langsung maupun tidak langsung. Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak lepas dari pengaruh jasa lingkungan, baik pemanfaatan langsung terkait jasa penyediaan maupun jasa lingkungan terkait jasa pencegahan bencana dan pengaturan. Tabel II-54 berikut menginformasikan jasa lingkungan penyedia air.

Tabel II- 52 Jasa Lingkungan Penyedia Air di Kalimantan Timur

KAB/KOTA	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air					Grand Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Paser	61.706,81	548.536,57	46.7035,94	28.102,14	4.281,80	1.109.663,25
KUBAR	42.113,61	655.980,39	421.940,13	4.345,54	23.361,17	1.147.740,84
KUKAR	222.012,85	147.8357,31	93.8737,86	178.564,22	37.007,96	2.854.680,20
KUTIM	59.299,66	1.654.387,74	1.298.756,44	63.292,33	11.541,76	3.087.277,94
Berau	56.141,03	480.358,67	1.506.681,83	119.558,67	9.932,94	2.172.673,13
PPU	11.591,41	182.626,15	96.857,97	1.396,22	1.573,66	294.045,40
MAHULU	3.009,42	14.2543,18	1.248.647,99	543.948,77	6.785,58	1.944.934,94
Balikpapan	1.392,63	24.657,32	24.320,64	128,92	608,05	51.107,57
Samarinda		42.859,33	12.036,70	447,30	2.353,23	57.696,57
Bontang	2.565,97	4.679,07	8.816,81	38,19	144,98	16.245,02
Grand Total	459.833,39	5.214.985,73	6.023.832,30	939.822,31	97.591,14	12.736.064,87

Sedangkan informasi jasa lingkungan pengaturan sebagaimana ditunjukkan tabel II-55.

Tabel II- 53 Jasa Lingkungan Pengaturan Air di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air					Grand Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Paser	14.667,77	298.466,58	356.596,09	415.128,36	24.804,44	1.109.663,25
KUBAR	35.613,89	556.305,19	149.382,97	394.041,01	12.397,77	1.147.740,84
KUKAR	62.137,12	1.251.888,40	558.561,77	670.613,42	311.479,50	2.854.680,20
KUTIM	22.459,18	1.070.389,24	751.037,13	745.607,33	497.785,05	3.087.277,94
Berau	10.513,71	277.156,06	350.519,76	962.988,82	571.494,79	2.172.673,13
PPU	2.050,78	127.954,91	115.797,38	44.191,16	4.051,18	294.045,40
MAHULU		106.844,25	51.052,58	781.572,97	1.005.465,13	1.944.934,94
Balikpapan		24.083,67	16.786,57	6.768,55	3.468,78	51.107,57
Samarinda	4.173,44	40.128,58	10.293,87	1.830,77	1.269,90	57.696,57

Kabupaten / Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air					Grand Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bontang		5.042,33	10.320,27	699,25	183,17	16.245,02
Grand Total	151.615,89	3.758.259,21	2.370.348,39	4.023.441,64	2.432.399,73	12.736.064,87

Tren perubahan jasa lingkungan penyedia air yang juga dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan pada setiap Kab/Kota di Kalimantan Timur sebagaimana ditunjukkan pada tabel II-56.

Tabel II- 54 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air			Grand Total
	Naik	Tetap	Turun	
Paser	29.626,07	991.960,25	87.883,98	1.109.470,30
KUBAR	42.334,03	848.987,50	256.419,31	1.147.740,84
KUKAR	101.138,22	2.085.885,07	667.618,49	2.854.641,78
KUTIM	154.474,13	2.419.670,50	513.133,31	3.087.277,94
Berau	70.089,10	1.672.930,18	429.653,85	2.172.673,13
PPU	9.749,25	202.653,81	81.642,34	294.045,40
MUHULU	40.935,21	1.4657.66,41	438.233,32	1.944.934,94
Balikpapan	781,22	43.025,36	7.300,99	51.107,57
Samarinda	877,23	48.292,47	8.526,87	57.696,57
Bontang	4.271,53	11.693,41	280,08	16.245,02
Grand Total	454.276,00	9.790.864,96	2.490.692,53	12.735.833,50

#### 2.3.1.5. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah, dampaknya mengurangi proporsi tenaga kerja usia muda.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai

tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel II- 55 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD ke Bawah	470.608	443.488	477.106	482.844	493.889
		(29,76)	(28,79)	(29,43)	(28,51)	(29,18)
2	SMP	278.802	236.959	260.843	273.257	267.721
		(17,63)	(15,38)	(16,09)	(16,14)	(15,82)
3	SMA/SMK	600.455	593.161	609.994	659.047	643.105
		(37,97)	(38,50)	(37,63)	(38,92)	(37,99)
4	Diploma I/II/III	70.398	68.636	64.291	57.174	64.507
		(4,45)	(4,45)	(3,97)	(3,38)	(3,81)
5	Universitas /DIV	160.976	198.431	208.735	221.159	223.574
		(10,18)	(12,88)	(12,88)	(13,06)	(13,21)
Kalimantan Timur		1.581.239	1.540.675	1.620.969	1.693.481	1.692.796
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III. Masih tingginya proporsi penduduk pada kelompok tamatan SD ke bawah untuk usia bekerja perlu menjadi perhatian serius oleh Provinsi Kalimantan Timur, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Pada tahun 2020 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 29,18 persen meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 28,51 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,38 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 3,81 persen.

Tabel II- 56 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tinggi berdasar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019

No	KAB/KOTA	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	34.244	35.740	39.940	15.981	16.325	14.888
		(29,67)	(27,69)	(30,38)	(13,85)	(12,65)	(11,32)
2	KUBAR	18.598	19.590	22.592	6.070	7.601	8.553
		(28,31)	(26,97)	(32,80)	(9,24)	(10,46)	(12,42)
3	KUKAR	121.146	119.976	128.560	38.307	44.946	43.730
		(37,76)	(35,60)	(36,18)	(11,94)	(13,34)	(12,31)
4	KUTIM	56.497	60.335	70.942	22.272	20.426	21.588

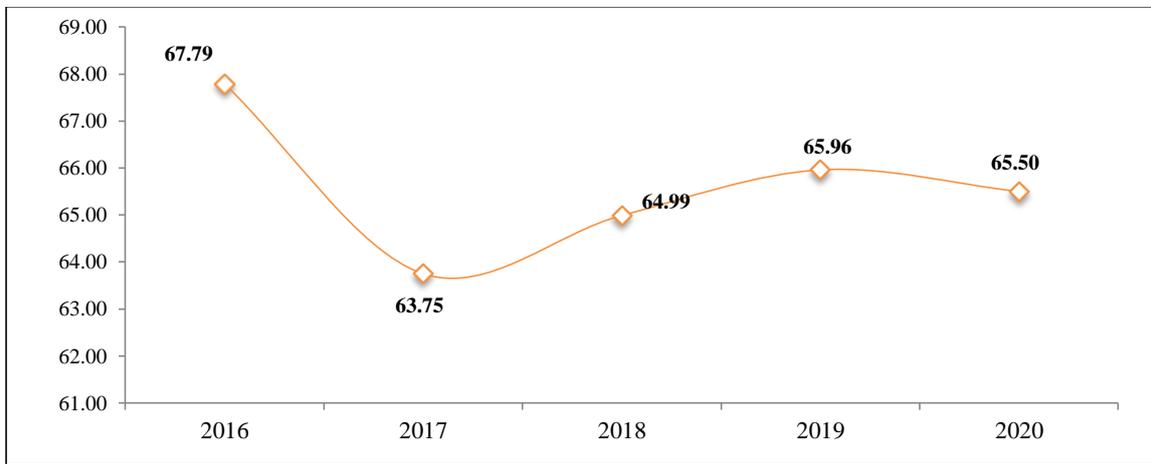
No	KAB/KOTA	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
		(35,70)	(35,52)	(39,91)	(14,07)	(12,02)	(12,15)
5	Berau	34.925	36.398	40.825	11.843	11.184	13.557
		(36,45)	(35,50)	(38,76)	(12,36)	(10,91)	(12,87)
6	PPU	19.086	20.372	20.077	6.661	7.691	5.585
		(29,20)	(28,81)	(28,57)	(10,19)	(10,88)	(7,95)
7	MAHULU	4.172	4.371	3.589	1.522	1.697	1.047
		(32,18)	(30,89)	(28,22)	(11,74)	(11,99)	(8,23)
8	Balikpapan	123.119	131.097	146.838	71.439	70.634	60.319
		(46,01)	(46,77)	(48,79)	(26,70)	(25,20)	(20,04)
9	Samarinda	160.685	157.910	165.736	80.294	79.300	98.779
		(43,37)	(42,80)	(41,10)	(21,67)	(21,49)	(24,50)
10	Bontang	20.689	36.718	37.090	12.678	15.905	16.102
		(30,34)	(50,27)	(47,00)	(18,59)	(21,78)	(20,41)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

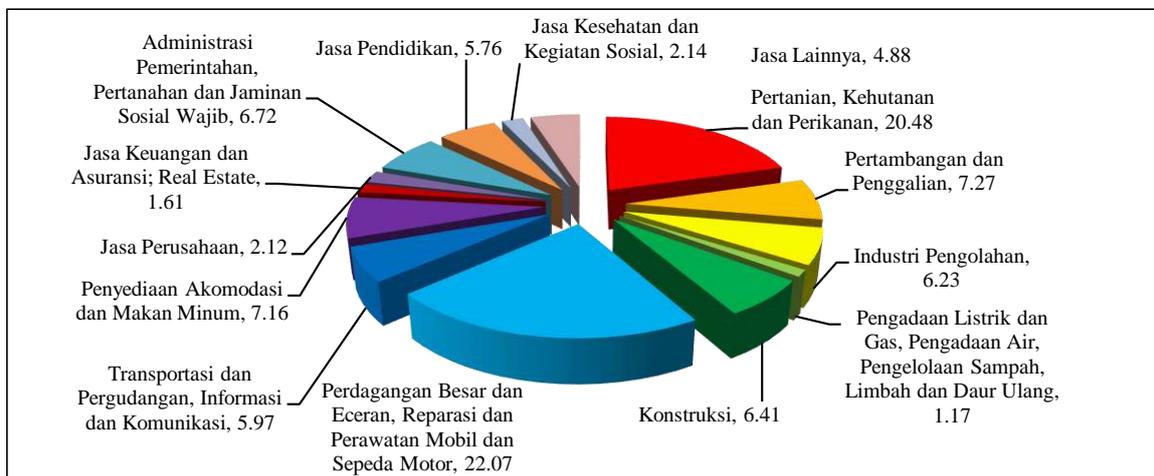
Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang memiliki lebih banyak Pekerja yang lulusan SMA/SMK dan Diploma/Perguruan Tinggi yang dimana pada tahun 2019 mencapai 48,79 persen di Kota Balikpapan, 41,10 persen di Kota Samarinda dan 47 persen di Kota Bontang lulusan SMA/SMK. Dengan tingginya pekerja lulusan SMA/SMK di Kota tersebut diharapkan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2020, sebelumnya pada tahun 2019 TPAK Kalimantan Timur sebesar 65,96 persen, mengalami penurunan sebesar 0,46 persen di tahun 2020 menjadi 65,50 persen.



Gambar II- 39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020  
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*



Gambar II- 40 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)  
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

Tahun 2020, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 22,07 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,48 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 1,17 persen.

Seperti yang tergambar diatas bahwa Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa merupakan sektor yang menyerap jumlah kerja terbanyak untuk itu perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja yang

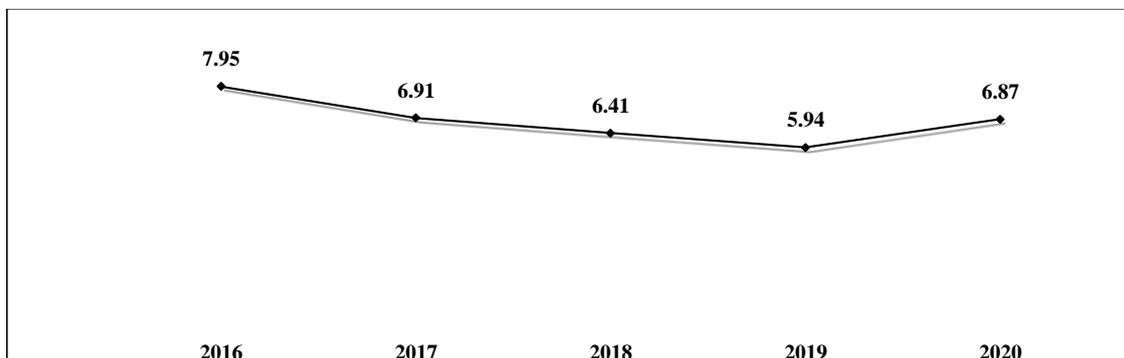
merupakan sasaran paling strategis karena mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi lainnya seperti modal, bahan baku, energi dan lainnya.

Tabel II- 57 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)		Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa (Juta Rp)
	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	(d+e)/(b+c)
a	b	c	d	e	f
2016	345.522	824.476	28.639.398	43.869.020	61,97
2017	328.448	590.465	30.261.400	46.507.456	83,54
2018	347.901	597.666	32.118.725	49.622.537	86,45
2019	319.764	640.269	33.364.448	51.976.061	88,89
2020	346.768	653.131	33.020.515	48.648.392	81,68

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari rasio antara PDRB Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa berdasarkan harga konstan dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor tersebut. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan di tahun 2016 dan meningkat drastis pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 88,89 Juta Rupiah pada tahun 2019. Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor perdagangan & jasa makin efisien dan produktif karena tenaga kerja yang terlibat mampu menghasilkan nilai tambah atau output yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa mengalami penurunan menjadi 81,68 Juta Rupiah. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menurunkan nilai PDRB Kalimantan Timur secara signifikan.



Gambar II- 41 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

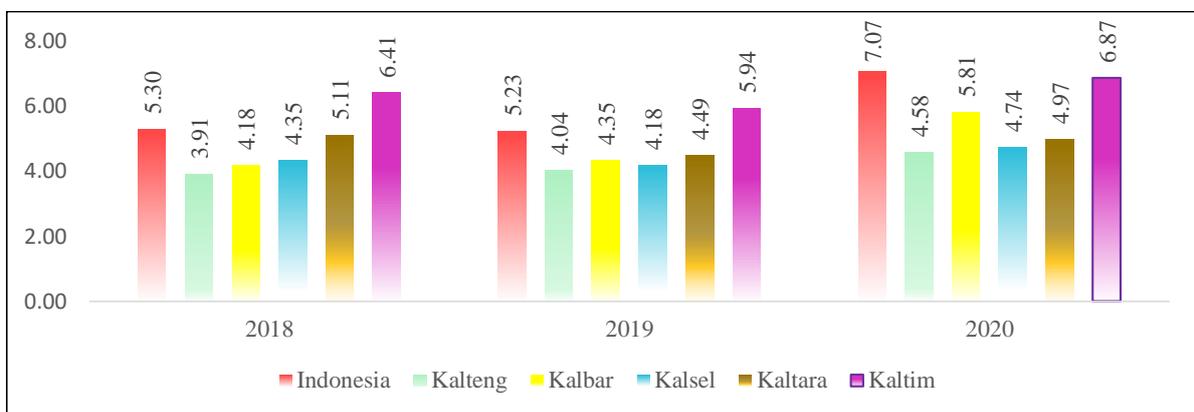
Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan.

Tabel II- 58 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020 (%)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020
1	Paser	5,54	5,00	4,55	4,52
2	KUBAR	5,87	4,86	5,08	4,97
3	KUKAR	5,72	5,96	5,98	5,70
4	KUTIM	4,61	5,93	5,53	5,45
5	Berau	6,45	5,62	5,08	5,08
6	PPU	4,75	4,76	6,26	6,22
7	MAHULU	9,05	4,17	3,69	3,49
8	Balikpapan	10,39	9,52	7,29	9,00
9	Samarinda	6,19	6,16	5,87	8,26
10	Bontang	12,44	9,61	9,19	9,46

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,46 persen, Kota Balikpapan sebesar 9,00 persen, dan Kota Samarinda sebesar 8,26 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah kembali ditorehkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,49 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2020 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,87 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Gambar II- 42 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek yang paling terdampak akibat Pandemi COVID 19. Pada tingkat global diperkirakan sekitar 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Upaya mengatasi pengangguran melalui peningkatan kapasitas masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang dapat bertahan dan bahkan berkembang ditengah Pandemi COVID 19 perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu Penganggur, Bukan Angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Komponen ketiga dan keempat merupakan dampak pandemic COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan komponen pertama dan kedua merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel II- 59 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (Agustus 2020)

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
Pengangguran <sup>2</sup> Karena COVID-19	17.712	13.273	27.547	3.438	30.985
Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>3</sup> Karena COVID-19	4.772	9.567	11.792	2.547	14.339
Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19	15.496	5.706	17.078	4.124	21.202
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	220.306	124.525	245.182	99.669	344.851
Total	258.306	153.071	301.599	109.778	411.377
Persentase terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK)	17,81	11,55	16,18	12,04	14,82

Sumber : BPS, Kalimantan Timur, 2021

Keterangan :

1. Penghitungan dengan menggunakan pembimbing hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang berhenti bekerja keras COVID-19 selama bulan Februari 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan Angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,78 juta, terdapat 411 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,82 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar 1,6 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang

terdampak di perkotaan sebesar 16,18 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,04 persen.

Tabel II- 60 Data Pekerja Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Pekerja Ter-PHK		Pekerja Yang Dirumahkan		Total
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Paser	2	4	4	29	33
2	KUBAR	8	13	0	0	13
3	KUKAR	4	314	6	1.517	1.831
4	KUTIM	0	0	1	54	54
5	Berau	0	0	3	71	71
6	PPU	0	0	0	0	0
7	MAHULU	0	0	0	0	0
8	Balikpapan	19	1.091	60	5.698	6.789
9	Samarinda	12	420	21	892	1.312
10	Bontang	73	101	125	243	344
Jumlah		118	1.943	220	8.504	10.447

Sumber : DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah tenaga kerja yang yang di PHK pada tahun 2020 sebanyak 1.943 orang dengan jumlah perusahaan 118 yang melakukan PHK terhadap pekerjanya dan Kota Balikpapan adalah dengan jumlah pekerja ter-phk tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Jumlah pekerja yang dirumahkan pada tahun 2020 sebanyak 8.504 pekerja dari 220 perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan Kota Balikpapan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan tertinggi sebanyak 5.698 pekerja.

Salah satu cara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan mendata para pencari kerja ke dalam database Disnaker caranya para pencari kerja membuat Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning yang didalamnya tercantum nomor pencari kerja, nomor kartu identitas atau KTP dan legalisasi dari Disnaker setempat. Lamaran kerja serta berkas yang diserahkan pencari kerja ke Disnaker akan dimasukkan kedalam database pencari kerja. Database ini nantinya akan dikelompokkan menurut pendidikan dan keahlian. Perusahaan yang mencari pekerja ke Disnaker akan diberikan data pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Dinas Tenaga

Kerja juga memiliki pusat informasi lowongan pekerjaan serta perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja melalui database kartu kuning masih rendah yaitu dibawah 30 persen, namun cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 20,03 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 22, 12 persen. Pada tahun 2020, persentase penempatan tenaga kerja mengalami penurunan hingga mencapai 18,03% dibanding tahun 2019 yang mencapai 29,41 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah hanya sebagian pencari kerja yang melaporkan kembali apabila telah diterima bekerja dan sebagian lagi tidak melapor.

Tabel II- 61 Persentase Penempatan Tenaga Kerja  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	29.863	45.834	49.552	26.148	30.719
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	5.982	10.365	11.266	7.690	5.538
3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	19.515	31.879	26.969	36.158	22.819
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03

Sumber : DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2021

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi adalah Kota Samarinda mencapai 31,48 persen persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2020, capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 23,21 persen dan Kabupaten Kutai Timur dengan persentase penempatan tenaga kerja tahun 2020 mencapai 21,02 persen.

Tabel II- 62 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kab/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	1.908	65	3,41
2	KUBAR	2.244	183	8,16
3	KUKAR	4.812	578	12,01

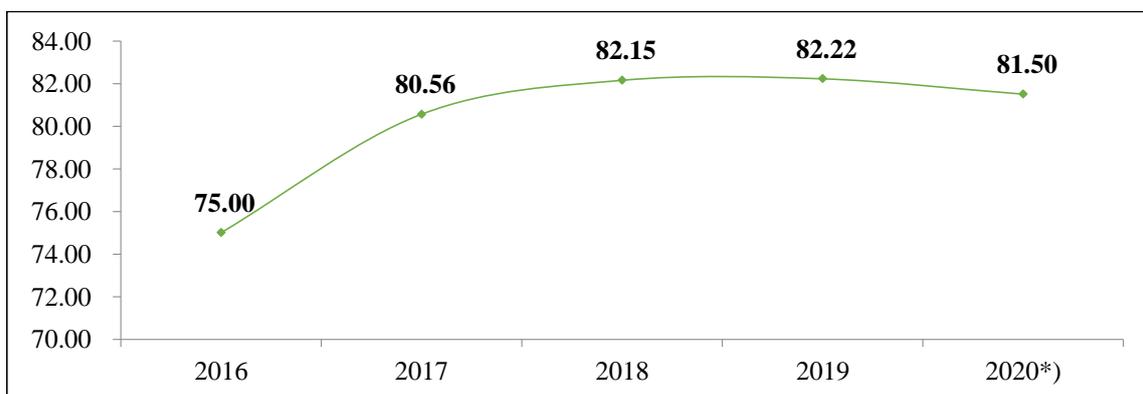
No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
4	KUTIM	1.161	244	21,02
5	Berau	4.249	699	16,45
6	PPU	1.185	275	23,21
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	2.898	498	17,18
9	Samarinda	5.563	1.751	31,48
10	Bontang	6.699	1.245	18,58

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.3.1.6. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

#### 1. Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur pada tahun 2020 menurun di angka sementara 81,50 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,22. Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum stabilnya kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar II- 43 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur

\*) Angka Sementara

## 2. Keuangan Daerah

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020 adalah 52,99 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II- 63 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2016	4.031.514.706,41	7.987.877.780,77	50,47
2017	4.588.752.896,23	8.154.749.005,92	56,27
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
Rata-rata	5.018.592.816,33	9.470.146.587,54	52,99

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011 dan pada Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

### 3. Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai 2017. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapat predikat BB dengan skor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Tugas dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPK adalah pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui kematangan penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah perlu adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah. Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

#### 2.3.1.7. Lingkungan

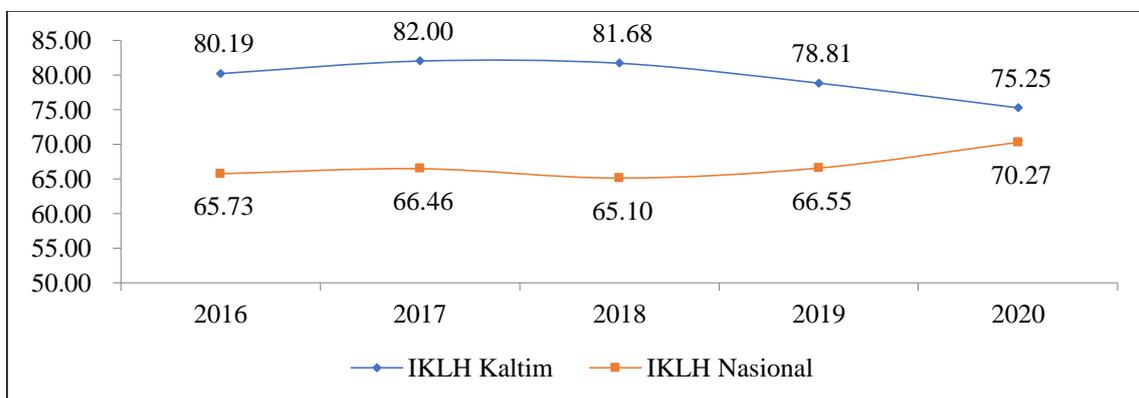
Potensi sumberdaya alam di Provinsi Kalimantan Timur sangat besar terutama pada potensi sumberdaya alam migas, mineral dan batubara. Terbukti hingga saat ini perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih bertumpu pada dukungan pemanfaatan dari sumberdaya alam pemasok kebutuhan energi utama ini. Dan jika melihat kondisi keuangan Kalimantan

Timur dari nilai ekspor tahun 2021 yang menunjukkan sektor pertambangan masih sangat dominan.

Menyadari aspek keberlanjutan dari sumber daya alam *nonrenewable* yang sangat terbatas dan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan yang sangat besar, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat kebijakan yang mengarahkan secara bertahap strategi rencana pembangunan daerahnya menuju pembangunan yang mengarusutamakan prinsip berkelanjutan yaitu Kaltim Hijau yang telah dicanangkan pada Mei 2016. Komitmen Pembangunan Kaltim Hijau terus berkesinambungan hingga saat ini sebagaimana tercermin dari Visi dan Misi dan program-program pembangunan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil gubernur serta sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten kotanya.

Pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan daerah akan berakibat signifikan pada penurunan kemampuan alam untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus tanpa strategi alternatif untuk memperbaikinya maka akan sampai pada kelangkaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup, atau telah dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Daya dukung dan daya tampung Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dari perbandingan antara sumberdaya alam yang tersedia dengan jumlah sumberdaya alam yang dapat dikonsumsi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar II- 44 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2021

IKLH Kaltim dari tahun 2016 - 2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) yang dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga meningkat. Namun, pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 78,81 (predikat baik,  $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 75,25. Menurunnya IKLH tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai.

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II- 64 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Angka Penurunan Emisi (juta ton co <sub>2</sub> eq)	54,12	42,14	34,65	24,41

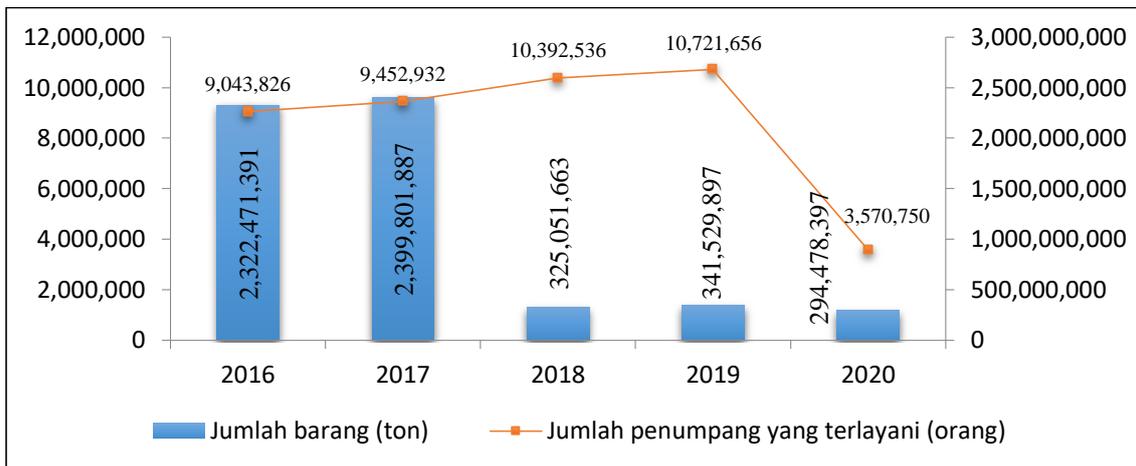
Sumber : DLH Provinsi KALTIM, 2021

#### 2.3.1.8. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang/jasa di suatu wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada

tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 Orang Penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 Orang Penumpang sehingga menjadi 3.570.750 Orang Penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 Ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 Ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan karena beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah Wabah Pandemi COVID 19 masuk ke negara tersebut di akhir tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 bahkan diperkirakan sampai dengan tahun 2021.



Gambar II- 45 Jumlah Penumpang yang Terlayani dan Jumlah Barang  
*Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2020*

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak

mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan pada periode 2013-2017.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.2.1. Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan. Provinsi Kalimantan Timur memiliki Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yang dibagi menjadi 3 Kawasan, Yaitu :

##### 1). KPPP I (Kawasan Pesisir Utara)

Sangatta - Bontang dan sekitarnya

Potensi :

- a. Daya Tarik Wisata berupa pengamatan satwa endemic Orangutan
- b. Daya Tarik Wisata berupa pengamatan burung dan satwa liar
- c. Desa Wisata berbasis hutan dan pantai/pesisir
- d. Daya tarik Wisata berupa wisata bahari : Pantai, Menyelam/Diving, Snorkeling dan Mangrove

##### 2). KPPP II (Kawasan Pesisir Selatan)

Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan sekitarnya

Potensi :

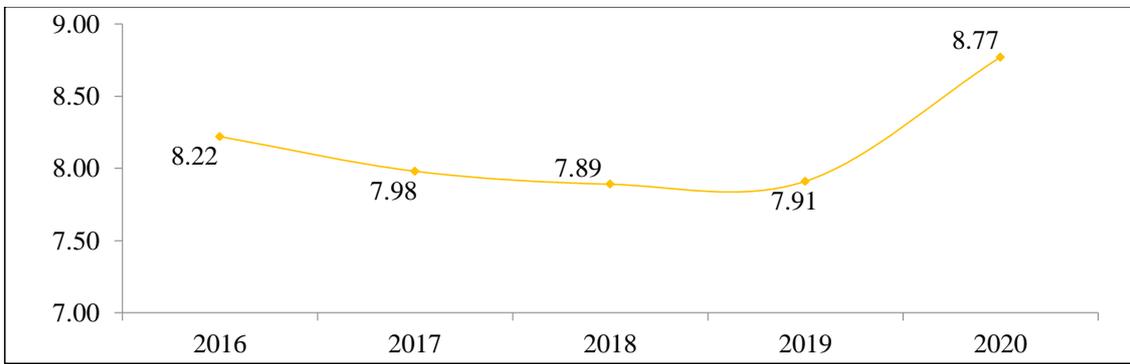
- a. Konservasi satwa endemic Kalimantan : Orangutan, Beruang Madu, dan Bekantan
  - b. Ekowisata Bahari : Wisata Mangrove, Pantai dan Desa Bahari/Pesisir
  - c. Beberapa Ekowisata Goa
  - d. Wisata Budaya Paser
- 3). KPPP III (Kawasan Hulu Sungai Mahakam dan Perbatasan)  
Samarinda – Tanah Grogot dan Sekitarnya
- Potensi :
- a. Daya Tarik Wisata berupa Susur Sungai Mahakam
  - b. Daya Tarik Wisata Arung Jeram
  - c. Daya Tarik Wisata Air Terjun
  - d. Desa Wisata dan Wisata Budaya Dayak

Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur cukup besar dan bisa menjadi salah satu sumber ekonomi baru di masa depan. Hal ini dapat terwujud bila didukung oleh fasilitas yang memadai. Tetapi ini terkendala dengan kurangnya fasilitas umum (Amenitas), sarana dan prasarana jalan transportasi (Aksesibilitas), serta kurang peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Kedepannya diharapkan peran serta Pemerintah - Swasta - Masyarakat dalam pengembangan/pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yang kemudian diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan (*Multiplier Effect*).

#### 2.3.2.2. Pertanian

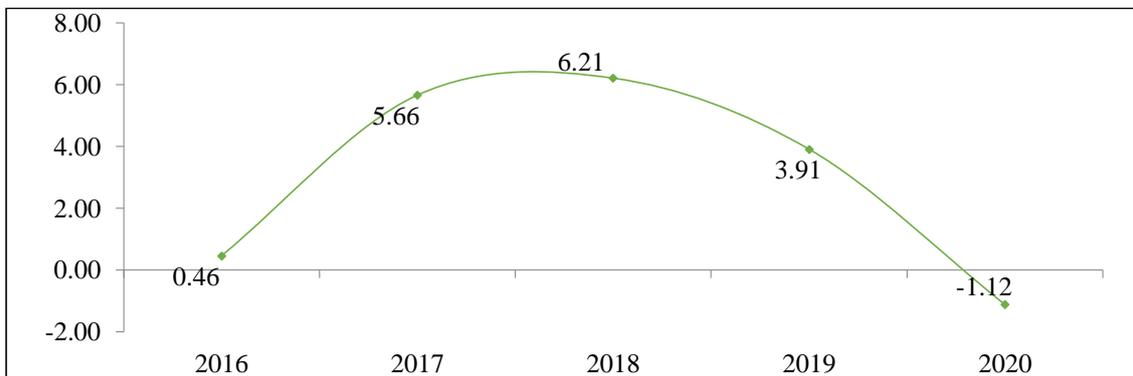
Kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020, kontribusi pertanian mencapai 8,77 persen meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 7,91 persen. Peningkatan ini tentu saja karena terdampaknya penurunan Kategori unggulan lainnya seperti pertambangan dan penggalian akibat pandemi COVID-19. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang minim terdampak dari dampak negatif pandemi COVID-19.



Gambar II- 46 Kontribusi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan di periode tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 3,91 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,12 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi lebih dalam di tahun 2020 menjadi -7,92 persen.



Gambar II- 47 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

### 1. Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi

masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2017 mencapai 4,24 ton per hektar dan menurun hingga 3,57 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka dari sisi produktivitas, Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata produktivitas nasional yakni 5,11 ton/ha.

Tabel II- 65 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Provisis Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.394	400.102	4,24
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

## 2. Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,19 juta ha dan memiliki produksi mencapai 15,25 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 55,97 ribu ton pada tahun 2020. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II- 66 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	121.869	55.979	1,07
2.	Kelapa	20.711	11.280	0,68
3.	Kopi	2.306	212	0,24
4.	Lada	8.337	3.362	0,57
5.	Kakao	6.886	2.536	0,61
6.	Kelapa Sawit	1.194.849	15.259.383	17,59

\*) angka sementara, Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2021

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dan Kabupaten Kutai Timur memiliki produksi terbanyak dengan jumlah produksi sebanyak 6,27 juta ton pada tahun 2020, Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet sebesar 27,9 Ribu Ton, sedangkan Kab Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan produksi Kelapa dan lada terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi masing-masing komoditi sebesar 2.609 ton dan 1.690 ton.

Tabel II- 67 Produksi Perkebunan menurut Kab/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (ton)

No	KAB/KOTA	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	1.987.340	1.019	7.399	110	3	12
2	KUBAR	888.486	202	27.922	27	19	5
3	KUKAR	3.136.905	2.609	13.135	9	30	1.690
4	KUTIM	6.274.515	1.055	956	47	1.410	123
5	Berau	2.415.122	3.483	135	14	226	174
6	PPU	497.390	2.053	3.194	2	-	611
7	MAHULU	48.214	5	-	-	282	-
8	Balikpapan	469	479	2.813	3	1	910
9	Samarinda	10.644	364	425	-	3	13
10	Bontang	298	11	-	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2021 (Angka Sementara)

### 3. Kehutanan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,3 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu terus

mengalami peningkatan dari 4,3 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta m<sup>3</sup> di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 4,8 juta m<sup>3</sup>. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 6,9 ton menjadi 1.428,65 ton di tahun 2019 dan menurun menjadi 864,9 ton di tahun 2020. Walaupun demikian, masih banyak ditemui lahan kritis di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2020 lahan kritis di Kalimantan Timur adalah sebesar 113.015 hektar dan lahan sangat kritis seluas 79.900 hektar. Oleh karena itu, upaya penurunan lahan kritis masih terus ditingkatkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel II- 68 Lahan Kritis menurut Tingkat Kekritisan Lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPK	536,18	2.242,30	50.847,26	37.748,15	29.333,72	120.707,61
HPT	2.536,14	7.338,38	2.076.115,67	540.395,72	197.048,22	2.823.434,13
HP	72.494,93	60.437,52	1.668.892,82	800.749,59	416.283,11	3.018.857,98
HL	2.566,30	11.785,67	1.266.122,80	382.467,60	109.383,93	1.772.326,30
KSA	1.767,01	31.211,76	137.432,09	200.894,32	65.687,88	436.993,06
TOTAL	79.900,55	113.015,64	5.199.410,65	1.962.255,39	817.736,85	8.172.319,08

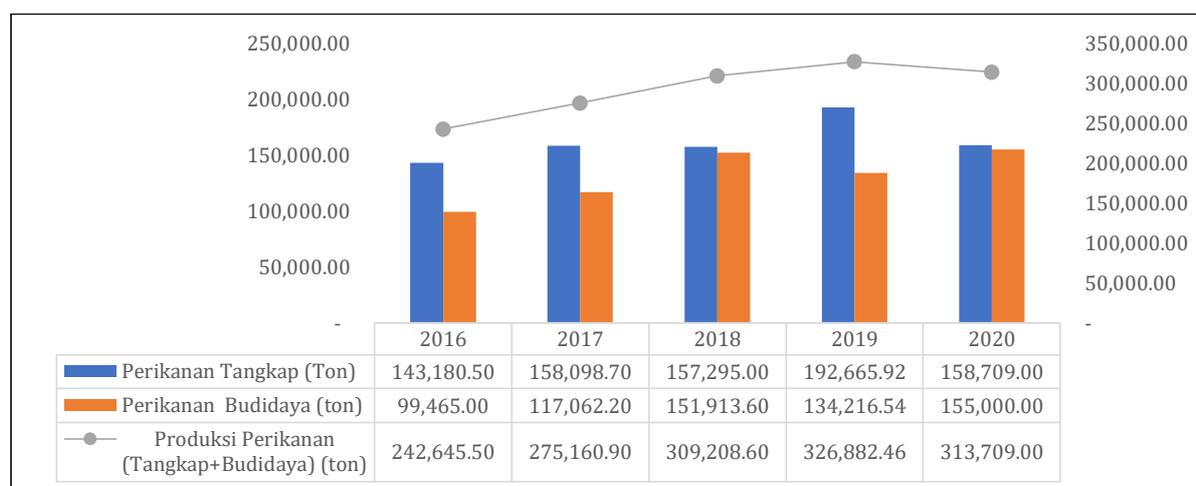
Sumber : BPN KANWIL KALTIM, 2021

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2020, perkembangan perhutanan sosial mencapai 74 unit dengan luas sebesar 189.974,75 hektar.

#### 4. Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Dalam

pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, dan sistem Pemasaran.



Gambar II- 48 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: DKP Provinsi Kalimantan Timur, 2020 (diolah)

## 5. Peternakan

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 71,28 juta ekor, ayam kampung 4.59 juta ekor dan ayam ras petelur 896,38 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 123,07 ribu ekor dan babi sebanyak 85,02 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II- 69 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (ekor)

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sapi Potong	118.712	119.123	117.504	119.485	123.069
2	Sapi Perah	97	107	110	91	92
3	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929
4	Domba	320	281	439	590	596
5	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	85.022
6	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.255
7	Kuda	101	91	97	102	103
8	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	9.302

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020*)
9	Ayam Kampung	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.591.035
10	Ayam Ras Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	71.280.894
11	Ayam Ras Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	896.378
12	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	267.418

\*) Data Sementara; Sumber : DPKH Provinsi KALTIM, 2021

Program pengembangan populasi sapi potong yang efisien dan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah dan menjadi lumbung ternak sapi nasional. Untuk mendukung dan mencapai upaya tersebut diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan peternakan berbasis *Mini Ranch*. *Mini Ranch* adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah. Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Dengan program *Mini Ranch* ini diharapkan dapat membuat produksi dari sektor peternakan menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membuat lahan-lahan bekas tambang menjadi lebih bermanfaat lagi. Adapun daftar *Mini Ranch* yang tersebar di Kabupaten tersaji pada tabel berikut :

Tabel II- 70 Jumlah Miniranch di Provinsi Kalimantan Timur

No	KAB /KOTA	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (m)	Luas Kandang (m <sup>2</sup> )	Tahun
				Betina	Jantan			
1	KUBAR	KT. Benteng Perjuangan	Cornelius Untaq	57	36	4800	180	2019
2	KUTIM	KT. Sumber Mulyo	Sudaryanto	50	10	800	30	2019
3	KUTIM	KT. Sumber Rejeki	Rustamaji	24	14	800	30	2019
4	PPU	KT. Sumber Rejeki	Sakka	49	5	4800	180	2019
5	Paser	KT. Gawi Bersama	Jumarang	130	130	5200	180	2019
6	Paser	KT. Meta Bolum	Abdul Syukur	29	11	800	67,5	2020
7	Paser	KT. Petani Pinang Tunggal	Arpansyah	87	26	800	67,5	2020

No	KAB /KOTA	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (m)	Luas Kandang (m <sup>2</sup> )	Tahun
				Betina	Jantan			
8	Berau	KT. Rawa Makmur	Jumadi	48	12	800	67,5	2020
9	KUBAR	KT. Bumi Prana Jaya	Rusmadi Yatin	8	2	800	67,5	2020
10	KUBAR	KT. Sapi Jaya	Yonatan	8	2	800	67,5	2020
11	KUKAR	KT. Rukun Abadi	H. Sayuti	45	15	800	67,5	2020
12	KUKAR	KT. Pelita	M. Saleng	100	300	800	67,5	2020
13	KUKAR	KT. Karya Mulya	Abdiansyah	-	-	800	67,5	2020
14	MAHULU	KT. Danum Paroy	Rudin	6	2	400	33	2020
15	MAHULU	KT. Harapan Masa	Rahmani	5	4	400	33	2020
16	PPU	KT. Sinar Abadi	Suriansyah	35	7	800	67,5	2020
17	PPU	KT. Semoga Jaya	M. Rifai	17	7	800	67,5	2020

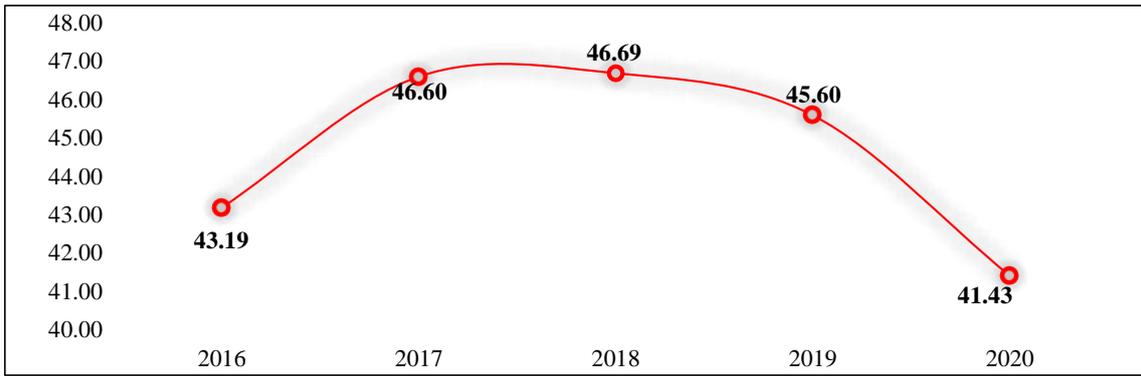
Sumber : DPKH Provinsi KALTIM, 2021

### 2.3.2.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan *tren* yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Dari total 1,2 juta KK di Kalimantan Timur, 82,6 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 7,64 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non PLN. Dan sampai dengan tahun 2020 masih terdapat 119.890 KK yang belum berlistrik. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 90,21 persen.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusinya turun menjadi sebesar 41,43 persen dari tahun sebelumnya sebesar 45,60 persen. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat maupun industri akibat pandemi COVID-19 yang juga diiringi oleh lemahnya permintaan batu bara dari negara tujuan utama menjadi penyebab penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Meski demikian,

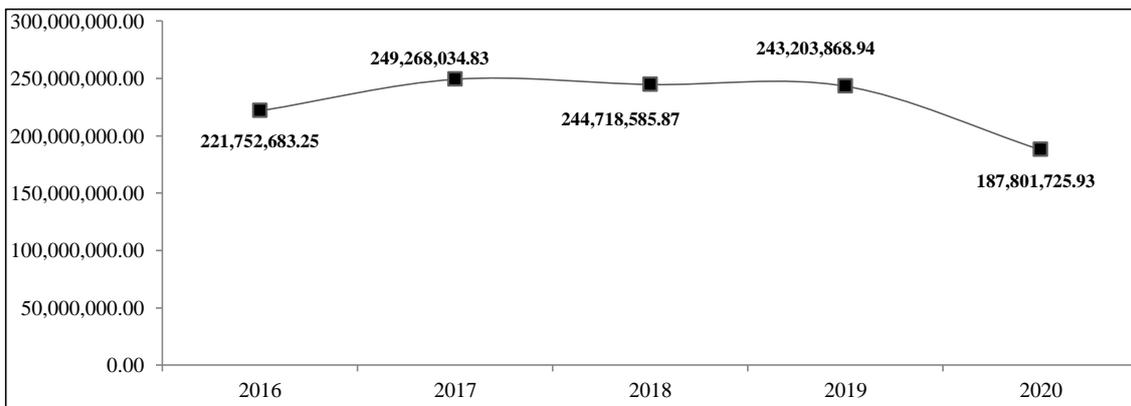
sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi pangsa utama perekonomian di Kalimantan Timur.



Gambar II- 49 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Produksi batubara tahun 2020 adalah sebesar 187 juta ton, yang menunjukkan penurunan sebesar 22,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang menurun dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat pandemi COVID-19 serta penurunan yang signifikan pada harga batubara global.



Gambar II- 50 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Ton)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

Tabel II- 71 Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2016	221.752.683,25	34.323,80	568.588,50
2017	249,268,034.83	29.754,98	449.579,20
2018	244,718,585.87	23.717,95	296.832,49
2019	243,203,868.94	20.829,80	240.828,16
2020	187,801,725.93	14.381,23	156.294,54

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II- 72 Proyeksi Kebutuhan Energi Primer di Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2050 (dalam Ton Oil Equivalen/TOE)

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batu Bara	460,88	1.402,52	1.444,53	1.539,08	1.864,43	2.348,97	3.004,41	3.894,30
Gas	2.142,87	2.465,71	2.976,76	3.718,99	4.692,87	5.872,24	7.330,13	9.314,48
Minyak	6.045,84	5.744,85	5.918,18	6.462,05	7.078,01	7.799,19	8.564,01	9.335,21
Energi Baru Terbarukan	279,82	708,97	1.462,09	2.526,48	3.825,13	5.229,93	6.918,82	9.082,65
Jumlah*	8.929,41	10.322,05	11.801,56	14.246,60	17.460,44	21.250,33	25.817,37	31.626,64

Sumber : RUED Provinsi Kalimantan Timur

Tabel II- 73 Proyeksi Persentase Kebutuhan Energi Primer di Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2050

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batu Bara	5,16%	13,59%	12,24%	10,80%	10,68%	11,05%	11,64%	12,31%
Gas	24,00%	23,89%	25,22%	26,10%	26,88%	27,63%	28,39%	29,45%
Minyak	67,71%	55,66%	50,15%	45,36%	40,54%	36,70%	33,17%	29,52%
Energi Baru Terbarukan	3,13%	6,87%	12,39%	17,73%	21,91%	24,61%	26,80%	28,72%
Jumlah*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RUED Provinsi Kalimantan Timur

Pada tabel tersebut dapat dilihat energi primer minyak adalah yang paling besar pada tahun 2015 yaitu mencapai 67,71%, sedangkan energi baru terbarukan hanya sekitar 3,13% saja. Namun demikian pada tahun 2025 pemanfaatan energi terbarukan diperkirakan sudah mencapai 12,39%.

Tabel II- 74 Proyeksi Permintaan/Kebutuhan Energi Final di Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2050 (dalam Ton Oil Equivalen/TOE)

Energi Final	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Listrik	364,96	596,83	826,25	1.166,21	1.627,37	2.191,31	2.908,66	3.913,70
Gas Bumi	1.840,68	2.049,40	2.410,92	2.971,93	3.763,46	4.718,68	5.917,08	7.596,14
Premium	529,09	580,18	579,25	504,67	406,48	290,37	156,18	-
Avtur	102,63	114,08	135,16	136,33	131,63	115,33	76,39	-
Minyak Tanah	4,62	3,40	1,49	1,70	1,84	1,66	1,11	-
Minyak Solar	3.773,13	3.358,30	3.059,13	2.872,25	2.557,66	2.037,90	1.217,67	-
Minyak Bakar	10,56	8,76	4,41	4,95	5,13	4,34	2,65	-
LPG	151,30	175,74	175,25	162,26	144,30	122,94	98,26	71,16
Batu Bara	160,59	162,76	174,47	267,19	400,54	543,50	711,28	947,73
Briket	-	0,11	0,31	0,50	0,78	1,10	1,51	2,11
Biogas	0,05	0,53	0,98	1,05	1,10	1,14	1,16	1,15
Biomasa Tradisional	145,15	76,36	120,51	119,34	111,27	96,95	75,79	46,46
Avgas	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	-
BioSolar	284,56	778,84	1.344,18	2.247,42	3.439,01	4.998,75	7.002,90	9.590,26
Bio Premium		59,67	143,46	248,96	367,91	503,64	661,72	851,00
Minyak Diesel	0,75	0,81	0,90	1,09	1,22	1,11	0,74	-
Biomasa Komersial	105,28	103,33	93,45	131,73	181,03	224,70	267,27	320,28
Bioavtur	-	2,12	7,11	43,06	99,32	188,22	325,74	539,20
Syngas	-	0,13	0,39	0,72	1,27	2,02	3,09	4,79
Jumlah*	7.473,42	8.071,41	9.077,66	10.881,40	13.241,36	16.043,70	19.429,22	23.883,98

Sumber : RUED Provinsi Kalimantan Timur

Dengan mengacu pada sasaran KEN dan RUEN serta target energi daerah, dilakukan pemodelan dengan hasil permintaan energi di Kalimantan Timur pada masa yang akan datang. Pada tahun 2015 energi final yang paling banyak dibutuhkan adalah bahan bakar minyak solar, kemudian gas bumi. Minyak solar sebagian besar dibutuhkan untuk bahan bakar alat angkut dan alat bongkar kegiatan pertambangan mineral batuan dan migas. Namun seiring dengan program Pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan dalam bahan bakar minyak dengan tahapan pencampuran sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain, maka penyediaan minyak solar pada masa yang akan datang akan semakin berkurang bertahap dan mulai digantikan dengan biosolar.

Penggunaan gas bumi di Kalimantan Timur sebagian besar dipakai untuk produksi pupuk dan sebagian lainnya untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan gas kota. Berdasarkan volume yang dibutuhkan, gas bumi mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 1.840.680 Ton Oil Equivalen dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 2.410.920 Ton Oil Equivalen dan pada tahun 2050 menjadi 7.596.140 Ton Oil Equivalen.

Tabel II- 75 Kebutuhan Energi di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Sektor Pengguna s/d Tahun 2050 (dalam Ton Oil Equivalen/TOE)

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Industri	627,85	827,50	1.182,94	1.852,25	2.845,60	3.967,06	5.348,95	7.366,06
Transportasi	986,37	1.141,66	1.311,51	1.485,74	1.701,57	1.987,68	2.364,71	2.873,04
Rumah Tangga	483,45	608,96	764,98	889,27	1.010,49	1.133,55	1.258,41	1.381,70
Komersial	100,88	119,21	155,24	203,36	273,40	377,18	525,61	743,77
Sektor Lainnya	3.647,53	3.656,85	3.797,13	4.400,38	5.138,89	6.041,72	7.089,83	8.320,49
Non Energi	1.627,32	1.717,22	1.865,87	2.050,41	2.271,41	2.536,52	2.841,69	3.198,92
Jumlah*	7.473,40	8.071,40	9.077,67	10.881,41	13.241,36	16.043,71	19.429,20	23.883,98

Sumber : RUED Provinsi Kalimantan Timur

Tabel II- 76 Persentase Kebutuhan Energi di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Sektor Pengguna s/d Tahun 2050

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Industri	8,40%	10,25%	13,03%	17,02%	21,49%	24,73%	27,53%	30,84%
Transportasi	13,20%	14,41%	14,45%	13,65%	12,85%	12,39%	12,17%	12,03%
Rumah Tangga	6,47%	7,54%	8,43%	8,17%	7,63%	7,07%	6,48%	5,79%
Komersial	1,35%	1,48%	1,71%	1,87%	2,06%	2,35%	2,71%	3,11%
Sektor Lainnya	48,81%	45,31%	41,83%	40,44%	38,81%	37,66%	36,49%	34,84%
Non Energi	21,77%	21,28%	20,55%	18,84%	17,15%	15,81%	14,63%	13,39%
Jumlah*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RUED Provinsi Kalimantan Timur

Pada tabel diatas, sektor pengguna energi yang mengalami kenaikan kebutuhan adalah sektor industri dan sektor komersil. Sektor industri di Kalimantan Timur pada tahun 2015 menggunakan energi 8,4% dari seluruh energi yang terpakai di Kalimantan Timur. Penggunaan energi pada sektor industri ini menunjukkan kenaikan yang pesat. Pada tahun 2025 sebesar 13,03% seluruh energi sekunder atau energi final yang digunakan di Kalimantan Timur akan digunakan oleh sektor industri. Kemudian pada tahun 2050 diperkirakan penggunaan energi pada sektor industri ini meningkat lagi hingga mencapai 30,84% dari seluruh energi yang terpakai di Kalimantan Timur.

#### 2.3.2.4. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II- 77 Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

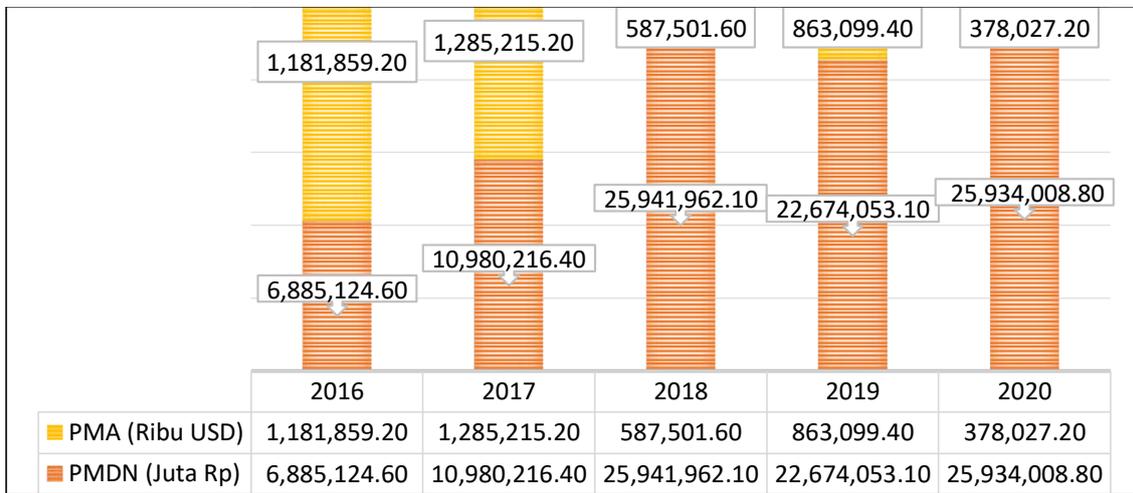
Tahun	PMDN	PMA	Total
2016	243	471	714
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2021

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 4.702 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 3.130 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 1.707 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 390 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik.

#### 2.3.2.5. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 22,67 triliun menjadi sebesar Rp 25,93 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami penurunan menjadi 378,03 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 senilai Rp 31,38 triliun.



Gambar II- 51 Nilai PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2021

2.3.2.6. Ketenagakerjaan

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Terlihat baik proyek penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing mengalami penurunan rasio daya serap tenaga kerja. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mampu memberikan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 78 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	PMDN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	29.023	9.236	12.935	20.837	19.952
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	243	357	520	2.227	3.924
3	Rasio daya serap tenaga kerja	119,44	25,87	24,88	9,36	5,08
No	Uraian	PMA				
		2016	2017	2018	2019	2020

No	Uraian	PMDN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	22.204	15.508	12.500	15.166	5.868
2	Jumlah proyek seluruh PMA	471	566	513	903	778
3	Rasio daya serap tenaga kerja	47,14	27,40	24,37	16,80	7,54

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan sektor usahanya, tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling banyak diserap oleh sektor perdagangan sebesar 22,07 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 20,48 persen. Adapun lapangan usaha yang menciptakan nilai tambah terbesar untuk PDRB Kalimantan Timur yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan hanya mampu menyerap 7,27 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,23 persen.

Tabel II- 79 Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (sekolah)	-	-	72	80	100
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	-	-	30	45	55
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang	-	-	90	90	90

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	telah memenuhi standar kompetensi (%)					
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	-	-	791	9.125	28.235
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	-	-	635	4.207	2.196
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	-	-	0	85	85
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	-	-	0	66,26	65
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	-	-	76	80	85
2.2	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	-	-	6	23,50	23,50
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.322	8.622	7.922	7.922	7.922
3.3	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaian (%)	51,70	51,50	54.30	54,59	62,64
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41.722	36.722	51.722	73.481	72.881
3.5	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	-	-	63,19	66,46	75,34
<b>4</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat</b>					
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	-	-	67,18	61,38	50
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	50	55	60	60	61,33
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam	-	-	85	75	80

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penanganan Bencana (%)					
5	Sosial					
5.1	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	-	-	2.762	2.961	2.498
B	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-	-	50	29,41	-0,27
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	-	-	80	76	75
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,93	56,64	57,53	65,65	65,54
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	-	-	70	70	82
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	-	-	34	37	62
2.4	Rasio KDRT (%)	7,01	27,11	0,066	18,16	27,20
2.5	Kampung KB	160	175	154	160	175
3	Lingkungan Hidup					
3.1	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	-	-	5,60	25,18	50,72
3.2	Indeks Kualitas Air Sungai	-	-	-	77,09	53,70
3.3	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	89,42	89,06
3.4	Indeks Kualitas Air Laut	-	-	-	-	83,51
3.5	Indeks Kualitas Lahan	-	-	-	72,12	79,76
3.6	Indeks Risiko Bencana	-	-	155,49	154,49	153,49
3.7	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	600	640	670	592	679
3.8	Indeks Pencemaran Lingkungan	3,027 (Cemar Ringan)	2,700 (Cemar Ringan)	9,304 (Cemar Sedang)	5,299 (Cemar Sedang)	6,509 (Cemar Sedang)

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ringan )				
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
4.1	Indeks Desa Membangun	-	-	-	0,6238	0,6752
4.2	Jumlah desa tertinggal (desa)	-	-	381	285	128
4.3	Meningkatkan jumlah Bumdesa aktif (Bumdes)	207	275	320	335	360
4.4	Desa berkembang (Desa)	-	-	289	15	329
4.5	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	-	-	15	25
4.6	Jumlah kampung Iklim	-	-	-	-	30
5	Perhubungan					
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	9.043. 826	9.452.9 32	10.392. 536	10.721. 656	3.570.7 50
5.2	Jumlah barang yang diangkut (ton)	2.322. 471.39 1	2.399.8 01.887	325.051 .663	341.529 .897	294.478 .397
5.3	Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	-	-	10 Dermag a SDP – 12 Pelabuh an Laut (83%)	10 Dermag a SDP – 12 Pelabuh an Laut (83%)	10 Dermag a SDP – 12 Pelabuh an Laut (84%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	705	1.193	846	570	448
6	Komunikasi dan Informatika					
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	2,49	3,04	3,14
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	-	-	-	183	-
8	Kepemudaan dan Olahraga					
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23	57,82	56,33	56,74	57,23
9	Kebudayaan					
9.1	Persentase cagar budaya yang	-	-	-	-	-

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dilestarikan dan dikelola (%)					
9.2	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	-	-	-	-	-
10	Perpustakaan					
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	-	-	137.841	469.997	199.772
C	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan					
1	Pariwisata					
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	-	-	2	3	3
2	Pertanian					
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	305.337	356.680	262.773	253.820	262.430
2.2	Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina	11.499.594	13.250.778	13.478.263	18.343.852	13.450.350
2.3	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	-	-	-	5	12
2.4	Angka Kelahiran Sapi (%)	-	-	19	17,49	20,10
2.5	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta ton CO2eq)	-	-	-	-	2.916
2.6	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	-	-	1.357.946	1.389.845	1.389.078
2.7	Produksi komoditas perkebunan (ton)	-	-	13.478.443	18.416.921	16.809.560
2.8	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	-	-	-	-	18
3	Kehutanan					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	-	118.000	31.368	32.000
3.2	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	-	-	5.511.800,73	5.200.737,85	4.828.401,15
3.3	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	-	-	584,81	457,015	1.246,69
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	-	-	3,13	4,40	4,80
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	817.343	905.821	945.607	1.032.475	1.105.227
5	Perdagangan					
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	-	-	1,45	2,04	2,23
6	Perindustrian					
6.1	Persentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	5,46	3,47	0,52	0,19	-2,77
7	Kelautan dan Perikanan					
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	107.027	173.622	151.918	148.197	155.000
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	143.287	159.345	149.039	176.049	158.709
D	Fokus : Urusan Penunjang					
1	Perencanaan					
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	-	-	82,30	85,00	87,00
2	Keuangan					
2.1	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	-	-	-	11.775	10.132
2.2	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	-	-	650	824	793
3	Pengawasan					
3.1	Hasil Penilaian Integritas	-	-	650	824	793

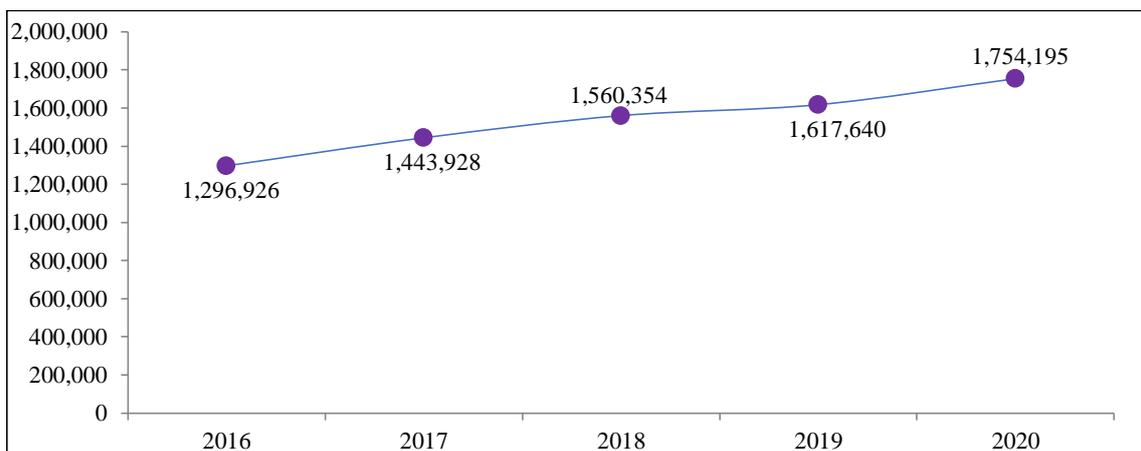
No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Umum/Sekretariat					
4.1	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	71	71	71,05	73,68	74,00
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) (%)	-	-	86	84	87
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) (%)	-	-	49	13,16	61

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.754.195,- per bulan.



Gambar II- 52 Pengeluaran Rata-rata per Kapitas Sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

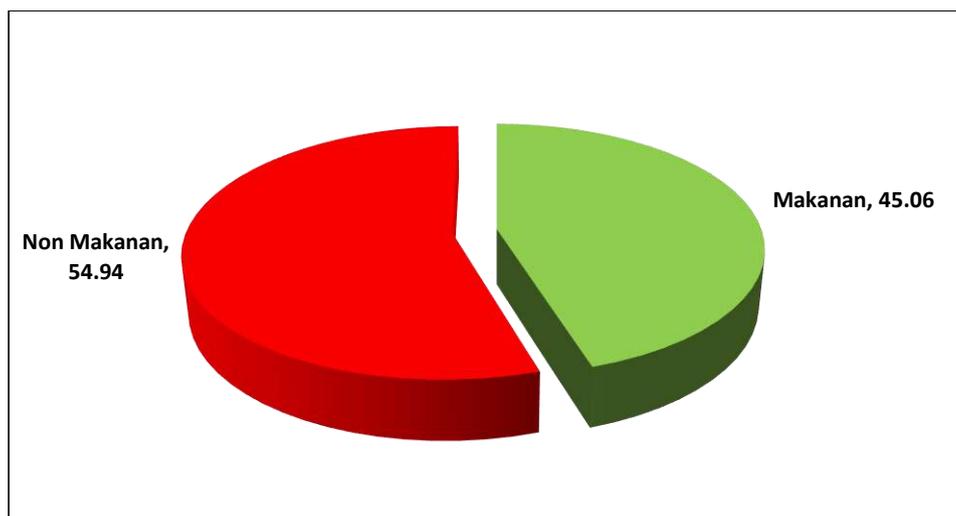
### 2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel II- 80 Konsumsi Rumah Tangga non Makanan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	709.006	780.443	857.449	893.217	963.725
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.296.926	1.443.928	1.560.354	1.617.640	1.754.195
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,67	54,05	54,95	55,22	54,94

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021



Gambar II- 53 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Sebulan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

### 2.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani. Berdasarkan

hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II- 81 Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	120,03	121,96	123,77	107,91	116,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	122,31	125,54	128,75	102,41	104,76
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,14	97,15	96,14	105,38	111,65

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Peningkatan NTP tahun 2020 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali subsektor tanaman pangan yang mengalami penurunan sebesar 0,97 persen yakni dari NTP 102,16 di tahun 2019 menjadi 101,18 di tahun 2020. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan drastis sebesar 11,00 persen di tahun 2020 terhadap NTP pada tahun 2019. Selanjutnya, ada tiga subsektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Tabel II- 82 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur menurut Sub Sektor Tahun 2019-2020

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2019	2020	
NTP Gabungan		105,38	111,65	5,62
1.	Tanaman Pangan	102,16	101,18	-0,97
2.	Hortikultura	104,59	105,27	0,65
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	110,45	124,10	11,00
4.	Peternakan	100,56	101,70	1,12
5.	Perikanan	100,90	102,69	1,74

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 101,65. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi sebesar 111,65, disusul Kalimantan Barat sebesar 108,46.

Tabel II- 83 Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional menurut Sub Sektor Tahun 2020

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	111,65	108,46	103,55	101,85	102,75	101,65
1.	Tanaman Pangan	101,18	96,91	99,08	101,85	100,09	101,28
2.	Hortikultura	105,27	99,04	98,88	97,73	95,43	101,28
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	124,10	114,67	106,18	100,64	114,38	104,32
4.	Peternakan	101,70	97,55	103,31	99,98	102,84	100,22
5.	Perikanan	102,69	102,23	101,91	99,86	102,61	100,35

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 2.4.2.1. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Selain memperhatikan luas peruntukan kawasan budi daya di KBNK, penentuan luas wilayah produktif perlu memperhatikan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup utamanya penyediaan air dan pangan yang dihitung oleh Pemerintah. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel II-81.

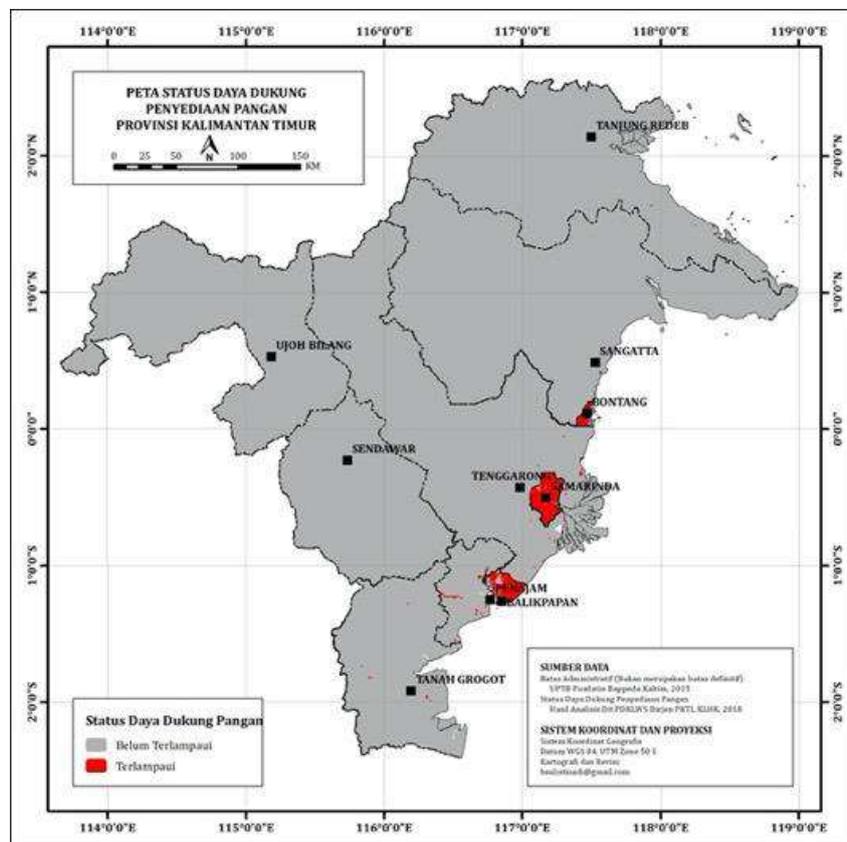
Tabel II- 80 Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	KAB/KOTA	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Paser	301.226	445.964	67,54
2.	KUBAR + MAHULU	515.012	862.681	59,70
3.	KUKAR	420.324	936.710	44,87
4.	KUTIM	472.421	942.679	50,11
5.	Berau	370.716	536.320	62,12
6.	PPU	113.402	145.011	78,20
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
9.	Bontang	5.643	10.002	56,42

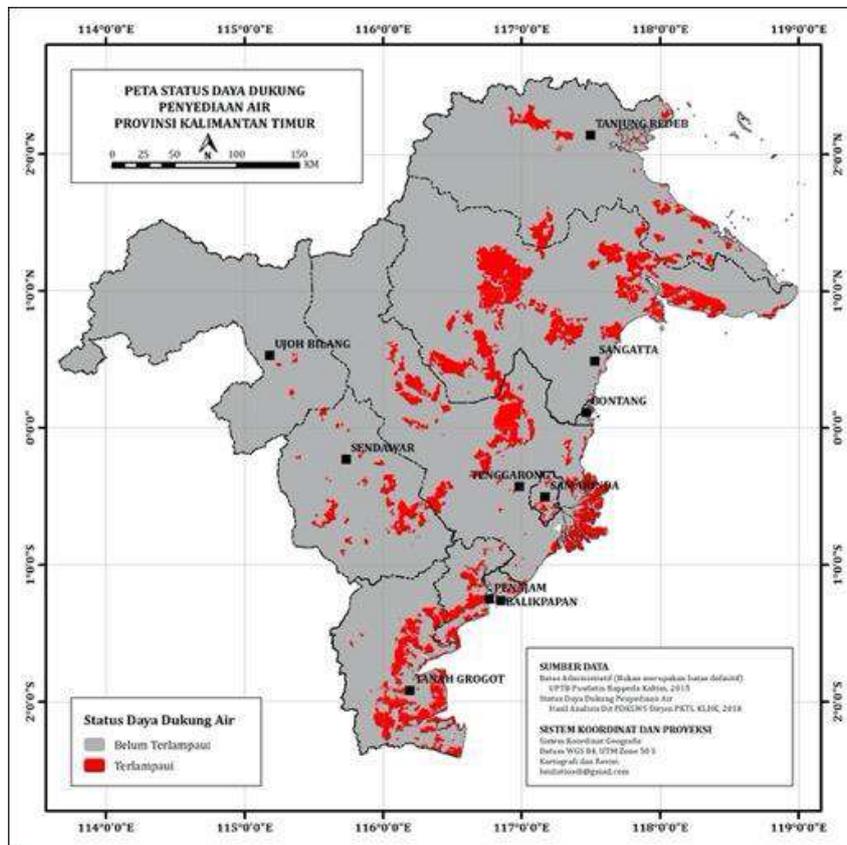
No.	KAB/KOTA	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
	Jumlah	2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

KLHS menganalisis status daya dukung penyedia pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, seperti pada Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang (Gambar II-53). Sementara dari segi penyediaan air, terdapat cukup banyak wilayah yang telah melampaui daya dukungnya seperti Delta Mahakam, sebagai besar wilayah pesisir di Penajam Paser Utara dan Paser dan sebagian pesisir di Kabupaten Kutai Timur (Gambar II-54).



Gambar II- 54 Peta Status Daya Dukung Penyediaan pangan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar II- 55 Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Timur

Dengan kondisi sebagaimana disimpulkan dari studi awal status daya dukung daya tampung provinsi Kalimantan Timur ini, perlu perhatian yang lebih untuk wilayah-wilayah yang telah dideklarasikan sebagai wilayah yang defisit air dan pangan.

Tabel II- 81 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan					Grand Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Paser		114.268,21	772.095,57	188.300,99	34.998,48	1.109.663,25
KUBAR		76.033,98	950.204,25	97.908,77	23.593,85	1.147.740,84
KUKAR	2.547,63	201.477,47	1.848.883,84	646.827,99	154.943,27	2.854.680,20
KUTIM	2.178,89	306.415,21	2.026.118,48	731.635,29	20.930,07	3.087.277,94
Berau		250.383,11	1.196.875,80	703.760,93	21.653,29	2.172.673,13
PPU	142,71	2.1751,48	203.267,98	56.787,90	12.095,33	294.045,40
MAHULU		30.291,83	900.468,23	1.014.174,88		1.944.934,94
Balikpapan		11.269,34	17.865,78	20.387,79	1.584,66	51.107,57
Samarinda		23.008,61	19.436,68	13.734,40	1.516,88	57.696,57
Bontang		3.340,45	1.313,29	11.033,70	557,58	16.245,02
Grand Total	4.869,23	1.038.239,68	7936.529,90	3.484.552,64	271.873,42	12.736.064,87

#### 2.4.2.2. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 624,48 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 408,38 km, kondisi sedang mencapai 216,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 101,48 km, dan kondisi rusak berat mencapai 169,13 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 1.490,5 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km, kondisi sedang 1.144,83 Km, kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
2. Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
3. Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
5. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal.
6. Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;

7. Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor.

Tabel II- 82 Panjang Jalan menurut Status dan Jenis Permukiman (Km)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,90	1.490,50	0,00	4,31	216,10
2	Provinsi	895,09	529,65	132,49	28,42	204,53

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II- 83 Panjang Jalan menurut Status dan Kondisi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	251,16	1.144,83	249,72	65,19
2	Provinsi	408,38	216,10	101,48	169,13
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.514,24	3.626,06	2.387,09	2.589,81

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datarah Dawai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (reliable) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional, dan tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel II- 84 Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Kalimantan Timur berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	KAB/KOTA	No	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber : DISHUB Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang serta 7 Terminal Type B yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 72.881 unit, mengalami kenaikan sebanyak 10.195 unit dari tahun sebelumnya. Masih tingginya ketidaklayakan rumah tersebut dikarenakan rendahnya segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Selain itu, penambahan jumlah RTLH disebabkan karena di updating data RTLH serta penambahan nilai susut bangunan di tahun yang bersangkutan.

Tabel II- 85 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	KUBAR	0	DISPERKIM Kab. KUBAR 2019
3	KUKAR	22.780	e-RTLH Kab. KUKAR Th. 2020
4	KUTIM	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. KUTIM 2020
5	Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	PPU	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	MAHULU	1.603	FORM 1B Kab. MAHULU 2020
8	Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		72.881	

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021*

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.

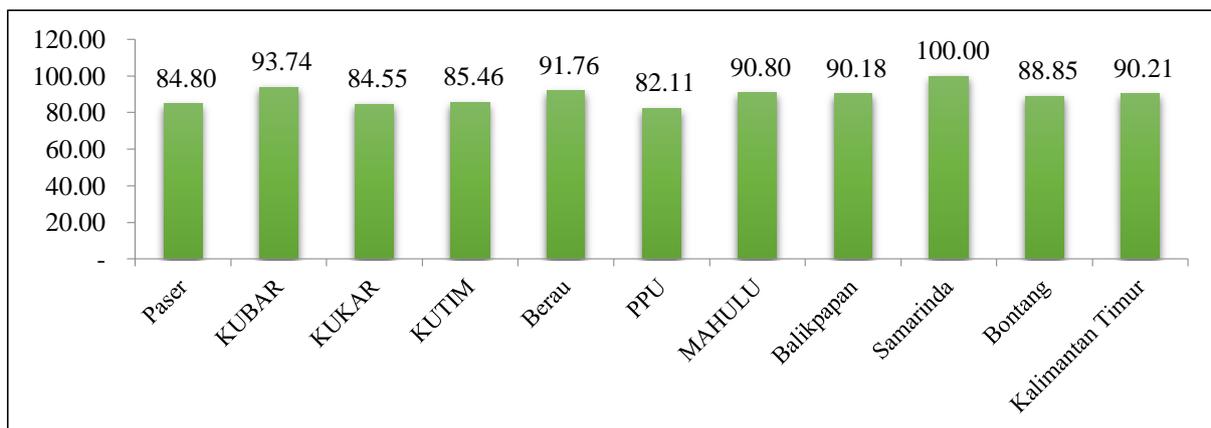
Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota 2015-2020, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah seluas 1.371,21 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II- 90 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
2	KUBAR	488,59	No. 413.2/K.719/2018
3	KUKAR	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	120,63	No. 050/K.661/2015
5	Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	39,6	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1.371,21	

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Dengan adanya penanganan kawasan kumuh seluas 83,39 Ha yang dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah, sehingga pada tahun 2020 luasan Kawasan kumuh Kalimantan Timur berkurang menjadi 1.287,82 Ha dari baseline data SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2015-2020.



Gambar II- 56 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 814 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 224 Desa. Sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi 90,21 persen pada tahun 2020.

Tabel II- 91 Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.156.967
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.801.719.937	1.748.943.749	2.213.445.295	2.213.445.295	

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMTARA

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2020, sawah yang mendapat layanan irigasi mencapai 61,37 persen atau sekitar 24.231,80 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel II- 92 Luas Lahan Pertanian yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
1	Paser	545,79	5.999,92	27,33	-	2,99	6.576,03
2	KUBAR	935,89	1.267,92	-	2,88	-	2.206,69
3	KUKAR	158,60	11.247,27	-	442,73	3.456,56	15.305,16
4	KUTIM	411,21	1.020,42	-	975,11	378,07	2.784,81

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
5	Berau	33,51	940,90	-	447,35	507,32	1.929,08
6	PPU	16,09	1.042,03	-	164,54	8.011,21	9.233,87
7	MAHULU	-	79,42	-	-	-	79,42
8	Balikpapan	-	34,71	-	-	-	34,71
9	Samarinda	0,03	458,57	-	306,08	558,20	1.322,88
10	Bontang	-	12,18	-	-	-	12,18
TOTAL		2.101,12	22.103,35	27,33	2.338,69	12.914,35	39.484,84

Sumber : BPN KANWIL KALTIM, 2021

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batu bara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, pengendali banjir dan sumber air minum. Selain permasalahan jaringan atau distribusi, masalah ketersediaan layanan air minum juga diakibatkan oleh kurangnya pasokan air baku, berikut tabel defisit kebutuhan air baku.

Tabel II- 93 Defisit Kebutuhan Air Baku

No	KAB/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m <sup>3</sup> /Tahun)	
		2018	2023
1	Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	KUBAR	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
3	KUKAR	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	KUTIM	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
5	Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
6	PPU	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	MAHULU	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
8	Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel II- 864 Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
2	KUBAR	Sungai Mahakam	500
3	KUKAR	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
4	KUTIM	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
5	Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	PPU	Sungai Tunan	20
7	MAHULU	Sungai Mahakam	500
8	Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
9	Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
Palaran	30		
10	Bontang	Bontang	120
		Guntung	20

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali

luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal. Tabel II-93 dan Tabel II-94 berikut menyajikan analisis jasa lingkungan pencegahan banjir beserta tren perubahan jasa lingkungan pencegahan banjir di Kab/Kota di Kalimantan Timur.

Tabel II- 87 Jasa Lingkungan Pencegahan Banjir di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pencegahan Banjir					Grand Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Paser	26.46,02	35.770,96	111.065,48	539.057,52	421.123,27	1.109.663,25
KUBAR	1.525,82	36.192,42	102.726,61	616.927,26	390.368,74	1.147.740,84
KUKAR	4.673,74	144.990,47	280.450,16	1.470.686,33	953.879,51	2.854.680,20
KUTIM	567,52	81.917,89	82.309,96	1.603.141,70	1.319.340,87	3.087.277,94
Berau	1.469,23	41.315,13	29.941,43	539.301,52	1.560.645,82	2.172.673,13
PPU	535,30	32.236,33	20.513,88	188.366,28	52.393,61	294.045,40
MAHULU		6.111,45	4.174,31	179.605,06	1.755.044,13	1.944.934,94
Balikpapan		11.175,59	730,96	28.669,65	1.0531,38	51.107,57
Samarinda	1.986,52	21.022,09	1.504,34	30.937,15	2.246,47	57.696,57
Bontang		3.323,16	569,28	10.733,03	1.619,55	16.245,02
Grand Total	13.404,15	414.055,49	633.986,41	5.207.425,48	6.467.193,34	12.736.064,87

Tabel II- 88 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Banjir di Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota	Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Banjir			Grand Total (Ha)
	Naik	Tetap	Turun	
Paser	33.943,89	97.1634,33	103.892,08	1.109.470,30
KUBAR	63.037,95	946.461,89	138.241,00	1.147.740,84
KUKAR	114.679,96	2.353.733,77	386.228,06	2.854.641,78
KUTIM	118.897,99	2.704.808,85	26.3571,10	3.087.277,94
Berau	33.387,50	1.955.323,74	18.3961,89	2.172.673,13
PPU	12.986,91	232.966,32	48.092,17	294.045,40
MAHULU	3.142,89	1.870.540,42	71.251,63	1.944.934,94
Balikpapan	1.294,59	46.784,68	3.028,30	51.107,57
Samarinda	985,85	45.545,45	11.165,26	57.696,57
Bontang	492,48	15.327,06	425,48	16.245,02
Grand Total	382.850,01	11.143.126,51	1.209.856,98	12.735.833,50

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan. Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II- 97 Penduduk Terlayani Air Minum Layak Tahun 2017-2020

No	KAB/KOTA	Penduduk Yang Terlayani Air Bersih (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Paser	38,29	45,45	37,16	48,56
2	KUBAR	34,35	22,01	34,24	31,04
3	KUKAR	63,39	45,07	58,68	51,54
4	KUTIM	33,13	42,76	15,43	40,11
5	Berau	44,70	45,46	81,59	56,87
6	PPU	15,87	16,98	34,79	32,14
7	MAHULU	-	-	-	24,51
8	Balikpapan	76,98	81,72	79,05	79,79
9	Samarinda	95,46	83,95	99,29	87,28
10	Bontang	87,05	89,06	51,10	99,96
Rata-Rata		54,3	52,59	54,59	64,53

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

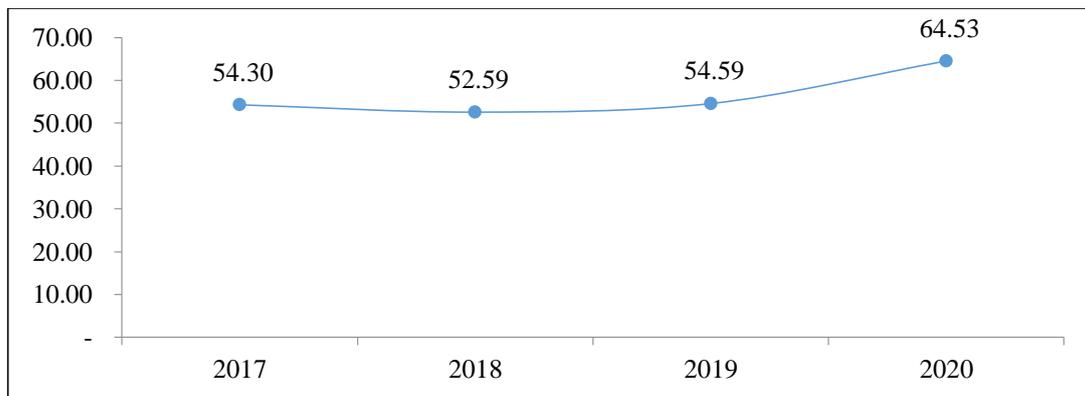
Dalam sektor air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih/air minum. Saat ini, terdapat 9 perusahaan daerah air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas desain produksi total terpasang pada tahun 2020 sebesar 8.395 l/dt dengan kapasitas sumber air yang diolah saat ini hanya mampu memproduksi air sebesar 87,51 persen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur saat ini.

Tabel II- 98 Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial (ltr/detik)	7.185	7.354	7.583	8.018	8.395
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.445	6.743	6.919	7.201	7.347
4.	Efektivitas Produksi (%)	89,70	91,69	91,24	89,81	87,51

Sumber : Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2021

Efektifitas produksi Instalasi Pengolahan Air yang masih <100% menyebabkan timbulnya idle capacity yang seringkali menjadi tantangan untuk penyelenggara air minum dalam pemanfaatannya. Idle capacity yang besar bila tidak dimanfaatkan segera, akan menyebabkan perluasan layanan SPAM menjadi terhambat. Belum lagi permasalahan tingkat kebocoran/NRW di SPAM yang setiap tahun meningkat, tanpa adanya upaya dalam penanganannya akan menyebabkan penyelenggaraan SPAM menjadi tidak efektif dan efisien. Semua itu kemudian berdampak pada hambatan dalam pemenuhan layanan air minum.



Gambar II- 57 Rata-rata Penduduk Terlayani Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

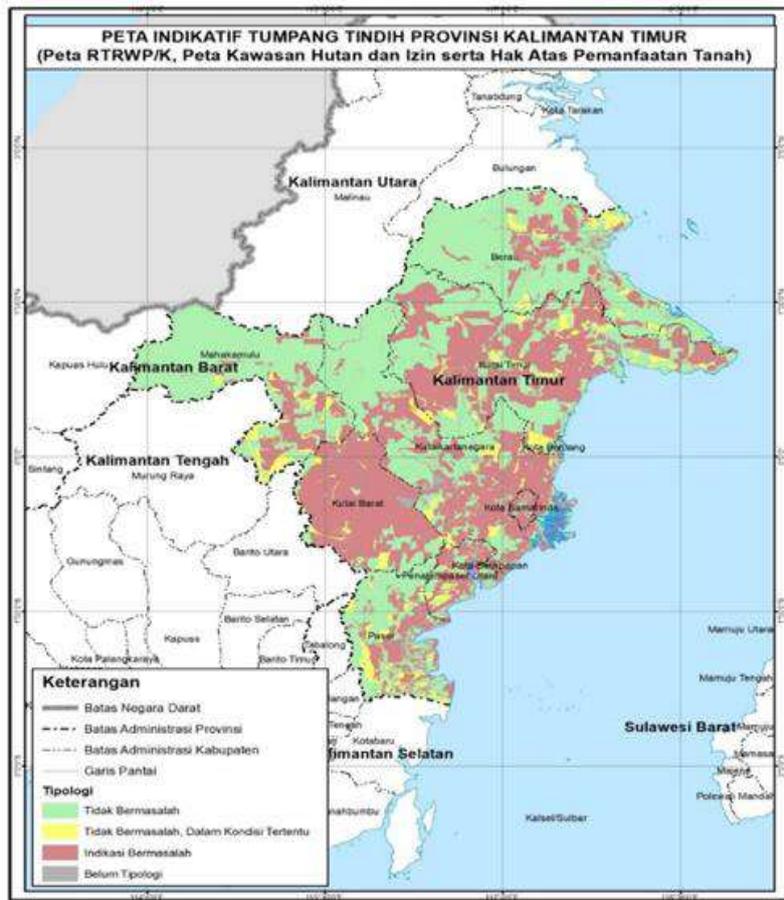
Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari *trend update* capaian pertahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Saat ini RTRWP Kalimantan Timur akan melakukan proses revisi yang sejalan dengan masa 5 tahun pertama RTRWP. Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN berupa penyusunan Materi Teknis serta mengikuti tahapan Peninjauan Kembali

Revisi Perda, dan pada tahun 2021 dilanjutkan proses Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Revisi RTRWP Kalimantan Timur memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi baik pada skala nasional maupun regional, penyesuaian terhadap turunan Undang-Undang Cipta Kerja, arah pengembangan pembangunan setelah ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN) baru, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang semenjak RTRW disahkan sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu memperhatikan indikasi program kegiatan pembangunan terhadap muatan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang diselaraskan dengan Program Prioritas Gubernur untuk sinkronisasi dan harmonisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran RTRWP sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; juga sebagai pedoman perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Adanya dinamika dan arah pengembangan pembangunan memberikan dampak intensitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tinggi. Namun hal ini sering tidak melihat terhadap norma-norma aturan arahan zonasi peruntukan pemanfaatan ruang sehingga menyebabkan permasalahan pada kegiatan perizinan di Kalimantan Timur. Sebagai contoh pemanfaatan ruang, di sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan yang tumpang tindih. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah pada sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta Ha, kemudian sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,4 Juta Ha (belum termasuk pemanfaatan untuk sektor lainnya), sehingga jika ditotal luas izin sektoral melebihi total luas daratan Kalimantan Timur ± 12 Juta Ha. Hal ini mengindikasikan adanya izin yang tidak sesuai atau izin bermasalah terhadap peruntukan pemanfaatannya dan akan berdampak terhadap konflik pemanfaatan ruang.



Gambar II- 58 Peta Indikatif Tumpang Tindih Provinsi Kalimantan Timur  
*Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020*

Dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang baik berupa alih fungsi lahan dan konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dalam upaya menjaga kualitas kawasan yang berfungsi lindung, maka dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan diantaranya adalah memberikan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang, melakukan audit pemanfaatan ruang, serta melaksanakan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pemberian pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang merupakan salah satu upaya mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya terhadap izin-izin sektoral pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan peruntukkan ruang. Pada tahun 2018 pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan sebanyak 108, tahun 2019 sebanyak 133 dan tahun 2020 sebanyak 193 pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang. Selain memberikan pertimbangan teknis, upaya lain dalam melakukan pengendalian adalah melakukan audit pemanfaatan ruang. Kegiatan audit memberikan gambaran indikasi

perbedaan pemanfaatan ruang terhadap peruntukkan dan arahan zonasinya. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kajian audit pada 5 (lima) kabupaten/kota. Namun saat ini belum dilaksanakan tindak lanjut audit serta fasilitasi penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Tabel II- 89 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan Kajian Audit Pemanfaatan Ruang

No.	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	Kutai Kartanegara	2014
2.	Balikpapan	2015
3.	Bontang	2016
4.	Paser	2020
5.	Penajam Paser Utara	2020

Sumber : Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Hasil audit diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang serta memberikan masukan terhadap review RTRW Kabupaten/Kota. Adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan serta menurunnya kualitas ruang pada Kawasan berfungsi lindung, maka kegiatan pengendalian dapat memberikan peran aktif agar setiap ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota maupun RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

### 2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71 persen. Pada tahun 2020 persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mencapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara ditahun 2020.

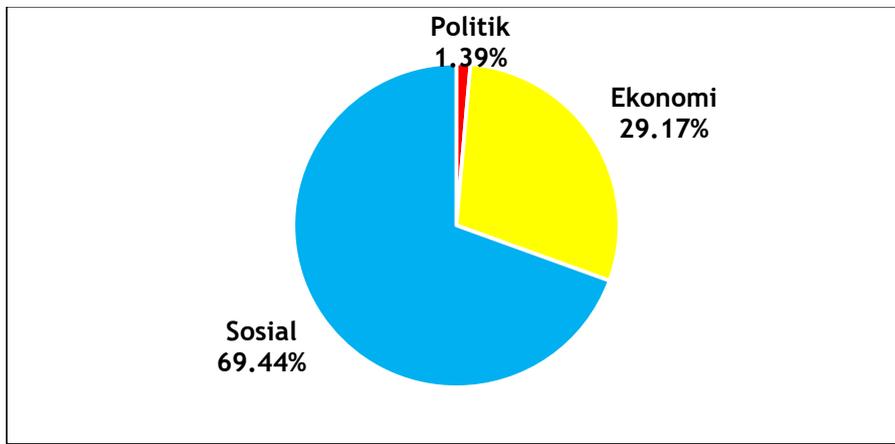
Tabel II- 100 Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	36,67
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020*	4.368	506	1.696	38,83	6,01

\*) Data Sementara; Sumber: POLDA KALTIM, 2021

### 2.4.3.2. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2020, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 155 demonstrasi dimana sebanyak 29,17 persen (42 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 69,44 persen (100 demonstrasi) terkait sosial dan 1,39 persen (2 demonstrasi) terkait politik.



Gambar II- 59 Demonstrasi Menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

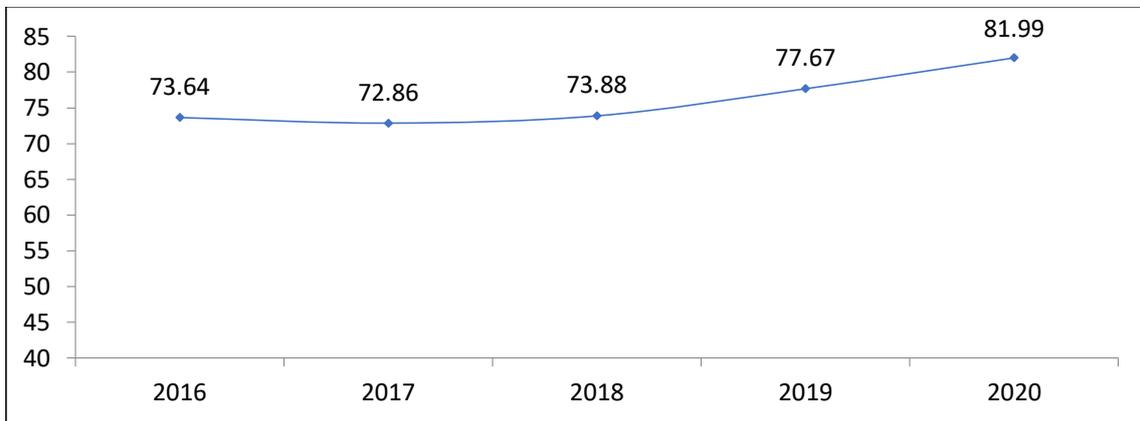
Tabel II- 90 Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	
2016	4	112	187	303
2017	12	121	201	334
2018	15	129	221	365
2019	57	83	185	325
2020	2	42	100	144

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

#### 2.4.3.3. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 77,67 persen pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini. Namun pada tahun 2020 posisi data sementara Indeks Demokrasi Indonesia baru mencapai 50 persen.



Gambar II- 60 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

#### 2.4.3.4. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun sebelumnya sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, tahun 2020 ini sektor usaha dengan nilai investasi terbesar adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi mencapai Rp 7.965,22 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 444,15 miliar diikuti sektor konstruksi dengan nilai investasi PMDN yang mencapai Rp 5.777,78 rupiah dan sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.738,08 miliar sedangkan sektor Pertambangan mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel II- 102 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	2.496.175	2.886.876,90	3.747.269,70	4.278.114,90	4.738.083,60
2.	Peternakan	.	.	.	33,40	-
3.	Kehutanan	8.050,10	25.144,20	602.835,40	283.625	125.549,60
4.	Perikanan	.	.	.	.	3,00
5.	Pertambangan	599.560,60	4.714.508,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	1.847.135,70	551.959,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40
2.	Industri Tekstil	.	.	.	.	0
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	.	0
4.	Industri Kayu	382.004,20	316.482	264.104,30	350.224	97.509,90
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	.	0
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	466.848,70	9.351,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	.	9.000	70,80
8.	Industri Mineral Non-Logam	8.893,30	748,30	17.919,90	292.133,10	95,00
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	27.566	.	.	5.000

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.	.	0
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	5.900	.	7.620	151.706,50	3.626,30
12.	Industri lainnya	78.643,40	248	.	509,50	70.348,60
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	324.544,20	2.297.726,20	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70
2.	Konstruksi	.	375,30	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90
3.	Perdagangan dan Reparasi	69.294,60	136.787,70	82.557,40	341.327,60	218.379,90
4.	Hotel dan Restoran	.	530	480	1.086.261,80	25.127
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	183.970,50	4.322,20	165.403,80	940.606,30	459.299,20
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	6.560,20	2.850	26.874,40	345.944,10	53.687,40
7.	Jasa Lainnya	407.544,10	4.740,10	1.015.135	1.623.524,70	419.150
	Total	6.885.124,60	10.980.216,40	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80

Sumber : DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Sektor usaha pertambangan yang mengalami peranan terbesar di Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 167,86 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 306,46 Ribu sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi yang mencapai US\$ 32.861,60 Ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 60 Ribu diikuti sektor industri makanan, sektor industri mineral Non Logam, industri instrumen kedokteran, presesi, optik dan jam.

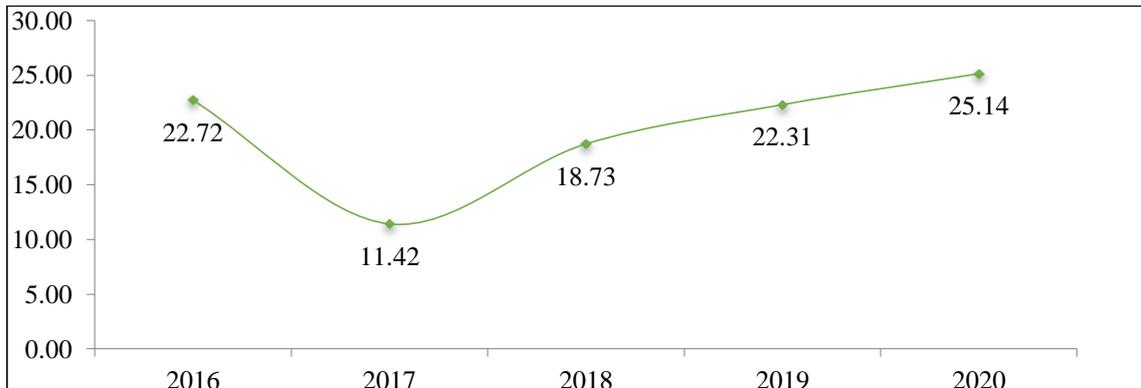
Tabel II- 103 Realisasi Investasi PMA menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (US \$)

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	344.588.200	159.353.800	63.157.800	185.796.300	67.781.500
2.	Peternakan	3.900	1.214.000	956.300	.	
3.	Kehutanan	9.304.600	82.734.000	657.100	2.751.700	2.071.400
4.	Perikanan	.	.	135.500	.	-
5.	Pertambangan	449.980	900.503.500	188.763.000	306.457.800	167.858.400
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	207.862.100	72.145.900	118.386.600	14.264.600	41.235.500
2.	Industri Tekstil	.	.	.	.	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	.	-
4.	Industri Kayu	7.906.900	.	6.600	33.300	-
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	.	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10.313.800	9.552.500	760.700	60.000	32.861.600
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	39.000	9.494.000	256.700	561.100	986.400
8.	Industri Mineral Non-Logam	27.487.300	16.586.100	.	15.809.600	24.840.000
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	75.719.600	3.607.700	22.600	1.879.400	276.400

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	253.200	1.533.400	3.550.700
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	128.800	58.500	.	43.800	-
12.	Industri lainnya	555.900	.	526.100	134.600	-
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	26.542.700	21.413.400	53.012.000	280.607.900	278.800
2.	Konstruksi	.	.	5.093.100	.	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	6.121.500	13.289.100	3.738.700	4.258.100	5.618.500
4.	Hotel dan Restoran	1.592.600	704.800	2.245.800	1.297.000	791.000
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	10.125.300	67.399.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1.674.700	1.115.400	301.200	146.900	221.300
7.	Jasa Lainnya	1.911.800	503.900	62.662.600	32.616.200	240.700
Total		1.181.859.200	1.285.215.200	587.501.600	863.099.400	378.027.200

Sumber : DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami penurunan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 25,14 triliun pada tahun 2020.

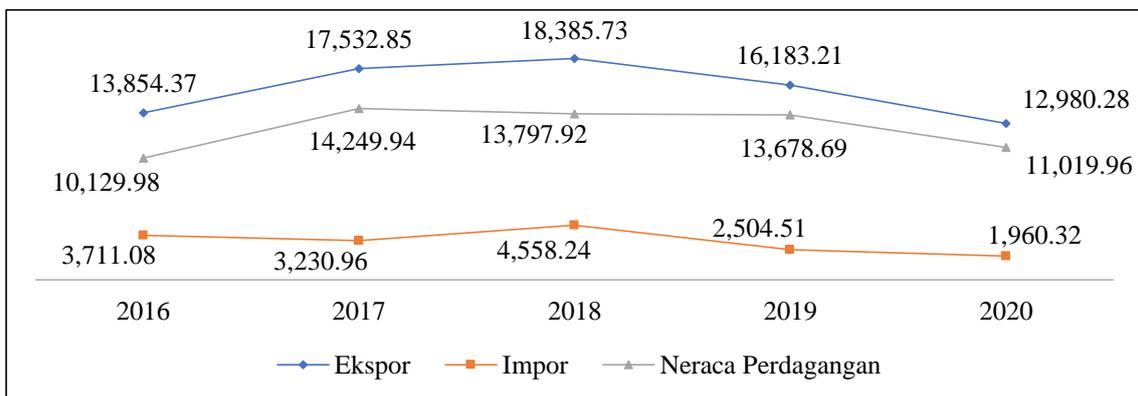


Gambar II- 61 Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)  
*Sumber; DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur, 2021*

#### 2.4.3.5. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2016-2020, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.



Gambar II- 62 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020  
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,79 persen dibanding tahun 2019 yaitu dari US\$ 16,18 miliar menjadi US\$ 12,98 miliar. Penurunan ekspor tahun 2020 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas maupun non migas, hanya komoditas hasil industri yang mengalami kenaikan. Ekspor barang migas tahun 2020 mencapai US\$ 1,15 miliar turun sebesar 39,59 persen dibanding tahun 2019. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 11,83 miliar turun sebesar 17,16 persen dibanding tahun 2019.

Tabel II- 104 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta US \$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
MIGAS		3.781,67	4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.148,29
1	Minyak Mentah	861,45	922,56	334,70	12,63	7,27
2	Hasil Minyak	138,23	188,97	12,97	224,05	108,64
3	Gas	2.781,99	3.140,97	2.977,57	1.831,52	1.032,38
Non MIGAS		10.072,71	13.230,03	15.029,36	14.113,59	11.831,99
1	Hasil Tambang	8.813,17	11.957,04	13.580,80	12.408	9.600,36
2	Hasil Industri	1.241,48	1.266,53	1.445,92	1.696,72	2.222,52
3	Hasil Pertanian	4,75	4,82	4,21	8,87	9,11
Total Ekspor		13.854,37	17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Produk Mineral adalah golongan barang yang paling dominan diekspor dari Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 produk mineral nilai ekspornya mencapai US\$ 10,75 miliar atau sebesar 82,81 persen dari total nilai ekspor Kalimantan Timur menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 14,14 miliar. Golongan barang dengan nilai ekspor terbesar berikutnya adalah Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani sebesar US\$ 1,3 miliar (10%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 0,89 Juta.

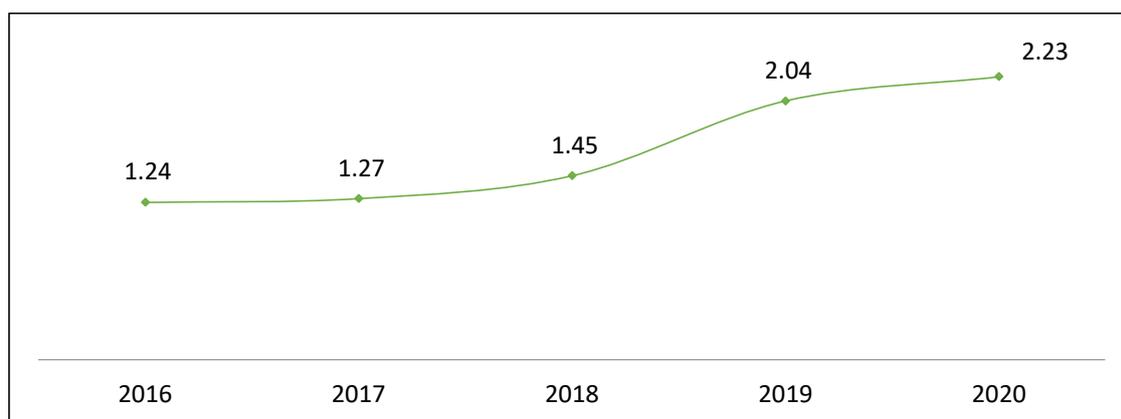
Tabel II- 105 Nilai Ekpor Provinsi Kalimantan Timur menurut Golongan Barang Utama Tahun 2016-2020 (Juta US \$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Mineral	12.608,75	16.261,60	16.933,08	14.135,08	10.748,65

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
2	Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani	266,59	584,81	640,79	887,42	1.298,27
3	Produk Industri Kimia	620,61	479,71	672,22	746,82	692,61
4	Mesin, Perlengkapan Listrik, Elektronika	303,61	190,10	123,04	232,13	28,27
5	Binatang Hidup, Produk Hewani	29,28	5,67	7,71	83,13	60,24
6	Lainnya	25,55	10,96	8,89	98,63	61,99
Total		13.854,37	17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

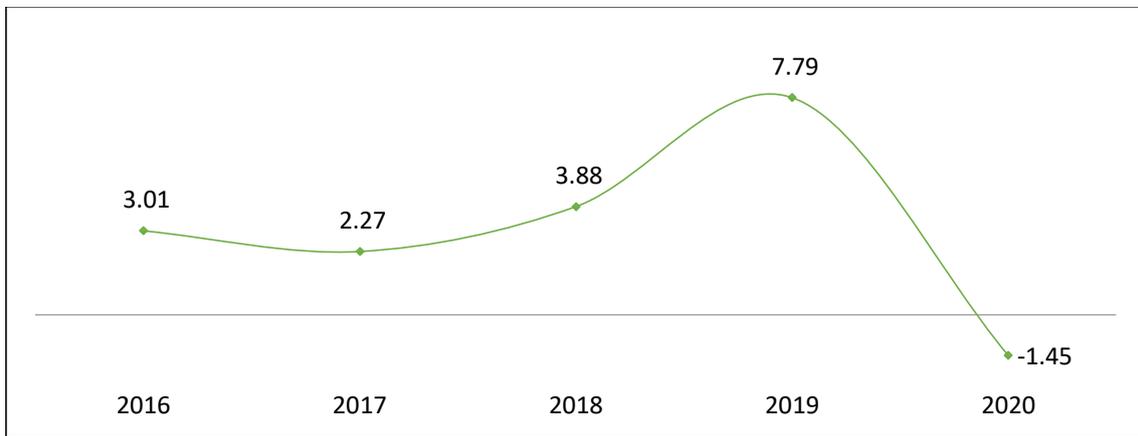
Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 2,23 miliar US\$ pada tahun 2020 mengalami peningkatan 9,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,04 miliar US\$.



Gambar II- 63 Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Milyar US\$)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan dimana tahun 2019 tumbuh tinggi hingga mencapai 7,79 persen akan tetapi pada tahun 2020 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan batubara mengalami perlambatan yang cukup curam mencapai -1,45 persen.



Gambar II- 64 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

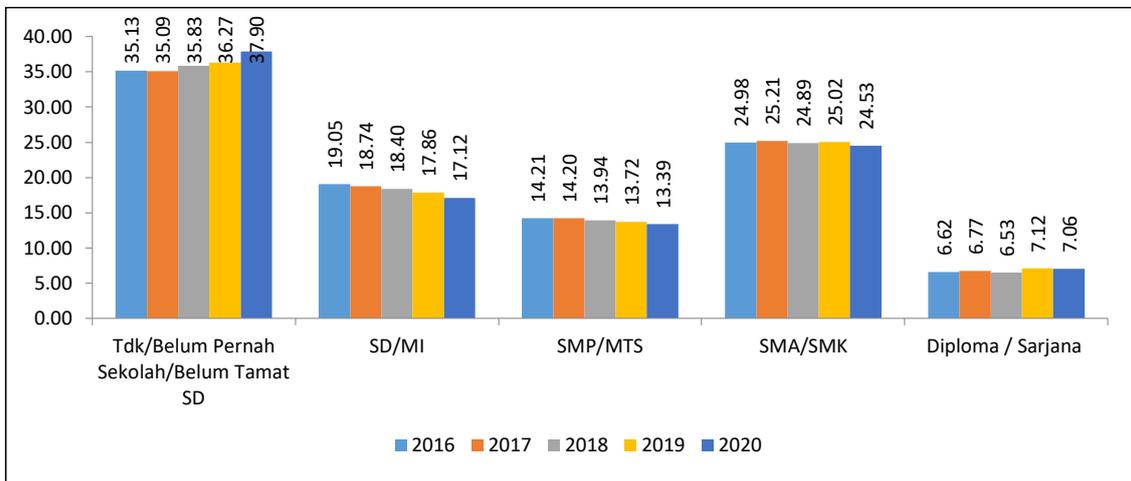
##### 2.4.4.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2020 hanya sebesar 7,06 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang

SMA/MA/SMK (24,53 persen), SLTP/MTs (13,39 persen) dan SD/MI (17,12 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 37,90 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

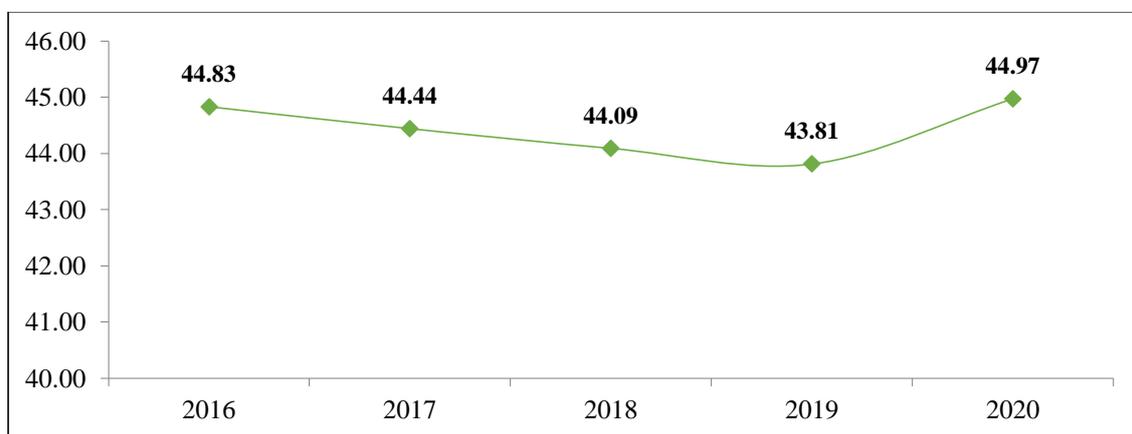
Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II- 65 Persentase Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020  
Sumber; DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

#### 2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,97, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44-45 orang penduduk usia non produktif.



Gambar II- 66 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Berikut adalah tabel capaian kinerja pembangunan untuk aspek daya saing di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020.

Tabel II- 106 Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur					
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	58,88	63,46	52,85	61,45	69,77
1.2	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (kawasan)	3	3	2	2	2
1.3	Capaian akses air minum layak (%)	75	77	52,59	56,84	64,53
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.808,50	15.558,50	13.618,50	13.728,50	13.878,50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	-	-	730	641	477
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	533,56	459,59	1.858,88	1.525,47	1.287,82
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69,01	75,09	73,18	66,46	66,46
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	79,52	84,07	84,21	88,93	90,21

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Fokus iklim berinvestasi					
2.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,08	34,73	25,53	35,62	31,38
2.2	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	-	-	-	22,31	25,14
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	13	12	15	14	12
2.4	Indeks Demokrasi Indonesia	73,64	72,86	73,88	77,67	81,99
3	Fokus Sumber Daya Manusia					
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71	71	76,55	76,55	76,60
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81,56	82,22	81,50	82,00
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

## 2.5. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Keputusan Gubernur Kaltim No. 050/K.362/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 dan telah disusun RAD SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Penyusunan RAD SDGs Kalimantan Timur ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *universality* yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak individu,

perdamaian, dan kemitraan; *integration*, yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait; dan *no-one left behind* atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan *partnership*. Pelaksanaan RAD SDGs Kalimantan Timur menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Kalimantan Timur disajikan pada tabel dibawah ini.



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS, Dinkes	%	78,80	81,35	81,71	84,21	n/a
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	SIDATA, Dinas Kesehatan	%	58,55	48,44	71,30	53,10	No Data
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	62,24	65,08	61,85	60,09	No Data
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	66,70	71,71	73,31	56,84	64,53 (SIDATA)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU, SIDATA	%	61,63	58,78 (BPS)	68,24 (BPS)	80,89 (BPS)	81,35 (SIDATA)

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU, SIDATA	%	61,63	58,78 (BPS)	68,24 (BPS)	80,89 (BPS)	81,35 (SIDATA)
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	6,69	7,37	5,93	6,07	6,10
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	60,56	63,71	61,96	66,16	73,00
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, e-infoduk DKP3A	%	89,26	88,32	90,00	89,37	n/a
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	DESDM, TNP2K	%	97,43	98,16	99,23	98,88	n/a
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SIDATA, BPBD	Jiwa per 100.000 orang	70,43	48,44	20,91	1,29	2.052,78

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	SIDATA, BPBD	Lokasi	10	11	12	12	13
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa	0	0	0	1.320	1687
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa	0	0	0	0	0
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas P&K, Kemenag, BPBD, Podes	Daerah	1	0	0	0	0
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD Kaltim	Indeks Resiko Bencana	0	0	0	0	0
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	SIDATA, BPBD Kaltim	Rupiah	54.125.440.000	0	1.590.000.000	0	0
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	SIDATA, BPBD Kaltim	Doku-men	1	0	0	2	2
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Rupiah	0	0	0	0	0
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan,	BAPPEDA	Miliar Rupiah,	n/a	n/a	2.269,58	-	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.		Fungsi Pendidikan			-21,27%		
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)	Dinas Pertanian, Susenas BPS	%	12,62	11,67	10,24	7,02	No Data
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.	Susenas BPS, dinas Pertanian	%	3,77	4,40	3,20	No Data	No Data
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN								
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes, Susenas BPS	%	19,92	22,00	19,00	28,10	28,10
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun	Dinkes, Susenas BPS	%	17,14	16,30	18,20	16,40	No Data
2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	dinas pertanian, SIDATA	%	19,16	14,64	15,94	13,17	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SIDATA, Dinas Kesehatan	%	4,63	4,70	9,40	9,09	No Data
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes, SIDATA	%	10,70	11,87	15,16	18,91	18,86
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinkes, BPS, SIDATA	%	52,98	63,03	59,00	71,08	71,13
							Dinkes	
							71,08	
							BPS	
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian, SIDATA	Skor	82,60	83,10	84,60	85,80	No Data
		Dinas Kelautan, SIDATA	Kg/Kapita /Tahun	46,41	47,05	46,02	52,58	53,09
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN), BPS	Rupiah/tenaga kerja	123.103.153	143.742.430	144.144.437	158.662.507	153.653.282
							(ASEM)	
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.								
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk	Dinas Peterna-kan	VUB Tanaman Pangan	n/a	n/a	80.248.3	NA	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	pangan yang dilepas. (Nasional)		(padi, jagung, kedelai)					
			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumate- ra)			50	105	
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peterna-kan	Hewan Ternak	n/a	n/a	3000	7.3	n/a
<b>TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</b>								
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDU-DUK, SUTAS	Jumlah kemati-an ibu	95	105	74	79	No Data

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	95,57	96,44	96,34	96,39	97,46
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,64	87,37	87,34	89,31	90,48
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	112	82	54	62	No Data
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	157	462	498	No Data	No Data
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	638	605	608	529	No Data
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes, SIDATA	%	100	100	90	90	80
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinkes, Komisi Penanggulangan Aids, SIDATA	%	3,88	2,23	1,72	0,04	0,05
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, SIDATA	%	130,43	102,17	46,08	228,00	112,00
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, BPS	API per 1000 penduduk	n/a	0,440	0,630	0,490	No Data
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, BPS	Kabupaten/ Kota	n/a	3	3	3	n/a
						8 (bps 2017)		
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	10	100	100	100	100
						7 (bps 2017)		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	Juta Orang (Filariasis)	n/a	n/a	-	n/a	n/a
			Orang (Kusta)	n/a	n/a	-	n/a	n/a
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinkes, SIDATA	Provinsi	10	10	8	9	8
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinkes, BPS	Kab/ Kota	0	0	0	0	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinkes, SIDATA	Orang	4.744	15.754	19.899	24.103	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes	%	48,96	50,53	49,37	83,40	52,57
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes, SIDATA	orang	2.706	4.565	9.250	21.541	n/a
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinkes	Kematian per 100.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinkes, SIDATA	Kab/ Kota	10	10	10	10	10
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	orang	n/a	n/a	1083	n/a	n/a
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	orang	n/a	n/a	89	n/a	n/a
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial, SIDATA	orang	n/a	n/a	38	38	38
							38	
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	BNN	Lembaga	n/a	n/a	2	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN	%	n/a	1,12	1,77	0,60	n/a
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas BPS, POLDA	liter per kapita	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN, SIDATA	%	81,74	66,67	78,95	No Data	No Data
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	n/a	66,50	66,5*	n/a	n/a
				Angka Absolut	630,59	805,55	661,41	No Data
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN, SIDATA	%	15,40	14,80	13,30	23,30	20,90
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN, SIDATA	Angka Absolut	370,23	451,25	410,26	23,3	No Data
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun	34,45	26,64	19,00	16,70	16,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DKP3A, BKKBN, SIDATA	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,17	2,70	2,48	2,47	2,56
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS, Dinkes	%	3,41	4,18	4,04	3,85	n/a
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS Kesehatan, Kemenkeu, SIDATA	Juta Penduduk	2.913.440	2.364.851	3.083.909	3.262.448	3.454.261
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Kesehatan, SIDATA	%	77,12	78	87,19	91,86	94,35
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan. (Nasional)	Sistem Registrasi Sampel	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS, Dinas Kesehatan	%	25,23	24,69	29,17	24,52	24,42
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes, SIDATA	%	84,84	96,74	98,82	99,24	N/A
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinkes, SIDATA	tenaga keteknisia n fisik per 1.000 penduduk	341,66	377,00	385,41	No Data	No Data
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinkes, SIDATA	tenaga keteknisia n fisik per 1.000 penduduk	0,07	0,10	0,11	0,12	0,14
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Dinkes, SIDATA	dokter spesialis per 1.000 penduduk	0,12	0,14	0,14	0,17	0,18
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinkes, SIDATA	dokter umum per 1.000 penduduk	0,30	0,30	0,28	0,27	0,32
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinkes, SIDATA	dokter gigi per 1.000 penduduk	0,09	0,09	0,08	0,27	0,09
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinkes, SIDATA	perawat per 1.000 penduduk	1,87	2,16	2,18	1,99	2,24
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinkes, SIDATA	perawat gigi per 1.000 penduduk	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinkes, SIDATA	bidan per 1.000 penduduk	0,81	0,95	0,95	0,89	0,95

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinkes, SIDATA	tenaga gizi per 1.000 penduduk	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinkes, SIDATA	tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
	Kepadatan dan distribusi tenaga ketarapian fisik	Dinkes, SIDATA	tenaga keterapian fisik per 1.000 penduduk	0,17	0,31	0,32	0,33	0,32
	Kepadatan dan distribusi keteknisian medis	Dinkes, SIDATA	tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	0,14	0,14	0,19	0,19	0,18
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinkes, SIDATA	tenaga keteknisian fisik per 1.000 penduduk	0,07	0,10	0,11	0,12	0,14
<b>TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>								
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i)	Disdik	%	n/a	n/a	0	63,4	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	membaca (Bahasa Indonesia)							
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Disdik	%	n/a	n/a	0	n/a	n/a
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdik	%	n/a	n/a	0	82,8	n/a
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Disdik	%	n/a	n/a	0	77,5	n/a
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdik	%	72,40	72,90	73,10	73,40	79,02
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Disdik, SIDATA	%	110,04	108,07	108,02	106,84	n/a
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Disdik, SIDATA	%	95,28	91,46	92,57	91,03	n/a
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik, SIDATA	%	95,38	99,51	96,08	94,96	95,23
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Disdik, SIDATA	Tahun	9,55	9,62	9,63	9,88	9,99
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Disdik, SIDATA	%	102	104	107	107	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik, SIDATA	%	95,38	99,51	96,08	94,96	95,23
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Disdik, SIDATA	%	26,43 (SIDATA)	28,87 (SIDATA)	29,51 (SIDATA)	37,78 (DISDIK)	n/a
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	%	46,11	50,56	60,85	69,44	n/a
4.4.1*	Proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% remaja (15-24)	73,12	76,99	83,52	89,87	n/a
4.4.1*	Proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% dewasa (15-59)	n/a	n/a	50,56 (bps 2017)	69,44	n/a
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
4.5.1*	Rasio APM SD/MI/ sederajat	Disdik	%	99,36	99,80	100,13	100,57	99,95
						99,8		
						(bps 2017)		
4.5.1*	Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	Disdik	%	100,75	100,30	95,41	98,10	100,98
						100,3		
						(bps 2017)		
4.5.1*	Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Disdik	%	95,15	96,60	106,42	100,85	112,30
						96,6		
						(bps 2017)		
4.5.1*	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Disdik	%	160,99	106,40	104,09	120,37	120,45
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas, BPS	%	98,82	98,96	98,96	99,03	98,97
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	% 15 - 24 tahun	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00
			% 15 - 59 tahun	99,34	99,70	99,70	99,76	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Susenas, BPS	%	100,00	99,92	100 99,7 (bps 2017)	100	n/a
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	100,00	99,92	-	99,76	n/a
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Disdik	71,09	72,00	74,00	75,00	80,00	No Data
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Disdik	%	n/a	n/a	SD 0 SMP 0 SMA/ SMK 0 SLB 0	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
						Kaltim 0		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.								
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang )bersertifikat pendidik.	Disdik	%	74,00	75,00	80,00	91,04	90,00
	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	87,79	n/a
	Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	94,29	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	72,81	n/a
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	86,81	88,84	n/a
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	94,58	95,76	n/a
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	97,58	98,32	n/a
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	n/a	n/a	95,05	95,48	n/a
<b>TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER</b>								
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DKP3A	Doku-men	10	5	3	1	1
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, DKP3A	%	0,019	0,037	0,023	0,057	n/a
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	BPS, DKP3A	%	n/a	n/a	0,034	n/a	n/a
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, DKP3A	%	n/a	n/a	0,008	n/a	n/a
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DKP3A	%	28,32	57,02	116,55	63,5	n/a
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15	DKP3A	% (sebelum umur 15 tahun)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		DKP3A, BPS		14,85	13,90	11,54	12,36	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	tahun dan sebelum umur 18 tahun.		% (sebelum umur 18 tahun)					
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DKP3A, BPS	Tahun		21,7		44,51	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun	n/a	53	n/a	16,7	n/a
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik	%	95,38	99,51	96,08	94,96	n/a
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DKP3A	%	10,91	10,91	10,91	18,18	18,18
			% (pusat)	n/a	n/a	17,32	20,87	n/a
			% (parlemen)	n/a	n/a	7	16,88	n/a
			% (daerah)	n/a	n/a	6,722		n/a
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DKP3A	%	44,03	39,36	41,68	44,12	n/a
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DKP3A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN, SIDATA	%	10	9	10,9	11,20	12,20
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN, BPS, SIDATA, DP3AKB	%	69,86	70,61	71,79	n/a	n/a
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DKP3A	Doku-men	n/a	n/a	2	n/a	n/a
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS, Diskomin-fo, SIDATA	%	74	77	77	77	77
<b>TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b>								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR, SIDATA	%	78,93 (BPS)	82,75 (BPS)	81,26 (BPS)	70,71	64,53 (SIDATA)
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PUPR, SIDATA	m3/dt	6,74	6,74	7,84	7,92	8,40
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR, SIDATA	%	n/a	n/a	n/a	41,75	47,40
							89,22 (BPS)	
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR, SIDATA	%	69,61	69,02	79,38	75,84	n/a
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR, SIDATA	%	75,60 (BPS)	72,36 (BPS)	79,19	80,89 (SIDATA)	81,35
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPMPD, Dinkes, SIDATA	desa/ke-lurahan	n/a	n/a	n/a	83	83

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPMPD dan Dinkes, SIDATA	desa/ke-lurahan	60	28	17	33	76
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR, SIDATA	Kabupa-ten/Kota (Skala Kota)	n/a	n/a	0	7	7
			Kabupa-ten/Kota (Skala Kawasan)	n/a	n/a	0	20	n/a
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR, SIDATA	Kabupa-ten/Kota (Skala Komunal)	n/a	n/a	0	154	n/a
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR, SIDATA	%	n/a	n/a	0,17	3,84	4,30
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PUPR, SIDATA	Kab/Kota	7	7	8	8	9

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPR, SIDATA	%	n/a	n/a	0,17	3,84	4,30
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas PUPR	Danau prioritas	n/a	n/a	n/a	3	n/a
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas PUPR, SIDATA	Indeks	55,29	57,69	57,73	62,01	53,70
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	dinas LH	PM	NA	NA	NA	NA	NA
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/	dinas LH	PM	NA	NA	NA	NA	NA
	perkebunan dan industri.							
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas PUPR	RPDAST	6	4	4	4	4
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	PUPR, BMKG	stasiun	NA	NA	NA	31	NA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR, SIDATA	wilayah sungai	1	2	2	2	2
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas Kehuta-nan	Ha	NA	50	100	1265,78	1916,26
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPR, SIDATA	Wilayah sungai	n/a	n/a	n/a	1	4
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR, SIDATA	lembaga	5	5	5	6	6
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas PUPR, SIDATA	DAS	n/a	n/a	n/a	4	4
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas PUPR, SIDATA	DAS	n/a	n/a	n/a	4	4
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas PUPR	Danau	n/a	n/a	n/a	3	n/a
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas PUPR	Danau	n/a	n/a	n/a	3	n/a
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas PUPR	Danau	n/a	n/a	n/a	3	n/a
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dishut, SIDATA	Ha	n/a	n/a	3.070	5.300	2.756
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas PUPR, SIDATA	DAS Prioritas	4	4	4	4	4
<b>TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</b>								
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM, SIDATA	%	79,67	84,67	85,75	88,93	90,21
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM, SIDATA	kWh	n/a	n/a	n/a	1.011,92	1.086
7.1.2(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	Dinas ESDM, SIDATA	SR	9.280	17.280	36.045	41.045	62.335
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas ESDM, SIDATA	%	0,88	1,61	3,25	3,52	5,12
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	1,95	1,38	1,86	3,60	4,80
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Dinas ESDM	SBM (Setara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
			Barrel Minyak					
<b>TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>								
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-2,50	0,99	0,6*	2,72	n/a
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	%	145,34	165,55	174,88 *(BPS 2018)	175,65	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Disnaker, SIDATA	%	-10,21	5,75	-2,26	-0,55	-7,20
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (sakernas), Disnaker, SIDATA	%	35,51	31,61	32,17	33,95	39,27
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (sakernas), Disnaker	%	55,25	59,96	59,91	59,18	n/a
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (sakernas), Disnaker	%	77,79	71,31	69,02	70,60	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	BI, BPS, Perindag-kop	%	n/a	n/a	21,31	n/a	n/a
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (sakernas),Disnaker, SIDATA	Rupiah	20.182	21.157	21,033	21.579	22.751
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (sakernas),Disnaker	%	7,95	6,91	6,60	5,94	6,88
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (sakernas),Disnaker	%	6,69	4,90	4,22	4,82	7,14
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (sakernas),Disnaker	%	27,04	20,47	23,06	19,44	24,25
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnaker-trans, SIDATA	Fasilitas TKLN	5.625	6.144	6.292	6.292	8.074
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	n/a	0,91	0,93	1,02	1,06

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Juta Orang	61.376	58.281	62.424	76.003	19.787
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Juta Orang	5.897.490	5.899.282	7.479.870	7.085.381	2.884.329
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinas Pariwisata,BPS (statistik pariwisata)	Triliun Rupiah	n/a	n/a	4,962	Blum ada data	n/a
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nespar-na), Dispar	%	n/a	n/a	5,01	Blum ada data	n/a
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	53	56	55	n/a	n/a
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (podes), BI	Km	16	16	16	n/a	n/a
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI (data UMKM), Disperin-dagkop	%	26,36	27,22	18,15	17,77	18,90
<b>TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</b>								
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	PUPR, SIDATA	%	66,24	68,24	52,85	61,45	69,77

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	PUPR, SIDATA	Km	33,09	33,09	33,09	99,35	99,35
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	PUPR, SIDATA	Km	0	0	0	0	0
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DISHUB, SIDATA	unit	8	8	9	9	9
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	unit	2	2	6	6	6
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	lokasi	13	13	13	12	12
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Dispe-rindag-kop	%	20,63	18,93	18,14	17,82	18,90
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	5,46	2,80	0,45	0,03	-2,77
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	6,34	6,60	7,16	7,66	n/a
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Perindag-kop	%	n/a	n/a	100	0,99	n/a
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta)					
			Persen	n/a	n/a	21,31	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Perindag-kop	%	3,69	1,26	52,02	7,20	n/a
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH	%	56,00	37,51	7,20	n/a	50,72
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BALIT-BANGDA)	%	n/a	n/a	0,0000059	n/a	n/a
						(Berda-sarkan PDRB ADHB 2018)		
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskomin-fo, SIDATA	%	90,91	90,91	90,91	90,00	90,00
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskomin-fo, SIDATA	%	74,47	74,30	76,36	76,88	76,71
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Diskomin-fo	%	38,03	42,14	50,25	59,12	66
<b>TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN</b>								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,32	0,33	0,34	0,33	0,33
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dinsos	%	6,11	6,19	6,03	5,94	6,10
			(Rp/ kapita/ bulan)			574.704		
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMPD, SIDATA	Kab	7	7	5	5	7
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	DPMPD, SIDATA	desa tertinggal	393	381	381	285	128
			desa sangat tertinggal	295	137	137	23	4
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DPMPD, SIDATA	desa	0	2	2	11	51
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, Bappeda	%	3,41	4,29	5,40	5,44	n/a
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, BAPPEDA	%	10,65	11,29	11,62	11,25	n/a
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	Susenas BPS, BAPPEDA	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.							
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kesbang-pol, SIDATA	indeks	78,25	83,33	90,99	88,50	n/a
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kemen-kumham	Kebijakan/Dokumen	4	5	7	1	0
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah pusat.	BAPPEDA	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETENAGA KERJAAN	Formal	358.826	449.465	478.172	830.065	819.665
<b>TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</b>								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	PUPR, BPS (Koordinasi dengan Pusat)	%	97,40	98,11	98,20	65,55	n/a
		PUPR		0	0	0	0	0

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	(Belum masuk Metropo-litan	Kawasan perkotaan metropolit an					
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	n/a	n/a	3	3	3
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH, SIDATA	%	n/a	n/a	75,9	n/a	76
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	DISHUB	%	19,1	8,5	7,6	6,5	6,1
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Kota besar	0	0	0	0	0
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	PUPR (Pusat)	Kota sedang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	PUPR (Pusat)	Metro-politan Baru	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	PM	n/a	n/a	1	1	1
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	PUPR (Koordinasi SATKER)	PM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka	n/a	n/a	1	1	n/a
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD, SIDATA	Orang	70,43	48,44	20,91	1,29	2.052,78
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD, (Pusat) INARIS, SIDATA	Indeks	156,70	156,03	155,49	155,49	155,49
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD, INARIS, BMKG, SIDATA	Kota Tangguh	0	0	1	0	0
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD, SIDATA	sistem peringatan dini	7	7	7	7	7
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	54.125.440.000	0	1.590.000.000	0	0

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH, SIDATA	%	N/A	N/A	60,85	65,33	76
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	DLH	Jumlah	n/a	n/a	3	3	3
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PUPR	Kawasan per-kotaan metro-politas/ kota sedang	3	3	3	3	3
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD, SIDATA	%	10	n/a	10	20	20
11.b.2*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1	2	2
<b>TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH, SIDATA	peserta proper	225	225	225	205 (emas, hijau, biru)	211
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH, SIDATA	juta ton	42.825,80	43.306,52	38.109,74	32.479,89	57.945,91
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH, SIDATA	Ton	N/A	N/A	10	65.700	58.269
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH	Jumlah	n/a	n/a	55	55	55
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	produk ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	0
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Fasilitas Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	0
<b>TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</b>								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Doku-men	1	0	0	2	2
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD, SIDATA	orang	70,43	48,44	20,91	1,29	2.052,78
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH, SIDATA	Doku-men	N/A	N/A	1	1	1
<b>TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN</b>								
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.								
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	DKP, SIDATA	Doku-men (PP)	N/A	N/A	N/A	1	1
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP, SIDATA	WPP	2	2	2	2	2
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP, SIDATA	% (target dibagi msy)	45	35	35	35	35
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	HA	285.549	N/A	322.948,17	288.766	288.766
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	31,35	32,42	33,60	80,00	N/A
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP, SIDATA	regulasi/k ebija-kan	1	1	4	2	2
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP, SIDATA	lokasi	9	9	8	9	9
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP, SIDATA	orang	6.917	9.863	867	3.561	N/A
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	DKP, SIDATA	Pergub	1	1	1	1	1
<b>TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN</b>								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	%	N/A	N/A	51,06	54,90	N/A
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	BKSDA, BNKT		N/A	N/A	100	N/A	300
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	dishut	Ha	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dishut/ BKSDA Kaltim, BPS, SIDATA	unit	n/a	0 (BPS)	2	3 (SIDATA)	n/a
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	dishut	Unit	9	9	9	20	20
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut, SIDATA	Ha	42.464,21	40.901,85	13.136,77	524.00	1.500.00
Target 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	BKSDA	Jumlah	n/a	n/a	0	0	0
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal								
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	BKSDA	spesies	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 15.9 Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dishut, BKSDA	Doku-men	n/a	n/a	1	n/a	n/a
<b>TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</b>								
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda, Kesbangpol	kasus	n/a	n/a	23	12	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda, Kesbang-pol	Kematian/ 100.000 penduduk	0	0	0	0	n/a
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polda, Kesbang-pol, BPS	%	1,00	0,01	0,08	0,08	n/a
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	statistik kriminal (BPS)	%	n/a	55,42	55,42	n/a	n/a
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	statistik kriminal (BPS)	%	n/a	n/a	0	n/a	n/a
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DKP3A	%	0,032	0,060	0,046	0,040	n/a
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DKP3A, BPS	%	n/a	n/a	0,009	n/a	n/a
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DKP3A, BPS	%	n/a	n/a	11,07	n/a	n/a
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD, Bappeda	%	n/a	n/a	92	n/a	n/a
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BPKAD, Inspektorat	%	n/a	n/a	90	90	n/a
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerintahan, SIDATA	%	3	0,20	-3,40	2,20	2,20
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Administrasi Pembangunan	%	n/a	n/a	63	n/a	n/a
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah	Biro Organisasi	%	n/a	n/a	68,02	68,6	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).							
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerin-tahan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DKP3A	%	n/a	n/a	n/a	18,18	18,19
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	n/a	n/a	18%	12,7%	12,8%
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS, kesbang-pol, SIDATA	indeks	60,36	68,72	72,22	82,17	50
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS, Kesbang-pol	indeks	78,25	83,33	90,99	88,50	50
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS, kesbang-pol	indeks	78,35	67,18	61,38	66,27	50
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*			%	84,35	84,49	82,84	84,83	n/a

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS), DKP3A					Dkp3a 100,46	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	92,66	92,33	92,30	92,69 bps 100,46 dkp3a	n/a
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	%	n/a	n/a	50 % (KIP Kaltim)	75%	n/a
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Kominfo	%	n/a	n/a	94 % (KIP Kaltim)	99%	n/a
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kominfo	PPID	n/a	n/a	1	1	n/a
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Hukum dan HAM, SIDATA	Kebijakan/	4	5	7	1	0
			Doku-men					
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda, SIDATA	%	1,57	1,38	1,68	1,81	1,64
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda, SIDATA	%	0,61	0,59	0,74	0,76	0,64
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	%	53,01	55,77	75,49	76,82	86,18
Target 17.6. Meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasarkan kesepakatan timbal balik.								
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Diskomin-fo, SIDATA	%	30	45	60	60	60
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskomin-fo, SIDATA	%	50,09	50,09	50,91	50,00	51,70

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskomin-fo, SIDATA	%	90,91	90,91	92,14	90,00	91,17
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskomin-fo, SIDATA	%	38,03	42,14	50,25	59,12	66,24
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskomin-fo, SIDATA	%	15	20	30	30	30
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bappeda	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bappeda	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	90,00	99,33	99,38	100,00	100,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	88,67	90,63	91,01	99,02	100,00
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Meta-data	n/a	n/a	0	2	n/a
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DKP3A	data registrasi	n/a	n/a	1	n/a	n/a
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	51.000	51.000	52.000	58.747	n/a
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	90,72	100	100	100	n/a

### BAB III

#### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2016-2020 dan kerangka pendanaan untuk periode RPJMD tersisa yaitu tahun 2021-2023. Pengelolaan keuangan daerah pada periode 2016-2020 menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah termasuk didalamnya untuk periode pelaksanaan RPJMD murni tahun 2019 dan 2020. Gambaran tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu masukan dalam menentukan kerangka pendanaan yang meliputi identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja, serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

Terkait dengan perubahan RPJMD, penentuan kapasitas riil keuangan daerah mempertimbangkan isu strategis: Pandemi COVID-19 yang secara nyata berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dan penerimaan daerah. Pengaruh pandemi tersebut merupakan rangkaian dampak pandemi secara global, nasional, dan regional. Kinerja pembangunan tahun 2020 mengonfirmasikan dampak-dampak dimaksud.

#### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur tergambarkan oleh kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir (2016 hingga 2020), yang berfluktuasi secara negatif dari minus 0,36 persen pada tahun 2016 menjadi minus 2,85 persen pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi semenjak awal tahun 2020 cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kinerja pada sebagian besar lapangan usaha seperti sektor utama pertambangan dan penggalian yang berkontraksi 4,58 persen dan industri pengolahan berkontraksi 2,77 persen. Struktur perekonomian

Kalimantan Timur tahun 2020 masih didominasi oleh 4 sektor lapangan usaha yakni Pertambangan dan Penggalian sebesar 41,43 persen, Industri Pengolahan sebesar 18,90 persen, Konstruksi sebesar 9,53 persen dan Pertanian sebesar 8,77 persen.

Kondisi keuangan daerah pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi positif dari jumlah realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 7,985 triliun rupiah menjadi Rp. 9,987 triliun pada 2020. Puncak realisasi tertinggi pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 11,775 triliun, pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar minus 15,18 persen. Meskipun secara nominal cenderung menurun, namun secara persentase, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 merupakan capaian tertinggi sebesar 116,34 persen dan secara rata-rata, perkembangan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen.

Pendapatan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi oleh pendapatan asli daerah dengan proporsi rata-rata 54,01 persen. Secara absolut, realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun secara persentase meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 55,67 persen. Penurunan absolut pendapatan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya realisasi pendapatan dari pajak daerah.

Perekonomian Kalimantan Timur ke depan diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, perbaikan diperkirakan ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya. Pada sektor industri pengolahan, perbaikan kinerja diperkirakan didorong oleh membaiknya permintaan CPO baik domestik maupun global. Sektor konstruksi diperkirakan kembali membaik sejalan dengan peningkatan kinerja proyek-proyek strategis.

Berlanjutnya perbaikan ekonomi daerah juga didorong oleh terus bergulirnya program pemulihan ekonomi nasional dan regional serta masifnya vaksinasi. Selain di sisi ekspor, perbaikan ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan juga bersumber dari sisi konsumsi maupun investasi. Di sisi konsumsi, masih bergulirnya program pemulihan ekonomi nasional dan

regional, termasuk bantuan sosial atas inisiatif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diperkirakan akan membuat proses pemulihan konsumsi semakin solid. Dari sisi investasi, perbaikan diperkirakan didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek-proyek strategis, perbaikan harga komoditas, dan pulihnya keyakinan dunia usaha sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan perundangan turunannya.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

#### 1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2016-2020, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada Tabel III-1.

Tabel III- 1 Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan (%)
2016	7.762.674.455.113	7.985.727.918.251	102,90
2017	8.223.730.774.720	8.158.103.650.157	99,16
2018	9.591.235.184.518	10.671.715.200.487	111,24
2019	11.137.939.446.363	11.775.086.836.200	105,72
2020	8.584.526.835.525	9.987.385.879.199	116,34

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah

dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 107,45 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 7,97 persen per tahun namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,74 persen dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan Pajak Daerah yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat sebagai efek dari adanya Pandemi COVID-19.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah dalam APBD yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan Dana Transfer selama lima tahun sebesar 6,4 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan semenjak tahun 2016. Demikian pula dengan (Dana Alokasi Umum) DAU mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sementara itu, meskipun sebagai sumber pendapatan terbesar, besaran Dana Bagi Hasil (DBH) cenderung menurun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 65 persen. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 472 persen dari tahun 2016 sampai dengan 2020, penerimaan ini bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Insentif Daerah.

2. Belanja Daerah

Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak

perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan Belanja Daerah pada periode tahun 2016-2020 (Tabel III-2) digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa datang.

Tabel III- 2 Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja (%)
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%
2017	8.223.730.774.720	8.101.145.367.965	98,51%
2018	10.128.810.000.000	9.345.057.063.691	92,26%
2019	12.900.000.000.000	7.397.629.233.306	57,35%
2020	10.683.921.000.000	9.328.251.817.708*	87,31%

Ket : \*) Data realisasi belanja tahun 2020 sedang dalam proses audit BPK  
Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hingga tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masih terbatasnya belanja aset tetap lainnya dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Penurunan belanja modal tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu anggaran akibat dari upaya *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2016-2020 tergambar dalam Tabel III-3.

Tabel III- 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian Pembiayaan (Rp.)		Pembiayaan Netto (Rp.)
	Penerimaan	Pengeluaran	
2016	226.684.544.888,84	-	226.684.544.888,84
2017	611.118.124.746,55	-	611.118.124.746,55
2018	541.264.815.481,88	3.690.000.000,00	537.574.815.481,88
2019	1.862.060.553.637,08	100.000.000.000,00	1.762.060.553.637,08
2020	2.249.394.164.474,82	150.000.000.000,00	2.099.394.164.474,82

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pada tahun 2016-2020, penerimaan pembiayaan daerah hanya bergantung pada SiLPA. SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 226,684 Miliar sedangkan SiLPA tertinggi yakni sebesar Rp 2,249 Triliun dialami pada tahun 2020. Secara lengkap pertumbuhan Pendapatan Daerah disajikan pada Tabel III-4.

Sebagaimana terlihat pada tabel III-4, semua komponen APBD mengalami pertumbuhan hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan pada pendapatan dan belanja daerah akibat Pandemi COVID-19. Khusus untuk pembiayaan daerah (*netto*), terjadi peningkatan tajam sejak tahun 2019 guna menutup defisit.

Tabel III- 4 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	7.985.727.918.251,00	8.158.103.650.157,00	10.671.715.200.487,00	11.775.086.836.200,40	9.987.385.879.199,02	0,07
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.029.364.843.886,00	4.558.751.727.469,00	5.802.442.683.947,00	6.555.853.195.408,37	5.143.521.676.422,02	0,08
1.1.1.	Pajak daerah	3.127.250.928.433,00	3.505.578.072.171,00	4.716.694.876.324,00	4.984.520.517.158,50	3.900.431.414.628,53	0,08
1.1.2.	Retribusi daerah	19.435.790.560,00	16.659.010.037,00	21.128.021.966,00	26.492.587.129,92	10.123.187.098,84	-0,06
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	167.385.377.651,00	208.807.497.552,00	199.302.498.965,00	392.379.951.610,19	110.988.636.348,20	0,11
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	715.292.747.243,00	857.707.147.709,00	865.317.286.691,00	1.152.460.139.509,76	1.121.978.438.346,45	0,13
1.2.	Dana Perimbangan	3.941.626.961.365,00	3.533.009.585.813,00	4.829.780.659.372,00	5.176.264.298.792,00	4.759.526.731.777,00	0,06
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	2.844.821.387.413,00	1.710.695.086.821,00	2.991.231.124.961,00	3.207.168.795.642,00	3.544.638.973.637,00	0,13
1.2.2.	Dana alokasi umum	80.402.179.000,00	714.906.576.000,00	767.682.423.000,00	815.693.641.000,00	831.404.756.000,00	2,01
1.2.3.	Dana alokasi khusus	1.016.403.394.952,00	1.107.407.922.992,00	1.070.867.111.411,00	1.153.401.862.150,00	383.483.002.140,00	-0,13
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.736.113.000,00	36.342.417.167,00	39.491.857.169,00	42.969.342.000,00	84.337.471.000,00	0,65
1.3.1	Hibah	9.736.113.000,00	13.793.749.000,00	15.510.730.094,00	14.922.090.000,00	11.998.645.000,00	0,08
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	9.883.392.000,00	72.338.826.000,00	1,94
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	100.000.000,00	23.981.127.075,00	18.163.860.000,00	-	119,28

Tabel III- 5 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Lanjutan)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	7.989.359.000.000,00	8.834.897.375.000,00	10.128.810.000.000,00	12.900.000.000.000,00	10.683.921.000.000,00	0,09
2.1	Belanja Tidak Langsung	4.197.167.944.503,67	5.570.709.846.709,00	5.902.699.907.001,00	7.918.967.622.124,00	6.171.964.627.233,82	0,13
2.1.1	Belanja Pegawai	991.505.508.003,67	1.698.837.530.019,00	1.707.144.345.924,00	1.959.480.650.977,00	1.922.832.701.353,82	0,21
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	849.120.600.000,00	1.035.431.514.000,00	1.077.644.430.400,00	815.124.182.734,00	223.050.003.062,00	-0,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.870.100.000,00	5.010.000.000,00	5.809.250.000,00	9.774.550.000,00	16.070.550.000,00	0,45
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.478.522.500.000,00	2.104.010.195.500,00	2.411.414.151.000,00	3.087.791.772.893,00	1.911.308.336.000,00	0,12
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	861.149.236.500,00	721.120.607.190,00	694.353.829.677,00	2.021.796.465.521,00	1.598.703.036.818,00	0,38
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00	6.300.000.000,00	6.333.900.000,00	25.000.000.000,00	500.000.000.000,00	5,36
2.2	Belanja Langsung	3.792.191.055.496,33	3.264.187.528.291,00	4.226.110.092.999,00	4.981.032.377.876,00	4.511.956.372.766,00	0,06
2.2.1	Belanja Pegawai	450.048.961.767,00	243.801.648.092,00	249.150.290.586,00	316.812.099.029,00	323.879.356.195,00	-0,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.695.886.958.784,33	2.001.134.625.074,00	1.905.863.134.023,00	2.839.199.050.718,00	2.870.659.107.195,00	0,16
2.2.3	Belanja Modal	1.646.255.134.945,00	1.019.251.255.125,00	2.071.096.668.390,00	1.825.021.228.128,00	1.317.417.909.377,00	0,06
3	PEMBIAYAAN	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	537.574.815.481,88	1.762.060.553.637,08	2.099.394.164.475,00	1,01
3.1	Penerimaan Pembiayaan	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	541.264.815.482,00	1.862.060.553.637,00	2.249.394.164.475,00	1,06
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	3.690.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	13,30

Sumber : BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

### 3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah Neraca Daerah. Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

- a. Aset. Aset adalah sumber daya ekonomu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- c. Ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca Pemerintah Daerah berasal dari perolehan sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi berikutnya.

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 117,11 persen. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah investasi jangka panjang, sebesar 11,83 persen. Pertumbuhan komponen aset daerah yang

tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 9,71 persen dan aset tetap sebesar 9,62 persen. Sedangkan untuk komponen kewajiban, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 1,25 persen dan 12,39 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban yakni sebesar 10,19 persen.

Tabel III- 5 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Aset						
1.1	Aset Lancer	3.339.405.804.165	3.411.781.785.371	4.711.582.578.883	3.613.788.154.289	4.404.786.818.401	9,71
1.2	Investasi Jangka Panjang	2.277.501.235.381	2.454.130.155.571	3.163.853.338.255	3.405.946.252.521	3.508.090.971.515	11,83
1.3	Aset Tetap	17.175.963.871.130	21.357.892.468.817	23.940.372.213.635	24.512.546.855.263	24.424.856.141.865	9,62
1.4	Aset Lainnya	320.313.481.494	1.660.688.842.635	2.115.656.568.776	2.340.778.339.182	2.620.389.279.539	117,11
	Jumlah Aset Daerah	23.113.184.392.170	28.884.493.252.394	33.931.464.699.550	33.873.059.601.255	34.958.123.211.320	11,37
2	Kewajiban						
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	716.158.960.129	431.196.150.168	637.394.054.235	302.167.251.216	451.905.062.835	1,25
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	1.269.022.047.698	1.280.941.024.624	1.695.671.573.004	1.971.133.019.278	12,39
3	Ekuitas	22.397.025.432.041	27.184.275.054.528	32.013.129.620.691	31.875.220.777.035	32.535.085.129.207	10,19
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	23.113.184.392.170	28.884.493.252.394	33.931.464.699.550	33.873.059.601.255	34.958.123.211.320	11,37

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel III-7.

Tabel III- 6 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Persediaan (Rp.)
2016	2.204.883.737.445
2017	2.513.224.064.671
2018	2.476.747.485.202
2019	1.076.273.198.749
2020	1.356.850.995.168
Rata-rata pertumbuhan (%)	-0,04

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio cepat, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 8,33, sedangkan rasio lancar memiliki rata-rata 4,46. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup sebesar 1,25 persen. Adapun kondisi rasio cepat yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun cepat perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Tabel III- 7 Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Rasio Lancar	4,66	7,91	7,39	11,96	9,75	8,33

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
	( <i>Current Ratio</i> ) (%)						
2	Rasio Cepat ( <i>Quick Ratio</i> ) (%)	1,58	2,08	3,51	8,4	6,74	4,46

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel III-9.

Tabel III- 8 Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,03	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
2	Rasio hutang terhadap modal	0,03	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2016 hingga 2020, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya sama, yakni 0,06 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,06 pada rasio hutang terhadap modal.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi

dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel III-10.

Tabel III- 9 Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)
2016	522.640.331.690
2017	355.404.331.595
2018	372.006.311.051
2019	285.372.793.813
2020	88.568.656.755
Rata-rata pertumbuhan (%)	-29,89

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM, 2021

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 adalah 53,77 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah (Tabel III-11).

Tabel III- 10 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	PAD (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	DOFD (%)
2016	4.029.364.843.886,11	7.985.727.918.251,11	50.46
2017	4.588.751.727.469,47	8.158.103.650.157,47	56.25
2018	5.802.442.683.946,67	10.671.715.200.487,20	54.37
2019	6.555.853.195.408,37	11.775.086.836.200,40	55.68
2020	5.143.521.676.422,02	9.987.385.879.199,02	51.50
Rata-rata	5.223.986.825.426,53	9.715.603.896.859,04	53.77

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tabel III-12. di bawah

menyajikan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah. juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami trend meningkat. Proporsi selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya didalam APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel III- 11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)/(d)*100%
1	2016	1.441.554.469.770,67	7.989.359.000.000	18,04
2	2017	1.695.886.958.784,33	8.834.897.375.000	19,20
3	2018	1.646.255.134.945,00	10.870.432.071.874	15,14
4	2019	1.670.230.950.000,00	7.397.629.233.306	22,58
5	2020	N.A	9.428.251.817.708	N.A

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020:

### 1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, melihat penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. sehingga diperoleh SiLPA. Perkembangan defisit riil anggaran dapat dilihat pada Tabel III-13.

Tabel III- 12 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	7.985.727.918.251	8.158.103.650.157	10.671.715.200.487	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	7.601.242.338.859	8.227.956.959.422	9.345.057.063.691	11.287.763.575.489	9.811.126.773.547
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3.690.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000
A	Defisit riil	384.485.579.392	-69.853.309.265	1.320.795.738.155	387.323.260.711	26.259.105.652
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	226.681.020.888	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	226.681.020.888	611.118.124.747	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.275.642.920.000

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM (2021)

Secara riil kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2017 ketika APBD mengalami defisit, yakni menjadi penutup defisit belanja daerah. Penutup defisit tersebut terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016, 2018 hingga 2020 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

## 2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disajikan pada Tabel III-14. dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2016-2020 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

Tabel III- 13 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	449.734.484.026,79	100,00	545.491.000.183,57	100,00	1.625.434.831.455,95	100,00	2.206.090.542.483,11	100,00	3.947.756.080.958,10	100,00
1	Pelampauan penerimaan PAD	107.999.975.809,52	24,01	421.162.210.390,12	77,21	673.385.809.370,67	41,43	243.697.539.011,03	11,05	970.117.544.356,28	24,57
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	128.499.421.929,43	28,57	-491.637.254.661,00	-90,13	404.858.194.977,00	24,91	1.044.465.047,00	0,05	567.177.252.127,00	14,37
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-13.445.934.600,00	-2,99	4.847.919.707,90	0,89	2.236.011.626,40	0,14	-577.689.200,00	-0,03	11.067.120.000,00	0,28
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	226.681.020.887,84	50,40	611.118.124.746,55	112,03	541.264.815.481,88	33,30	1.861.926.227.625,08	84,40	2.249.394.164.474,82	56,98
5	Pelampauan pembiayaan netto	N/A	-	N/A	-	3.690.000.000,00	0,23	100.000.000.000,00	4,53	150.000.000.000,00	3,80

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM. 2021

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari *pertama*, strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia. mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

##### A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam dua tahun kedepan sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan. terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari

bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih mengandalkan pada Pajak Daerah. terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, peningkatan pelayanan dan perluasan objek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,47 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data realisasi pendapatan daerah tahun 2019-2020, penetapan APBD tahun 2021 dan potensi pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD. Rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen. yaitu pendapatan asli daerah. pendapatan transfer. dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD. serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Optimalisasi pengelolaan aset kawasan ekonomi sebagai aset daerah.
  - b. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah.
  - c. Peninjauan kembali terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan.

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
  - e. Pelaksanaan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah guna mengukur kapasitas pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan.
  - f. Pelaksanaan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal. yaitu dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi. kepolisian. PD teknis penghasil. dan kecamatan.
  - g. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD penghasil serta Unit Pelayanan Teknis untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sumberdaya kawasan ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perundangan.
  - h. Meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD dengan melakukan penataan manajemen yang mendorong BUMD dikelola secara profesional.
2. Komponen Pendapatan Transfer. Bagi Provinsi Kalimantan Timur. komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu. strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
  - b. Peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
  - c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
3. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. terutama dalam rangka bagi hasil

pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. terutama dalam hal dana transfer.

Tabel III- 14 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

KODE REK	KOMPONEN PENERIMAAN	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	9.590.400.000.000	11.043.618.621.745	12.136.620.129.156
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.555.853.195.408	5.143.521.676.422	5.396.942.567.871	5.986.210.931.582	7.037.700.381.643
4.1.01	Pajak Daerah	4.984.520.517.159	3.900.431.414.629	4.260.000.000.000	5.042.645.000.000	6.015.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.492.587.130	10.123.187.099	17.841.347.000	20.961.945.240	23.513.538.659
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	392.379.951.610	110.988.636.348	243.641.687.732	149.177.986.342	174.327.842.984
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.152.460.139.510	1.121.978.438.346	875.459.533.139	773.426.000.000	824.859.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.180.730.432.129	5.044.808.890.162	5.086.179.747.513
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.180.730.432.129	5.044.808.890.162	5.086.179.747.513
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.176.264.298.792	4.759.526.731.777	4.143.276.121.129	5.007.354.579.162	5.048.725.436.513
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.207.168.795.642	3.544.638.973.637	2.620.455.460.129	3.484.533.918.162	3.525.904.775.513
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	815.693.641.000	831.404.756.000	856.333.359.000	856.333.359.000	856.333.359.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.153.401.862.150	212.147.502.140	318.456.830.000	318.456.830.000	318.456.830.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	171.335.500.000	348.030.472.000	348.030.472.000	348.030.472.000

KODE REK	KOMPONEN PENERIMAAN	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.883.392.000	72.338.826.000	37.454.311.000	37.454.311.000	37.454.311.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33.085.950.000	11.998.645.000	12.727.000.000	12.598.800.000	12.740.000.000
4.03.01	Hibah	33.085.950.000	11.998.645.000	12.727.000.000	12.598.800.000	12.740.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2021

## B. Rencana Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perhitungan belanja daerah harus dilakukan memperhatikan kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah, karena pengalokasian belanja menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan melalui strategi perencanaan berbasis kinerja yang berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Disamping itu alokasi belanja daerah disusun dengan strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Secara rinci untuk realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel III-16.

Tabel III- 15 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

Kode Rek	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
2	BELANJA	12.900.000.000.000	10.683.921.000.000
2.01	Belanja Tidak Langsung	7.918.967.622.124	6.171.964.627.234
2.01.01	Belanja Pegawai	1.959.480.650.977	1.922.832.701.354
2.01.04	Belanja Hibah	815.124.182.734	223.050.003.062
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	16.070.550.000
2.01.06	Belanja Bagi Hasil	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	2.021.796.465.521	1.598.703.036.818
2.01.08	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	500.000.000.000
2.02	Belanja Langsung	4.981.032.377.876	4.511.956.372.766
2.02.01	Belanja Pegawai	316.812.099.029	323.879.356.195
2.02.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.199.050.718	2.870.659.107.195
2.02.03	Belanja Modal	1.825.021.228.128	1.317.417.909.377
3	PEMBIAYAAN	1.762.060.553.637	2.099.394.164.475
3.01	Penerimaan Pembiayaan	1.862.060.553.637	2.249.394.164.475
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	150.000.000.000

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM. 2021

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhitung tahun 2021 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak

terduga dan belanja transfer. Klasifikasi ini menyebabkan perbedaan klasifikasi belanja yang telah disusun pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyajian Tabel Belanja Daerah di pisah menjadi 2 (dua) bagian. dimana tahun 2019-2020 menggunakan Klasifikasi sesuai PP Nomor 58 tahun 2006. sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan klasifikasi belanja sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 seperti disajikan pada Tabel III-17.

Tabel III- 16 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

Kode Rek	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
5	BELANJA	11.616.186.000.000	10.806.996.675.345	11.886.763.209.156
5.01	BELANJA OPERASI	5.435.615.961.300	5.455.989.649.862	5.179.359.797.259
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353	2.819.754.544.723	2.540.827.464.009
5.01.05	Belanja Hibah	274.429.463.838	288.150.937.030	296.795.465.141
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000	16.121.850.000	9.774.550.000
5.02	BELANJA MODAL	1.984.395.175.358	1.720.052.686.483	2.399.903.411.897
5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999	33.766.647.534	47.112.913.028
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492	426.692.779.400	595.343.075.920
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019	590.905.137.277	24.460.358.803
5.02.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	757.752.039.798	656.811.429.461	916.416.109.184
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050	11.876.692.811	16.570.954.962
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	3.944.241.500.000	3.407.751.500.000	4.107.500.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000	3.107.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	800.000.000.000	1.000.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM. 2021

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, Pemerintah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti disajikan pada Tabel III-18. Komponen belanja wajib mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel III- 17 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2021-2023

	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	5.729.400.964.884	5.529.265.228.406	8.859.499.554.655	8.354.025.436.590	9.308.280.638.094
1	Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan TTP)	1.964.758.191.991	2.001.875.319.326	1.940.716.624.687	1.940.716.624.687	1.940.716.624.687
2	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	23.802.600.000	24.513.262.080	59.966.551.103	59.966.551.103	59.966.551.103
3	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.240.000.000.000	2.607.571.500.000	3.107.500.000.000
4	Operasional Wajib Kantor	0	0	83.922.193.786	83.922.193.786	83.922.193.786
5	Insentif pemungut Pajak	0	0	129.632.250.000	151.279.350.000	180.450.000.000
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	653.048.400.000	623.341.242.000	666.487.302.000	666.487.302.000	666.487.302.000
7	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	0	162.729.921.000	171.536.608.000	196.941.606.585	202.945.387.865
8	Dana Insentif Daerah (DID)	0	62.010.148.000	37.454.311.000	37.454.311.000	37.454.311.000
9	Belanja pajak rokok	0	47.187.000.000	60.000.000.000	69.643.500.000	75.000.000.000
10	BLUD	0	696.300.000.000	700.150.000.000	651.500.000.000	703.500.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik (Kesbangpol)	0	0	2.381.863.838	2.381.863.838	2.381.863.838
12	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	1.661.741.500.000	800.000.000.000	1.000.000.000.000
13	Bantuan keuangan Ke Desa	0	0	42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000

	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
14	Bantuan Keuangan Pengawasan	0	0	251.933.363.342	6.000.000.000	
15	Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian	0	0	638.508.829.668	10.000.000.000	
17	Belanja Tidak Terduga	0			223.202.839.000	200.000.000.000
18	Belanja Fungsi Pendidikan	0			642.368.664.868	897.769.740.183
19	Belanja Fungsi Kesehatan	0	0	120.678.514.191	120.142.760.683	64.383.473.640
20	Belanja untuk Pengawasan	0	0	21.838.214.268	21.691.480.268	22.684.847.281
21	Belanja untuk Peningkatan SDM ASN	0	0	30.051.428.772	20.254.888.772	20.618.342.711
B	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>249.856.920.000</b>	<b>249.856.920.000</b>	<b>236.621.946.400</b>	<b>150.000.000.000</b>
1	Pembayaran Pokok Utang	-	0	0	0	-
2	Penyertaan modal	150.000.000.000	249.856.920.000	249.856.920.000	236.621.946.400	150.000.000.000
	<b>TOTAL BELANJA WAJIB &amp; MENGIKAT</b>	<b>5.879.400.964.884</b>	<b>5.779.122.148.406</b>	<b>9.109.356.474.655</b>	<b>8.590.647.382.990</b>	<b>9.458.280.638.094</b>

Sumber: BAPPEDA Prov. KALTIM. 2021

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2019-2023 seperti disajikan pada Tabel III-19.

Tabel III- 18 Proyeksi Kapasitas Riil Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	9.590.400.000.000	11.043.618.621.745	12.136.620.129.156
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.275.642.920.000	-	-
Total Penerimaan		13.637.147.389.837	12.236.769.693.547	11.866.042.920.000	11.043.618.621.745	12.136.620.129.156
Dikurangi						
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat	5.879.400.964.884	5.779.122.148.406	9.109.356.474.655	8.590.647.382.990	9.458.280.638.094
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		7.757.746.424.953	6.457.647.545.141	2.756.686.445.345	2.452.971.238.755	2.678.339.491.062

Sumber: BAPPEDA Prov. KALTIM, 2021

Adapun alokasi Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Kalimantan Timur guna mendanai prioritas pembangunan disajikan dalam tabel III-20.

Tabel III- 19 Alokasi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi		Proyeksi		
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	7.757.746.424.953	6.457.647.545.141	2.756.686.445.345	2.452.971.238.755	2.678.339.491.062
- Prioritas I	4.298.780.414.747	3.578.359.909.148	1.527.555.691.010	1.359.258.751.379	1.484.141.491.295
- Prioritas II	2.406.514.107.314	2.003.213.184.110	855.145.870.562	760.931.018.822	830.842.027.613
- Prioritas III	1.052.451.902.892	876.074.451.883	373.984.883.773	332.781.468.554	363.355.972.153

Sumber: BAPPEDA Prov. KALTIM. 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagian besar belanja wajib dan mengikat untuk pemenuhan pelayanan dasar telah dialokasikan pada belanja wajib dan mengikat seperti tertuang pada tabel Tabel III-20. Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2019-2023. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Alokasi belanja operasi terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. mempunyai arah kebijakan yaitu penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, dengan tetap menjaga dan mengupayakan besaran SiLPA seminimal mungkin dari tahun ke tahun. Strategi lainnya adalah kerjasama pembiayaan pembangunan secara komplementer dan terpadu baik melalui Pinjaman (*Loan*). APBN dan APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah. Sementara untuk komponen pengeluaran pembiayaan, terdiri dari nilai penyertaan modal yang dinilainya diasumsikan sama dengan tahun 2021. Detil pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel III-21 berikut.

Tabel III- 20 Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
	Pembiayaan Daerah					
A	Penerimaan Pembiayaan	1.861.926.227.625	2.249.394.164.475	2.275.642.920.000	0	0
-	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.861.926.227.625	2.249.394.164.475	2.275.642.920.000	0	0
B	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	150.000.000.000	249.856.920.000	236.621.946.400	150.000.000.000
-	Penyertaan Modal	100.000.000.000	150.000.000.000	249.856.920.000	236.621.946.400	150.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi Kaltim, 2021

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam setiap periode lima tahun. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi kebijakan yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perubahan RPJMD 2019-2023 ini dilakukan dengan memperhatikan pemutakhiran permasalahan dan isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan pembangunan Kalimantan Timur paling tidak hingga akhir periode keempat.

### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi Permasalahan pembangunan daerah dan per-urusan Pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan. Sedangkan permasalahan per-urusan pemerintahan adalah persoalan yang dihadapi oleh beberapa urusan Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### 4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan dan/atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang

dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory* (wajib untuk dilaksanakan).

Setelah menelaah kajian data dan informasi terkait situasi dan kondisi beserta dinamika di daerah di Bab 2. Dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama (*core problem*) pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yakni “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur”.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan utama pembangunan tersebut, maka dapat dirumuskan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Tingginya ketimpangan daya saing SDM;
- 2) Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata;
- 3) Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar;
- 5) Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
- 6) Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat.

Keenam permasalahan pokok tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, yang dapat diuraikan lebih detil sebagai berikut:

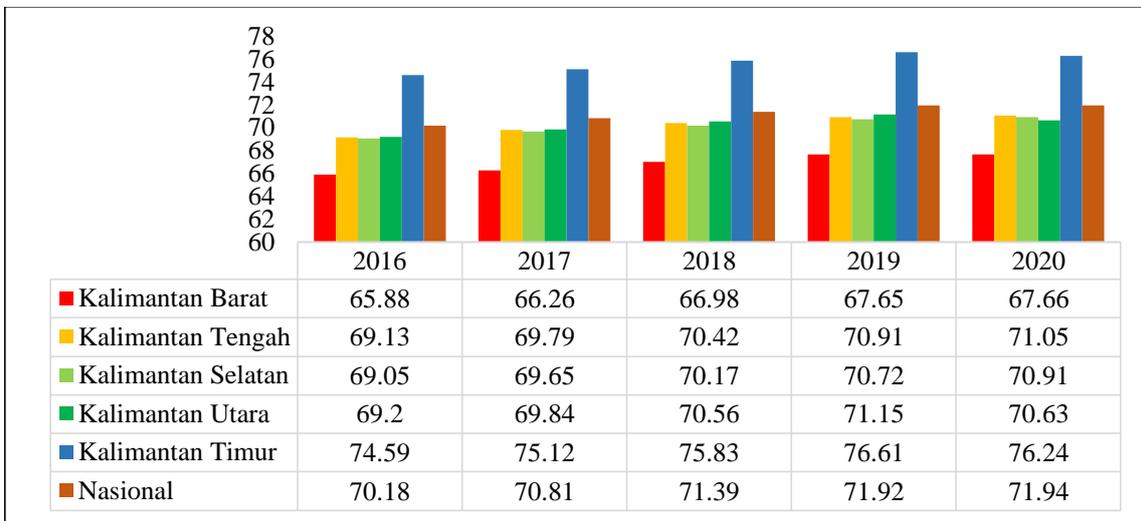
#### 1. Tingginya ketimpangan daya saing SDM

Salah satu permasalahan yang masih memerlukan perhatian dalam perumusan perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Aspek daya saing seringkali diukur dengan

menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kalimantan Timur sudah lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta bahkan dibandingkan rata-rata nasional. Namun, bila dicermati lebih lanjut daya saing antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka akan terlihat adanya ketimpangan IPM yang menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.

Secara umum, IPM Provinsi Kalimantan Timur periode 2015 hingga dengan 2019 selalu meningkat dan selalu berada di atas IPM Nasional dan jauh di atas provinsi lain di Pulau Kalimantan. Meski demikian, IPM Kaltim pada tahun 2020 menurun ke angka 76,24 dari angka 76,61 di tahun 2019. Angka ini tidak linier dengan perkembangan IPM Nasional yang cenderung menanjak di tahun yang sama walau sedikit. Anomali yang terjadi pada capaian IPM ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi salah satu dari komponen utama penyusun IPM yakni pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator yang merupakan komponen hidup layak pada penghitungan IPM tersebut mengalami penurunan dikarenakan banyaknya dampak negatif akibat pandemi COVID-19 yang diterima rumah tangga secara langsung seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan produksi, hingga menurunnya aktivitas perdagangan yang kesemuanya berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

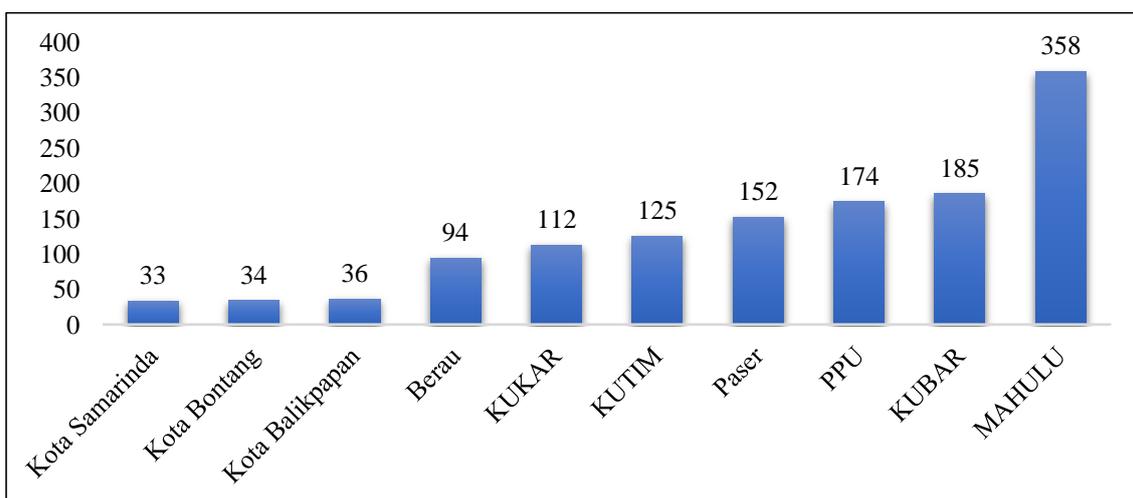
Selanjutnya, secara detail perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar IV-1 di bawah ini.



Gambar IV- 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020

(Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020)

Ketimpangan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur terlihat dari nilai IPM setiap Kabupaten/Kota (Gambar IV-2.), dimana ketimpangan 13,02 poin terlihat dari nilai IPM tertinggi yakni Samarinda sebesar 80,11 dan IPM sementara terendah yakni IPM Mahakam Ulu sebesar 67,09. Selanjutnya secara nasional IPM tertinggi Kalimantan Timur yakni IPM Kota Samarinda berada pada peringkat ke-33 secara nasional disusul IPM Kota Bontang dan Kota Balikpapan yang berada pada peringkat ke-34 dan peringkat ke-36. Sedangkan kabupaten lain masih berada pada kisaran peringkat ke-94 dan peringkat ke-358. Perbedaan nilai IPM yang cukup signifikan antar kabupaten/kota harus menjadi pemicu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi.



Gambar IV- 2 Peringkat Secara Nasional Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2020)

Timbangnya kualitas dan daya saing SDM Kalimantan Timur di atas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya. Secara keseluruhan dapat diuraikan, bahwa permasalahan pokok tingginya ketimpangan daya saing SDM disebabkan oleh masalah-masalah berikut:

- 1) Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan;
  - 2) Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah;
  - 3) Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata, terutama pada daerah 3T;
  - 4) Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender.
2. Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata

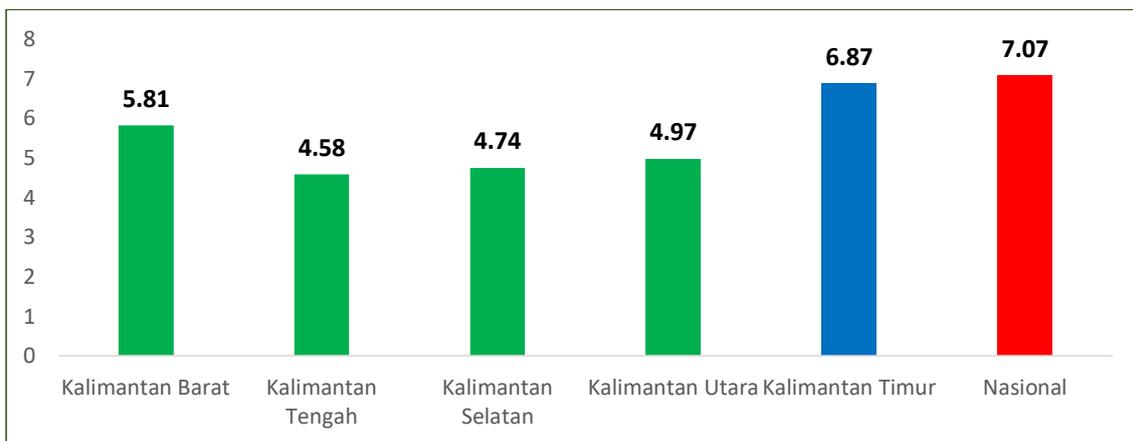
Permasalahan pokok berikutnya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah masih belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dengan masih tingginya disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur, masih harus diupayakan dalam pemenuhan sarana, prasarana, alat dan tenaga kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Pemenuhan tersebut terus diupayakan oleh pemerintah daerah, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan diupayakan dengan akreditasi puskesmas. masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait Pemenuhan SDM Kesehatan yaitu :

- 1) Distribusi tenaga kesehatan tidak merata
- 2) Terdapat 52 Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), dimana baru 16 Puskesmas yang sudah memenuhi standar, karena :
  - Daerah tidak diminati
  - Formasi CPNS terbatas

- Dukungan pemerintah daerah pada program penugasan tenaga kesehatan (nusantara sehat), khususnya penugasan khusus yang berbasis tim dan individu yang masih dirasakan kurang.

Terbatasnya lapangan usaha masyarakat (atau paling tidak yang sesuai dengan kapasitas dan persyaratan yang dituntut) di banyak daerah di Kaltim yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau taraf hidup pra-sejahtera. Kondisi ini tentu saja lebih banyak dihadapi oleh keluarga masyarakat yang tinggal dan menetap di Kalimantan Timur, daripada oleh pekerja migran yang tinggal sementara di provinsi ini. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan harus semakin diefektifkan.

Terbatasnya lapangan usaha masyarakat atau yang sesuai dengan kapasitas masyarakat Kalimantan Timur di atas berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka, sehingga selanjutnya menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui dengan mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja guna mengetahui indikasi besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Meskipun TPT Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional, namun faktanya tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Sehingga program pembangunan ke depan diharapkan berhasil mengentaskan kemiskinan atau taraf hidup pra sejahtera masyarakat Kalimantan Timur.



Gambar IV- 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Pulau Kalimantan Agustus Tahun 2020

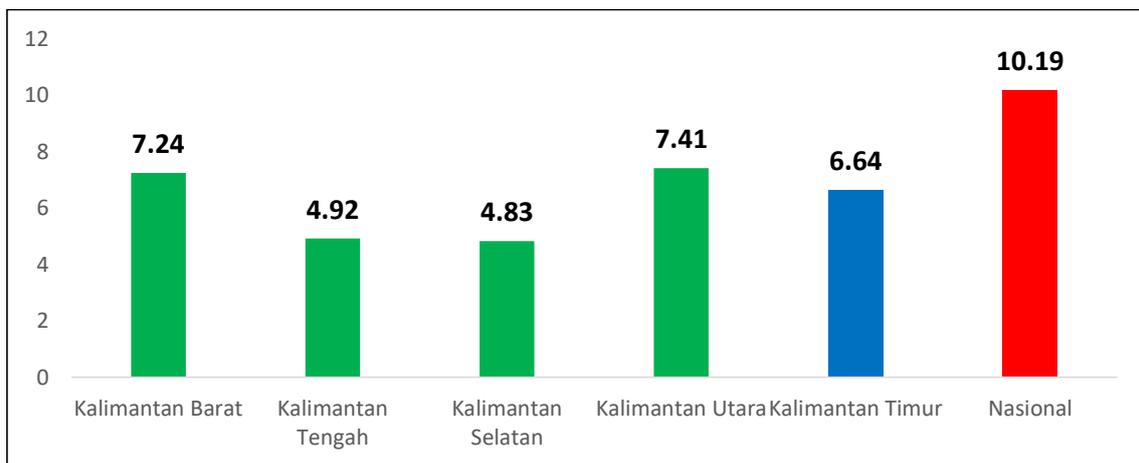
(Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020)

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Pemerintah mengkondisikan penciptaan pasar kerja yang sesuai dengan tuntutan global. Dalam hal ini tentu saja amat penting untuk mendorong sektor pendidikan, baik pada tingkat menengah maupun juga pendidikan tinggi, agar mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dalam arti siap kerja ataupun bahkan siap pakai.

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan dan peningkatan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja juga masih terjadi dan perlu memperoleh perhatian lebih dalam program peningkatan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Urutan logisnya, bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Sektor industri berbasis lahan khususnya di sector Pertambangan dan Perkebunan, justru berada dan tumbuh berkembang di tengah banyak wilayah yang masih relatif belum berkembang optimal/tertinggal, tidak terkecuali pembangunan pendidikannya Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan dan memperluas permasalahan yaitu bertambahnya kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas. Tiga sektor terkait kebutuhan dasar dimaksud perlu menjadi perhatian besar ke depan.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan dimana program-program masih terpusat pada wilayah perkotaan dan hanya sebagian kecil berada di kabupaten/kota,

terlebih di sekitar pedesaan. Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya *Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Timur dari 0,315 (Maret-2016) menjadi 0,328 (Maret-2020) yang mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tambahan, permasalahan di atas juga merupakan hasil evaluasi dari perbandingan persentase penduduk miskin antar Kaltim dan Nasional, dan Kaltim dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan, sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar IV- 4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Pulau Kalimantan September Tahun 2020  
(Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020)

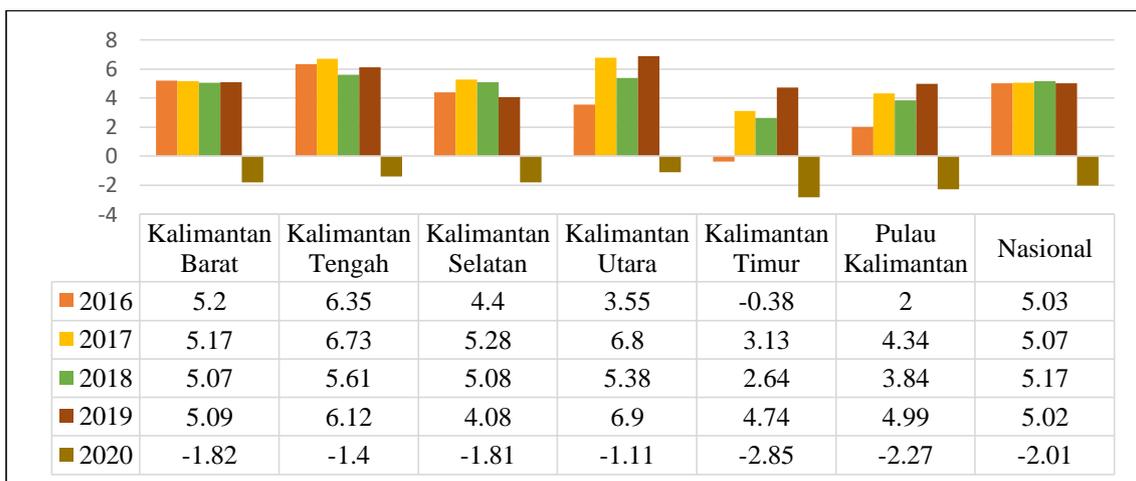
Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata disebabkan oleh masalah-masalah berikut ini :

- 1) Desa dan Masyarakat belum optimal diberdayakan; dan
- 2) Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja.
3. Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta berorientasi pada penurunan emisi. Hingga saat ini, perekonomian Kalimantan Timur masih ditopang oleh aktivitas perekonomian yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam dan berbasis lahan yang berpotensi menghasilkan dampak degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup. Oleh karenanya sudah menjadi tekad bahwa kegiatan

perekonomian tersebut harus ditransformasi menjadi perekonomian yang berwawasan kelanjutan lingkungan hidup (*sustainable development* atau *green-growth*). Berbagai upaya untuk mentransformasikan struktur perekonomian dari yang berbasis ekstraktif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berorientasi pada nilai tambah pengolahan hasil sumber daya alam terbarukan telah diupayakan bahkan sejak RPJMD sebelumnya. Prinsip utama dari upaya tersebut adalah efisiensi dan peningkatan nilai tambah (termasuk hilirisasi), serta upaya-upaya reinvestasi sumberdaya alam yang tergunakan guna keberlanjutannya.

Gambar IV-5 di bawah menjelaskan perbandingan antara Laju PDRB Provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berada secara konsisten pada urutan terendah selama 4 tahun terakhir. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2019, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batubara) akibat terjadinya penurunan harga dan permintaan batu bara di level internasional, padahal sektor tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar (bahkan dominan) dari Kalimantan Timur.



Gambar IV- 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (ADHK) Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020  
(Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020)

Secara umum, saat ini nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun

2015 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 653,68 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 542,15 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 313,17 triliun. Secara umum, saat ini nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 653,68 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 542,15 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 313,17 triliun.

Tabel IV- 1 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020 (%)

Provinsi	PDRB Per Kapita				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	3,63	3,66	3,62	3,69	-3,08
Kalimantan Tengah	4,05	4,47	3,46	4,02	-3,33
Kalimantan Selatan	2,71	3,64	3,54	2,57	-3,17
Kalimantan Utara	-24	2,98	2,3	3,19	-4,49
Kalimantan Timur	-2,5	0,99	0,58	2,7	-4,68
Nasional	3,72	3,79	3,93	3,82	-13,15

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Selain itu, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur juga mengisi tempat paling rendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dalam rentang waktu 2015 -2018. Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita Kalimantan Timur berhasil naik menjadi nomor 2 (dua) terendah, akan tetapi hanya terpaut 0,15 % dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, PDRB Per Kapita Kalimantan Timur tetap tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Perlu digaris-bawahi, bahwa ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produktivitas kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Di sektor pertambangan batubara dan mineral lainnya, luas areal yang terdapat perijinan seluas 4,8 juta hektar,

namun yang dieksploitasi hanya seluas  $\pm$  130 ribu hektar atau hanya 2,7% dari total luas IUP yang diberikan.

Pada sektor pertanian dalam arti luas, ternyata sektor kehutanan masih belum mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah diperuntukan untuk hutan produksi. Pada produksi hutan alam, produktivitas setiap tahun berada pada angka 30 m<sup>3</sup>/hektar/tahun dengan total produksi 2,0-2,6 juta meter kubik per tahun. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektar peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, izin perkebunan yang diterbitkan 2,88 juta hektar dengan luasan areal tertanam 1,4 juta hektar, termasuk 1,2 juta hektar kelapa sawit. Masih terdapat 1,48 juta hektar areal izin perkebunan yang belum ditanami.

Sementara itu industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), walaupun untuk *Palm Kernel Oil* (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Meskipun demikian Pemerintah Kalimantan Timur terus menggenjot agenda transformasi ekonomi dengan menangkap peluang yang ada, salah satunya adalah melalui ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan. Pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan pada pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh sebuah provinsi. Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan, khususnya sumber daya terbarukan melalui peningkatan nilai tambah hasil pengolahan sumber daya alam akan mampu menyelaraskan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan berbasis sektor unggulan yang dimaksud masih belum dapat diimplementasikan dan belum sesuai harapan. Beberapa kondisi permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk diselesaikan secara berjenjang diantaranya adalah masih kurangnya SDM yang kompeten dan mampu mengelola potensi wilayah utamanya sektor agribisnis dan ekonomi kreatif, masih belum optimalnya kondusivitas investasi UMKM sehingga ketertarikan investor dan perusahaan untuk berinvestasi pada usaha ekonomi kerakyatan masih rendah serta belum optimalnya pengembangan

industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan hasil kajian TPB/SDGs dalam dokumen KLHS Revisi RPJMD, dimana masih diperlukan upaya tambahan pada Tujuan 9 (Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi) khususnya indikator 9.2, 9.3 dan 9.4 (Lihat Bab 2 Perubahan RPJMD) guna memedomani prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan industri dan UMKM.

Lebih lanjut, KLHS Revisi RPJMD juga mengarahkan optimalisasi perlindungan pencadangan kawasan utamanya diluar kawasan hutan sumber pangan dan diversifikasi bahan makanan pokok, variasi pada pola konsumsi yang diharapkan dapat menumbuhkan kebutuhan terhadap bahan pangan yang lebih beragam sehingga dapat diikuti dengan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta sumber pangan lainnya, seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang lebih beragam.

Dapat disimpulkan bahwa lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan meliputi masalah-masalah berikut :

- 1) Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan;
- 2) Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk primer (migas dan batubara);
- 3) Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim;
- 4) Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dalam pemenuhan pangan lokal;
- 5) Masih rendahnya produksi sumber pangan hewani asal ternak;
- 6) Produktivitas perkebunan masih rendah ;
- 7) Rendahnya produksi perikanan;
- 8) Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- 9) Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan;
- 10) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah;

11) Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah.

4. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan serta rendahnya kualitas infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni serta ketenagalistrikan.

Dilihat dari ketersediaan prasarana jalan, tahun 2020 kondisi jalan mantap Provinsi hanya mencapai 69,77 persen dari total yang ada. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, baik dari sisi jumlah dan kondisinya yang belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan layanan transportasi guna mendukung mobilitas orang, barang dan jasa. Demikian pula pada transportasi darat, sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang minim dan bahkan sebagian sudah pada kondisi kurang layak menyebabkan angka kecelakaan masih tinggi dan bahkan cenderung semakin meningkat.

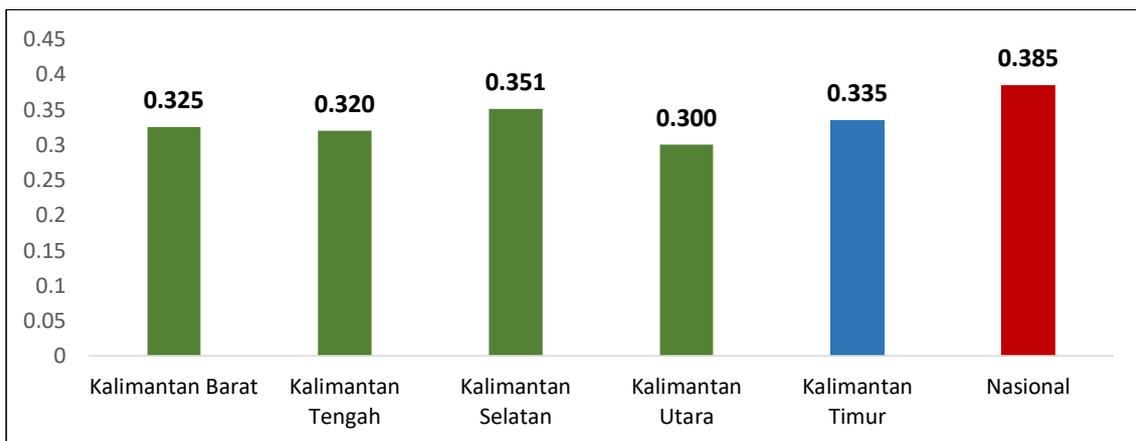
Pada sektor layanan air minum, terdapat 3 (tiga) daerah yang masih mengalami krisis sumber air baku, sehingga menyebabkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tidak optimal. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini kemudian menjadi dasar rencana penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional), dengan penggunaan sumber air baku bersama yang berasal dari daerah yang potensial memiliki sumber air berlebih, seperti contohnya Kabupaten Kutai Kartanegara (Waduk Marangkayu), Kabupaten Kutai Timur (Eks Void Tambang dan Bendali Suka Rahmat), Kabupaten Paser (Sungai Long Kali dan Bendungan Lambakan), dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih terdapat 6 (enam) titik kawasan permukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan daftar sesuai dengan skala prioritas (*backlog*) kepemilikan dan

penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum sepenuhnya merata, meskipun pada tahun 2020, rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah keluarga yang memiliki sumber penerangan listrik dan jumlah total keluarga) telah mencapai 90,21 persen.

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan: (a) masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota; serta (b) belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua situasi tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan maupun dalam infrastruktur tata kota.

Untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, data perbandingan antara Indeks Gini pada Provinsi Kaltim dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.6. Berdasarkan angka indeks tersebut maka Provinsi Kalimantan Timur (0,3335) masuk pada kategori ketimpangan moderat sebagaimana provinsi di Kalimantan lainnya (meski tidak setinggi Kalimantan Selatan) dan bahkan lebih rendah dari tingkat Nasional (0.385).



Gambar IV- 6 Indeks Gini Provinsi Pulau Kalimantan September Tahun 2020

(Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020)

Informasi penting lainnya, bahwa dalam menjawab tantangan global ke depan, pemerataan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan

informatika masih perlu dioptimalkan. Penerapan industri 4.0 yang telah mulai dicanangkan di Indonesia, membutuhkan fasilitas dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas teknologi komunikasi dan informatika yang baik. Belum meratanya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika baik antar perangkat daerah di tingkat provinsi maupun antar kabuapten/kota, disertai dengan masih rendahnya kualitas jaringan yang dimiliki, membutuhkan upaya lebih agar Kalimantan Timur mampu berjalan menuju industri 4.0.

Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur merupakan pokok permasalahan yang membutuhkan perhatian cukup besar. Dapat dirangkum keseluruhan uraian pembahasan di atas, bahwa permasalahan pokok ini disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut ini:

- 1) Rendahnya Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung ekonomi Kawasan;
- 2) Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air ;
- 3) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- 4) Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir;
- 5) Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok;
- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

##### 5. Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang sejak awal (paling tidak sejak 2010) telah berkomitmen untuk menjadi provinsi hijau (dengan slogan Kaltim Green) dengan menerapkan prinsip Pembangunan Hijau yang bercirikan: (a) memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta adil; (b) mengedepankan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan; (c) menjamin ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif; serta (d) berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca/GRK. Hal ini dibuktikan dengan berbagai perangkat kebijakan daerah yang telah diterbitkan, seperti Pergub Kaltim No.39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Perda Kaltim No. 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim serta Perda Kaltim No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perangkat kebijakan di daerah ini melengkapi berbagai instrumen lingkungan hidup wajib yang telah ditetapkan secara nasional, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, AMDAL, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Berdasarkan hasil identifikasi sumber-sumber emisi di Provinsi Kalimantan Timur, diketahui sumber emisi terbesar berasal dari kegiatan alih fungsi lahan dan hutan, energi, pertanian dan peternakan serta limbah. Upaya-upaya untuk memitigasi dan mengadaptasinya telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 (Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim) dan sejumlah program kegiatan serta penganggaran telah dialokasikan secara cukup. Di dalam RPJMD 2019-2023, berdasarkan penandaan kegiatan/*budget tagging* oleh Bappeda, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan yang berkenaan dengan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, penguatan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam perizinan usaha dan mendorong ekonomi alternatif bagi masyarakat dengan total pendanaan mencapai 460an Miliar Rupiah telah dialokasikan termasuk pada Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota yang terdapat setidaknya 97 (sembilan puluh tujuh) program dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) kegiatan yang apabila dilaksanakan dengan baik diharapkan akan dapat menghasilkan pengurangan emisi di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Berbagai hal tersebut mendasari ditetapkannya Kalimantan Timur oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan/KLHK sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang akan menerima insentif berbasis hasil dari Program Penurunan Emisi di bawah skema *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund* yang dikelola oleh Bank Dunia dengan periode pelaksanaan sejak Juni 2019 – Desember 2024. Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund akan mempercepat dan merealisasikan dengan optimal pelaksanaan REDD+ bukan hanya di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat nasional yang berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian target nasional dan komitmen internasional Indonesia dalam NDC/*Nationally Determined Contribution* (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional) terhadap penanggulangan emisi global.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah direncanakan, risiko penurunan kualitas lingkungan hidup masih terjadi. Kondisi ini dapat dimengerti mengingat perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang masih didominasi oleh sumber daya tak terbarukan (*unrenewable resources*), tentunya Sektor Pertambangan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diukur berdasarkan 3 (tiga) parameter, yaitu: (a) kualitas air (IKA); (b) kualitas udara (IKU); dan (c) tutupan hutan/lahan (ITH) serta dinamika vegetasi, menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun dalam kenyataannya belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di banyak provinsi tidak terkecuali Kalimantan Timur meskipun Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi dengan IKLH sangat baik (IKLH > 80) bersama dengan Provinsi Papua Barat, Papua dan Sulawesi Tengah (sumber: IKLH, KLHK, 2019).

Pemantauan yang dilakukan secara berkala di tingkat provinsi terkadang menunjukkan hasil skor IKLH yang berbeda dengan hasil penghitungan nasional. Berdasarkan pemantauan IKLH yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, diperoleh skor IKLH yang lebih rendah dari nasional yaitu 78,81. Angka ini meningkat dari yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 yaitu 75,75.

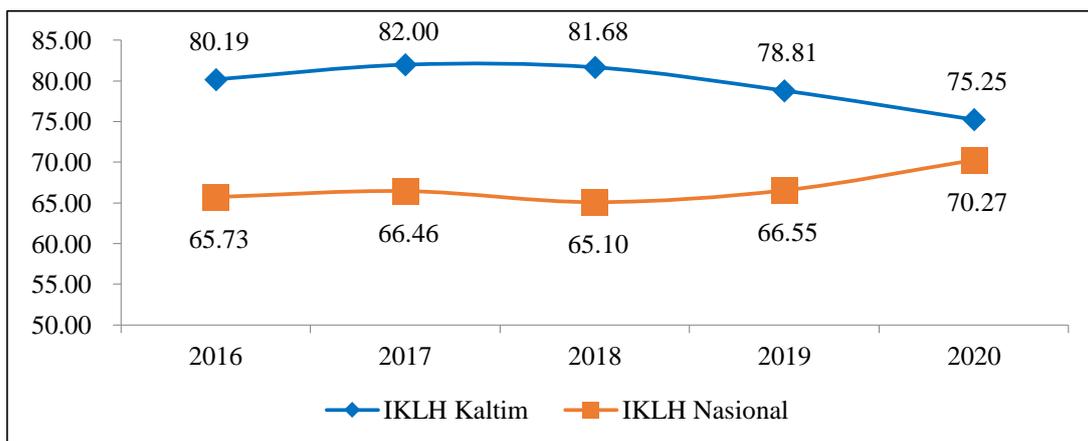
Untuk memperoleh IKA, dilakukan pemantauan kualitas air pada sungai prioritas, yaitu Sungai Segah, Sungai Kelay dan Sungai Mahakam dengan frekwensi pemantauan 2 (dua) kali dalam satu tahun meliputi 27 (dua puluh tujuh) titik sampling pada Sungai Mahakam dan 6 (enam) titik pada Sungai Segah dan Kelay. Hasilnya pemantauan menunjukkan Sungai Mahakam tercemar ringan (IP 4,9) sedangkan Sungai Segah (IP 5,9) dan Sungai Kelay (IP 6,4) keduanya masuk kategori Tercemar Sedang.

Pemantauan IKU dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian sampel udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 4 (empat) lokasi utama seperti kawasan permukiman, perkantoran, industri dan transformasi di seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur dengan frekwensi pemantauan 3

(kali) dan 5 (kali) pemantauan hanya untuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu dalam satu tahun. Skor 89,75 diperoleh dari hasil pemantauan, yang berarti IKU berada pada kategori Sangat Baik.

Indeks Tutupan Hutan (ITH) dengan mempertimbangkan bahwa indeks ini merupakan bagian pengukuran tingkat nasional, maka dalam dokumen IKLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, skor ITH merujuk pada angka hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK pada 30 April 2019 yaitu 77,32 dimana angka ini masuk kategori Baik.

Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan di alur perairan. Selain itu, Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batubara yang sebagian menimbulkan/menyisakan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman, sebagai konsekwensi logis dari pembangunan perekonomian berbasis sumber daya alam dan peningkatan populasi penduduknya. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir (2016-2020) disajikan dalam Gambar 4.7. berikut:



Gambar IV- 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

(Sumber : DLH Provinsi KALTIM, 2020)

Gambar IV-7 menunjukkan pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 75,81 (predikat baik,  $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) namun terus menurun pada tahun 2020 menjadi 75,25. Sementara Tabel IV-8. di bawah menunjukkan perbandingan dengan IKLH antara Provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Tabel IV- 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020

Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	72,24	74,17	73,09	65,92	70,07
Kalimantan Tengah	74,71	71,47	75,71	74,20	-
Kalimantan Selatan	59,07	69,38	68,78	61,94	-
Kalimantan Utara	0	81,87	86,88	78,98	-
Kalimantan Timur	80,19	82,00	81,68	78,81	75,50
Nasional	65,73	66,46	71,67	66,55	-

Masih berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS Revisi RPJMD juga memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian dan berkontribusi dalam pengukuran IKLH dan terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Berdasarkan analisis permasalahan TPB/SDGs, kebijakan terkait energi baru dan terbarukan masih diperlukan, termasuk untuk mendorong berkembangnya industri *biodiesel* yang diharapkan dapat menyediakan sumber energi yang lebih rendah emisi di masa datang bagi Kalimantan Timur. Pemenuhan ketersediaan air bersih, yang memerlukan kualitas baku air dari sungai dan perairan lainnya, disertai dengan perbaikan sistem pengelolaan limbah, juga akan menuju pada perbaikan indeks kualitas air. Upaya pemulihan ekosistem daratan serta penanganan sampah dan polusi, masih menjadi isu prioritas dalam TPB/SDGs. Perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan masih perlu dilakukan lebih optimal.

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka resiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu,

- 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
  - 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.
6. Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik), antara lain: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima, Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indeks kesetaraan gender yang belum optimal masih perlu pengarusutamaan dan edukasi gender ke dalam proses pembangunan dan masyarakat luas. Masalah pokok Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur setidaknya terdiri dari dua hal, yaitu: (a) belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan (b) belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yakni: (a) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (b) peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2018 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020. Meskipun demikian, masih ada persoalan aset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,38 pada tahun 2019. Angka tersebut telah menunjukkan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama (IKU) dalam tata kelola pemerintahan, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “B” pada tahun 2019 dengan nilai 68,93.

Dari sisi pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kalimantan Timur telah memperoleh predikat baik (3,14) di tahun 2020. Namun masih perlu dilakukan peningkatan indeks SPBE pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, serta meningkatkan indeks SPBE Kalimantan Timur itu sendiri. Terhadap pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan publik pada keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah bertekad untuk semakin terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat dan sebaliknya masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan. Gagasan *One Data One Map* serta Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan bagian yang perlu diperkuat. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun Indeks Persepsi Korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017. Standar layanan informasi publik perlu semakin dikuatkan, agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin bisa didekatkan.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi, capaiannya diukur dari 3 (tiga) aspek penting yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek itu dirinci menjadi 11 (sebelas) elemen yang lebih mbumi, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, bebas dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, hak partisipasi dalam penyusunan kebijakan, pemilu yang jujur dan adil, peran DPRD, biroktasi dan peradilan yang independen. IDI bergerak dari skor 0 – 100, predikat IDI Baik berada pada skor > 80, predikat Sedang pada skor 60-80 dan predikat Buruk pada skor dibawah 60.

Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,88 pada 2018. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan wawasan demokrasi masyarakat sehingga mampu menjadi wilayah yang memiliki ketahanan demokrasi. Penguatan IDI juga akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan investor untuk berinvestasi. IDI di Kalimantan Timur berada pada skor Sedang pada perbandingan seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan sebagaimana dapat dilihat di Tabel IV-3. berikut:

Tabel IV- 3 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2015-2019

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	76,40	75,28	79,13	76,14	77,66
Kalimantan Tengah	73,46	74,77	76,12	71,27	81,16
Kalimantan Selatan	74,76	73,43	76,25	79,92	79,47
Kalimantan Utara	80,16	76,98	81,06	81,07	83,45
Kalimantan Timur	81,24	73,64	72,86	73,88	77,67
Nasional	72,82	70,09	72,11	72,39	74,92

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan, Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan Pemerintah Daerah, Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan meliputi 3 (tiga) permasalahan berikut:

- 1) Birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat;
- 2) Birokrasi belum menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja yang menopang visi dan misi daerah; dan
- 3) Sistem pengawasan dan pengendalian intern pemerintah belum diselenggarakan secara efektif dan terintegrasi.

Permasalahan pembangunan daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan persoalan-persoalan bersifat makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai lingkup urusan pemerintahan, seperti sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan. Untuk menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan daerah dimaksud, diperlukan identifikasi permasalahan secara lebih spesifik hingga ke akar masalah (Tabel IV-4), agar strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Tabel IV- 4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1. Tingginya ketimpangan Daya Saing SDM.	1.1. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.	1.1.1. Belum optimalnya kompetensi layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja.
		1.1.2. Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan.
		1.1.3. Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT.</p> <p>1.1.4. Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan.</p> <p>1.1.5. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran jarak jauh.</p> <p>1.1.6. Belum optimalnya pengembangan perpustakaan yang mendukung sistem pendidikan.</p>
	<p>1.2. Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah.</p>	<p>1.2.1. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT.</p> <p>1.2.2. Belum optimalnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah.</p>
	<p>1.3. Akses pelayanan kesehatan belum merata, terutama pada daerah 3T.</p>	<p>1.3.1. Belum meratanya tenaga kesehatan berkualitas.</p> <p>1.3.2. Ketimpangan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas di daerah terpencil.</p> <p>1.3.3. Sistem kesehatan belum optimal dalam menjalankan SPM Kesehatan.</p> <p>1.3.4. Belum optimalnya penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan COVID-19.</p>

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		1.3.5. Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
	1.4. Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender.	1.4.1. Belum optimalnya kinerja lembaga pemberdayaan perempuan daerah.
2. Kesejahteraan belum Terwujud Secara Adil dan Merata.	2.1. Desa dan Masyarakat belum optimal diberdayakan.	2.1.1. Minimnya pembinaan dan pengembangan desa menuju kemandirian daerah.
		2.1.2. Belum optimalnya pemberdayaan pemerinta desa dan aparatnya.
	2.2. Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja.	2.2.1. Minimnya ketersediaan pusat-pusat pengembangan keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian.
		2.2.2. Pengembangan keterampilan angkatan kerja belum optimal dilakukan.
3. Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan.	3.1. Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan.	3.1.1. Belum optimalnya penggalan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah .
		3.1.2. Belum optimalnya penggalan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur.
	3.2. Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (Migas dan Batubara).	3.2.1. Gejolak perekonomian kerakyatan khususnya UMKM semasa pandemi COVID-19.
		3.2.2. Belum optimalnya pembinaan UKM dalam meningkatkan jangkauan pemasaran.

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3.2.3. Belum optimalnya ekspor barang olahan sektor unggulan non migas dan batubara.
	3.3. Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim.	3.3.1. Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi.
		3.3.2. Minimnya produk industri turunan sektor pertanian.
		3.3.3. Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha industri kecil mikro.
	3.4. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dalam pemenuhan pangan lokal.	3.4.1. Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
		3.4.2. Belum optimalnya kinerja kelembagaan dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
	3.5. Masih rendahnya produksi sumber pangan hewanin asal ternak.	3.5.1. Masih rendahnya produksi bibit dan benih ternak/pakan ternak berkualitas.
		3.5.2. Minimnya kawasan peternakan di Kalimantan Timur
	3.6. Produktivitas perkebunan masih rendah.	3.6.1. Belum optimalnya produktivitas komoditi perkebunan unggulan.
		3.6.2. Belum optimalnya pengembangan kualitas perkebunan unggulan non sawit.
		3.6.3. Belum optimalnya nilai tambah produksi petani swadaya.

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3.6.4. Belum optimalnya nilai tambah dan fluktuasi harga di tingkat petani.
		3.6.5. Belum efektifnya pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi.
	3.7. Rendahnya produksi perikanan.	3.7.1. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha bidang perikanan.
		3.7.2. Belum optimalnya ketersediaan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan .
		3.7.3. Tingginya potensi pencemaran lingkungan, khususnya ekosistem perikanan.
	3.8. Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu.	3.8.1. Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan yang baik.
		3.8.2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan sebagai nilai tambah produk unggulan.
		3.8.3. Lambatnya penanganan kerusakan hutan.
		3.8.4. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
	3.9. Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan.	3.9.1. Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara.
		3.9.2. Belum optimalnya pelayanan terpadu dalam perizinan penanaman modal daerah.

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3.9.3. Belum optimalnya komitmen perizinan.
		3.9.4. Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal.
	3.10. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah.	3.10.1. Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi dan UKM.
	3.10.2. Masih minimnya pelaku UKM dalam mengaplikasikan IT.	
	3.10.3. Penurunan aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19.	
	3.10.4. Minimnya permodalan UKM dalam menjalankan usahanya.	
	3.11. Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah.	3.11.1. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung peningkatan kualitas produk wisata.
	3.11.2. Minimnya promosi produk wisata dan ekonomi kreatif Kaltim.	
	3.11.3. Minimnya kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata.	
	3.11.4. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi kreatif di Kaltim.	
	3.11.5. Rendahnya daya saing ekonomi kreatif Kaltim di level nasional/ internasional.	
4. Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan	4.1. Rendahnya konektivitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan.	4.1.1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan.
		4.1.2. Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Infrastruktur Dasar.		pusat kegiatan ekonomi.
		4.1.3. Tingginya kerusakan fasilitas Jalan Provinsi.
	4.2. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air.	4.2.1. Terbatasnya kapasitas air baku daerah.
		4.2.2. Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat.
		4.2.3. Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya.
	4.3. Belum optimalnya Penanganan terhadap kawasan kumuh.	4.3.1. Masih banyaknya penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
	4.4. Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir.	4.4.1. Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya.
	4.5. Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok	4.5.1. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas listrik.
	4.6. Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang).	4.6.1. Belum Selarasnya RTRWN, RTRWP, RTRWK dan Belum Optimalnya RDTR yang mendukung IKN.
		4.6.2. Rencana Tata Ruang Belum menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
4.6.3. Belum Optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.		
5. Meningkatnya resiko penurunan kualitas Lingkungan Hidup	5.1. Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5.1.1. Tingginya potensi kerusakan hutan akibat aktivitas perekonomian
		5.1.2. Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
	5.2. Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah	5.2.1. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan memperkecil risiko bencana

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		5.2.2. Minimnya kesiapan wilayah dalam menghadapi bencana
6. Tata Pemerintahan belum menghasilkan Layanan dan Kebijakan Publik yang Berorientasi pada Kedaulatan Masyarakat	6.1. Birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat	6.1.1. Pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai SPM
		6.1.2. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
		6.1.3. Belum optimalnya penggunaan IT dalam integrasi pelaksanaan pembangunan
	6.2. Birokrasi belum menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja yang menopang visi dan misi daerah	6.2.1. Belum optimalnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan
		6.2.2. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi & Komunikasi untuk manajemen pemerintahan
		6.2.3. Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian kebijakan daerah
	6.3. Sistem pengawasan dan pengendalian intern pemerintah belum diselenggarakan secara efektif dan terintegrasi	6.3.1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pembangunan secara transparan dan akuntabel
	6.4. Belum optimalnya penggunaan IT dalam pengelolaan kinerja pemerintahan	6.4.1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
		6.4.2. Belum optimalnya penggunaan IT dalam integrasi pelaksanaan pembangunan

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

#### 4.1.2 Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka Provinsi

Kalimantan Timur berupaya merumuskan perencanaan pembangunan berlandaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pelaksanaan pembangunan berada pada koridor berkelanjutan, Berbagai rumusan dari KLHS yang disusun merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Kesadaran ini tentu saja dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan berbasis alam/lingkungan yang sudah cukup banyak digaungkan oleh penggiat pendidikan sehingga ke depan mampu untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dengan tetap memperhatikan kehidupan lingkungan hidup generasi mendatang, Namun dalam perjalanannya, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian TPB dimana beberapa kondisi perlu adanya akselerasi atau percepatan pencapaian target agar mampu menyelaraskan dengan target TPB Nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan upaya dalam mencapai TPB, dimana permasalahan tersebut dapat dilihat pada penjabaran berikut:

1. Pelayanan dan jaminan kesehatan kelompok masyarakat rentan

Pelayanan dan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat maupun mempertahankan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tidak dipungkiri kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian, sehingga tentu saja kesehatan akan berdampak signifikan pada implementasi pembangunan daerah. Selain itu, ketahanan kesehatan masyarakat melalui penjaminan kesehatan menjadi perlu dikarenakan masyarakat yang terkena penyakit kronis akan mengeluarkan uang yang cukup banyak jika tidak memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan untuk pemerataan jaminan kesehatan agar masyarakat tidak memiliki risiko tinggi (kerentanan) turun ke bawah garis kemiskinan karena suatu penyakit yang dideritanya.

Terlihat dari data yang dihimpun menyiratkan belum optimalnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sangat terlihat dari masih belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan dimana sebanyak 89,00

persen peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kalimantan Timur. Dari angka ini terlihat bahwa capaian proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan masih belum memenuhi target nasional meskipun sudah diupayakan pelaksanaannya. Belum optimalnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Salah satunya dengan melakukan upaya tambahan dalam mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut dengan inovasi dan program prioritas yang lebih aplikatif dan mampu menyeluruh.

Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier. Pembiayaan kesehatan merupakan hal penting bagi pemerintah dalam upaya memastikan seluruh warga negaranya mendapatkan akses.

Tabel IV- 5 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	%
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	705.172	18,7
2	PBI APBD	445.178	11,8
SUB JUMLAH PBI		1.150.350	30.6
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1.417.531	37,7
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri	844.363	22,4
3	Bukan Pekerja (BP)	42.017	1,1
SUB JUMLAH NON PBI		2.303.911	61.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		3.454.261	91.8

Sumber: Profil Kesehatan DINKES, 2020

Dari tabel diatas terlihat cakupan jaminan kesehatan di Kalimantan Timur masih sekitar 91,8 %, dimana persentasi penerima bantuan iuran (PBI) masih 30,6% dan Non PBI sebesar 61,2 %

## 2. Penguatan sistem penanggulangan bencana alam dan sosial

Upaya dalam meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mempersiapkan diri pada kondisi kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana menjadi salah satu fokus pemerintah pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terlihat bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur masih cukup tinggi yang mencapai 155,49 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya, namun capaian ini masih harus diturunkan lagi

Tahun 2020 merupakan tahun spesial bagi penanganan kebencanaan daerah dikarenakan terjadinya suatu bencana sosial COVID-19 saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Coronavirus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda. Meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh daerah serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas. Mengingat pentingnya perhatian Pemerintah terhadap pandemi ini, maka pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Di Kalimantan Timur, COVID-19 cukup merebak pesat di daerah perkotaan, khususnya Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Tentu saja hal ini menyebabkan tingginya masyarakat yang menjadi korban positif COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia. Jika diakumulasikan dengan berbagai bencana lainnya seperti kebakaran dan sebagainya, maka jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana pada tahun 2020 sebanyak 2.052 jiwa per 100.000 orang.

Dalam melakukan penanggulangan dan penanganan dampak Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur perlu adanya upaya lebih bagi Pemerintah Daerah baik dari segi pendanaan maupun secara teknis untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adanya vaksinasi yang telah resmi dikeluarkan memberikan cukup harapan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi pembangunan masih berada pada koridor perencanaan pembangunan regional maupun nasional.

### 3. Perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan gizi

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan kualitas pangannya sehingga mampu memiliki pola konsumsi yang baik dan pemenuhan gizi yang cukup. Untuk memberikan energi pada setiap aktivitas masyarakat, maka perlu pemenuhan konsumsi berupa kalori minimal minimal 1,400 kkal/kapita/hari. Namun di Indonesia, masih terdapat cukup tinggi masyarakat yang belum mengkonsumsi asupan kalori minimum tersebut. Terlihat dari data bahwa proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari memang memiliki kecenderungan menurun, namun hingga tahun 2019 masih terdapat 13,17 persen penduduk yang memiliki asupan kalori di bawah asupan kalori minimum.

Dari sisi pola konsumsi, maka kualitas konsumsi pangan Provinsi Kalimantan Timur masih perlu perbaikan. Hal ini terlihat dari skor pola harapan yang merupakan skor untuk melihat konsumsi pangan masyarakat dibandingkan dengan pola konsumsi pangan ideal. Tingginya konsumsi padi-padian dan belum optimalnya capaian tingkat konsumsi pangan hewani maupun sayur dan buah menjadi salah satu “kambing hitam” masih belum tercapainya target nasional. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 85,8 dimana diharapkan pada tahun 2023 akan mencapai 93,4 sehingga memerlukan upaya lebih dalam mencapai target tersebut.

### 4. Penanggulangan kerawanan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan

Narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kemudahan mendapatkan bahan berbahaya ini menyebabkan penggunaannya semakin meningkat dengan berbagai karakteristik pengguna baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan semua kalangan usia. Dari sisi kerawanan narkoba yang menjadi kekhawatiran masyarakat, kondisi belum ideal yang dialami Kalimantan Timur terkait pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. Terlihat dari data bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba cukup

fluktuatif dimana pada tahun 2019 mencapai 0,6 dan masih belum mencapai target nasional.

Selain kerawanan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan masih perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari data bahwa masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait tindak kekerasan baik dalam rumah tangga maupun luar rumah tangga. Terjadi penurunan menjadi sebesar 63,5 persen korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dan terjadi pula penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan hingga mencapai 0,040. Kedua data yang cukup fluktuatif series di setiap tahunnya mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana hanya beberapa kasus yang muncul di tahun tertentu. Pembinaan dan sosialisasi penting dilakukan disini dengan struktur yang baik agar mampu tersampaikan ke seluruh masyarakat.

#### 5. Peningkatan layanan pendidikan, kompetensi dan SDM

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, beberapa aspek terkait pelayanan pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pelayanan pendidikan menengah atas atau sederajat yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Belum optimalnya pelayanan pendidikan tersebut terlihat dari masih belum tercapainya target pembangunan nasional terkait angka partisipasi murni SMA/MA/sederajat, dimana angka Kalimantan Timur sebesar 73,00 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun diharapkan di Kalimantan Timur mampu mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun sehingga masyarakat mampu mengenyam pendidikan hingga SMA/MA/Sederajat. Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terdapat 79,02 persen SMA/MA/Sederajat yang terakreditasi minimal B. Upaya lebih harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas dan mutu sarana prasarana pendidikan di tingkat sekolah menengah atas menjadi hal yang perlu diutamakan demi tercapainya SDM berkualitas.

#### 6. Sosialisasi dan akomodasi peran perempuan dalam pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, peran serta seluruh elemen masyarakat diperlukan demi tercapainya Visi pembangunan daerah. Hal tersebut menjadikan tidak ada diskriminasi dalam setiap tahapan

pembangunan sehingga akan terbangun suatu kesetaraan demi kemajuan bersama. Pada aspek yang lebih spesifik, terkait perempuan, maka dalam pelaksanaan pembangunan menegaskan adanya kesetaraan gender dalam partisipasi pembangunan seluruh masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan dalam memberdayakan perempuan agar memiliki kesempatan dan hak yang sama atau berperan setara dalam mengambil peran serta pembangunan Kalimantan Timur.

Dari sisi pemberdayaan perempuan, pada tahun 2019 sebanyak 18,19 persen perempuan duduk di parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Angka ini tentu masih jauh dari yang disyaratkan yakni sebanyak 30 persen perempuan yang duduk sebagai anggota dewan. Selain itu, terjadi penurunan pada keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) yakni sebanyak 18 persen pada tahun 2018 menjadi 12,8 persen pada tahun 2020. Hal ini tentu saja menjadi catatan negatif dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan baik dari sektor formal maupun non formal.

#### 7. Perbaikan tata kelola untuk peningkatan rasio pajak terhadap PDRB

Belum optimalnya kinerja pajak Provinsi Kalimantan Timur terlihat dari minimnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 0,64 pada tahun 2020, padahal target dari Peraturan Presiden mencapai lebih dari 12 persen. Angka tersebut mengindikasikan kondisi perpajakan dan kapasitas sistem perpajakan daerah perlu ditingkatkan kinerjanya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait permasalahan ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, komitmen dan koordinasi antar lembaga Negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas Negara. Hal yang lebih sulit adalah meningkatkan wajib pajak perorangan daripada wajib pajak besar, yang meskipun nilainya per individu memang kecil, tetapi jumlah wajib pajaknya dan sumber penarikan pajaknya sangat banyak. Oleh karenanya dipertimbangkan penting untuk mencari pola insentif dan disinsentif tepat guna meningkatkan penerimaan pajak.

#### 8. Peningkatan kinerja industri dan UMKM

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Secara nasional, UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian nasional dimana lebih dari 99 persen unit pelaku usaha adalah UMKM. Hal ini tentu saja menjadikan UMKM berpotensi dalam mewujudkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat. Namun di Provinsi Kalimantan Timur, UMKM khususnya usaha industri manufaktur memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita serta pertumbuhan PDRB pada kategori industri pengolahan (secara umum), dimana penurunan kontribusi industri pengolahan pada PDRB menjadi 18,90 persen pada tahun 2020 dan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di setiap tahunnya hingga 0,03 persen pada tahun 2019 dan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -2,77 persen pada tahun 2020 yang diakibatkan adanya Pandemi COVID-19. Adapun terkait permodalan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sempat mencapai 27,33 persen dan menurun hingga mencapai 18,90 persen pada tahun 2020. Hal ini tentu saja memerlukan upaya lebih dalam mewujudkan peningkatan kinerja industri dan UMKM di Kalimantan Timur. Diharapkan dengan terbitnya UUCK No. 11 Tahun 2020 (beserta seluruh peraturan perundangan turunannya), dimana ruang bagi partisipasi UMKM diperluas menjadikan upaya guna mengembangkan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih optimal.

#### 9. Pengelolaan sampah domestik dan limbah B3

Hasil yang diharapkan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pada tahun 2030: (a) mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati; dan (b) secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu juga pada tahun yang sama secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Namun kedua harapan itu tampaknya masih cukup jauh pencapaiannya mengingat jumlah timbulan sampah yang didaur ulang hanya kisaran 0,0583 juta ton dan selisihnya cukup jauh dari target

nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) juga masih belum optimal, dimana capaian pada tahun 2020 mencapai 57,945. Belum optimalnya pengelolaan sampah domestik dan limbah B3 di Kalimantan Timur memang perlu menjadi perhatian mengingat tingginya volume sampah baik sampah rumah tangga maupun limbah industri. Oleh karena itu, untuk meminimalisir degradasi kualitas lingkungan hidup sekaligus memberdayakan masyarakat, maka ke depan perlu adanya kemitraan dalam hal pengelolaan sampah dan limbah B3 tersebut (tentu saja tidak terkecuali bermitra dengan UMKM) agar sekaligus upaya tersebut berdaya guna bagi perekonomian daerah dan juga perekonomian masyarakat.

#### 10. Penanganan lahan kritis, perubahan iklim dan mitigasi

Tingginya aktivitas perekonomian yang berpotensi “mengorbankan” ekosistem lingkungan hidup menyebabkan Pemerintah dan kalangan usaha memiliki tanggung jawab dalam memulihkan kualitas lingkungan hidup dan bahkan menjadikannya lebih baik. Salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan kritis yang timbul akibat aktivitas perekonomian, khususnya pembukaan lahan maupun karena pertambangan dan penggalian. Terlihat dari data bahwa luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga tahun 2019 hanya mencapai 524 ha. Terlebih bilamana data rehabilitasi tersebut dibandingkan dengan luasan lahan kritis yang ada beserta laju pertumbuhannya per-tahun. Kondisi ini tentu saja memerlukan perhatian khusus bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana lahan kritis yang terus bermunculan seyogyanya menjadi fokus utama pemerintah dan swasta dalam memperbaiki dan merehabilitasi setiap dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perekonomian perusahaan. Upaya rehahilitasi lahan kritis ini menjadi sangat signifikan kepentingannya, terlebih Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memperoleh dana dari Bank Dunia dalam rangka program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) terkait dengan upaya penurunan emisi karbon. Implementasi FCPF ini dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan tahap akhir RPJPD Kalimantan Timur dan tentu saja dengan RPJMD perubahan ini.

#### 11. Penyediaan air bersih

Sebagai sumber kehidupan dan bahkan bagian dari kebutuhan pokok terpenting (*first floor basic needs*), permasalahan air bersih menjadi isu utama dalam hal penyediaannya kepada masyarakat secara luas dan merata. Perhatian terhadap distribusi air bersih dan layak kepada masyarakat secara otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Namun dari data capaian TPB terlihat bahwa terjadi penurunan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan hingga mencapai persentase 64,53 persen rumah tangga. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sempat mencapai 73,31 persen. Kondisi ini tentu saja seiring dengan penurunan pada indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan dimana masing-masing sebesar 64,53 persen dan 47,40 persen. Penurunan capaian ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya untuk menjamin pemerataan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Catatan penting yang selalu menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah, bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber air yang melimpah, baik curah hujan yang tinggi dan juga ketersediaan banyak sungai besar. Sehingga isu air bersih lebih pada persoalan teknis dan pengelolaannya yang harus terus dibenahi seiring dengan penambahan penduduk/rumah tangga.

#### 4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan paling tidak dalam periode pembangunan menengah (lima tahunan), khususnya hingga akhir RPJMD Kaltim 2019-2023. Di samping itu, tentu sangat penting

memperhatikan juga isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah pada periode yang sama sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta tidak dapat diabaikan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan. Secara lebih detail akan diidentifikasi dan diuraikan di bawah ini.

#### 4.2.1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Hal tersebut dikarenakan sebagai suatu sistem kehidupan yang terpadu, dan kompleksitas persoalan yang dihadapi dewasa ini yang menghasilkan saling ketergantungan, serta tentu dengan era teknologi informasi yang menghasilkan keterbukaan, maka isu baik di tingkat internasional ataupun sebaliknya di tingkat lokal juga akan saling mempengaruhi (terlebih persoalan lingkungan hidup dan perekonomian). Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

##### 1. Kelesuan Perekonomian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi global. Sesuai laporan Bank Indonesia (2020), ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara yang mengakibatkan volume perdagangan dunia terus berkontraksi dalam 2 (dua) tahun terakhir, bahkan terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Kecenderungan penurunan ekonomi global antara lain diakibatkan oleh dampak negatif dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok juga menyangkut sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia, Namun demikian, berdasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang, pertumbuhan ekonomi global pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami

peningkatan. Namun, proyeksi tersebut tersebut mengalami koreksi sehubungan dengan beberapa sentimen negatif di awal tahun 2020 antara lain keputusan sejumlah bank sentral dunia yang tetap mempertahankan kebijakan akomodatif, merebaknya wabah virus corona, serta pemangkasan prospek ekonomi dunia oleh IMF.

Pandemi COVID-19 merupakan isu strategis yang paling mengoreksi optimisme ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Rendahnya produktivitas global akibat pandemi COVID-19 didukung fakta makin banyak negara yang melaporkan terjadinya resesi saat bersamaan kasus COVID-19 kian meningkat, antara lain karena vaksin belum tersedia sampai kini. Di tingkat global, data terakhir menunjukkan bahwa COVID-19 telah mewabah hingga 216 negara, menginfeksi lebih dari 152 juta orang dengan kematian mencapai lebih dari satu juta orang. Demikian pula dengan belum dapat dipastikannya akhir dari pandemi global ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap usaha dan upaya strategis guna memitigasinya.

## 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri. Dengan ketersediaan teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Bagi Provinsi Kalimantan Timur yang wilayahnya sangat luas dan beberapa wilayah berada di pedalaman dan perbatasan dengan hambatan geografis, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya guna pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, penyampaian kondisi dan potensi tentang Provinsi ini tentu juga sangat penting sebagai media promosi secara global yang diharapkan dapat menarik investasi dalam dan luar negeri di berbagai sektor. Oleh karenanya dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

## 3. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Development*)

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green growth*/Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang bukan hanya terkait laju

pertumbuhan ekonomi tetapi juga kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi hijau meliputi: (a) efisiensi dan manajemen sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang baik, (b) investasi infrastruktur yang rendah karbon dan tahan iklim, (c) menstimulasi inovasi dan investasi sektor swasta dalam teknologi yang baru dan adaptif, (d) fokus pada sumber daya manusia, dan (e) mengatasi kegagalan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau melalui intensifikasi kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis dan berfungsi baik. Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong: (a) pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, (b) menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta (c) memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong: (a) budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrasi perikanan dan hutan (*aqua silviculture*), serta (b) menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan bagi pembenihan biota air di alam (*reservat*). Demikian masih banyak upaya strategis yang dapat dijalankan untuk sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor pembangunan perekonomian berbasis lahan, yang menyumbang emisi terbesar dari Kalimantan Timur.

#### 4. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (*Paris Agreement*)

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Telah dihasilkan 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu: (a) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius; (b) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi

secara transparan; (c) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim; (d) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dan; (e) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, terlebih provinsi ini sudah mengambil inisiatif paling awal (sejak *Conference of the Parties/COP 13* di Bali 2007) guna berpartisipasi aktif dalam program mitigasi perubahan iklim.

#### 4.2.2. Isu Nasional

Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa dipisahkan dari perkembangan isu strategis di tingkat nasional. Hal ini pada dasarnya merupakan kondisi yang bersifat struktural di dalam sebuah wilayah negara, sehingga tentu juga menjadi konsekwensi logis bagi provinsi lainnya. Oleh karena itu, Kalimantan Timur harus mendasarkan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan sekali isu-isu yang menyimpan potensi pengaruh secara nasional, atau yang telah digariskan dalam berbagai kebijakan nasional. Berikut ini adalah isu-isu strategis nasional yang berkorelasi dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi rujukan dalam rangka perencanaan pembangunan termasuk dalam melakukan perubahan RPJMD 2019-2023.

##### 1. RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Pembangunan nasional Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Kemajuan ini terjadi di tengah-tengah

ketidakpastian kondisi global. Indikator yang paling berpengaruh adalah terjaganya kestabilan ekonomi, menurun drastisnya angka kemiskinan, begitu juga menurunnya tingkat pengangguran secara signifikan. Pencapaian ini pada saat yang sama menunjukkan bahwa Nawacita jilid satu telah berhasil dilaksanakan hingga tahun 2019 yang lalu.

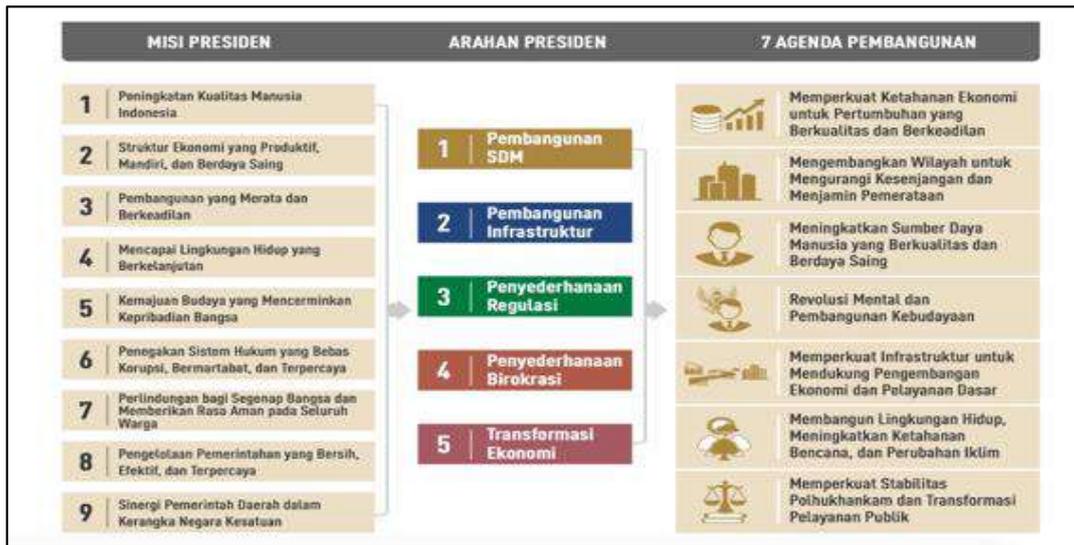
Perencanaan pembangunan selanjutnya yang dirumuskan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 didasarkan kepada kebijakan periode terakhir RPJPN Tahun 2005-2025. Dengan kata lain, RPJMN tahun 2020-2024 adalah perencanaan penentu dalam upaya pencapaian target pembangunan yang tersirat di dalam RPJPN. Target dari RPJPN berkaitan langsung dengan upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai upaya lanjutan dari Nawacita jilid satu, Presiden terpilih untuk tahun 2020-2014 menyusun visi dan misi berdasarkan RPJPN tahun 2005-2025. Visi misi yang kemudian ditetapkan sebagai visi dan misi RPJMN 2020-2024 ini berbunyi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini akan dijabarkan kembali melalui 9 (sembilan) misi yang disebut Nawacita jilid kedua, sebagaimana yang bisa dilihat dalam gambar IV-8 dibawah ini.



Gambar IV- 8 Misi RPJMN 2020-2024  
(Sumber: Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024)

Melalui misi Presiden di atas, kemudian ditetapkanlah 5 (lima) arahan utama pembangunan nasional 2020-2024. Kelima arahan tersebut meliputi 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Berdasarkan 5 (lima) arahan utama tersebut, kemudian ditetapkanlah 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar IV-9 di bawah ini.



Gambar IV- 9 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024  
(Sumber: Perpres No, 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024)

Berdasarkan misi dan arahan presiden, ditetapkanlah 7 (tujuh) prioritas dari agenda pembangunan nasional yang akan dijalankan dalam kurun 5 (lima) tahun (RKP), sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, melalui :
  - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
  - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, melalui:
  - a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f) Pengentasan kemiskinan; dan
  - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, melalui:
- a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
  - b) Memajukan kebudayaan;
  - c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
  - e) Meningkatkan budaya literasi.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui:
- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
  - e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, melalui:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui:
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
  - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

## 2. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu isu yang selalu muncul di dalam perencanaan pembangunan nasional adalah pemerataan populasi. Secara langsung persoalan populasi berkaitan dengan kesiapan wilayah sebagai penampung populasi tersebut. Perencanaan pembangunan nasional juga mendapatkan dampak dari persoalan populasi dan kaitannya dengan kebutuhan wilayah. Hal ini bisa dilihat dari keselarasan antara percepatan pembangunan di Jakarta dengan terus naiknya angka populasi penduduk, yang dikhawatirkan akan tiba pada satu titik krusial sebagai akumulasi dampak, dimana berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan semakin sulit dikendalikan di ibukota negara tersebut. Isu ini mendorong Pemerintah mencari beberapa pilihan yang potensial untuk diambil. Dengan beragam pertimbangan, khususnya sebagai upaya untuk menciptakan peluang-peluang di masa depan, maka Presiden menetapkan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Penetapan rencana pemindahan IKN ini harus diikuti oleh beberapa kondisi dasar yang dibutuhkan, Salah satunya adalah telah adanya kandidat wilayah atau daerah potensial baru untuk lokasi IKN. Keputusan Presiden mengenai lokasi kemudian jatuh ke areal yang berada di Kalimantan Timur (areal tersebut berada pada wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara), Penetapan wilayah ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu :

1. Memiliki posisi geostrategis yang sangat baik (di tengah wilayah NKRI);
2. Tersedia lahan milik negara;
3. Minimnya resiko bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami;
4. Berdekatan dengan kota eksisting yang telah berkembang;
5. Memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap;
6. Memiliki budaya terbuka terhadap pendatang;
7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

IKN dipastikan akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Provinsi Kalimantan Timur dari segi pembangunan, dimana akan terjadi pertumbuhan pembangunan yang bersifat masif dengan asumsi bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tidak hanya terfokus pada wilayah IKN saja, namun juga wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Sektor-sektor potensial yang akan akan dikembangkan di antaranya adalah sektor pelayanan, pendidikan tinggi, industri digital dan inovasi.

Isu ekonomi hijau yang dicanangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan *Masterplan* Pembangunan IKN yang akan segera disusun. *Master plan* ini akan menerapkan prinsip inklusif, lestari, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian IKN baru bukan hanya sebagai pusat pemerintahan namun juga bisa berpotensi menjadi klaster perekonomian dunia.

Lokasi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wilayah ini memiliki luas 256.142,72 Ha yang meliputi 56,181 Ha sebagai Kawasan Ibu Kota Negara dan 6.116,14 Ha sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. IKN diarahkan agar dapat mempengaruhi perkembangan di wilayah tengah dan timur Indonesia. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

(RTR KSN) direncanakan secara matang agar tidak mengganggu kawasan lindung, fungsi kawasan gambut, hutan mangrove serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perhitungan yang baik agar tidak terjadi bencana, baik persoalan kerentanan maupun potensi penyebab juga dilakukan. Dari perhitungan ini diperkirakan lebih dari 50 persen kota baru IKN akan berfungsi sebagai kawasan lindung dan penyangga perkotaan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur, maka perlu penyesuaian dalam penataan ruang wilayah. Penyesuaian ini dilakukan pada dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur (Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036), RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara (Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2034), dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara (Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033). Selain hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyusun serta menetapkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai antisipasi tindak lanjut pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang akibat penetapan IKN yaitu RDTR Kecamatan Loa Janan, RDTR Kecamatan Samboja, RDTR Kecamatan Loa Kulu dan RDTR Kecamatan Muara Jawa.

Dalam rangka penyesuaian Struktur Perkotaan di Kalimantan Timur setelah ditetapkan IKN serta menyesuaikan dengan jadwal waktu (*timeline*) penyusunan regulasi dan kebijakan rencana tata ruang bahwa saat ini telah disusun Materi Teknis Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Timur dan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada Tahun 2021 berdasarkan pentahapan, telah memasuki proses pengajuan persetujuan substansi ke Kementerian Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sehingga diharapkan dapat ditetapkan di tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya adalah penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang (RTR), mengamanatkan agar Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diintegrasikan ke dalam RTRWP, maka saat ini tengah dilakukan tahapan integrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail tata Ruang.

#### 4.2.3. Isu Strategis Kewilayahan

Isu-isu strategis yang bersifat kewilayahan penting karena berpengaruh secara langsung dengan peluang dan persoalan potensial di masa depan. Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akhir dari Pembangunan Jangka Panjangnya dalam skema pembangunan berkelanjutan. Sementara itu melalui visinya, Kalimantan Timur menyadari bahwa ada pekerjaan besar dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan menjadi persoalan mendasar dan sekaligus isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur.

Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dimana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain. Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Isu strategis kewilayahan yang teridentifikasi dan dipertimbangkan perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah, antara lain :

##### 1. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Kalimantan Timur masih rendah, hanya 2 (dua) KSP yang berkembang dengan pesat dari 7 (tujuh) KSP yang ada, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda. Infrastruktur pendukung konektivitas dari dan menuju Pusat-pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal, terutama terkait dengan jaringan air bersih, telekomunikasi dan transportasi. Penguatan KSP sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektivitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan, Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektivitas antar kawasan.

## 2. Peningkatan Daya Saing Daerah

Kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah dilatarbelakangi oleh pengalaman perekonomian Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan cukup berat, dimana pada periode tahun 2015-2016 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat tajam. Rendahnya kondisi daya saing daerah disebabkan oleh pengaruh eksternal buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Disamping itu, pengaruh internal terhadap rendahnya daya saing daerah antara lain :

- 1) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
- 2) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- 3) Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan Kesehatan masyarakat.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (*borderless*). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan,

inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi, Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, sedangkan antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai *timing*-nya.

Peningkatan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peningkatan daya saing dilakukan melalui upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki, meliputi :

- a) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam menggali sumber PAD baru dan pengembangan investasi, penataan pola hubungan kerja sama antara Pusat-Daerah dan antar Daerah, serta kolaborasi multi pihak swasta;
- b) Meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- c) Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

### 3. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan tata ruang dalam pembangunan wilayah berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah dan menyelaraskan keseimbangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah dapat tumbuh bersama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi

Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Dalam hubungannya dengan pembahasan ini, maka Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Hal ini amatlah penting terlebih secara faktual telah padatnya beragam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam serta penggunaan kawasan di Kalimantan Timur

Optimasi pemanfaatan ruang dan peningkatan produktivitas di dalam ruang menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Tersedianya mekanisme pemanfaatan ruang untuk masyarakat pada kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial masih belum optimal dilakukan, dikarenakan areal yang dicadangkan terbatas dan kalaupun ada justru tidak berada pada masyarakat yang justru membutuhkan. Berdasarkan data untuk Kalimantan Timur hingga Januari 2021, dari 423.704,00 hektar yang dipersiapkan/ dicadangkan, baru 212.815,47 hektar yang digunakan. Luasan tersebut termasuk dalam 97 Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan melibatkan 11.828 Kepala Keluarga. Sementara itu, sistem kemitraan perkebunan melalui skema inti-plasma, merupakan peluang untuk mengurangi konflik lahan dan sumber daya alam, terutama antara perizinan perkebunan dengan masyarakat lokal.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas, kapital yang dimiliki oleh masyarakat juga secara umum terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut, dan bahkan sebagian masih pada kondisi 'status-quo' atau belum ada kejelasan apakah di dalam atau di luar kawasan,

mengingat belum secara keseluruhan kawasan hutan dikukuhkan (berdasarkan informasi dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH Wilayah IV untuk Kalimantan Timur baru mencapai 85% dari total luasan yang ada). Sementara di lain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti banjir dan tanah longsor.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan guna menghindarkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian perizinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini juga menjadi lebih penting dengan kehadiran UUCK No. 11 Tahun 2020 beserta peraturan perundangan turunannya, yang memang diarahkan guna meningkatkan arus investasi ke Indonesia dan tentu saja ke Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya investasi pemanfaatan ruang yang mampu mengolah sumber daya alam secara lestari, maka ekonomi daerah akan berputar dimana akan terjadi penyerapan tenaga kerja, terbentuk nilai tambah, perolehan profit dan pajak serta munculnya *multiplier effect* untuk daerah (beserta masyarakatnya), yang selanjutnya diharapkan akan mampu mempersempit ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Harmonisasi peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang serta implementasinya hingga ke tingkat administrasi pemerintahan terendah yaitu desa/kampung merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

Dalam pengembangan isu strategis pemanfaatan ruang ini tentu harus menilik pula pada KLHS. Sebagai suatu kajian yang penting bagi perencanaan pembangunan, KLHS menjadi tanggung jawab berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, pelaku usaha, mitra pembangunan, akademisi dan masyarakat. Bukan hanya pada taraf penyusunannya, akan tetapi juga implementasi atau pemanfaatan dalam berbagai skala serta lingkup

pembangunan. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi bahwa isu lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama, lintas sektor dan perhubungan dengan personal maupun kelembagaan. Hal ini berdampak pada pentingnya koordinasi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, khususnya perangkat daerah terkait dalam mengintegrasikan atau mensinkronkan kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah. Merangkum hal tersebut, maka dalam melakukan pemanfaatan ruang untuk pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah berketetapan untuk terus mendorong seluruh pihak guna senantiasa melakukan penyesuaian dengan berbagai rekomendasi yang telah diarahkan pada KLHS, agar tetap mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dalam konsep dan implementasinya.

#### 4.3. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan. Tak terkecuali pada perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini, implementasi KLHS dalam melihat perjalanan pembangunan yang telah dilewati harus mampu memotret dan memberikan masukan sebagai penyempurnaan dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan demi akselerasi pencapaian visi pembangunan daerah.

Pada rumusan KLHS Perubahan RPJMD ini, melalui analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta rencana upaya tambahan dan penyesuaiannya terkait dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka didapatkan 11 poin isu strategis dari rumusan KLHS dengan penjabaran menurut prioritas sebagai berikut:

a) Penyediaan Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan)

Pelayanan dasar yang memberikan ruang gerak dalam mewujudkan kesejahteraan melalui penurunan angka kemiskinan difokuskan pada ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kualitas dalam hal ini tidak saja terkait kompetensi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan, akan tetapi juga terkait kuantitas serta pemerataannya. Dengan adanya penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, secara otomatis akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas hidupnya dalam pembangunan. Penyediaan tenaga Kesehatan utamanya menjadi target OPD terkait, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan dan meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta atau dalam hal ini perusahaan/kelompok usaha yang beroperasi di suatu wilayah terpencil sekalipun. Bisa saja kegiatan kemitraan ini dalam kerangka CSR (*Corporate Social Responsibility*) ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Derajat dan kualitas SDM akan signifikan menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian, mengingat tersedianya sumber daya manusia yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Selain dari segi pendidikan, bidang kesehatan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitannya sangat jelas, bahwa Sumber Daya Manusia yang sehat akan memiliki kemampuan optimal dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya termasuk dalam menjalankan pekerjaan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu syarat utama dalam perwujudan kualitas dan daya saing masyarakat Kalimantan Timur.

#### b) Penyediaan Kebutuhan Dasar (Air, Listrik, Rumah)

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat yang

penting dalam menjalani kesehariannya adalah kebutuhan dasar air berkualitas, listrik dan rumah yang layak. Air berkualitas dalam hal ini diwakili oleh ketersediaan dan pemerataan air minum bersih dan layak sehingga kesehatan masyarakat lebih terjamin. Pada kebutuhan dasar lain yakni kelistrikan, terlihat bahwa sektor listrik menjadi sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan fasilitas listrik mampu memudahkan berbagai macam aktivitas, khususnya dalam mendukung optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Setidaknya ada empat kriteria sebuah rumah dikatakan layak huni. Keempat kriteria tersebut, yaitu: (a) struktur konstruksi yang kuat, (b) luas bangunan, (c) sanitasi yang baik, serta (d) tersedianya jaringan air bersih di rumah tersebut. Terpenuhinya empat kriteria tersebut akan mewujudkan rumah layak huni yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat pada kategori baik, khususnya dari sisi kenyamanan tinggal.

#### c) Pengembangan Industri dan UMKM

Industri pengolahan mempunyai peran penting dalam pergerakan ekonomi dan pembangunan daerah. Kegiatan industri di Kalimantan Timur tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, seperti di Kota Balikpapan, Bontang, Samarinda, dan sejumlah kabupaten dengan spesifikasi usaha industri yang berbeda. Industri yang cukup besar kontribusinya dalam perekonomian Kalimantan Timur seperti di Balikpapan dengan kantong industri pengolahan minyak, mesin, dan peralatan; Kota Samarinda dengan industri pengolahan kayu dan mesin; Kota Bontang dengan industri pengolahan pupuk, kimia, dan gas; dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Selain industri tersebut, masih terdapat pula industri-industri kecil dan menengah yang mampu bertahan dan berkembang dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan sehingga peluang ini harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Secara umum, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah usaha yang melakukan aktivitas dalam bentuk menjual kembali berbagai aneka jenis produk yang di hasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Oleh karena itu, kedua jenis usaha ini saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan jika ada usaha yang menghasilkan produk sendiri dan sekaligus memasarkannya maka termasuk dalam IKM maupun Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha industri kecil dan UMKM rata-rata merupakan usaha berbasis rumah tangga yang berawal dari perekonomian kerakyatan. Usaha ini pada dasarnya mampu bertahan lebih baik pada masa-masa krisis seperti saat Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut, fasilitasi pemerintah sangat perlu dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan tatanan normal baru. Fasilitasi tersebut dapat berupa bantuan permodalan, pembinaan, dan sosialisasi hingga asistensi untuk menjadikan usaha naik kelas.

d) Pengembangan Pendapatan Daerah

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Keinginan ini harus diwujudkan karena dana perimbangan dari Pemerintah Pusat cenderung semakin menurun. Namun realisasi keinginan dalam peningkatan PAD belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini dikarenakan BUMD Kalimantan Timur maupun pemasukan pendapatan asli daerah lain masih belum memiliki signifikansi dalam kontribusi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi dan inovasi terhadap potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah baik melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD maupun upaya pengembangan nilai tambah sektor-sektor unggulan sehingga retribusi pajak akan mengalami peningkatan.

e) Pengembangan Usaha Pertanian

Pengembangan usaha pertanian dalam mewujudkan perekonomian hijau di Kalimantan Timur harus dilakukan dengan komitmen yang kuat. Intensifikasi usaha pertanian dan pengembangan sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan kemampuan angkatan kerja di bidang pertanian menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan sektor pertanian daerah. Meskipun begitu, dalam perwujudan pengembangan usaha pertanian, maka perlu diupayakan beberapa hal seperti tenaga kerja dengan pendapatan yang layak, tenaga kerja terdidik, pemasaran produk pertanian, peningkatan nilai tambah produk pertanian, hingga industrialisasi produk pertanian berskala ekspor.

Pengembangan Usaha Pertanian ini tentu saja dari tingkat basis (masyarakat), yang dalam kenyataannya besar jumlahnya dan sangat luas

operasional kegiatan, hingga ke tingkat industri (atau dari hulu hingga hilir). Dengan demikian keberhasilannya juga amat dipengaruhi oleh kerjasama yang kuat dan harmonis pada berbagai tingkat pemerintahan (dari provinsi hingga ke desa). Keterpaduan antara perencanaan regional dan sectoral amatlah penting.

f) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengendalian Pencemaran

Beberapa upaya tambahan untuk mengakselerasi capaian dinas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan hidup adalah peningkatan intensitas pemantauan kualitas air dan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran air; peningkatan upaya pengelolaan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; serta pengembangan fasilitas daur ulang sampah. Ketiga upaya tambahan tersebut diharapkan mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air.

Pada tahun 2020, sebanyak 76 persen sampah di wilayah perkotaan telah tertangani, sehingga meskipun masih ada tugas meningkatkan lagi akan tetapi capaian ini mengindikasikan semakin baiknya penanganan volume sampah di Kalimantan Timur. Selain itu, sebanyak 58.269 juta ton timbulan sampah telah didaur ulang yang mengindikasikan pemanfaatan limbah sampah telah dilakukan sehingga mengurangi adanya pencemaran. Pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran yang telah dilakukan memang dirasa belum optimal, namun peluang ini akan terus ada sehingga isu pengelolaan ini tetap dipandang perlu untuk menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kalimantan Timur.

g) Pemulihan Ekosistem Daratan dan Perairan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki aktivitas perekonomian yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, khususnya tambang batubara dan minyak bumi. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi pertambangan karena Pandemi COVID-19, namun produksi tersebut masih tergolong cukup banyak hingga mencapai 187 juta ton batubara dan 14.381 ribu barrel minyak bumi. Dengan adanya aktivitas perekonomian tersebut, maka sudah tentu terjadi efek samping (atau tepatnya dampak lingkungan) dari kegiatan pertambangan dan penggalian tersebut, khususnya pada ekosistem daratan dan perairan. Perlu adanya

strategi dalam upaya pemulihan ekosistem daratan dan perairan di Kalimantan Timur. Upaya tersebut tentu saja diimbangi dengan pengetatan perizinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang “mengeruk” (eksploitatif) sumber daya tak terbaharukan (*unrenewable resources*) di Kalimantan Timur. Berbagai upaya pemulihan ekosistem daratan dan perairan dapat dilakukan seperti reboisasi berbagai tanaman di hutan, pemulihan lahan kritis, melakukan restorasi ekosistem, hingga pemulihan terumbu karang maupun ekosistem perairan darat lainnya.

#### h) Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pemerataan pembangunan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, sudah sejak lama dipahami disparitas perekonomian antara wilayah pedalaman/perbatasan dengan wilayah pantai, salah satu diantaranya disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pada kondisi aspek geografis di provinsi ini yang cukup sulit. Dalam implementasinya, pemerataan pembangunan memerlukan aksesibilitas wilayah yang baik dan mampu memberikan sumbangsih positif bagi kemudahan distribusi barang dan jasa. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur perhubungan dimana keberhasilan pada sektor perhubungan dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki. Makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, semakin mempermudah mobilisasi penduduk antarwilayah atau antarkota, bahkan antardesa juga semakin tinggi. Namun mengingat banyaknya ekosistem dan wilayah yang membatasi ruang gerak pembangunan, maka dalam pengembangan moda transportasi umum di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar selalu memperhatikan Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara , Pengaturan Iklim dan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah.

#### i) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi *International Labor*

*Organization/ILO* No.102 tahun 1952. Di Indonesia sendiri telah mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Jaminan sosial yang merupakan program Pemerintah sudah cukup banyak diimplementasikan baik pendanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun terkadang dalam perjalanannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi khususnya terkait data keluarga penerima jaminan sosial, terutama bantuan sosial. Oleh karena itu, dalam penyediaan jaminan sosial masyarakat kurang mampu harus selalu dilakukan verifikasi dan revalidasi untuk meyakinkan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

j) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya (pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian) untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat sasaran dalam menghadapi ancaman bencana menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa potensi bencana alam yang telah dialami selama ini khususnya longsor, banjir dan kebakaran (khususnya kebakaran hutan dan lahan). Kejadian bencana alam tersebut, walaupun kejadiannya berkala, tentu saja berdampak pada berbagai kerugian-kerugian fisik maupun psikis kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, mitigasi bencana sangat perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan dan kesiapsiagaan terjadinya bencana alam.

k) Penyediaan Lapangan Kerja

Terjadinya peningkatan angka pengangguran di tahun 2020 memang sejatinya secara langsung atau tidak langsung dikarenakan adanya Pandemi COVID-19. Hal ini tentu menjadi perhatian besar bagi perumus kebijakan pada Perubahan RPJMD Kalimantan Timur untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Belum terlihatnya akhir dari Pandemi COVID-19 ini membutuhkan program pembangunan yang relevan dalam menyediakan lapangan kerja dengan implementasi pembukaan lapangan kerja baru atau dukungan dalam mengembangkan kewirausahaan daerah.

Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tidak hanya difokuskan pada kuantitas penyerapan tenaga kerja saja, tapi juga kualitas dari lapangan usaha menentukan bagaimana kelayakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui program penempatan tenaga kerja harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain maupun berbagai mitra kerja untuk mewujudkan penurunan pengangguran kembali, khususnya selama Pandemi ini masih berlangsung. Disamping lapangan kerja, tentu saja penciptaan ruang/kesempatan berusaha, baik yang bersifat vertikal atau horizontal, khususnya dengan usaha skala besar yang ada di sekitarnya juga terus diupayakan.

#### 4.4. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah per-urusan pemerintahan. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada akhir periodisasi pembangunan jangka menengah, dengan tetap mempertimbangkan sinergitas target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, target pembangunan nasional, isu internasional, dan kesepakatan regional-global.

Terdapat 8 (delapan) rumusan Isu Strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu: a) Peningkatan daya saing

sumber daya manusia, b) Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal, c) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan, d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, e) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel, f) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), g) Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dan h) Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19.

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir periode pembangunan jangka menengah keempat, yaitu tahun 2023:

a) Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan/sekolah vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga di sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ini, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan akhirnya diharapkan pada kualitas pendidikan.

Selain itu, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing. Keterampilan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi penting dimiliki untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Disisi lain, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, juga menjadi bagian penting guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin,

serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia mendatang.

- b) Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur akan sangat tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbarukan dilakukan melalui optimasi produktivitas kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu dan bahkan jasa lingkungan serta penggunaan kawasan hutan sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya (hilirisasi), diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur, paling tidak dalam mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas juga menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada kawasan Danau Jempang, Semayang dan Melintang di daerah aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

- c) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur. Rangkaian pembangunan yang terintegrasi sangat diharapkan realisasinya dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan penguatan konektivitas wilayah sehingga setiap kawasan ekonomi dapat terhubung dan saling mendukung. Tak hanya sampai disana, pemenuhan infrastruktur dasar ini tentu akan mendukung pembangunan IKN menjadi lebih baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perwujudan infrastruktur yang handal seperti akses air minum layak untuk seluruh masyarakat.

Diperlukan upaya optimal untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi SPAM Regional Marangkayu (Kukar-Bontang), SPAM Regional Void Ex Tambang (Kutim-Bontang), SPAM Regional Suka Rahmat (Kutim-Bontang), SPAM Regional Sepaku-Semoui (PPU-Balikpapan), SPAM Regional Batu Lepek (Kukar Balikpapan), dan SPAM Regional Lambakan (Paser-PPU Balikpapan).

Selain terkait konektivitas wilayah dan akses terhadap sumber air minum, maka pengembangan perumahan dan pemukiman layak huni melalui sanitasi dan drainase yang baik diharapkan mampu menjadikan masyarakat hidup lebih layak, termasuk didalamnya penyediaan listrik,

ketahanan bangunan hingga ketersediaan prasarana dan sarana umum (PSU).

d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya, Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Namun di sisi lain, isu kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, meskipun kedua sektor tersebut merupakan kewenangan pusat, namun dampak yang timbul perlu diantisipasi dengan langkah strategis penanggulangannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Adapun dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, memperbanyak desa tangguh bencana, sekolah/madrasah aman bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

Dari sisi adaptasi, penyiapan sumber daya manusia yang tangguh bencana dan mencintai lingkungan sejak dini juga masih perlu diintervensi melalui sekolah-sekolah berstandar adiwiyata. Dalam skala kampung/desa, mendorong perencanaan tata ruang kampung/desa yang rendah emisi dalam kerangka Kampung Iklim serta percepatan penyadartahuan urgensi penanganan persampahan juga perlu diperhatikan.

e) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan

dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kondisi ini menjadi konsekwensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang membuat dan bahkan menuntut keerbukaan dan kesiapan dalam pelayanan publik. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

f) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Berdasarkan capaian pembangunan daerah, masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM sebagai acuan. Adapun masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM di Kalimantan Timur, antara lain :

- a. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;
- b. Kapasitas daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada masalah lemahnya pemahaman aparatur daerah;
- c. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

- d. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.

g) Pembangunan Ibukota Negara (IKN)

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya.

Persoalan perubahan lingkungan hidup akibat dari pembangunan IKN tentu akan langsung menjadi sorotan, mengingat pemahaman luas selalu mengidentikan Kalimantan Timur sebagai pusat kekayaan dan keaneragaman hayati dunia. Terutama jika mengingat bahwa Kalimantan merupakan lokasi strategis bagi seluruh proyek paru-paru dunia, atau penyerapan dan penyimpanan karbon yang menjadi isu sentral global. Pertambahan secara masif jumlah bangunan dan infrastruktur yang akan dibangun membutuhkan suplai yang sangat banyak dari alam. Sehingga secara alamiah, daya tampung lingkungan hidup secara mendadak akan bertambah beberapa kali lipat. Selain hal-hal alamiah ini, persoalan legal lingkungan hidup juga memiliki potensi yang cukup besar seperti eksekusi lahan yang memiliki Hak Guna usaha/HGU, izin usaha perkebunan, izin pertambangan, atau lahan-lahan yang telah dipersiapkan sebagai wilayah perlindungan. Selain memberikan dampak yang cukup problematis dan sekaligus dilematis, pemindahan dan pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai upaya kampanye Ibukota hijau. Pengembangan IKN yang bisa dikatakan di desain dari nol (sehingga memungkinkan mendapatkan model yang ideal), memungkinkan seluruh proyek pembangunan diarahkan kepada pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau. Rangkaian pembangunan atau pertumbuhan ekonomi hijau

ini secara gradual akan memberikan efek yang sangat positif bagi Kalimantan Timur secara regional, Indonesia secara nasional, dan menjadi isu internasional.

Persoalan besar yang kedua dari pemindahan IKN adalah perspektif bertambahnya jumlah penduduk secara drastis (paling tidak dari pengalaman Jakarta sebagai ibukota saat ini). Persoalan kependudukan ini dan persoalan lingkungan pada dasarnya saling terkait, terutama dalam pembahasan suplai yang akan diberikan oleh alam. Efek langsung yang akan muncul dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah jumlah dan model hunian yang akan dibangun. Infrastruktur-infrastruktur dasar yang akan dibangun secara massal ini memutlakkan penggunaan sumber daya alam yang terus menerus dalam jangka panjang dan dengan bobot yang besar. Seperti halnya para persoalan lingkungan di atas, problem kependudukan juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi sumber peluang dengan mempersiapkan peta jalan (*road map*) pembangunan yang dapat disesuaikan dan terlokalisir dengan baik.

Problem ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian Ibu Kota Baru. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan baik di wilayah Kalimantan Timur maupun di provinsi-provinsi tetangga mengandaikan bahwa pemindahan IKN berpotensi surplus. Akan tetapi, pemindahan aparatur negara tentu tidak akan bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu atau dua gelombang. Asumsi bahwa keuntungan ekonomis, tidak bisa disimpulkan secara cepat. Terutama jika mengingat akan adanya evaluasi bertahap dan berlapis mengenai hal ini. Perubahan-perubahan rencana sangat memungkinkan untuk terjadi dan dilakukan dalam tahapan yang besar juga.

Problem besar terakhir adalah kesiapan masyarakat dan budaya lokal dalam menerima pemindahan IKN. Irisan paling strategis dari isu pemindahan IKN adalah bertambahnya marwah Negara dan Bangsa Indonesia di wilayah Internasional terutama pada bagian utara NKRI. Sebagaimana yang telah diketahui, potensi-potensi masalah kebanyakan berasal dari wilayah perbatasan sebelah Utara dan Selatan NKRI. Ditambah dengan jumlah negara dan wilayah dagang potensial yang berada di bagian utara, maka pemindahan IKN ke bagian Utara NKRI adalah langkah yang sangat signifikan dengan kedaulatan negara ke luar. Meski demikian, perubahan yang akan terjadi secara tiba-tiba dengan problem-problem yang

tidak sedikit perlu untuk disikapi agar bisa menjadi peluang. Salah satu persoalan paling klasik dari masyarakat dan budaya di wilayah Kalimantan adalah persoalan hunian dan eksploitasi SDA. Secara postulatif, seluruh rangkaian pemindahan IKN ini memiliki kandungan-kandungan persoalan pada dua hal besar tersebut. Dalam kaitan implikasi sosial budaya adalah upaya untuk membangun kerukunan antar suku dan/atau kelompok masyarakat yang dipertimbangkan akan menjadi sangat heterogen dengan terbangunnya IKN di provinsi ini. Pengalaman Panjang Kalimantan Timur yang mampu mengendalikan konflik sosial meskipun industrialisasi sumber daya alam di berbagai bidang selama berdarsawarsa telah menarik berbagai migran ke wilayah ini, menjadi nilai plus dari harapan pencapaian kerukunan dimaksud.

Bagian paling menguntungkan dari pemindahan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh. Pemindahan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi Pemerintah Pusat dan sekaligus Pemerintah Daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan dilaksanakan. Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau.

#### h) Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang bersifat global dan mempengaruhi seluruh struktur juga secara global. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh sektor yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah, sedang, dan akan terdampak. Sehingga, secara bertahap penurunan produktivitas di dalam struktur masyarakat akan mengarah pada kemunculan kerentanan sosial. Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika tertentu terutama pada sektor ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan tentu saja merasakan dampak yang cukup besar dan luas. Hal-hal yang paling urgen untuk ditindaklanjuti adalah persoalan retribusi dan pajak, alternatif bagi tenaga kerja yang di-PHK, dan kesulitan dalam pasokan bahan baku industri.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan di atas mengimbuai seluruh sektor lainnya. Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja membuat distribusi pangan tidak bisa tersalurkan dengan baik, Selain itu, urgensi untuk bekerja dari rumah juga menghambat tetap berjalannya produktivitas di bidang pangan yang ditandai oleh banyaknya terjadi gagal panen. Selain sektor pangan, industri-industri kecil juga mendapatkan penurunan pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan kelesuan daya saing.

Salah satu upaya strategis Pemerintah Pusat dalam meredam dampak Pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan reformasi struktural. Diharapkan reformasi struktural mampu memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia sehingga dapat mengakselerasi ketertinggalan akibat dampak negatif pandemi. Presiden Joko Widodo memprioritaskan lima hal yang harus menjadi area fokus bagi program reformasi struktural, yaitu: (a) pengembangan SDM, (b) pembangunan infrastruktur, (c) deregulasi, (d) debirokratisasi, dan (e) mentransformasikan ekonomi.

Peluang yang sangat berpotensi muncul dari bencana pandemi COVID-19 ini adalah pada reformasi birokrasi secara regional. Kunci utama dari terjadinya reformasi industri tahap baru ini bisa dimulai dari kesepakatan global masyarakat dunia mengenai perlawanan terhadap COVID-19. Secara mendasar adanya konsensus nasional dan bahkan internasional ini akan memudahkan untuk melakukan *reshaping* aturan dan regulasi serta sistem pelayanan birokrasi, sehingga penanganan problem di seluruh sektor bisa dilakukan. Persoalan-persoalan yang muncul di dalam bidang industri yang melibatkan pasokan bahan baku dari luar negeri akan digantikan dengan pengaturan baru mengenai impor dan ekspor bahan baku terkait. Persoalan ketahanan pangan akan membuka kolaborasi regulatif dari beberapa daerah yang berdekatan untuk saling mengisi pasokan-pasokan pangan yang ada di dalam negeri.

Begitu juga peluang untuk memangkas pengeluaran bagi anggaran secara hibrid akan bisa dicapai melalui pelayanan yang tidak lagi mutlak dilaksanakan secara fisik. Persiapan pada infrastruktur yang sebelumnya bisa saja masih dinilai tidak efektif akan berubah secara pragmatis dikarenakan kebutuhan bersama yang memutlakan adanya adaptasi sosial. Hal yang mencengangkan juga terjadi di dunia pendidikan dengan mulai

terbiasanya masyarakat dalam memanfaatkan media-media daring (*online*) untuk kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Struktur penghubung mengenai seluruh hal ini tentu harus diregulasikan agar bersifat mengikat seluruh kalangan.

Peluang paling baik yang mungkin muncul dari bencana pandemi COVID-19 adalah cara pandang masyarakat Indonesia, umumnya dan masyarakat Kalimantan Timur mengenai protokol mendasar kesehatan. Selain itu kesadaran bahwa keberadaan setiap orang sebagai unsur masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan, pendidikan, dan sosial-budaya akan meningkat dengan tajam. Peluang-peluang yang akan muncul ini, jika dapat didukung dengan program yang tepat secara kualitatif akan mampu mengimbangi *cost* yang dikeluarkan dalam bentuk belanja selama menghadapi dan masa pemulihan COVID-19 ke depan.

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam setiap rencana pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah, senantiasa dituntut untuk memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang harus dirumuskan secara jelas dan runut dengan kecermatan dan kehati-hatian. Visi menjadi landasan utama dari suatu rencana yang ingin dicapai, baik dalam rencana jangka panjang maupun menengah. Adapun misi ditunjukkan untuk menunjukkan cara/langkah-langkah yang ditetapkan guna mencapai tujuan pembangunan. Sementara tujuan pada tahap operasionalisasi merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dan diupayakan diwujudkan. Sedangkan Sasaran, sebagai konsekuensi logis dari Tujuan, merupakan pernyataan tentang hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan secara operasional (biasanya setiap tahun/jangka pendek).

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada: (a) nilai yang berkembang di masyarakat, (b) visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, (c) capaian kondisi pembangunan daerah, serta (d) proyeksi pembangunan lima tahun berikutnya. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ke depan tidak hanya dititikberatkan pada upaya efisiensi pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting, antara lain: (a) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (b) ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, (c) pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), (d) ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada periode Tahun 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Berdasarkan tema pembangunan tahapan ke-4 tersebut maka aspek SDM menjadi focus utama yang perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

### 5.1. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023, yaitu :

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Berani: dimaknai bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan diwujudkan dalam pemerintahan yang memiliki keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kalimantan Timur yang Berdaulat: diuraikan bahwa pokok dari pernyataan visi “Kalimantan Timur yang Berdaulat” terdapat pada kata “Berdaulat”. Istilah berdaulat yang dimaksud akan dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut :

- a) Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;
- b) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- c) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- d) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

## 5.2. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;

Misi pertama berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

Misi 2: Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;

Misi kedua merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan di bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan daerah untuk pendanaan pembangunan Kalimantan Timur yang selama ini masih rendah dibanding potensinya. Sumber ekonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu ekonomi berbasis ekspor yang didukung oleh sektor industri dan ekonomi berbasis kerakyatan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian diharapkan dapat menopang dua basis ekonomi di atas. Untuk itu, diharapkan, upaya untuk mendatangkan investasi pada sektor-sektor unggulan, khususnya pada hilirisasi menjadi salah satu sasaran penting misi kedua. Di luar itu, sektor UKM dan pariwisata menjadi andalan ekonomi Kalimantan Timur berikutnya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah dan kerakyatan, Kalimantan Timur menyandarkan kepada kekuatan daerah dengan menciptakan persaingan yang adil dalam kepastian berusaha melalui dukungan modal, teknologi, usaha pertanian rakyat, BUMDES dan koperasi.

Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;

Misi ketiga merupakan kebijakan untuk mencapai kedaulatan di bidang infrastruktur kewilayahan dengan tujuan utama mencapai keseimbangan antara konektivitas dan kebutuhan infrastruktur wilayah pada

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang daerahnya tertinggal guna mendukung pengurangan ketimpangan pembangunan. Dalam kerangka itu, disamping untuk meningkatkan jumlah arus barang dan penumpang dari dan ke Kalimantan Timur dan pengembangan kawasan ekonomi, dukungan infrastruktur prioritas juga diwujudkan pada ketersediaan air minum layak, dukungan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penurunan kawasan kumuh, pengurangan dampak banjir, kebutuhan listrik masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan tata ruang.

Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;

Misi keempat merupakan amanat penting dari pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon, agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability*) secara keseluruhan melalui aspek pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Misi kelima ini merupakan kebijakan pengungkit bagi keberhasilan misi-misi yang lain pada umumnya berupa hadirnya pemerintahan yang berdaulat, yaitu birokrasi yang bersih, jujur, mandiri, berwibawa, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang mendukung daya saing daerah serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, perlu diwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kinerja dengan citra birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dinamika dan tuntutan layanan hadirnya sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik bersifat mendesak.

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur.

Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selama masa jabatan berlangsung. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari: (a) Indeks Pembangunan Manusia, (b) Tingkat Kemiskinan, (c) Tingkat Pengangguran Terbuka, (d) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (e) Indeks Gini, dan (f) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator makro ini merupakan petunjuk atas pencapaian *impact* pembangunan lokal, regional, dan nasional. Tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator makro pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat pada Tabel V-1.

Tabel V- 1 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		2018	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,41	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,5±1
5.	Indeks Gini	0,342	0,308
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,68	76,15
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,02)	B (72,00)

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian visi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Tujuan RPJMD juga menggambarkan capaian visi dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun akan diletakkan beriringan dengan setiap tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun 6 (enam) tujuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

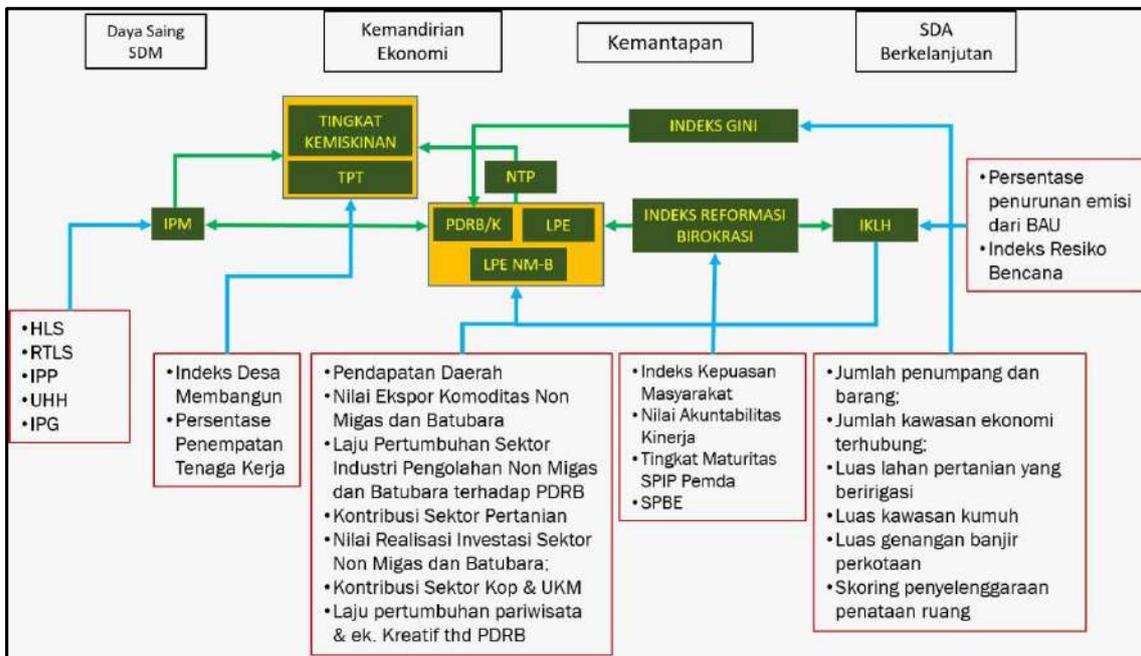
Keenam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SDGs dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel V-2.

Tabel V- 2 Keselarasan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Kehidupan sehat dan Sejahtera		Pendidikan Berkualitas
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tanpa Kemiskinan		Kesetaraan Gender

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	 Tanpa Kelaparan	 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung jawab	 Kemitraan untuk mencapai Tujuan
4	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	 Energi Bersih dan terjangkau	 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	 Berkurangnya Kesenjangan	
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	 Air Bersih dan Sanitasi Layak	 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	 Penanganan Perubahan Iklim	 Ekosistem Lautan
		 Ekosistem Daratan			
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SGDs di atas, menunjukkan komprehensivitas tujuan pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan di dalam sasaran-sasaran, dengan *casecading* indikator sebagaimana gambar V-1.



Gambar V- 1 *Casecading* Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dari gambar V-1 tampak bahwa *ultimate goals* RPJMD adalah pada pencapaian visi yang diwakili oleh terwujudnya indikator tujuan sebagai tanggung jawab kepala daerah. Indikator tujuan dimaksud juga mencerminkan terwujudnya pokok visi, meliputi: (1) kemantapan (pemerintahan), (2) kemandirian dalam ekonomi, (3) SDA Berkelanjutan, dan (4) Daya Saing SDM. Guna mewujudkan masing-masing indikator tujuan yang sekaligus juga mencerminkan pencapaian kinerja makro pembangunan, dikembangkan hubungan kinerja dimaksud dengan IKU sektoral atau bidang urusan yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (prioritas) yang sekaligus mencerminkan indikasi keberhasilan sasaran di masing-masing tujuan. Menyukkseskan capaian indikator masing-masing sasaran merupakan salah satu kunci terwujudnya kinerja makro atau tujuan pembangunan.

Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan *refocusing* Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Perubahan jumlah tujuan dari yang semula 7 tujuan menjadi 6 tujuan. Selanjutnya perubahan Sasaran dari yang semula 28 sasaran menjadi 19 sasaran. Perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian terhadap indikator yang digunakan. Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel V-3.

Tabel V- 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,75	77,25	77,75
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,69	13,72	13,91	14,02	14,13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,70	9,77	9,91	10,04	10,17
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	0,22	0,32	0,40
Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,33	74,45	74,60	74,75
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,65	65,54	65,63	65,64	65,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6.50	6.00	5.90

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,09	6,87	6.81	6.75	6.50
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6238	0,6752	0,6770	0,6825	0,6900
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29,41	-0,27	33,14	35,00	40,00
<b>MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN</b>						
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	-2,85	1,5±1	3,5±1	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	170	172	175
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	1,50	2,00	2,50
	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	118,00	119,00	120,00
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.775	10.132	9.590	11.038	12.122
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,04	2,23	1,57	1,72	1,89
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas	7,46	8,24	9,44	9,64	9,86

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	dan Batubara thd PDRB (%)					
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,56	0,63	0,64	0,65	0,65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,36	0,36	0,37	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,33	4,94	5,00	5,20	5,30
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,67	1,68	1,70	1,72
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,07	15,04	12,92	13,00	13,50
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,03	1,06	9,52	9,67	9,91
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	14,93	15,23	15,68
<b>MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN</b>						
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,328	0,328	0,313	0,308
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	2	2	4	5	7
	Capaian akses air minum layak (%)	56,84	64,53	66,53	68,53	70,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.728,50	13.878,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50
	Luas Kawasan kumuh (Ha)	1.525,47	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	641	477	420	374	329
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	66,46	75,94	76,74	83,10
	Rasio elektrifikasi (%)	88,93	90,21	91,50	93,00	95,00
<b>MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN</b>						
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,81	75,25	75,95	76,05	76,15
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	25,18	50,72	27,75	28,50	29,33

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49
<b>MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>						
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	B (71,00)	B (71,50)	B (72,00)
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	82,00	82,30	82,50	83,00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04	3,14	3,20	3,25	3,30
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

5.4. Penyeragaman Indikator Makro RPJMD dengan RPJMN

Dalam rangka pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka perlu penyeragaman perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat daerah. Penyeragaman RPJMD terhadap RPJMN tahun 2020-2024 bertujuan untuk menciptakan intergrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah; mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2020-2024; menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024; dan menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Penyeragaman yang dilakukan yakni penyeragaman target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target indikator makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyeragaman pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Penyeragaman target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro nasional dengan target indikator makro daerah.

Tabel V- 4 Penyeragaman Target Makro Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro Nasional

Indikator	Target RPJMN					Indikator	Target RPJMD				
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.80	6.70	7.10	8.00	8.50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,85	-1.00	3,5±1	3,5±1	
Tingkat Kemiskinan (%)	5.58	5.25	4.66	4.11	3.35	Tingkat Kemiskinan (%)	6,1	6,05	6	5.90	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.20	6.00	5.80	5.40	5.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	6,81	6,75	6,5	
Rasio Gini					0.360 -0.474	Indeks Gini	0.328	0.313	0.313	0.308	
Penurunan Emisi GRK (%)					27.3	Penurunan Emisi GRK (%)	50,72	27,75	28,5	29,33	
Indeks Pembangunan Manusia					71,22- 79,25	Indeks Pembangunan Manusia	76.24	76.75	77.25	77.75	

#### 5.5. Agenda Pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur

Sebagai penerjemahan terhadap visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan utama Gubernur tersebut merupakan target kinerja dedikatif pada akhir masa jabatan Gubernur/Wakil dalam mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa dalam 5 tahun);
3. 250.000 penyerapan tenaga kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan direktif/arahan utama Gubernur tersebut, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penerjemahan visi, misi, direktif/arahan utama Gubernur dan agenda pembangunan dapat dilihat sebagaimana keterkaitannya dapat dilihat pada Gambar V-2 dibawah ini.



Gambar V- 2 Keterkaitan Misi, Arahan Gubernur, dan Agenda Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

#### 5.6. Arahan Target Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten/kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh.

Salah satu upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah melihat bagaimana target indikator makro pembangunan yang merupakan rapor kinerja kepala daerah mampu selaras dan saling mendukung antar daerah. Target indikator makro yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019, adalah alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik pada aspek ekonomi, sosial maupun urusan pembangunan lainnya. Untuk lebih rinci dalam melihat arahan target pembangunan indikator makro kabupaten/kota, dapat dilihat pada Tabel V-4. Sebagai informasi, bahwa target indikator makro kabupaten/kota ini telah dibahas di dalam forum Pra-Musrenbang.

BAB VI  
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas daerah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Permasalahan Daerah serta Isu Strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan eksternal maka dirumuskan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Pemaparan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi sebagai berikut :

Tabel VI- 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	S1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		serta kemampuan pembelajaran berbasis IT 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu 5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh 6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	S2. Peningkatan daya saing generasi muda	7. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT 8. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	S3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis 10. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya 12. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular 13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	S4. Optimalisasi pengarusutamaan gender	14. Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
Sasaran 5: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	S5. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	15. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa 16. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	S6. Perluasan kesempatan kerja	17. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		18. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	S7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	19. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		20. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	S8. Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	21. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		22. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor
		23. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	S9. Pengembangan industri unggulan provinsi	24. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		25. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		26. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	S10. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	27. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		28. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		29. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	S11. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	30. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		31. Pengembangan Kawasan Peternakan
	S12. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	32. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		33. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		34. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		35. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		36. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	S13. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	37. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		38. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
		39. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	S14. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	40. Penguatan informasi potensi kawasan hutan
		41. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
		42. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan
		43. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor	S15. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha	44. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Non Migas dan non Batu Bara	Non migas dan non batubara	45. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
		46. Pemantauan komitmen perizinan
		47. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	S16. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	48. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		49. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital
		50. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		51. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	S17. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	52. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim
		53. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		54. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	S18. Pengembangan ekonomi kreatif	55. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim
		56. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan		
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang	S19. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	57. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		58. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
perekonomian berbasis tata ruang/ kewilayahan.	S20. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	59. Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	S21. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	60. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		61. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		62. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	S22. Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	63. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	S23. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	64. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	S24. Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	65. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	S25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	66. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
67. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang		
68. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.		
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	S26. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	69. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		70. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	S27. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	71. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		72. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	S28. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	73. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		74. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		75. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	S29. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	76. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		77. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	S30. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	78. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah dengan mempedomani Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Dengan demikian diharapkan akan ada efisiensi waktu, dan tenaga dalam rangka efektifitas pemanfaatan anggaran dan pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

## 6.2. Tema Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tema pembangunan tahunan merupakan garis besar kebijakan yang spesifik guna menggambarkan puncak prioritas pembangunan tahunan. Tema menjadi arah kebijakan tahunan, yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang paling tepat agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan secara terstruktur selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan akan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan setiap tahun telah dirumuskan dengan mengacu pada rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang di dalam Gambar VI-1.



Gambar VI- 1 Tema Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD pertahun, identifikasi isu strategis, dan permasalahan dengan urgensitas tinggi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap tema RKPD sebagaimana disajikan pada Gambar VI-1 diatas memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini :

- a. Tema RKPD Tahun 2019: *“Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”*, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
  1. Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
  2. Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
  3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan;
  4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas sentra produksi, kawasan industri dan outlet; dan
  5. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan publik.
  
- b. Tema RKPD Tahun 2020, *“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”*, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
  1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi;
  3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan;
  4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi;
  5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
  6. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.
  
- c. Tema RKPD Tahun 2021, *“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”*, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
  1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
  2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
  3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
  4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
  5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;

6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;
  7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi COVID-19.
- d. Tema RKPD Tahun 2022, *Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN*" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;
  2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;
  3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;
  4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN; dan
  5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
- e. Tema RKPD Tahun 2023, *"Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"* dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
  2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
  3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
  4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
  5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
  6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

### 6.3. Program Unggulan Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program unggulan RPJMD tahun 2019-2023 merupakan amanat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih sesuai dengan janji Gubernur

dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (disertai dengan indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya;
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur;
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama;
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School);
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan;
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA;
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal;
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas;
9. Peningkatan perlindungan anak;
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun;
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional;
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan;
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah;
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa;
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera;
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan;
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat;

18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas;
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat;
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis;
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat;
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata;
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan;
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara;
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis;
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN);

36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah;
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan; dan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jika dikelompokkan 38 (tiga puluh delapan) program unggulan Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023, maka ada 8 (delapan) kelompok besar, yaitu berturut-turut terbanyak: SDM/ Sosbud (10 program); Fisik/ Infrastruktur (8 program); Pemerintahan/ Pelayanan Publik (5 program); Ekonomi (5 program); Lingkungan (5 program); Pertanian luas (3 program); Energi (2 program). Berdasarkan pengelompokan program unggulan di atas, maka dapat dilihat prioritas yang akan dikerjakan dan dicapai hingga akhir periode RPJMD 2019-2023.

#### 6.4. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan memperhatikan urutan waktu. Arah kebijakan juga menjadi instrumen untuk memetakan kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan agar tetap dalam koridor untuk memecahkan berbagai akar permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Di tingkat provinsi, di samping akan dioperasionalkan oleh perangkat daerah, arah kebijakan juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta pencapaian target makro ekonomi kabupaten/kota adalah sebagai dirangkum pada Tabel VI-2 berikut.

Tabel VI- 2 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
1.	Paser	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang berdekatan pada areal

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
			konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur air bersih, peningkatan kualitas kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Layanan Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan vokasi
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro dan Pangan
2.	KUBAR	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan Nilai Tambah Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan, utamanya di kawasan 3 (tiga) danau
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan layanan infrastruktur	Peningkatan layanan jaringan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, Perluasan infrastruktur air bersih dan jalan produksi
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Layanan Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan vokasi
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro dan Aneka
3.	KUKAR	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan,	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		hortikultura dan perkebunan	pangan dan hortikultura produktif Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, utamanya di kawasan 3 (tiga) danau
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, Perluasan infrastruktur air bersih, peningkatan kualitas kawasan kumuh, jalan provinsi, dan jalan produksi

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka dan Pangan
4.	KUTIM	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	peningkatan & perluasan infrastruktur air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, pengendalian banjir, jalan provinsi, jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri Maloy sebagai kawasan industri hulu agro, industri berbasis oleochemical dan pengolahan hasil tambang serta industri aneka
5.	Berau	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif  Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan telekomunikasi, jalan provinsi, jalan produksi, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat  Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Pengembangan industri pariwisata	Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia, utamanya untuk mendukung pengembangan industri pariwisata Kepulauan Derawan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro
6.	PPU	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif
			Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Pengembangan Agroindustri	Pengembangan kawasan industri Buluminung sebagai pusat industri pengolahan produk pertanian
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka dan Pangan di Kawasan Industri Buluminung
7.	MAHULU	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten	Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan telekomunikasi, jalan akses perbatasan, jalan produksi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Aneka
8.	Balikpapan	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
9.	Samarinda	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Peningkatan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
		Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro, Aneka, Kimia Dasar dan Pangan
		Pengendalian perluasan kawasan pertambangan	Pembatasan wilayah kerja konsesi pertambangan pada kawasan permukiman
		Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
10.	Bontang	Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk Perikanan Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Peningkatan dan perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri petrokimia berbasis gas dan kondensat

Terdapat catatan penting dari Tabel VI-2. di atas terkait dengan Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan serta membandingkan dengan Program Unggulan Gubernur 2019-2023, bahwa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur justru mengarahkannya pada aspek perekonomian

terutama transformasi ekonomi menuju kepada sumber daya alam terbarukan (khususnya Bidang Pertanian dalam arti luas). Tentu saja program di Bidang SDM/Sosbud serta infrastruktur juga tetap ada dalam perencanaan regional tersebut. Dengan demikian maka program-program unggulan Gubernur harus mampu dijabarkan lebih dominan dalam perencanaan sektoral melalui Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD agar dapat menjamin implementasinya.

#### 6.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-clusteran wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya sekaligus tetap memperhatikan daya dukung maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016-2036, dan berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pengembangan kawasan untuk lima tahun kedepan pada Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Tabel VI- 3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

No	Kawasan Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
1.	Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.
2.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan <i>oleochemical</i> berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, <i>oleo chemical</i> , dan industri turunannya.
3.	Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

#### 6.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

Pencapaian indikator target kinerja Visi dan Misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD. Secara lengkap Program prioritas Pembangunan Daerah dapat di lihat pada Lampiran dokumen ini. Sedangkan penjelasan berikut merupakan ringkasan per-urusan.

## A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

### 1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas; pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan; dan pengelolaan pendidikan khusus melalui pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa hingga pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, serta sub kegiatan lainnya yang bersifat pembangunan dan rehabilitasi ruang/gedung.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK pada tahun 2021 sebesar 77%, tahun 2022 sebesar 82% dan tahun 2023 sebesar 85%.

### 2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi melalui sub kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan target di tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 3 kabupaten/kota.

#### b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di 10 kabupaten/kota; penyediaan

layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi; dan penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota dengan target tahun 2021-2023 sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat Daerah Provinsi melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan; dan kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase kabupaten/kota yang memiliki  $\geq 45\%$  Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan pada tahun 2021 sebesar 30%, tahun 2022 sebesar 40%, dan tahun 2023 sebesar 50%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi melalui sub kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada tingkat kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 sebesar 75,02%, tahun 2022 sebesar 76,15% dan tahun 2023 sebesar 78,27%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui

sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM; Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; dan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada capaian akses air minum layak perpipaan pada tahun 2021 sebesar 64,64%, tahun 2022 sebesar 66,64%, dan tahun 2023 sebesar 68,64%.

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan Polder/Kolam Retensi; dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan persentase capaian layanan SDA pada tahun 2021 sebesar 73,69%, tahun 2022 sebesar 76%, dan tahun 2023 sebesar 78,91%.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada panjang saluran drainase yang berfungsi baik pada tahun 2021 sepanjang 2.785 meter, tahun 2022 sepanjang 3.020 meter, dan tahun 2023 sepanjang 3.455 meter.

e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada indeks penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2021 sebesar 0,87, tahun 2022 sebesar 0,91, dan tahun 2023 sebesar 1.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha melalui sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha; koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha; dan pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pengurangan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2021 menjadi 71.781 unit, tahun 2022 menjadi 70.781 unit dan tahun 2023 menjadi 69.681 unit.

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi melalui penyusunan kajian risiko bencana provinsi; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana

kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan pascabencana provinsi, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui respon cepat penanganan darurat bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana melalui pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase desa/kelurahan Tangguh bencana pada tahun 2021 sebesar 66,67%, tahun 2022 sebesar 82,67%, dan tahun 2023 sebesar 100%.

## B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja; kegiatan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja melalui survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja; kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah melalui pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan persentase lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 70%.

#### b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota; penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

pengelolaan informasi pasar kerja; perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi; Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 31%.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan provinsi; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi; penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pengimplementasian kelembagaan PUG pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 1 kebijakan.

## 3. Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut serta

koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan (1) Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) pada tahun 2021 sebesar 53,75, tahun 2022 sebesar 53,80, tahun 2023 sebesar 53,85; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 sebesar 89,11, tahun 2022 sebesar 89,16, tahun 2023 sebesar 89,21; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2021 sebesar 79,81, tahun 2022 sebesar 79,86, tahun 2023 sebesar 79,91; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada tahun 2021 sebesar 83,56, tahun 2022 sebesar 83,61, tahun 2023 sebesar 83,66.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah Desa berkembang dengan target pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 30 desa.

##### b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal dengan target sebanyak 30 Desa pada tahun 2021, 35 Desa pada tahun 2022, dan 45 Desa pada tahun 2023.

## 5. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; pengelolaan terminal penumpang Tipe B; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi; persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi; audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 menjadi 512 kasus, tahun 2022 menjadi 427 kasus dan tahun 2023 menjadi 342 kasus.

### b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait

Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas; dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP pada tahun 2021 sebesar 85%, tahun 2022 sebesar 87%, dan tahun 2023 sebesar 88%.

## 6. Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi dengan target tahun 2021 sebesar 70%, tahun 2022 sebesar 80%, dan tahun 2023 sebesar 85%.

## 7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melalui sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target Koperasi sehat dimana pada tahun 2021 program

ini tidak dilaksanakan, yang kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2022-2023 dengan target masing-masing sebesar 10%.

b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan melalui sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target UKM naik kelas pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 1%.

c. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah melalui sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan *platform* pasar berbasis digital pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 3%.

8. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi melalui sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; penyediaan

layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada waktu penyelesaian proses perizinan pada tahun 2021 menjadi 12 hari, tahun 2022 menjadi 11 hari, dan tahun 2023 menjadi 10 hari.

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi melalui sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 100%.

9. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pengembangan daya saing keolahragaan pada tahun 2021 sebesar 67%, tahun 2022 sebesar 70%, dan tahun 2023 sebesar 80%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi; dan

pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan pada tahun 2021 sebesar 0,8%, tahun 2022 sebesar 1%, dan tahun 2023 sebesar 1,2%.

## 10. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi melalui sub kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi, pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi, pengembangan perpustakaan deposit, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka; dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada prosentase peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi pada tahun 2021 sebesar 7%, tahun 2022 sebesar 9%, dan tahun 2023 sebesar 11%.

## C. Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan sub – sub kegiatan yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat, rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada luasan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif pada tahun 2021 seluas 289.048 Ha, tahun 2022 seluas 297.805,90 Ha, dan tahun 2023 seluas 297.805,90 Ha.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 158.938 ton, tahun 2022 sebesar 162.593 ton, dan tahun 2023 166.170 ton.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing melalui sub kegiatan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 161.216 ton, tahun 2022 sebesar 164.441 ton, dan tahun 2023 sebesar 167.730 ton.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; dan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan pada tahun 2021 sebanyak 2 jenis, tahun 2022 sebanyak 3 jenis, dan tahun 2023 sebanyak 4 jenis.

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi melalui perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi dan pengembangan daya tarik wisata unggulan; pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengelolaan destinasi pariwisata provinsi melalui monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang dikembangkan pada

tahun 2021 sebanyak 2 destinasi, tahun 2022 sebanyak 3 destinasi, dan tahun 2023 sebanyak 3 destinasi.

b. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif melalui sub kegiatan layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif dan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui sub kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan dimana pada tahun 2021 program ini tidak dilaksanakan, yang kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2022-2023 dengan target masing-masing sebesar 23,53%.

3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian melalui sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada meningkatkan (1) jumlah produksi padi pada tahun 2021 sebesar 271.356 ton, tahun 2022 sebesar 279.581 ton, tahun 2023 sebesar 289.846 ton; (2) jumlah produksi tanaman hortikultura pada tahun 2021 sebesar 273.070 ton, tahun 2022 sebesar 283.592 ton, tahun 2023 sebesar 292.383 ton.

### Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian melalui sub kegiatan melalui sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada produksi komoditas perkebunan pada tahun 2021 sebesar 17.136.849,15 ton, tahun 2022 sebesar 18.126.490,20 ton, dan tahun 2023 sebesar 18.313.874,25 ton.

### Peternakan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian; peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi; pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi; pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan angka kelahiran sapi pada tahun 2021 sebesar 20,5%, tahun 2022 sebesar 21%, dan tahun 2023 sebesar 22%.

## b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

### Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian melalui sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada (1) luas lahan kelompok tani tanaman pangan yang difasilitasi pada tahun 2021 seluas 7.100 ha, tahun 2022 seluas 8.000 ha, tahun 2023 seluas 8.500 ha; dan (2) jumlah fasilitas pengembangan pada tahun 2021

sebanyak 6 unit; tahun 2022 sebanyak 7 unit; tahun 2023 sebanyak 7 unit.

#### Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian melalui sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada (1) jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 30 kelompok; dan (2) luas kebun yang dibangun pada tahun 2021 seluas 1.425.580 ha, tahun 2022 seluas 1.462.645 ha, dan tahun 2023 seluas 1.500.674 ha.

#### Peternakan

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian melalui sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah *mini ranch* yang teregister pada tahun 2021 sebanyak 24 unit, tahun 2022 sebanyak 49 unit, dan tahun 2023 sebanyak 30 unit.

### c. Program Penyuluhan Pertanian

#### Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan ketenagaan penyuluhan melalui sub kegiatan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN; kegiatan pengembangan penerapan penyuluh pertanian melalui sub kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan melalui sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani dan pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada (1) jumlah aparatur, non aparatur yang dibina pada tahun 2021 sebanyak 85 orang, tahun 2022 sebanyak 330 orang, tahun 2023 sebanyak 441 orang; dan (2)

jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 4 lembaga.

#### Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan ketenagaan penyuluhan melalui sub kegiatan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN; kegiatan pengembangan penerapan penyuluh pertanian melalui sub kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan melalui sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani, pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani, pendampingan manajemen koorporasi petani, dan penilain kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 1 lembaga.

#### d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi melalui sub kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah penurunan emisi sektor perkebunan pada tahun 2021 sebesar 4,079 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq, tahun 2022 sebesar 4,067 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq, dan tahun 2023 sebesar 4,044 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq.

#### e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota melalui pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 35 perusahaan.

#### 4. Kehutanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan; penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan; penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat pada tahun 2021-2023 masing-masing seluas 32.000 ha.

##### b. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun; dan perbenihan tanaman hutan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada (1) produksi hasil hutan kayu pada tahun 2021 sebesar 4.950.000 m<sup>3</sup>, tahun 2022 sebesar 5.000.000 m<sup>3</sup>, tahun 2023 sebesar 5.050.000 m<sup>3</sup>; dan (2) produksi hasil hutan non kayu pada tahun 2021 sebesar 670 ton, tahun 2022 sebesar 700 ton, tahun 2023 sebesar 730 ton.

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program ini diarahkan pada kegiatan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; penatausahaan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; dan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pemanfaatan EBT pada tahun 2021 sebesar 6,08%, tahun 2022 sebesar 7,34%, dan tahun 2023 sebesar 8,40%.

### b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan pada kegiatan penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi; penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; dan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah KK berlistrik pada tahun 2021 sebanyak 1.135.000 KK, tahun 2022 sebanyak 1.165.000 KK, dan tahun 2023 sebanyak 1.200.000 KK.

## 6. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi melalui sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan dan pembinaan pelaku usaha ekspor.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 5%.

7. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi melalui sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah industri pengolahan non migas dan non batubara di kawasan peruntukan industri pada tahun 2021-2023 masing-masing sebanyak 2 industri.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja melalui pembinaan pelaksanaan reformasi

birokrasi, monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan, dan fasilitasi peningkatan pelayanan publik; dan kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan (1) persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021 sebesar 71%, tahun 2022 sebesar 79%, tahun 2023 sebesar 89%; (2) persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK) pada tahun 2021 sebesar 77%, tahun 2022 sebesar 79%, tahun 2023 sebesar 81%; dan (3) persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada tahun 2021 sebesar 92%, tahun 2022 sebesar 95%, tahun 2023 sebesar 97%.

## E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah melalui sub kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; dan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah melalui sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil provinsi.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada (1) persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya pada tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 100%; dan (2) jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim pada tahun 2021 sebanyak 685 wajib pajak, tahun 2022 sebanyak 739 wajib pajak, tahun 2023 sebanyak 777 wajib pajak.

#### b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, melalui sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah; analisa

dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah; penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah; penyelesaian keberatan pajak daerah; pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target pendapatan asli daerah pada tahun 2021-2023 sebesar 100%.

## F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

### 1. Inspektorat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal melalui sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota, kerjasama pengawasan internal dan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2021 sebesar 85%, tahun 2022 sebesar 90%, dan tahun 2023 sebesar 95%.

Tabel VI- 4 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS									
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia									
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK	77%	927.170.386.251	82%	894.742.153.237	85%	1.047.619.357.662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	6,89 %	2.253.800.000	9,19 %	2.325.000.000	11,49 %	2.366.889.475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	66,60 %	104.683.770.000	70 %	26.000.000.000	80 %	52.556.558.610	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	0,8%	2.296.260.000	1%	8.420.000.000	1,2%	1.152.838.910	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100%	89.592.878.967	100%	88.073.706.300	100%	86.786.133.281	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	30%	3.448.642.993	40%	500.000.000	50%	3.803.205.886	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3 Kab/Kota	1.790.115.000	3 Kab/Kota	504.923.350	3 Kab/Kota	1.974.160.828	Dinas Kesehatan
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	999.325.201	1 Kebijakan	1.200.000.000	1 Kebijakan	946.947.708	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat									
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	598.906.326	30 Desa	1.281.412.513	30 Desa	1.445.188.037	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30 Desa	1.699.649.500	35 Desa	2.698.564.625	45 Desa	1.793.722.922	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	204.132.915	70%	1.191.517.040	70%	204.132.915	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2.378.629.500	31%	1.967.167.260	31%	2.094.755.588	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN									
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas									
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah									
KEUANGAN									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	100%; 685 wajib pajak	1.145.950.000	100%; 739 wajib pajak	1.633.400.000	100%; 777 wajib pajak	1.633.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%;	10.043.125.000	100%;	19.318.082.000	100%;	11.471.100.000	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	1.000.000.000	5%	1.185.650.240	5%	1.736.027.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 industri	2.000.000.000	2 industri	3.022.500.000	2 industri	2.984.344.373	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi 2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7100 Ha 6 Unit	6.189.757.500	8000 Ha 7 Unit	4.716.890.000	8500 Ha 7 Unit	4.716.890.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02		1. Jumlah produksi padi	271356 ton	24.520.588.200	279681ton	25.533.110.000	289846 ton	14.715.122.948	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	273070 ton		283592 ton		292383 ton		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	85 orang 4 Lembaga	6.149.929.725	330 orang 4 Lembaga	3.693.331.700	441 orang 4 Lembaga	3.693.331.700	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	24 Unit	9.385.337.500	49 Unit	10.023.538.200	30 Unit	5.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	20.5 %	11.316.262.500	21%	7.243.486.018	22%	10.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079 Juta Ton CO2eq	1.219.000.000	4,067 Juta Ton CO2eq	1.080.500.000	4,044 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000	Dinas Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30 kelompok 1.425.580/Ha	7.995.000.000	30 kelompok 1.462.645 Ha	6.722.948.500	30 Kelompok 1.500.674 Ha	7.222.948.500	Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15 Ton	6.005.000.000	18.126.490,20 Ton	6.465.557.600	18.313.874,25 Ton	6.965.557.600	Dinas Perkebunan
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	3.850.000.000	1 lembaga	3.734.806.900	1 lembaga	4.234.806.900	Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	784.000.000	35 Perusahaan	750.000.000	35 Perusahaan	750.000.000	Dinas Perkebunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	289.048 Ha	3.629.995.000	297.805,90 Ha	4.036.245.818	297.805,90 Ha	4.057.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938 ton	21.616.945.000	162593 ton	72.422.675.000	166170 ton	19.425.875.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161216 ton	5.280.000.000	164441 ton	5.394.447.000	167730 ton	5.306.947.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	2 Jenis	1.198.000.000	3 Jenis	1.481.250.000	4 Jenis	1.463.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>									
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	20.264.352.500	32000 Ha	25.158.200.136	32000 Ha	25.209.625.775	Dinas Kehutanan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu	4950000 M3 670 ton	262.140.098.102	5000000 M3 700 ton	181.688.359.057	5050000 M3 730 ton	189.508.477.419	Dinas Kehutanan
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	12 Hari	1.760.000.000	11 Hari	3.651.330.000	10 Hari	3.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100%	2.030.000.000	100%	1.500.000.000	100%	2.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.17.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	500.000.000	1%	271.143.400	1%	1.008.402.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	-	-	10%	576.519.240	10%	1.625.103.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	500.000.000	3%	701.986.600	3%	541.701.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2 Destinasi	4.674.685.000	3 Destinasi	7.602.445.000	3 Destinasi	6.310.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	-	-	23,53%	2.794.999.500	23,53%	2.000.000.000	Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN									
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar									
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85%	12.124.942.825	87%	5.005.777.515	88%	5.988.493.918	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	512 kasus	17.307.675.541	427 kasus	18.601.404.483	342 kasus	29.422.023.979	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75,02%	765.958.058.272	76,15%	728.072.635.446	78,27%	838.395.197.395	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64%	44.981.874.700	66,64%	150.384.487.100	68,64%	200.207.378.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73,69%	107.790.286.992	76,00%	103.392.334.896	78,91%	165.779.820.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71781 unit	42.628.242.045	70781 unit	43.686.076.280	69681 unit	63.122.084.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	2785 meter	24.276.456.494	3020 meter	18.611.113.120	3455 meter	34.020.180.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,87	7.492.280.000	0,91	8.000.000.000	1	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08%	2.219.129.000	7,34%	2.920.731.000	8,40%	3.160.127.332	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1135000 KK	46.921.080.638	1165000 KK	54.200.364.300	1200000 KK	54.220.087.800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN									
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56 Indeks/Indeks	4.840.000.000	53,80/89,16/79,86/83,61 Indeks/Indeks	6.807.500.000	53,85/89,21/79,91/83,66 Indeks/Indeks	4.625.485.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67%	3.013.732.010	82,67%	3.156.119.870	100%	3.364.509.632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK									
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik									
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	70%	5.035.579.830	80%	8.637.367.937	85%	3.952.701.863	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien									
SEKRETARIAT DAERAH									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71%	1.400.000.000	79%	1.093.608.537	89%	1.493.206.000	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77%	1.947.315.881	79%	1.855.181.293	81%	2.533.052.500	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	92%	946.684.167	95%	1.845.868.227	97%	2.520.336.500	Sekretariat Daerah
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel									
INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85%	10.104.090.400	90%	13.084.203.070	95%	10.324.325.294	Inspektorat

BAB VII  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang aspek pendanaan dan program perangkat daerah guna mendukung tercapainya kinerja pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan daerah pada bab ini lebih menekankan pada dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan RPJMD memisahkan penyajian APBD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dialokasikan dalam bentuk pagu program perangkat daerah dengan nomenklatur berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun (2019-2023) Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada Bab III dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan dialokasikan dengan struktur APBD, sebagai berikut (Tabel VII-1 dan Tabel VII-2).

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2	BELANJA		
2.01	Belanja Tidak Langsung	7.918.967.62	6.171.964.627
2.01	Belanja Pegawai	1.959.480.65	1.922.832.701
2.01	Belanja Bunga	-	
2.01	Belanja Subsidi	-	
2.01	Belanja Hibah	815.124.182.	223.050.003.0
2.01	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.00	16.070.550.00
2.01	Belanja Bagi Hasil	3.087.791.77	1.911.308.336

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2.01	Belanja Bantuan Keuangan &	2.021.796.46	1.598.703.036
2.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.0	500.000.000.0
2.02	Belanja Langsung		4.511.956.372
2.02	Belanja Pegawai		
2.02	Belanja Barang dan Jasa		
2.02	Belanja Modal		

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, struktur belanja dipisahkan antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam yang antara lain diakibatkan oleh atau dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Penurunan realisasi belanja tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sebesar 17,18 persen. Perimbangan antara kedua kelompok belanja masih lebih tinggi belanja tidak langsung dibanding yang langsung di kedua tahun tersebut.

Adapun untuk tahun proyeksi tahun 2021 sd 2023 (akhir periode RPJMD), kelompok belanjanya terjadi perubahan rincian belanja sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2021. Proyeksi kerangka pendanaan dalam dua tahun sisa periode RPJMD dan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel VII-2 sebagai berikut.

Tabel VII-2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021-2023

Kode Rek	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
5	BELANJA	11.616.186.000.000	10.806.996.675.345	11.886.763.209.156
5.01	BELANJA OPERASI	5.435.615.961.300	5.455.989.649.862	5.179.359.797.259
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353	2.819.754.544.723	2.540.827.464.009
5.01.05	Belanja Hibah	274.429.463.838	288.150.937.030	296.795.465.141
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000	16.121.850.000	9.774.550.000
5.02	BELANJA MODAL	1.984.395.175.358	1.720.052.686.483	2.399.903.411.897
5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999	33.766.647.534	47.112.913.028
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492	426.692.779.400	595.343.075.920
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019	590.905.137.277	24.460.358.803

Kode Rek	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
5.02.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	757.752.039.798	656.811.429.461	916.416.109.184
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050	11.876.692.811	16.570.954.962
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	3.944.241.500.000	3.407.751.500.000	4.107.500.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000	3.107.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	800.000.000.000	1.000.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Prov. KALTIM. 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel VII-2, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dipisahkan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sepanjang tahun 2021 sd 2023, belanja daerah bersifat fluktuatif dimana proyeksinya disesuaikan dengan penerimaan daerah tahun berkenaan. Penurunan belanja pada tahun 2022 antara lain diakibatkan oleh berkurangnya belanja modal dan belanja transfer.

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5 (lima) tahun periode RPJMD dimana dalam perubahan dokumen ini dipisahkan antara program perangkat daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019 dan 2020), sedang dilaksanakan (tahun 2021) dan akan dilaksanakan (tahun 2022 dan 2023). Program perangkat daerah dipisahkan pula menjadi 2 (dua) bagian yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pertimbangan yang demikian dikarenakan urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan kepentingan untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
  
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
  
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;

- d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
    - a. Kesekretariatan Daerah; dan
    - b. Sekretariat DPRD.
  5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
    - a. Perencanaan;
    - b. Keuangan;
    - c. Kepegawaian;
    - d. Pendidikan dan Pelatihan;
    - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
    - f. Pengelolaan Penghubung.
  6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
    - a. Inspektorat Daerah.
  7. Unsur Pemerintahan Umum
    - a. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab VII ini berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dengan besaran pendanaan secara ringkas sebagaimana dijabarkan pada Tabel VII-3, sedangkan rincian program pembangunan pada masing-masing bidang urusan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel VII-3 Kerangka Pendanaan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.573,00	2.518,52	4.997,31	4.765,48	5.306,58
1.01	Pendidikan	547,48	654,44	2.108,59	2.038,90	2.382,52
1.02	Kesehatan	1.007,50	942,69	1.246,13	1.214,24	1.220,91
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	942,99	839,30	1.494,40	1.352,80	1.530,64

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43,05	48,31	46,48	53,00	68,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17,32	15,61	38,46	37,27	38,50
1.06	Sosial	14,72	18,18	63,25	69,25	66,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	203,20	157,13	538,85	526,16	481,70
2.07	Tenaga Kerja	21,03	12,78	54,86	53,17	48,31
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,08	4,69	17,25	28,34	17,22
2.09	Pangan	22,97	20,29	65,29	74,54	72,73
2.11	Lingkungan Hidup	15,92	11,24	32,28	38,71	33,00
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3,49	5,33	2,27	5,32
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9,02	8,16	19,90	23,30	21,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,40	0,30	0,50	1,00	0,4
2.15	Perhubungan	23,71	21,86	62,69	56,70	75,00
2.16	Komunikasi dan Informatika	14,84	14,10	28,50	57,33	22,37
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20,73	17,40	42,53	40,24	34,98
2.18	Penanaman Modal	9,98	11,21	24,49	29,42	34,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	39,73	23,84	142,41	70,67	71,50
2.20	Statistik	-	0,19	0,95	1,30	0,75
2.21	Persandian	-	-	0,31	0,77	0,25
2.22	Kebudayaan	11,77	3,12	14,37	14,87	16,24
2.23	Perpustakaan	5,55	4,37	26,30	27,21	27,62
2.24	Kearsipan	0,46	0,12	0,90	1,35	0,94
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	329,61	216,84	822,95	837,38	799,99
3.25	Kelautan dan Perikanan	41,38	23,72	80,93	134,33	82,00
3.26	Pariwisata	12,24	11,33	29,58	34,50	31,00
3.27	Pertanian	81,93	66,72	159,14	143,54	142,27
3.28	Kehutanan	171,28	106,42	463,95	426,97	444,50
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	11,34	4,12	75,48	84,67	84,67
3.30	Perdagangan	7,18	1,83	7,66	8,32	9,01
3.31	Perindustrian	3,01	2,21	5,60	4,50	6,00
3.32	Transmigrasi	1,23	0,41	0,61	0,54	0,54
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	315,52	236,15	539,02	447,83	436,00
4.01	Kesekretariatan Daerah	193,03	137,67	285,38	277,03	273,00

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
4.02	Sekretariat DPRD	122,48	98,48	253,63	170,80	163,00
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	203,56	162,30	4.659,21	4.166,31	4.801,49
5.01	Perencanaan	49,92	29,21	47,79	47,65	45,00
5.02	Keuangan	90,96	83,95	4.486,47	3.999,83	4.647,26
5.03	Kepegawaian	18,50	21,95	46,57	48,96	36,73
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	23,58	13,72	44,36	34,57	35,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan	4,37	4,99	19,88	20,28	21,50
5.07	Pengelolaan Penghubung	16,22	8,49	14,14	15,00	16,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12,64	5,94	39,15	39,00	40,00
6.01	Inspektorat Daerah	12,64	5,94	39,15	39,00	40,00
8	Unsur Pemerintahan Umum	7,17	6,12	19,69	24,83	21,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7,17	6,12	19,69	24,83	21,00
	JUMLAH	4.661,75	4.556,92	11.616,19	10.807,00	11.886,76

BAB VII  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang aspek pendanaan dan program perangkat daerah guna mendukung tercapainya kinerja pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan daerah pada bab ini lebih menekankan pada dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan RPJMD memisahkan penyajian APBD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dialokasikan dalam bentuk pagu program perangkat daerah dengan nomenklatur berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun (2019-2023) Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada Bab III dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan dialokasikan dengan struktur APBD, sebagai berikut (Tabel VII-1 dan Tabel VII-2).

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2	BELANJA		
2.01	Belanja Tidak Langsung	7.918.967.62	6.171.964.627
2.01	Belanja Pegawai	1.959.480.65	1.922.832.701
2.01	Belanja Bunga	-	
2.01	Belanja Subsidi	-	
2.01	Belanja Hibah	815.124.182.	223.050.003.0
2.01	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.00	16.070.550.00
2.01	Belanja Bagi Hasil	3.087.791.77	1.911.308.336

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2.01	Belanja Bantuan Keuangan &	2.021.796.46	1.598.703.036
2.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.0	500.000.000.0
2.02	Belanja Langsung		4.511.956.372
2.02	Belanja Pegawai		
2.02	Belanja Barang dan Jasa		
2.02	Belanja Modal		

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, struktur belanja dipisahkan antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam yang antara lain diakibatkan oleh atau dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Penurunan realisasi belanja tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sebesar 17,18 persen. Perimbangan antara kedua kelompok belanja masih lebih tinggi belanja tidak langsung dibanding yang langsung di kedua tahun tersebut.

Adapun untuk tahun proyeksi tahun 2021 sd 2023 (akhir periode RPJMD), kelompok belanjanya terjadi perubahan rincian belanja sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2021. Proyeksi kerangka pendanaan dalam dua tahun sisa periode RPJMD dan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel VII-2 sebagai berikut.

Tabel VII-2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021-2023

Kode Rek	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
5	BELANJA	11.616.186.000.000	10.806.996.675.345	11.886.763.209.156
5.01	BELANJA OPERASI	5.435.615.961.300	5.455.989.649.862	5.179.359.797.259
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109	2.331.962.318.109
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353	2.819.754.544.723	2.540.827.464.009
5.01.05	Belanja Hibah	274.429.463.838	288.150.937.030	296.795.465.141
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000	16.121.850.000	9.774.550.000
5.02	BELANJA MODAL	1.984.395.175.358	1.720.052.686.483	2.399.903.411.897
5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999	33.766.647.534	47.112.913.028
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492	426.692.779.400	595.343.075.920
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019	590.905.137.277	24.460.358.803

Kode Rek	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
5.02.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	757.752.039.798	656.811.429.461	916.416.109.184
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050	11.876.692.811	16.570.954.962
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	223.202.839.000	200.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	3.944.241.500.000	3.407.751.500.000	4.107.500.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000	3.107.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	800.000.000.000	1.000.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Prov. KALTIM. 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel VII-2, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dipisahkan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sepanjang tahun 2021 sd 2023, belanja daerah bersifat fluktuatif dimana proyeksinya disesuaikan dengan penerimaan daerah tahun berkenaan. Penurunan belanja pada tahun 2022 antara lain diakibatkan oleh berkurangnya belanja modal dan belanja transfer.

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5 (lima) tahun periode RPJMD dimana dalam perubahan dokumen ini dipisahkan antara program perangkat daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019 dan 2020), sedang dilaksanakan (tahun 2021) dan akan dilaksanakan (tahun 2022 dan 2023). Program perangkat daerah dipisahkan pula menjadi 2 (dua) bagian yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pertimbangan yang demikian dikarenakan urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan kepentingan untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
  
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
  
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;

- d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
    - a. Kesekretariatan Daerah; dan
    - b. Sekretariat DPRD.
  5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
    - a. Perencanaan;
    - b. Keuangan;
    - c. Kepegawaian;
    - d. Pendidikan dan Pelatihan;
    - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
    - f. Pengelolaan Penghubung.
  6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
    - a. Inspektorat Daerah.
  7. Unsur Pemerintahan Umum
    - a. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab VII ini berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dengan besaran pendanaan secara ringkas sebagaimana dijabarkan pada Tabel VII-3, sedangkan rincian program pembangunan pada masing-masing bidang urusan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel VII-3 Kerangka Pendanaan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.573,00	2.518,52	4.997,31	4.765,48	5.306,58
1.01	Pendidikan	547,48	654,44	2.108,59	2.038,90	2.382,52
1.02	Kesehatan	1.007,50	942,69	1.246,13	1.214,24	1.220,91
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	942,99	839,30	1.494,40	1.352,80	1.530,64

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43,05	48,31	46,48	53,00	68,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17,32	15,61	38,46	37,27	38,50
1.06	Sosial	14,72	18,18	63,25	69,25	66,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	203,20	157,13	538,85	526,16	481,70
2.07	Tenaga Kerja	21,03	12,78	54,86	53,17	48,31
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,08	4,69	17,25	28,34	17,22
2.09	Pangan	22,97	20,29	65,29	74,54	72,73
2.11	Lingkungan Hidup	15,92	11,24	32,28	38,71	33,00
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3,49	5,33	2,27	5,32
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9,02	8,16	19,90	23,30	21,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,40	0,30	0,50	1,00	0,4
2.15	Perhubungan	23,71	21,86	62,69	56,70	75,00
2.16	Komunikasi dan Informatika	14,84	14,10	28,50	57,33	22,37
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20,73	17,40	42,53	40,24	34,98
2.18	Penanaman Modal	9,98	11,21	24,49	29,42	34,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	39,73	23,84	142,41	70,67	71,50
2.20	Statistik	-	0,19	0,95	1,30	0,75
2.21	Persandian	-	-	0,31	0,77	0,25
2.22	Kebudayaan	11,77	3,12	14,37	14,87	16,24
2.23	Perpustakaan	5,55	4,37	26,30	27,21	27,62
2.24	Kearsipan	0,46	0,12	0,90	1,35	0,94
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	329,61	216,84	822,95	837,38	799,99
3.25	Kelautan dan Perikanan	41,38	23,72	80,93	134,33	82,00
3.26	Pariwisata	12,24	11,33	29,58	34,50	31,00
3.27	Pertanian	81,93	66,72	159,14	143,54	142,27
3.28	Kehutanan	171,28	106,42	463,95	426,97	444,50
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	11,34	4,12	75,48	84,67	84,67
3.30	Perdagangan	7,18	1,83	7,66	8,32	9,01
3.31	Perindustrian	3,01	2,21	5,60	4,50	6,00
3.32	Transmigrasi	1,23	0,41	0,61	0,54	0,54
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	315,52	236,15	539,02	447,83	436,00
4.01	Kesekretariatan Daerah	193,03	137,67	285,38	277,03	273,00

Kode	Bidang Urusan	Realisasi (Milyar Rp)		Pagu (Milyar Rp)		
		2019	2020	2021	2022	2023
4.02	Sekretariat DPRD	122,48	98,48	253,63	170,80	163,00
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	203,56	162,30	4.659,21	4.166,31	4.801,49
5.01	Perencanaan	49,92	29,21	47,79	47,65	45,00
5.02	Keuangan	90,96	83,95	4.486,47	3.999,83	4.647,26
5.03	Kepegawaian	18,50	21,95	46,57	48,96	36,73
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	23,58	13,72	44,36	34,57	35,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan	4,37	4,99	19,88	20,28	21,50
5.07	Pengelolaan Penghubung	16,22	8,49	14,14	15,00	16,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12,64	5,94	39,15	39,00	40,00
6.01	Inspektorat Daerah	12,64	5,94	39,15	39,00	40,00
8	Unsur Pemerintahan Umum	7,17	6,12	19,69	24,83	21,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7,17	6,12	19,69	24,83	21,00
	JUMLAH	4.661,75	4.556,92	11.616,19	10.807,00	11.886,76

Tabel VII-4 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.590.051.891.684		3.772.434.934.357		4.997.312.465.314		4.765.478.225.688		5.306.578.272.342	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				547.480.549.961		654.440.619.901		2.108.590.683.603		2.038.902.153.265		2.382.518.305.464	
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	83 %	139.662.139.846	95,63 %	178.420.671.443							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	17.567.702.380	96,87 unit	12.934.233.349							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	87,5 %	6.074.629.482	90,93 %	3.668.316.923							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	77,5 %	2.526.084.297	85,45 %	1.838.014.380							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	60%	66,26 %	9.447.386.483	65 %	7.120.163.223							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	95%	94,1 %	10.538.050.901	98,71 %	5.125.563.951							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan	75%	86,43 %	6.712.284.057	84,34 %	7.529.788.151							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		menengah dan khusus													
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi	791 Orang	9125 Orang	141.168.265.841	28235 Orang	161.416.709.554								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	635 Siswa	4207 Siswa	11.556.406.000	2196 Siswa	4.732.133.400								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68.23%	39,44 %	94.007.336.467	45 %	97.442.871.093								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK	68.23%	41,1 %	71.363.511.465	45 %	123.560.246.550								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulum Berbasis Agama	72 Sekolah	0 Sekolah	-	100 Sekolah	122.714.000								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	30 SMK	0 SMK	-	10 SMK	23.426.575								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	0 persen	0 persen	-	42,08 persen	31.621.292.496								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80 %	1.055.895.363	91,73 %	1.479.603.547								UPTD Taman Budaya
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	630.134.458	6 unit	854.820.650								UPTD Taman Budaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	90 %	147.983.035	90 %	94.465.420								UPTD Taman Budaya
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80 %	807.180.429	98,5 %	881.134.815								UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	25.976.565.130	6 unit	15.012.029.733								UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	0 %	-	90 %	562.420.649								UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	90%	90 %	8.238.994.327	90 %	-								UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan						100 %	1.175.903.478.952	100 %	1.135.403.881.928	100 %	1.324.165.437.938		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK						77 %	927.170.386.251	82 %	894.742.153.237	85 %	1.047.619.357.662		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						70 %	5.516.818.400	86 %	5.256.118.100	90 %	6.233.509.864		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana						0 %	0	97 %	3.500.000.000	100 %	4.500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				1.007.497.053.226		942.682.917.823		1.246.126.184.844		1.214.242.728.268		1.220.914.606.774	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	84,25 %	2.582.899.900	86,71 %	2.845.186.098							Dinas Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2.353.499.609	5 unit	1.329.030.030							Dinas Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	30 %	1.131.774.773	40 %	626.346.992							Dinas Kesehatan
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	67,92 %	972.105.710	70,03 %	364.177.850							Dinas Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	98%	95 %	2.765.224.803	96,9 %	761.203.170							Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	10%	30 %	5.862.383.136	30 %	3.134.395.194							Dinas Kesehatan
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	87.50%	100 %	6.823.493.973	83,89 %	33.096.521.658							Dinas Kesehatan
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	50%	100 %	1.331.193.814	100 %	436.161.746							Dinas Kesehatan
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5 Kab/Kota	1 Kab/Kota	724.629.518	1 Kab/Kota	9.069.283.260							Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	6%	23,5 %	2.102.086.948	23,5 %	1.105.333.088								Dinas Kesehatan
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	92 Fasyankes	834.871.680	100 Fasyankes	9.747.329.673								Dinas Kesehatan
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	5 Kab/Kota	2 Kab/Kota	361.944.737	2 Kab/Kota	391.934.201								Dinas Kesehatan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100%	100 %	4.663.672.100	100 %	9.097.738.487								UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	59 %	1.289.684.303	57 %	1.535.623.323								UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1.611.615.427	3 unit	1.387.326.635								UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100 %	-	100 %	-								UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	%	13 %	4.945.673.670	0 %	-								UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	50 Fasyankes	813.467.000	60 Fasyankes	262.510.000								UPTD Balai Latihan Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70 %	1.839.284.488	76,7 %	2.210.737.843								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1.425.091.012	3 unit	1.355.344.810								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	65 %	390.914.075	70 %	249.255.773								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	0 %	-	0 %	-								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	5554 SPM	70 SPM	2.509.347.264	80 SPM	839.408.792								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	0%	0 %	-	0 %	-								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0%	0 %	-	0 %	-								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	60 %	834.871.667	65 %	1.179.532.657								UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1.231.991.766	3 unit	5.685.575.600								UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	60 %	317.863.660	65 %	14.654.000								UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	80 %	-	85 %	-								UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	0%	73,65 %	299.059.425	0 %	-								UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	74%	100 %	2.703.239.117	83 %	3.397.237.754								UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	69 %	3.662.785.812	91,2 %	4.290.767.815								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	70,58 unit	996.967.458	3 unit	2.270.151.583								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%	67,02 %	1.166.662.397	88,33 %	722.185.410								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	80%	0,27 %	12.750.000	82,11 %	667.740.396								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	0 %	-	59,35 %	617.935.575								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%	0 %	-	59,35 %	617.935.575								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	1%	34,16 %	8.540.000	83,83 %	51.215.800								Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78%	80 %	677.468.550	98 %	82.227.140								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%	71 %	35.147.000	100 %	242.721.887								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	7%	6 %	14.977.639.531	83 %	5.496.335.906								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	75%	64 %	21.835.153.513	60 %	9.687.509.697								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	75%	60 %	959.343.105	89 %	6.023.577.930								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	70%	0 %	-	68 %	145.297.476								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	75%	0 %	-	64 %	-								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	76%	78 %	-	90 %	-								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.105	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3.1	3,2	-	61	-								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.106	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	80%	100 %	-	87 %	-								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.107	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	65%	80 %	-	97 %	-								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A	100%	102 %	547.703.818.133	1026,37 %	459.422.960.134								RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78.42%	78,6 %	-	79 %	472.200.000								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	80 unit	-	85 unit	1.062.014.000								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100 %	-	100 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%	72 %	48.489.000	72,5 %	192.770.358								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%	100 %	-	100 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	78%	80 %	38.309.274.005	83 %	77.433.651.436								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%	91 %	-	92 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan	0%	0 %	-	40 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	78.42%	78,6 %	-	79 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau	80 Sertifikat	80 Sertifikat	-	85 Sertifikat	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	76%	80 %	-	85 %	-								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	0 Instalasi / unit	18 Instalasi / unit	284.523.131.525	18 Instalasi / unit	254.216.656.340								RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70 Nilai	84,93 Nilai	-	86,49 Nilai	-								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	6 unit	-	6 unit	-								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	75 %	-	100 %	-								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	63,77 %	-	75,27 %	-								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Penyelenggaraan Pemerintahan														
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	65%	67,89 %	972.252.933	87,07 %	37.625.000								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	40%	60 %	366.922.805	99,8 %	30.000.000								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	65%	95,3 %	15.925.138.274	70,69 %	6.837.462.578								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS Yang Berfungsi dengan Baik	90%	90 %	86.573.200	99,88 %	462.987.686								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	58%	69,44 %	-	77,78 %	347.830.000								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	200000000 Rupiah	1241452149 Rupiah	-	4349578014 Rupiah	23.981.400								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	83%	0 %	-	100 %	188.246.000								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	76%	0 %	-	94,11 %	-								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	0%	%	22.507.112.409	95 %	20.917.082.066								Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan						80 %	80.874.943.770	82 %	89.240.781.000	85 %	89.189.882.176	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)						85,67 %	56.836.024.844	86 %	60.384.916.679	86,25 %	59.892.955.689	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)						100 %	630.295.464.950	100 %	559.694.516.083	100 %	581.325.490.596	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)						79 %	326.876.647.000	80 %	347.844.898.000	80 %	330.463.603.543	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)						80 %	17.510.851.650	80 %	23.311.118.117	80 %	16.150.369.140	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)						1 Sertifikat	37.500.000.000	1 Sertifikat	22.385.344.743	1 Sertifikat	37.911.503.457	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota						100 %	89.592.878.967	100 %	88.073.706.300	100 %	86.786.133.281	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)						90 %	480.690.000	91 %	18.416.876.046	92 %	506.543.956	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)						85 %	3.000.000	86 %	27.439.610	86,5 %	3.161.355	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya						20 %	0	30 %	2.665.519.040	40 %	12.017.995.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan						30 %	3.448.642.993	40 %	500.000.000	50 %	3.803.205.886	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)						85 %	673.634.400	85 %	1.011.002.800	85 %	621.297.264	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial						90 %	243.291.270	92 %	181.686.500	94 %	268.304.603	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS						3 Kab/Kota	1.790.115.000	3 Kab/Kota	504.923.350	3 Kab/Kota	1.974.160.828	Dinas Kesehatan
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>1.908.528.575.844</b>		<b>2.039.594.950.231</b>		<b>1.494.398.282.962</b>		<b>1.352.806.169.250</b>		<b>1.530.645.360.103</b>	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85 %	11.923.397.888	86 %	14.907.004.190							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit	7 unit	4.985.333.802	7 unit	9.039.489.761								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	50 %	1.625.574.755	60 %	1.613.961.640								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%	75 %	806.995.030	79 %	420.702.051								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan provinsi	52.85%	61,45 %	412.831.639.257	69,77 %	280.814.038.814								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	7922 L/detik	7922 L/detik	140.591.772.456	7922 L/detik	83.009.884.974								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	60.23%	68,46 %	203.554.488.949	73,03 %	266.845.708.139								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	20456 Orang	26309 Orang	3.180.923.691	30979 Orang	2.667.597.716								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	63.19%	64,87 %	5.564.232.903	75,34 %	5.084.754.765								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85 %	1.028.997.270	86 %	2.467.873.339								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	6.223.444.575	3 unit	2.155.692.603								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55 %	807.909.044	60 %	562.353.805								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	52%	52 %	53.042.344.725	58 %	51.749.903.976								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85 %	955.239.959	86 %	3.227.330.279								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	5.388.216.100	3 unit	5.894.447.073								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55 %	847.710.403	60 %	416.997.209								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	52%	52 %	54.830.290.039	58 %	57.750.257.711								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85 %	1.377.835.983	86 %	3.162.615.371								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1.156.425.221	3 unit	1.590.313.418								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55 %	834.482.777	60 %	639.891.229								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	52%	52 %	31.381.176.800	58 %	45.283.913.000								UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum						89,00 %	111.108.427.632	90,00 %	132.395.288.814	90,00 %	119.250.162.708		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA						73.69 %	107.790.286.992	76.00 %	103.392.334.896	78.91 %	165.779.820.000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan						64,64 %	44.981.874.700	66,64 %	150.384.487.100	68,64 %	200.207.378.600		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Capaian akses penanganan sampah domestik						68,38 %	100.000.000	69,74 %	1.100.000.000	71,37 %	1.100.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PERSAMPAHAN REGIONAL													
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian akses limbah domestik layak						82,26 %	1.141.298.300	84,53 %	400.000.000	87,27 %	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik						2785 meter	24.276.456.494	3020 meter	18.611.113.120	3455 meter	34.020.180.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan infrastruktur permukiman						100	134.706.700	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata						78,82 %	265.173.550.780	94,12 %	185.598.498.662	100 %	149.784.701.400	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata						87,18 %	160.906.177.092	97,44 %	18.851.811.212	100 %	7.107.920.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi						75,02 %	765.958.058.272	76,15 %	728.072.635.446	78,27 %	838.395.197.395	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat						35989 orang	5.335.166.000	41029 orang	6.000.000.000	46159 orang	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang						0.87 Indeks	7.492.280.000	0.91 Indeks	8.000.000.000	1 Indeks	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Perumahan Rakyat
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				94.506.432.033		101.925.867.049		46.484.912.000		53.000.000.000		68.000.000.000	
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	51722 unit	73481 unit	43.046.082.033	72881 unit	48.306.411.418							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyelenggaraan SPM Perumahan						3,33 %	654.666.945	3,33 %	977.660.000	3,33 %	201.820.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni						71781 unit	42.628.242.045	70781 unit	43.686.076.280	69681 unit	63.122.084.600	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman						3,09 %	3.202.003.010	3,18 %	8.336.263.720	3,29 %	4.676.095.400	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				17.320.042.792		15.609.714.284		38.458.820.000		37.273.593.000		38.500.000.001	
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	10 %	3.687.840.657	12 %	4.739.702.377							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	61 unit	2.724.079.877	16 unit	695.508.992							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	406 %	1.571.791.502	65 %	444.677.765							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	19 %	107.197.200	27 %	142.223.100							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	36 %	1.225.463.096	37 %	339.056.200							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertiban Masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli	0%	133 %	1.525.931.481	133 %	497.488.269							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.64	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	persen	28 persen	1.295.092.296	18 persen	247.962.800							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	%	35 %	1.012.114.787	35 %	433.437.687							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	1.732.216.393	85 %	2.265.461.030							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja	4 Unit	4 Unit	240.535.600	4 Unit	1.468.255.750							Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pelayanan Tepat Waktu													
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	%	644.246.195	%	182.772.243								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 Nilai	62,53 Nilai	459.784.000	60,01 Nilai	238.635.535								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	75 Persen	460.823.261	80 Persen	3.480.598.030								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	12 Desa / Kelurahan	0 Desa / Kelurahan	329.044.200	1 Desa / Kelurahan	283.023.838								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Persen	20 Persen	303.882.247	Persen	150.910.668								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana						95 %	12.661.749.990	95 %	13.673.298.130	98 %	14.135.490.368		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana						66,67 %	3.013.732.010	82,67 %	3.156.119.870	100 %	3.364.509.632		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP						95 %	15.739.078.907	95 %	18.833.214.000	98 %	14.507.121.698		Satuan Polisi Pamong Praja





Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	0 unit	1 unit	162.095.360	2 unit	130.969.800							Dinas Sosial
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100 %	795.368.385	100 %	1.007.127.715							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	85 unit	381.859.957	50 unit	604.833.024							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100 %	-	100 %	-							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	2.166.724.528	1 Panti	3.497.503.285							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100 %	738.634.501	100 %	969.284.377							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	unit	65 unit	727.818.347	60 unit	1.095.890.966							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100 %	-	100 %	-							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1.210.853.207	1 Panti	1.627.761.648							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100 %	760.013.026	100 %	983.498.758								UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	55 unit	705.844.468	55 unit	684.913.128								UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100 %	-	100 %	-								UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1.476.678.461	1 Panti	1.569.311.373								UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100 %	707.447.491	100 %	1.088.160.227								UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	50 unit	337.562.498	35 unit	811.564.300								UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100 %	-	100 %	-								UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	0%	55 %	803.956.700	95 %	1.008.058.000								UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial						90 %	48.786.377.621	90 %	53.173.245.081	90 %	50.904.641.698		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang diberdayakan						4 Lembaga	254.290.100	4 Lembaga	254.290.100	4 Lembaga	265.331.165		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina dilayani dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial						1169 Orang	11.713.350.584	1169 Orang	13.326.483.124	1169 Orang	12.221.934.557	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Keluarga Miskin Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar						440 Orang	1.172.304.800	440 Orang	1.172.304.800	440 Orang	1.223.205.303	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial						1518 Orang	781.548.800	1518 Orang	781.548.800	1518 Orang	815.483.001	Dinas Sosial
1.06.08	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TMP yang dikelola						1 Lokasi	545.710.000	1 Lokasi	545.710.000	1 Lokasi	569.404.276	Dinas Sosial
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				203.203.452.139	157.135.721.851			538.846.109.287		526.159.935.460		481.700.576.424	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				21.028.435.412	12.779.499.027			54.856.970.232		53.168.761.072		48.310.148.744	
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	93 %	3.444.939.784	91 %	3.471.656.519							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1.775.508.636	100 unit	1.337.252.115							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	78 %	1.562.849.729	98 %	1.127.254.928							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	50.28%	100 %	712.270.538	75 %	814.193.590							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Penyelenggaraan Pemerintahan														
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	80%	76 %	6.619.526.900	75 %	2.508.912.452								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	27 %	2.366.996.250	25 %	1.088.666.779								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	100 %	2.118.122.885	100 %	1.102.602.000								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	0 %	-	0 %	-								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi	120 Perusahaan	169 Perusahaan	2.428.220.690	250 Perusahaan	1.328.960.644								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%	0 %	-	100 %	-								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	70%	0 %	-	95 %	-								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						76 %	43.742.697.913	81 %	43.534.249.740	83 %	38.522.292.312		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja						70 %	0	70 %	96.485.000	70 %	450.000.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)						85 %	3.436.148.964	85 %	2.208.677.700	85 %	2.323.984.402		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)						85 %	2.136.148.964	85 %	1.616.511.368	85 %	2.558.934.193	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja						70 %	204.132.915	70 %	1.191.517.040	70 %	204.132.915	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja						31 %	2.378.629.500	31 %	1.967.167.260	31 %	2.094.755.588	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						20 %	1.375.437.984	20 %	1.203.525.364	20 %	761.288.435	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi						150 Perusahaan	1.083.792.000	250 Perusahaan	1.202.727.600	300 Perusahaan	1.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan)						20 Perusahaan	499.981.992	20 Perusahaan	147.900.000	20 Perusahaan	394.760.899	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>7.085.647.423</b>		<b>4.689.471.031</b>		<b>17.247.264.000</b>		<b>28.345.678.574</b>		<b>17.220.596.783</b>	
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100 %	1.588.854.297	100 %	1.825.409.181							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	100%	100 %	1.806.544.210	100 %	988.306.632							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%	98 %	533.256.370	100 %	325.868.410							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%	98 %	533.256.370	100 %	325.868.410							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100 %	382.461.410	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	94,49 %	70.901.969	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	%	100 %	163.953.000	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	%	100 %	722.367.387	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)	34%	35,4 %	140.202.200	50 %	50.505.015							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	70%	0,07 %	430.226.796	82 %	58.775.148							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	%	100 %	46.678.000	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	kebijakan	1 kebijakan	288.920.500	kebijakan	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	%	25 %	307.122.945	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	0%	94,49 %	70.901.969	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,07%	%	-	0 %	96.272.355							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	%	-	100 %	485.705.409							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan	50%	kebijakan	-	0 kebijakan	386.547.079								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	50%	%	-	61,11 %	146.213.392								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						90 %	14.496.914.174	95 %	16.495.678.574	100 %	14.474.499.468	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG						1 Kebijakan	999.325.201	1 Kebijakan	1.200.000.000	1 Kebijakan	946.947.708	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan						4 Kebijakan	551.024.625	4 Kebijakan	3.451.825.000	4 Kebijakan	700.231.926	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah						65 %	500.000.000	70 %	1.000.000.000	75 %	400.000.000	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak						3 Kebijakan	225.000.000	3 Kebijakan	3.348.175.000	3 Kebijakan	224.652.112	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.08.08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak						88 %	475.000.000	90 %	2.850.000.000	90 %	474.265.569	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>22.972.293.245</b>		<b>20.293.767.620</b>		<b>65.289.228.854</b>		<b>74.544.278.906</b>		<b>72.731.338.906</b>	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	1.901.657.967	85 %	2.369.799.708							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1.777.138.081	5 unit	1.236.430.368							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80 %	1.854.912.754	80 %	798.768.243							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai AKIP	0 %	1.097.605.226	63,49 %	919.033.050							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	420 Desa	418 Desa	4.077.204.701	257 Desa	1.562.534.007							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,6 Skor	84,7 Skor	1.247.431.612	87,3 Skor	1.198.710.127							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	583.723.149	80 %	915.948.029							UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	2.460.176.371	3 unit	277.898.475								UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80 %	73.685.535	80 %	247.304.539								UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	917.946.349	85 %	1.310.102.216								UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	133.506.100	3 unit	509.965.550								UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80 %	105.250.000	85 %	71.048.750								UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	1.230.642.287	85 %	1.530.185.241								UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	287.065.800	3 unit	562.520.500								UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80 %	-	80 %	175.531.500								UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	986.287.072	85 %	1.254.819.117							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	182.901.242	3 unit	244.671.800							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80 %	-	85 %	265.282.600							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	693 Desa	696 Desa	4.055.158.999	711 Desa	4.843.213.800							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian						80 Skor	59.412.392.959	81 Skor	67.544.278.906	82 Skor	65.731.338.906	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; 2. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi						94/89 Skor/Skor	3.664.254.906	96.2/90 Skor/Skor	4.457.703.644	97.5/91 Skor/Skor	4.294.007.626	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan						39 Desa	1.389.094.624	45 Desa	1.226.296.356	50 Desa	1.389.992.374	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di kalimantan timur						90 %	823.486.365	91 %	1.316.000.000	92 %	1.316.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				15.918.699.296		11.244.410.404		32.285.035.000		38.714.900.000		33.000.000.000	
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	3.336.017.490	85,25 %	4.441.721.683							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1.130.362.240	5 unit	688.656.230							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	77,86 %	880.642.978	98 %	601.078.640							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai AKIP	59 Nilai AKIP	1.290.903.398	62 Nilai AKIP	558.781.820							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	Persentase	64,81 Persentase	1.144.782.890	0 Persentase	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,81 Indeks	1.816.964.887	0 Indeks	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	Dokumen	7 Dokumen	1.309.689.930	0 Dokumen	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	Persentase	99,99 Persentase	679.039.876	0 Persentase	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225	225 225	1.042.699.220	0 225	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan	Indeks Pencemaran	0 Indeks (Tercemar Sedang)	0 Indeks (Tercemar Sedang)	-	2,128 Indeks	1.607.041.600							Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	kerusakan lingkungan hidup					(Tercemar Sedang)								
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	%	100 %	429.719.400	0 %	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	0 Perusahaan	50 Perusahaan	404.270.100	0 Perusahaan	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	Penghargaan	3 Penghargaan	973.569.076	0 Penghargaan	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	10 Juta Ton CO2eq	996.060.532	0 Juta Ton CO2eq	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	Ribu Hektare	200 Ribu Hektare	483.977.279	0 Ribu Hektare	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0 %	-	100 %	1.095.101.532							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	417 Kegiatan	0 Kegiatan	-	634 Kegiatan	1.479.788.159							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	10%	0 %	-	12,21 %	772.240.740							Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup						85,30 Indeks	20.304.935.000	83 Indeks	21.482.165.000	84 Indeks	21.199.515.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah						100 %	1.370.100.000	100 %	1.321.900.000	100 %	1.095.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)						53,75/89,11/79,81/83,56 Indeks/Indeks	4.840.000.000	53,80/89,16/79,86/83,61 Indeks/Indeks	6.807.500.000	53,85/89,21/79,91/83,66 Indeks/Indeks	4.625.485.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keaneekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci RPJMD dan RPJPD						100 %	500.000.000	100 %	899.588.540	100 %	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya); 2. Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)						0/40 %/%	1.400.000.000	4/45 %/%	529.500.000	8/50 %/%	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi						100 %	710.000.000	100 %	1.115.000.000	100 %	1.030.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH						50 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan bimbingan teknis pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup						52 %	850.000.000	52 %	850.000.000	52 %	850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan						66,66 %	200.000.000	83,81 %	1.000.000.000	84,42 %	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan						100 %	730.000.000	100 %	954.225.000	100 %	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada						74 %	1.280.000.000	73 %	3.655.021.460	72 %	1.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-				3.489.050.175			5.328.353.000		2.226.175.000		5.320.114.456	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.08.24	Program Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	50%	%	-	98 %	3.489.050.175							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk						6 Kebijakan	4.680.000.000	6 Kebijakan	400.000.000	6 Kebijakan	4.672.763.920	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil						6 Kebijakan	170.000.000	6 Kebijakan	250.000.000	6 Kebijakan	169.737.151	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan						5 Kebijakan	478.353.000	5 Kebijakan	1.576.175.000	5 Kebijakan	477.613.385	Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				<b>9.024.888.126</b>		<b>8.159.052.557</b>		<b>19.898.636.000</b>		<b>23.300.000.000</b>		<b>21.000.000.000</b>	
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70 %	1.796.312.621	70 %	2.269.732.102							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	614.033.843	5 unit	669.909.955							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	30 %	1.332.948.502	30 %	935.826.061							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	66 %	209.091.289	67 %	215.087.543							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan Desa	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	456.201.035	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	546.234.016							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif	320 Bumdes	15 Bumdes	202.558.900	360 Bumdes	326.356.700							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%	80 %	78.870.700	80 %	79.959.000							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	310.824.346	1 Dokumen	270.803.875							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	0 Unit	18 Unit	342.995.690	18 Unit	154.721.500							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	0 PKK	150 PKK	1.693.472.347	165 PKK	942.497.800							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	310.824.346	1 Dokumen	270.803.875							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa	15 Desa	1.130.920.843	363 Desa	1.016.068.943							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa	15 Desa	545.833.664	329 Desa	287.071.187							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	0 Desa	0 Desa	-	40 Desa	173.980.000							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa						100 %	14.496.914.174	100 %	16.187.988.237	100 %	14.474.499.468	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa						7 Kab	83.700.000	7 Kab	85.168.000	7 Kab	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang						30 Desa	598.906.326	30 Desa	1.281.412.513	30 Desa	1.445.188.037	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)						30 Desa	1.699.649.500	35 Desa	2.698.564.625	45 Desa	1.793.722.922	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK MHA KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan						30 Desa	3.019.466.000	30 Desa	3.046.866.625	30 Desa	3.186.589.573	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			396.934.030	267.385.157	460.000.000	1.000.000.000	459.288.761						
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	%	100 %	313.071.430	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	%	100 %	-	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	orang	100 orang	83.862.600	orang	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50%	%	-	70 %	267.385.157							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk						1 Kebijakan	150.000.000	1 Kebijakan	500.000.000	1 Kebijakan	149.768.074	Dinas Kependudukan PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						33 %	150.000.000	40 %	300.000.000	50 %	149.768.074	Dinas Kependudukan PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1 Kebijakan	160.000.000	1 Kebijakan	200.000.000	1 Kebijakan	159.752.613	Dinas Kependudukan PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>23.707.137.724</b>		<b>21.859.800.204</b>		<b>62.692.443.000</b>		<b>56.700.000.000</b>		<b>75.000.000.000</b>	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100 %	2.739.363.967	100 %	6.006.416.282							Dinas Perhubungan
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	2.317.632.154	4 unit	2.583.262.500							Dinas Perhubungan
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	20 %	3.497.222.813	30 %	1.835.361.366							Dinas Perhubungan
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%	72,32 %	705.082.650	70,2 %	1.390.503.686							Dinas Perhubungan
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854 Kasus	570 Kasus	4.624.644.961	448 Kasus	5.958.194.000							Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit%	83 Unit%	2.498.922.280	83 Unit%	617.900.036							Dinas Perhubungan
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	0 Simpul	1 Simpul	4.829.829.048	1 Simpul	1.228.638.629							Dinas Perhubungan
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100 %	937.108.401	100 %	1.323.324.305							UPTD Terminal
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	405.759.350	3 unit	732.216.800							UPTD Terminal
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55 %	134.853.600	55 %	94.175.000							UPTD Terminal
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	500000 Penumpang	515880 Penumpang	1.016.718.500	254928 Penumpang	89.807.600							UPTD Terminal
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan						100 %	32.760.772.334	100 %	32.092.818.002	100 %	38.393.165.667	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas						512 kasus	17.307.675.541	427 kasus	18.601.404.483	342 kasus	29.422.023.979	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP						85 %	12.124.942.825	87 %	5.005.777.515	88 %	5.988.493.918	Dinas Perhubungan
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian						20 %	499.052.300	50 %	1.000.000.000	80 %	1.196.316.436	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				14.841.459.594		14.098.652.350			28.500.052.792		57.329.058.401		22.371.249.305	
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70 %	3.812.495.575	75 %	4.032.709.913								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	1.565.883.791	3 unit	2.246.934.018								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75 %	1.865.087.616	80 %	799.169.183								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	75 %	128.735.400	77 %	106.042.500								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0 Persen	25 Persen	360.756.862	30 Persen	29.857.660								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	0 Lembaga	2 Lembaga	2.214.801.885	2 Lembaga	1.120.619.040								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	80 %	472.173.696	80 %	1.104.271.150								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	0 Persen	80 Persen	471.129.577	80 Persen	236.581.550								Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,6 Indeks	2.269.823.341	2,6 Indeks	2.202.349.552								Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	0 Persen	70 Persen	1.472.457.435	75 Persen	2.220.117.784							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	208.114.416	100 Persen	-							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo						100 %	16.518.650.562	100 %	39.141.690.464	100 %	12.966.391.768	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik						75 %	6.945.822.400	77 %	9.550.000.000	80 %	5.452.155.674	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi						70 %	5.035.579.830	80 %	8.637.367.937	85 %	3.952.701.863	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				20.732.307.998		17.396.444.882		42.534.778.108		40.238.655.408		34.984.816.409	
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86 %	2.996.178.554	86 %	4.024.922.212							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3.468.364.140	5 unit	2.391.972.222								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50 %	1.561.081.214	50 %	1.207.951.430								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72,01 Nilai AKIP	74,79 Nilai AKIP	933.379.830	74,79 Nilai AKIP	894.498.198								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	183 UKM	1.121.651.700	UKM	-								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	0 Wirausaha Baru	105 Wirausaha Baru	515.599.076	Wirausaha Baru	-								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	0 Koperasi	31 Koperasi	4.326.123.237	Koperasi	-								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	183 UKM	1.121.651.700	UKM	-								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Jumlah koperasi berkualitas	0 Koperasi	Koperasi	-	4 Koperasi	3.592.606.555							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86 %	1.090.481.850	86 %	1.280.582.172							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	357.177.400	3 unit	575.007.419							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40 %	307.320.460	45 %	305.815.628							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86 %	1.112.899.569	86 %	1.343.326.400							UPTD Pelatihan Koperasi
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	547.365.638	3 unit	777.555.019							UPTD Pelatihan Koperasi
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40 %	379.938.300	45 %	303.641.397							UPTD Pelatihan Koperasi
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang	300 Orang	893.095.330	240 Orang	698.566.230							UPTD Pelatihan Koperasi
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM						88 %	36.734.778.108	89 %	34.046.326.916	90 %	29.083.324.909	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat						0 %	0	10 %	576.519.240	10 %	1.625.103.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an						50 Koperasi	500.000.000	50 Koperasi	234.348.760	0 Koperasi	0	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih ; Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)						300 ; 600 Koperasi dan UKM	1.000.000.000	300 ; 520 Koperasi dan UKM	3.688.920.492	300 ; 520 Koperasi dan UKM	1.642.883.500	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas						10 Koperasi	3.300.000.000	10 Koperasi	719.410.000	10 Koperasi	1.083.402.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas						1 %	500.000.000	1 %	271.143.400	1 %	1.008.402.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital						3 %	500.000.000	3 %	701.986.600	3 %	541.701.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.981.761.467		11.209.779.936		24.493.197.000		29.417.141.000		34.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	87,91 %	2.798.980.062	86,7 %	3.580.927.986							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	6 unit	1.658.060.052	6 unit	1.564.741.900							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	97,4 %	3.548.226.478	84,1 %	3.011.591.750							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	31,06 Nilai AKIP	42,68 Nilai AKIP	272.615.000	50,8 Nilai AKIP	202.022.500							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	Hari	-	12 Hari	-							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0 perusahaan industri baru	36 perusahaan industri baru	478.219.000	7 perusahaan industri baru	288.939.000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	531.570.000	2 Kebijakan	1.449.615.000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	%	75,38 %	95.597.500	86,7 %	399.780.000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU	0 MoU	598.493.375	0 MoU	712.161.800							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal						85 %	17.093.182.850	85 %	19.132.226.000	86 %	20.750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal						4 Dokumen	1.690.013.950	2 Dokumen	1.880.000.000	2 Dokumen	3.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi						9 Laporan	1.360.000.000	10 Laporan	2.607.820.000	11 Laporan	3.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan						12 Hari	1.760.000.000	11 Hari	3.651.330.000	10 Hari	3.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM						100 %	2.030.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	2.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan						4 Kegiatan	560.000.200	5 Kegiatan	645.765.000	5 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>39.727.101.531</b>		<b>23.845.880.970</b>		<b>142.415.899.232</b>		<b>75.668.413.765</b>		<b>71.500.000.000</b>	
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80,35 %	3.870.519.011	80,26 %	3.982.333.061							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1.554.390.360	5 unit	3.089.040.712							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	92 %	2.984.910.791	91 %	1.122.318.001							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58.38%	58,4 %	492.275.566	5 %	208.207.402							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda	Persen	0,03 Persen	1.173.641.583	0,16 Persen	925.884.362							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda Kader Kepanduan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan Hukum	0%	0,06 %	1.880.148.250	0,1 %	1.700.390.690							Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	0%	14,15 %	10.739.731.189	14,94 %	599.667.112								Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Pelaku Olahraga Prestasi	0%	10 %	3.683.607.290	14,44 %	1.856.519.226								Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha	0,03 Persen	0,09 Persen	-	0,15 Persen	333.215.723								Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM)	76.80%	80,26 %	8.918.726.054	89,55 %	7.738.498.740								UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	1.651.165.337	1 Unit	1.590.432.549								UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya	0 Event	25 Event	2.777.986.100	0 Event	699.373.392								UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga						100 %	33.935.869.232	100 %	41.048.413.765	100 %	17.037.526.450		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan						0,80 %	2.296.260.000	1 %	8.420.000.000	1,20 %	1.152.838.910		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						66,60 %	104.683.770.000	70 %	26.000.000.000	80 %	52.556.558.610		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						6,15 %	1.500.000.000	7 %	200.000.000	8 %	753.076.030		Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				-	193.618.500		953.673.080		1.300.000.000		748.590.130		
2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan	0 Buku	0 Buku	-	1 Buku	193.618.500							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi Sosial Sumber daya Alam dan Infrastruktur						50 %	953.673.080	60 %	1.300.000.000	70 %	748.590.130	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				-	-		316.849.592		770.941.599		248.712.564		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan informasi						10 indeks	316.849.592	10 indeks	770.941.599	10 indeks	248.712.564	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				11.766.774.113	3.116.197.957		14.372.156.397		14.869.458.735		16.239.247.366		
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya loka	17 Sekolah	60 Sekolah	9.999.465.104	150 Sekolah	2.364.912.417							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	100 Orang	100 Orang	1.767.309.009	130 Orang	751.285.540							UPTD Taman Budaya
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan						80 %	3.908.407.170	85 %	4.813.771.755	88 %	4.416.149.469	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan						60 %	2.554.803.200	65 %	3.926.917.990	70 %	2.886.698.418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina						70 %	1.188.704.200	75 %	1.129.268.990	80 %	1.343.129.104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan						45 %	3.841.375.000	55 %	3.649.306.000	65 %	4.340.409.131	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman						27 %	2.878.866.827	45 %	1.350.194.000	65 %	3.252.861.244	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>5.554.798.939</b>		<b>4.368.919.960</b>		<b>26.301.573.000</b>		<b>27.214.473.000</b>		<b>27.621.313.479</b>	
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	83 %	1.912.103.706	91 %	2.168.858.617							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	555.555.983	6 unit	904.682.932							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	90 %	974.976.229	100 %	682.728.607							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	94%	95 %	85.643.293	100 %	38.325.300							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan	0 Pemustaka	145731 Pemustaka	1.681.852.140	205700 Pemustaka	438.330.840							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	0 Judul	1623 Judul	344.667.588	3550 Judul	135.993.664							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan	25 Perpustakaan	-	20 Perpustakaan	-							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip						100 %	24.047.773.000	100 %	24.889.473.000	100 %	25.254.424.004	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi						6,89 %	2.253.800.000	9,19 %	2.325.000.000	11,49 %	2.366.889.475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>465.213.242</b>		<b>123.791.121</b>		<b>900.000.000</b>		<b>1.352.000.000</b>		<b>945.159.521</b>	
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	.Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik	1100 berkas	14616 berkas	127.997.504	1100 berkas	95.969.121							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	.Jumlah lembaga instansi yang dibina	50 Lembaga/ntansi	16 Lembaga/ntansi	337.215.738	50 Lembaga/ntansi	27.822.000							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip						100 %	859.891.300	100 %	1.252.000.000	100 %	903.038.277	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Penyelamatan Pengolahan Perlindungan serta Pelestarian Arsip						100 %	40.108.700	100 %	100.000.000	100 %	42.121.244	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>				<b>329.608.188.887</b>		<b>216.840.863.516</b>		<b>822.955.224.476</b>		<b>837.379.130.686</b>		<b>799.990.495.835</b>	
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>41.377.739.560</b>		<b>23.725.369.773</b>		<b>80.927.997.000</b>		<b>134.332.356.000</b>		<b>82.000.000.000</b>	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	4.461.018.527	81 %	7.420.628.623							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	8 unit	3.084.727.034	8 unit	2.022.538.805							Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	2.223.352.745	20 %	1.152.969.725								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	60 Nilai	-	63 Nilai	-								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149039 Ton	152233 Ton	15.416.842.418	158709 Ton	2.926.020.901								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	151918 Ton	143508 Ton	4.053.198.037	155000 Ton	1.876.455.707								Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Angka Konsumsi Ikan	48 Kg/Kapita	52,28 Kg/Kapita	-	53,18 Kg/Kapita	-								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan yang di restorasi	1 Kawasan yang di restorasi	2.965.431.511	1 Kawasan yang di restorasi	1.236.487.890								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	33,6 Persen	36,87 Persen	1.942.425.300	37,07 Persen	1.083.730.757								Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80 %	455.339.336	79,18 %	530.271.290								UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	114.071.861	3 Unit	102.515.632								UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	137.721.850	20 %	175.509.520								UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	253 Sampel	200 Sampel	304.710.500	240 Sampel	133.693.800								UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80 %	588.929.795	81 %	699.844.359								UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	275.973.663	3 Unit	232.856.066								UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	167.005.000	20 %	410.897.920								UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Windu/Ikan Air Laut	25000000 00 Ekor	26000000 00 Ekor	3.442.205.426	2600000000 Ekor	1.997.972.000								UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80 %	571.835.067	81 %	797.638.603								UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	138.090.850	3 Unit	366.318.775								UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	196.710.000	20 %	211.978.400								UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Tawar	60000 Ekor	53208 Ekor	838.150.640	Ekor	-								UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah /Ikan Air Laut	0 Ekor	0 Ekor	-	32000 Ekor	347.041.000								UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan						82 %	40.216.697.000	83 %	42.433.062.502	84 %	43.201.106.320	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif						289.048 Ha	3.629.995.000	297.805,90 Ha	4.036.245.818	297.805,90 Ha	4.057.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap						158938 ton	21.616.945.000	162593 ton	72.422.675.000	166170 ton	19.425.875.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut						1.232.000 Ekor	838.360.000	2.264.000 Ekor	752.046.680	3.797.000 Ekor	752.046.680	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut						2,8 Milyar Ekor	4.637.000.000	2,9 Milyar Ekor	3.510.425.000	3 Milyar Ekor	3.510.425.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya						161216 ton	5.280.000.000	164441 ton	5.394.447.000	167730 ton	5.306.947.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan						40,74 %	3.300.000.000	44,82 %	3.945.204.000	47,06 %	3.925.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan						2 Jenis	1.198.000.000	3 Jenis	1.481.250.000	4 Jenis	1.463.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan						220 Sampel	211.000.000	230 Sampel	357.000.000	240 Sampel	357.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>12.244.880.442</b>		<b>11.334.675.668</b>		<b>29.576.256.000</b>		<b>34.500.000.000</b>		<b>31.000.000.000</b>	
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90 %	2.177.088.457	90 %	2.579.968.383							Dinas Pariwisata
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.615.836.600	5 unit	799.943.760							Dinas Pariwisata
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	41,07 %	1.531.025.563	16 %	552.384.509							Dinas Pariwisata
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65,18 nilai AKIP	63,78 nilai AKIP	896.583.300	65,71 nilai AKIP	567.866.100							Dinas Pariwisata
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	2 Destinasi	0 Destinasi	953.880.700	Destinasi	-							Dinas Pariwisata
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	3 Kawasan	1.859.353.523	3 Kawasan	1.464.059.810							Dinas Pariwisata
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	0 Destinasi	10 Destinasi	-	Destinasi	-							Dinas Pariwisata
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	0 Orang	-	616 Orang	1.196.995.453							Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	0 orang	-	320 orang	1.488.231.100								Dinas Pariwisata
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya	0 Orang	0 Jenis Usaha	939.253.999	Jenis Usaha	-								Dinas Pariwisata
		Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan		0 Orang	-	616 Orang	1.196.995.453								
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah Jenis Pelaku Ekraf yang difasilitasi dan ditingkatkan SDM nya	2 Jenis	5 Jenis	1.271.858.300	Jenis	-								Dinas Pariwisata
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	0 orang	-	320 orang	1.488.231.100								Dinas Pariwisata
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata						95 %	16.845.063.400	95 %	16.822.555.500	95 %	16.590.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan						2 Destinasi	4.674.685.000	3 Destinasi	7.602.445.000	3 Destinasi	6.310.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)						2.015.000 Orang	3.509.422.600	2.005.000 Orang	3.260.000.000	2.310.000 Orang	2.700.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan						0 %	0	23,53 %	2.794.999.500	23,53 %	2.000.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi						90 %	4.547.085.000	95 %	4.020.000.000	97 %	3.400.000.000	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				81.933.002.081		66.772.335.433			159.138.634.146		143.549.310.094		142.268.661.094	
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226017 Ton	248325 Ton	3.018.999.250	225716 Ton	2.103.265.300								Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	383958 Ton	253818 Ton	10.744.508.230	253818 Ton	9.320.835.041								Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	150 Ha	150 Ha	613.326.511	277,6 Ha	376.316.830								UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT	6192 Ha	6165 Ha	2.789.351.098	6139 Ha	517.647.180								UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	75%	81 %	4.551.792.010	50 %	1.485.274.000								UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	89,71 %	2.518.335.693	88,45 %	2.863.542.336								Dinas Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.077.538.499	5 unit	1.879.619.679								Dinas Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	2.160.545.920	20 %	1.369.690.146								Dinas Perkebunan
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai	68 Nilai	761.064.974	69,93 Nilai	1.066.364.262								Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Penyelenggaraan Pemerintahan														
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	0 Ton	52817 Ton	13.586.851.900	55690 Ton	8.602.374.400								Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	0 ton	18343852 ton	-	17723864 ton	-								Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	0 ton	2513 ton	-	2538 ton	-								Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	0 ton	6484 ton	-	3448 ton	-								Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	0 Ton	11013 Ton	-	7662 Ton	-								Dinas Perkebunan
		Produksi komoditas perkebunan	Ton	18416679 Ton	-	17793202 Ton	-								Dinas Perkebunan
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	%	20 %	138.693.780	%	-								Dinas Perkebunan
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	%	30 %	1.023.424.269	%	-								Dinas Perkebunan
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi	5 Komoditi	198.103.550	Komoditi	-								Dinas Perkebunan
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi	5 Komoditi	385.982.223	Komoditi	-								Dinas Perkebunan
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	221.709.300	Kelompok Tani	-								Dinas Perkebunan
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	1.87 Juta ton CO2eq	4,08 Juta ton CO2eq	263.047.000	2,916 Juta ton CO2eq	464.349.800								Dinas Perkebunan
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	%	50 %	241.406.900	%	-								Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan	Orang	25 Orang	308.165.900	Orang	-								Dinas Perkebunan
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	Gapoktan	5 Gapoktan	311.943.300	Gapoktan	-								Dinas Perkebunan
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	98 Perusahaan	30 Perusahaan	526.185.650	18 Perusahaan	472.311.200								Dinas Perkebunan
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	Kelompok	20 Kelompok	294.194.700	Kelompok	-								Dinas Perkebunan
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	Komoditi	5 Komoditi	343.599.806	Komoditi	-								Dinas Perkebunan
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	%	80 %	259.085.330	%	-								Dinas Perkebunan
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	0%	99,8 %	1.334.604.850	%	-								Dinas Perkebunan
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	0 Produk	0 Produk	-	2 Produk	830.746.200								Dinas Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	311.831.432	83 %	369.307.046								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	454.744.226	3 unit	1.091.329.500								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	366.844.850	20 %	165.071.900								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	0 Kasus	2 Kasus	607.515.100	Kasus	-								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih	2486546 Benih	398.387.750	Benih	-								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2825176 Benih	0 Benih	-	6749812 Benih	339.673.600								UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	415.664.606	83 %	528.809.522								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	387.271.865	3 unit	350.438.092								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20 %	264.099.519	20 %	185.513.320								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	25 Kelompok	25 Kelompok	441.927.196	Kelompok	-								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	2500 KG	5000 KG	419.858.951	KG	-								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter	0 Liter	-	Liter	-								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	2085338000 Rupiah	0 Rupiah	-	996352513 Rupiah	668.396.892								UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	0 %	-	83 %	411.179.839								UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	0 unit	-	3 unit	395.996.552								UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	0 %	-	20 %	141.023.650								UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	0 %	-	85 %	1.388.963.500								UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	2.564.713.665	81 %	3.078.610.001								Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1.385.403.826	5 unit	3.225.418.132								Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	20,88 %	1.462.453.079	12 %	1.298.458.212								Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.86 Nilai	79,45 Nilai	1.217.341.393	75,34 Nilai	1.363.823.590							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.23	Program Hillirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%	44,44 %	1.229.001.900	11 %	1.412.743.894							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	123.1 Konstanta	123,57 Konstanta	5.032.573.987	102,98 Konstanta	4.181.130.744							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Miniranch yang terregister	Unit	4 Unit	-	12 Unit	-							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	0 Unit	5 Unit	1.300.256.451	35 Unit	2.299.196.554							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	19%	17,49 %	6.459.693.075	20,1 %	6.069.277.363							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Calving Interval	19 Bulan	19 Bulan	-	18,18 Bulan	-							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	994.735.640	80,6 %	1.482.963.285							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	941.177.521	3 unit	503.369.048							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11 %	277.312.498	11 %	335.899.736							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak	10%	9,8 %	4.188.962.404	10 %	1.397.178.357								UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
		Persentase produksi bibit ternak berkualitas	10%	9,8 %	-	10 %	-								UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80 %	778.696.517	81 %	975.320.072								UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	252.269.945	3 unit	419.881.528								UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11 %	215.052.811	12 %	315.469.655								UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan	11%	11 %	892.751.232	12 %	1.025.555.475								UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanganan OPT DPI						15000 Ha	848.540.921	20000 Ha	1.200.000.000	30000 Ha	1.200.000.000		Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura						271356/273070 Ton/Ton	24.520.588.200	279681/283592 Ton/Ton	25.533.110.000	289846/292383 Ton/Ton	14.715.122.948		Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi						193 Jumlah	1.370.000.000	219 Jumlah	1.283.114.948	249 Jumlah	1.500.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk						30 Kali	224.178.500	40 Kali	275.000.000	50 Kali	275.000.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat						82 %	1.647.020.300	82 %	1.654.550.000	82 %	1.654.550.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura						7100/6 Ha/Unit	6.189.757.500	8000/7 Ha/Unit	4.716.890.000	8500/7 Ha/Unit	4.716.890.000	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara						1 Unit	80.203.000	1 Unit	513.766.446	1 Unit	513.766.446	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya						1	4.100.000.000	0	0	0	0	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina						85/4 Orang/Lembaga	6.149.929.725	330/4 Orang/Lembaga	3.693.331.700	441/4 Orang/Lembaga	3.693.331.700	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan						80 %	32.696.365.000	81 %	33.078.362.782	82 %	38.900.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi						20.5 %	11.316.262.500	21 %	7.243.486.018	22 %	10.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister						24 Unit	9.385.337.500	49 Unit	10.023.538.200	30 Unit	5.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)						12 %	2.052.730.000	13 %	1.135.460.000	14 %	1.800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular						50 %	1.642.950.000	60 %	1.820.000.000	70 %	3.050.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha						25 %	475.300.000	50 %	714.500.000	75 %	1.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak						43 %	1.915.000.000	44 %	664.200.000	45 %	1.400.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan						86 %	26.546.275.000	89 %	27.558.847.892	92 %	27.999.745.892	Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan						17.136.84915 Ton	6.005.000.000	18.126.49020 Ton	6.465.557.600	18.313.87425 Ton	6.965.557.600	Dinas Perkebunan



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50%	87 %	2.781.619.305	95 %	3.197.056.497							Dinas Kehutanan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2.343.805.727	5 unit	2.066.527.016							Dinas Kehutanan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	90 %	2.630.303.410	71 %	1.837.238.731							Dinas Kehutanan
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70,73 Nilai AKIP	72,86 Nilai AKIP	1.810.176.725	70,58 Nilai AKIP	809.226.300							Dinas Kehutanan
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167 Milyar Rupiah	184,097324153 Milyar Rupiah	3.169.596.740	124,4730828 Milyar Rupiah	1.772.539.118							Dinas Kehutanan
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13,98%	24,08 %	1.034.914.742	22,76 %	551.795.300							Dinas Kehutanan
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	2%	0,16 %	604.448.224	0,097 %	187.789.150							Dinas Kehutanan
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118000 Ha	43537 Ha	2.169.467.475	39857 Ha	600.958.183							Dinas Kehutanan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1.593.713.617	7 Unit Usaha	1.717.980.307							Dinas Kehutanan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	22 Jumlah Usulan	1.245.626.251	20 Jumlah Usulan	2.830.215.561							Dinas Kehutanan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%	0,13 %	9.870.934.375	0,02 %	1.598.363.096							Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9 kasus Tindak Pidana	80 kasus Tindak Pidana	1.444.892.620	14 kasus Tindak Pidana	1.543.829.500								Dinas Kehutanan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	66301 Hektar	4.455.703.465	400 Hektar	8.099.286.970								Dinas Kehutanan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4 SK/Sertifikat	8 SK/Sertifikat	1.026.420.562	33 SK/Sertifikat	-								Dinas Kehutanan
		Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	-	60000 Bibit	-								
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	0%	0 %	-	58,6 %	573.310.038								Dinas Kehutanan
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0 Ha	0 Ha	-	0 Ha	-								Dinas Kehutanan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	87 %	733.840.748	85 %	936.330.554								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	704.357.518	3 Unit	419.612.039								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80 %	209.969.560	85 %	9.412.500								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	4 Unit Usaha	247.863.763	4 Unit Usaha	209.875.621								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1.192.793.745	0 Jumlah Usulan	-								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0,25 %	9.638.357.929	0 %	-								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	1.318.134.280	2 kasus Tindak Pidana	1.521.398.632								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	86 Hektar	91.422.651	86 Hektar	5.109.645.705								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	970.000	0 Bibit	-								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	0 Hektar	150 Hektar	281.327.880	30 Hektar	50.993.238								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	87 %	577.653.532	85 %	924.598.957								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	532.585.732	3 Unit	1.251.450.095								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	90 %	222.817.487	85 %	278.772.852								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	192.988.614								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	4 Jumlah Usulan	660.241.122	4 Jumlah Usulan	856.832.685								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0 %	6.061.479.543	%	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	0 kasus Tindak Pidana	1.285.799.364	5 kasus Tindak Pidana	2.253.726.513								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	0 Hektar	68.108.550	160 Hektar	456.641.251								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	0 SK/Sertifikat	180.714.600	1 SK/Sertifikat	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Jumlah Bibit	0 Bibit	25000 Bibit	-	25000 Bibit	-								
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	722.500.603	8 Unit Usaha	977.873.558								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	993.472.883	85 %	1.389.827.642								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	669.433.430	7 Unit	525.214.298								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80 %	223.698.733	85 %	113.615.500								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	110.610.700	2 Unit Usaha	183.372.734								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	455.772.891	3 Jumlah Usulan	198.200.353								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	10 %	9.642.375.202	0,25 %	470.051.283								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	196.078.000	6 kasus Tindak Pidana	712.958.017								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 hektar	100 hektar	2.103.112.516	350 hektar	4.054.656.440								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pedegar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	0 SK/Sertifikat	-	SK/Sertifikat	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	-	10000 Bibit	-								
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	541.952.443	2 Unit Usaha	122.070.302								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	620.333.927	85 %	618.558.646								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	543.888.290	3 Unit	438.884.815								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	60 %	460.508.064	60 %	124.642.600								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	404.059.105	2 Unit Usaha	98.903.548								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	558.663.237	2 Jumlah Usulan	350.436.710								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0,12 %	8.670.994.167	0,25 %	632.173.400								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	741.780.850	0 kasus Tindak Pidana	1.000.345.715								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	1.578.340.372	100 Hektar	6.387.711.300								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	0 SK/Sertifikat	521.026.863	0 SK/Sertifikat	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Jumlah Bibit	0 Bibit	10000 Bibit	-	10000 Bibit	-								
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	428.562.100	2 Unit Usaha	44.898.000								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	650.549.465	85 %	960.021.845								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja	3 Unit	2 Unit	1.209.358.629	3 Unit	860.280.714								UPTD Kesatuan Pengelolaan



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	579.229.946	85 %	977.814.702								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	170.871.000	3 Unit	960.940.248								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80 %	448.758.110	85 %	142.464.000								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	0%	0 %	590.224.000	0 %	127.549.400								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	-	3 Unit Usaha	-								
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	0%	0 %	557.870.710	0 %	408.115.900								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	-	10 Jumlah Usulan	-								
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	0%	25 %	10.731.191.485	25 %	265.403.300								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	-	0.25%	-								
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	359.410.500	0 kasus Tindak Pidana	1.229.027.200								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	3.962.302.400	350 Hektar	3.701.456.100								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	82.107.900	0 Bibit	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan	0%	0,25 %	-	0 %	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	1.124.210.216	85 %	1.623.442.879								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	471.541.156	3 Unit	123.659.516								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80 %	221.644.952	85 %	107.654.800								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	804.877.900	1 Unit Usaha	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	625.912.200	5 Jumlah Usulan	2.230.198.900								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0,25 %	8.820.416.457	0,25 %	517.912.200								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	479.045.675	0 kasus Tindak Pidana	569.249.000								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	0 Hektar	17.604.400	240 Hektar	2.121.529.300								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	0 Bibit	27.056.600	100000 Bibit	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	464.161.229	0 Unit Usaha	53.704.200								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80 %	597.515.888	85 %	1.031.466.392								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	570.196.300	3 Unit	642.627.037								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80 %	454.403.900	85 %	225.482.100								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	255.410.609								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	466.163.854	2 Jumlah Usulan	462.888.767								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0,25 %	7.496.445.723	0,25 %	185.867.200								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	4 kasus Tindak Pidana	462.260.100	1 kasus Tindak Pidana	474.129.418								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	600 Hektar	10.701.366.188	600 Hektar	10.852.086.648								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	15600 Bibit	332.081.008	0 Bibit	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	517.177.125	2 Unit Usaha	143.144.700								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-								
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	97,59 %	699.578.829	96 %	1.775.596.388								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	723.174.300	3 Unit	1.170.310.253								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	90,13 %	552.887.457	85 %	590.944.701								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	286.547.214								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1.113.046.757	5 Jumlah Usulan	1.433.177.892								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%	3 %	6.502.022.715	0,25 %	-								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	4 kasus Tindak Pidana	1.359.706.176	10 kasus Tindak Pidana	3.578.719.654								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	40 Hektar	162.032.836	40 Hektar	578.450.570								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	9 Unit Usaha	597.046.000	9 Unit Usaha	641.397.600								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1,95%	-								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan						82 %	171.724.595.500	83 %	210.120.189.568	84 %	218.216.573.100		Dinas Kehutanan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu						4950000/670 M3/ton	262.140.098.102	5000000/700 M3/ton	181.688.359.057	5050000/730 M3/ton	189.508.477.419		Dinas Kehutanan
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan						<1,5 %	9.015.588.600	<1,25 %	8.241.274.639	<1 %	9.779.288.600		Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)						32000 Ha	20.264.352.500	32000 Ha	25.158.200.136	32000 Ha	25.209.625.775	Dinas Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat						8 %	810.000.000	13,98 %	1.765.896.600	13,98 %	1.784.275.000	Dinas Kehutanan
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>11.339.672.215</b>		<b>4.123.323.619</b>		<b>75.479.895.000</b>		<b>84.668.560.000</b>		<b>84.668.560.000</b>	
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	-	85 %	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	-	5 unit	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	%	-	85 %	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65,68 Nilai AKIP	68,35 Nilai AKIP	-	70,05 Nilai AKIP	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0,5 %	2.057.720.316	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	945607 KK	1011485 KK	1.655.386.437	1105227 KK	1.507.976.221							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	%	3 %	1.097.308.282	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	%	57,12 %	155.129.800	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	Perusahaan	82 Perusahaan	3.158.175.649	Perusahaan	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	%	95 %	1.158.231.415	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	%	-	67 %	876.205.829							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	Perusahaan	-	45 Perusahaan	1.739.141.569							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0,5 %	2.057.720.316	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						82 %	22.164.685.402	83 %	23.329.632.700	84 %	23.430.762.860	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan						33,00 %	1.949.999.960	33,64 %	1.713.862.000	38,38 %	2.443.862.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara						35 %	2.225.000.000	50 %	2.503.970.000	50 %	1.413.720.008	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT						6,08 %	2.219.129.000	7,34 %	2.920.731.000	8,40 %	3.160.127.332	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik						1135000 KK	46.921.080.638	1165000 KK	54.200.364.300	1200000 KK	54.220.087.800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>7.183.335.905</b>		<b>1.835.257.448</b>		<b>7.664.797.628</b>		<b>8.318.122.592</b>		<b>9.009.257.000</b>	
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%	30,4 %	1.855.363.111	30,4 %	950.864.500							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USdollar	1,559 milyar USdollar	710.218.000	milyar USdollar	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	bulan	4 bulan	920.099.800	bulan	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	3 Pelaku usaha/nilai transaksi	1.039.014.500	Pelaku usaha/nilai transaksi	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USdollar	1,559 milyar USdollar	710.218.000	milyar USdollar	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	0%	19 %	1.948.422.494	5 %	884.392.948							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksporir yang aktif menggunakan SKA						0 Eksporir	0	255 Eksporir	152.931.320	260 Eksporir	862.010.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)						0;0 Perusahaan; IKK	0	10; 57 Perusahaan; IKK	100.000.000	10; 60 Perusahaan; IKK	1.650.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapakting						80 %	1.000.000.000	80 %	1.046.107.320	80 %	1.315.400.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara						5 %	1.000.000.000	5 %	1.185.650.240	5 %	1.736.027.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi						15 %	2.750.000.000	15 %	2.832.000.000	15 %	1.650.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikat mutu barang						85 %	2.114.797.628	90 %	2.278.472.832	100 %	800.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.08	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran						5 Produk	800.000.000	5 Produk	722.960.880	5 Produk	995.820.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				3.013.925.417		2.215.092.165		5.600.000.000		4.495.810.000		6.005.926.591	
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	miliar rupiah	70,88 miliar rupiah	572.891.667	miliar rupiah	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	0,23%	0 %	2.441.033.750	-2,77 %	2.215.092.165							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri						2 Industri	2.000.000.000	2 Industri	3.022.500.000	2 Industri	2.984.344.373	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata						5 %	3.000.000.000	5 %	845.930.000	5 %	2.078.142.632	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya						10 Industri	600.000.000	10 Industri	627.380.000	10 Industri	943.439.586	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				1.231.433.380		413.977.686		613.010.000		541.052.000		539.851.256	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 Kimtrans	4 Kimtrans	1.231.433.380	4 Kimtrans	413.977.686							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN	Kawasan Transmigrasi						1 Kimtrans	263.010.000	1 Kimtrans	246.735.000	1 Kimtrans	231.621.472	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	100 %	1.663.000	100 %	4.000.000								Biro Hukum
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda)	0 perda	100 perda	1.016.392.926	100 perda	447.152.775								Biro Hukum
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub)	0 pergub	100 pergub	665.543.226	100 pergub	651.304.911								Biro Hukum
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%)	0%	100 %	285.314.084	100 %	308.195.416								Biro Hukum
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 peraturan	100 peraturan	1.832.316.701	100 peraturan	1.247.040.601								Biro Hukum
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	0%	%	1.647.430.744	100 %	1.204.503.793								Biro Hukum
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM	0%	100 %	523.968.957	100 %	388.793.400								Biro Hukum
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda)	0 perda	0 perda	-	0 perda	-								Biro Hukum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85 %	435.185.500	90 %	457.338.864								Biro Organisasi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	230.336.490	3 unit	207.709.900								Biro Organisasi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80 %	857.858.720	85 %	850.814.450								Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0%	0 %	847.923.559	61 %	520.865.100								Biro Organisasi
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%	0 %	119.603.800	100 %	146.772.300								Biro Organisasi
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	68.93 Skor	Skor	2.356.579.230	Skor	1.077.718.700								Biro Organisasi
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	71.05%	0 %	2.167.276.205	%	772.488.050								Biro Organisasi
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	0%	0 %	1.604.339.293	%	1.378.063.550								Biro Organisasi
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	52.63%	0 %	265.008.900	%	204.749.400								Biro Organisasi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75 %	1.137.716.750	75 %	894.723.420								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	222.064.000	unit	24.200.000								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50 %	866.435.471	%	527.904.274								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	73 %	2.346.000	73 %	3.370.000								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Penyelenggaraan Pemerintahan														
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan KDH Sesuai SOP	0%	100 %	621.173.520	100 %	351.117.100								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Tapal Batas Wilayah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	0%	80 %	1.381.133.204	100 %	506.732.773								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100 %	1.254.619.702	100 %	2.960.175.215								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	0%	100 %	1.120.675.150	100 %	1.493.544.434								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan	0%	100 %	681.263.017	100 %	585.566.456								Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Predikat LPPD "ST"	0%	50%	-	60%	-								
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70 %	602.330.225	75 %	735.951.818								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	408.979.232	2 unit	530.279.367								Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40 %	757.596.811	45 %	477.933.680								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70 %	13.356.700	73 %	13.744.650								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	0 Persen	80 Persen	2.077.134.583	85 Persen	1.013.042.303								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0 Persen	80 Persen	1.281.837.594	80 Persen	864.648.260								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0 Persen	80 Persen	1.030.245.150	80 Persen	672.749.300								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran	0%	100 %	2.722.402.370	100 %	2.485.768.300								Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75 %	463.039.500	80 %	606.689.499								Biro Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	203.243.870	2 unit	17.777.000								Biro Perekonomian
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50 %	865.216.376	55 %	390.549.219								Biro Perekonomian
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70 %	-	73 %	-								Biro Perekonomian
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	100 %	720.438.698	100 %	360.535.915								Biro Perekonomian
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	100 %	1.290.039.526	100 %	391.057.201								Biro Perekonomian
4.01.50	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang Ditindaklanjuti/Terlaksana	100 Persen	100 Persen	905.463.543	100 Persen	435.430.326								Biro Perekonomian
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100 %	1.141.664.482	85 %	1.323.338.175								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	846.585.898	2 unit	961.479.694								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75 %	1.109.716.926	80 %	347.054.750								Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70 %	499.898.932	73 %	6.093.400								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	2.061.783.196	100 Persen	1.127.982.315								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti	0%	70 %	1.641.374.446	75 %	1.463.241.185								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase rencana kerja anggaran sesuai ketentuan	0%	100 %	3.408.690.403	100 %	2.274.506.657								Biro Administrasi Pembangunan
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	88,29 %	398.798.000	96,42 %	459.415.610								Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	83.300.660	1 unit	20.000.000								Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	88,9 %	1.053.473.783	97,24 %	579.048.317								Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana	90%	87,49 %	835.074.754	97,33 %	630.477.149								Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	97,24 %	850.403.693	98,11 %	524.108.658								Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana	90%	87,35 %	876.218.662	98,12 %	618.341.786							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100 %	1.379.125.170	100 %	1.326.981.560							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit											Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%											Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%											Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.41	Program Kegiatan KORPRI	Prosentase Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya	5%	94 %	2.850.383.057	79 %	1.276.723.000							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim						83 %	16.208.164.396	84 %	10.747.466.970	85 %	16.245.166.230	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum						82 %	1.650.558.740	83 %	1.633.544.558	84 %	1.505.069.649	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi						82 %	2.228.311.681	83 %	2.205.341.944	84 %	4.651.580.147	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD						82 %	2.163.850.840	83 %	2.141.545.574	84 %	2.346.576.528	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat						82 %	2.448.438.837	83 %	2.423.200.000	84 %	2.403.392.301	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian						82 %	1.894.529.061	83 %	1.875.000.000	84 %	1.906.955.884	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan						82 %	3.544.400.748	83 %	3.507.864.588	84 %	2.722.197.247	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa						82 %	3.066.485.154	83 %	3.034.875.412	84 %	3.302.107.708	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum						82 %	182.885.205.323	83 %	181.000.000.000	84 %	171.628.865.521	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum						75 %	0	75 %	0	75 %	0	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)						71 %	1.400.000.000	79 %	1.093.608.537	89 %	1.493.206.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)						77 %	1.947.315.881	79 %	1.855.181.293	81 %	2.533.052.500	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)						92 %	946.684.167	95 %	1.845.868.227	97 %	2.520.336.500	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase pengendalian penerapan SPM						100 %	0	100 %	66.500.000	100 %	76.475.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah						85 %	3.332.405.550	87 %	2.929.955.176	90 %	2.191.155.975	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah						85 %	2.166.999.250	87 %	1.166.999.250	90 %	1.166.999.250	Sekretariat Daerah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti						85 %	42.801.621.900	87,5 %	43.062.650.000	90 %	40.741.067.412	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM						100 %	4.934.463.708	100 %	4.366.455.442	100 %	4.494.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian						90 %	3.607.047.706	95 %	2.625.000.000	100 %	2.900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)						3 Level	4.242.589.262	3 Level	5.049.000.000	PKP-PB Pro Aktif Level	4.255.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan						70 %	2.741.407.304	75 %	2.741.407.304	80 %	2.741.407.304	Sekretariat Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan						100 %	1.174.888.844	100 %	1.661.852.696	100 %	1.174.888.844	Sekretariat Daerah
<b>4.02</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				<b>122.485.226.139</b>	<b>98.482.478.101</b>			<b>253.631.948.000</b>		<b>170.801.405.000</b>		<b>163.000.000.000</b>	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75 %	13.801.711.657	76 %	24.884.443.389							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	31.629.938.252	1 unit	17.931.503.830							Sekretariat DPRD Provinsi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	70 %	20.192.706.711	72 %	7.204.677.023								Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70 %	1.867.991.844	72 %	1.756.804.054								Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	%	75 %	54.992.877.675	77 %	46.705.049.805								Sekretariat DPRD Provinsi
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD						80 %	169.890.765.450	80 %	124.723.094.578	81 %	109.182.597.014		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD						80 %	83.741.182.550	81 %	46.078.310.422	82 %	53.817.402.986		Sekretariat DPRD
<b>5</b>	<b>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>203.558.420.389</b>		<b>162.299.357.398</b>		<b>4.659.212.963.634</b>		<b>4.166.309.687.940</b>		<b>4.801.493.864.554</b>		
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>				<b>49.919.883.860</b>		<b>29.206.644.330</b>		<b>47.788.234.759</b>		<b>47.653.150.000</b>		<b>45.000.000.000</b>		
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.30%	100 %	7.485.646.066	86,89 %	6.144.064.878								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	1,42 unit	13.398.870.968	3 unit	6.262.069.858								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	13.80%	13,9 %	6.819.249.909	13,9 %	1.818.170.000								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	79,22 %	568.572.788	79,43 %	3.970.373.696								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53.23 Persen	66,11 Persen	3.595.317.603	77,69 Persen	1.414.150.567								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	45.68%	73,73 %	3.773.641.767	73,78 %	1.982.289.650								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38.6 Persen	66,6 Persen	2.849.758.416	88,56 Persen	2.083.944.240								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	45.2 Persen	50,96 Persen	3.316.078.717	79,49 Persen	2.215.592.087								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78.53%	89,74 %	8.112.747.625	85,13 %	2.261.831.875								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82.30%	0 %	-	0 %	-								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	80 %	-	81,48 %	1.054.157.480								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA						86 %	30.075.785.959	87 %	29.429.074.500	90 %	28.320.995.219	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan						75 %	10.427.448.800	78 %	9.956.300.000	80 %	9.819.052.710	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran						85 %	7.285.000.000	90 %	8.267.775.500	95 %	6.859.952.071	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>				<b>90.961.181.980</b>	<b>83.950.426.951</b>			<b>4.486.470.907.342</b>		<b>3.999.831.724.190</b>		<b>4.647.260.528.554</b>		
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	78 %	3.800.601.683	87 %	4.613.798.258							Badan Pendapatan Daerah	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3.440.259.524	5 unit	10.818.121.504							Badan Pendapatan Daerah	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	87 %	3.419.382.682	76 %	3.310.022.370							Badan Pendapatan Daerah	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65 nilai AKIP	68 nilai AKIP	741.752.147	68 nilai AKIP	574.881.300							Badan Pendapatan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	%	85 %	3.642.725.160	63 %	-								Badan Pendapatan Daerah
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	0%	82 %	4.580.898.573	91 %	3.469.254.107								Badan Pendapatan Daerah
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	0%	80 %	1.934.811.484	86 %	747.610.724								Badan Pendapatan Daerah
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	0 Dokumen	18 Dokumen	840.323.131	18 Dokumen	546.305.600								Badan Pendapatan Daerah
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	%	20531964 86598 %	-	135 %	-								Badan Pendapatan Daerah
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	0 Obyek	2 Obyek	-	2 Obyek	2.549.600.699								Badan Pendapatan Daerah
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	94 %	2.594.807.163	92 %	3.357.285.793								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1.110.345.142	3 unit	1.283.099.708								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	93 %	226.779.993	81 %	133.701.864								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	0%	96 %	421.935.866	97 %	246.397.658								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	91 %	2.459.431.055	93 %	3.013.438.062								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1.062.348.146	3 unit	896.514.562								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	89 %	279.287.240	78 %	143.168.500								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	0%	95 %	709.318.330	90 %	303.892.100								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	93 %	1.143.656.460	87 %	1.279.612.869								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1.268.258.260	3 unit	766.551.122								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	90 %	266.120.015	87 %	218.794.896								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	0%	93 %	610.581.260	83 %	223.031.088								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	94 %	1.563.817.947	93 %	1.612.481.327								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	207.816.824	3 unit	478.216.850								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	96 %	343.829.468	94 %	214.770.680								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	0%	100 %	430.874.969	99 %	142.266.700								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	92 %	2.251.677.723	88 %	2.462.223.331								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	722.620.121	3 unit	1.241.714.515								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	92 %	297.116.447	101 %	252.935.166								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	0%	92 %	547.266.324	86 %	141.751.900								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	96 %	991.005.482	94 %	1.138.135.829								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	0 unit	306.108.800	0 unit	963.836.170								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	77 %	331.193.188	98 %	324.981.355								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	0%	99 %	287.296.189	82 %	209.309.036								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	99 %	986.075.091	95 %	1.175.383.579								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	811.112.182	3 unit	827.646.981								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	89 %	284.005.942	96 %	290.242.739								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	0%	99 %	346.790.407	94 %	192.924.514								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	88 %	860.422.194	85 %	1.169.620.397								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1.128.125.065	3 unit	1.130.908.391								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	98 %	443.355.611	72 %	254.993.155								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	0%	93 %	572.604.712	95 %	205.948.199								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	87 %	984.299.082	89 %	1.094.610.909								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	553.022.820	3 unit	832.565.094								UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	95 %	340.172.650	82 %	330.067.843								UPTD Pendapatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	0%	99 %	357.002.757	86 %	155.726.848							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	88,31 %	6.667.918.967	90,21 %	6.113.139.364							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	87,78 %	3.216.693.429	63,34 %	2.169.524.743							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	63,5 %	97.444.500	78,77 %	2.067.859.863							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah	%	67,72 %	14.973.975.185	67,54 %	13.822.298.740							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	0%	60 %	1.407.289.967	44,37 %	836.980.050							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	0%	83,44 %	14.096.624.624	64,61 %	3.602.279.899							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan						80 %	34.881.743.000	80 %	51.159.084.190	80 %	36.031.829.755	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu						100 %	4.217.249.792.342	100 %	3.709.729.268.000	100 %	4.356.296.832.712	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik						60 %	7.900.000.000	80 %	7.504.000.000	100 %	8.160.471.083	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah						88;100 %; %	215.250.297.000	89;100 %; %	210.487.890.000	90;100 %; %	233.666.895.004	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)						100; 685 % ; Wajib Pajak	1.145.950.000	100; 739 % ; Wajib Pajak	1.633.400.000	100; 777 % ; Wajib Pajak	1.633.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah						100 %	10.043.125.000	100 %	19.318.082.000	100 %	11.471.100.000	Badan Pendapatan Daerah
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>				<b>18.501.608.398</b>		<b>21.947.476.337</b>		<b>46.568.661.000</b>		<b>48.976.216.000</b>		<b>36.733.336.000</b>	
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	0 %	2.044.300.769	%	2.098.578.585							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	0 unit	1.798.910.382	unit	1.515.041.631							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	0 %	1.404.166.409	%	1.091.529.849							Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 Nilai	0 Nilai	472.137.933	Nilai	401.841.350							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description	0%	0 %	-	%	1.576.658.887							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	0%	0 %	-	%	6.430.908.665							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik	0%	0 %	-	%	8.156.754.270							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan	0%	0 %	-	%	676.163.100							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural	0%	0 %	12.782.092.905	%	-							Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah						90 %	26.643.846.795	91 %	29.101.325.898	92 %	21.016.652.737	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit						100 %	19.924.814.205	100 %	19.874.890.102	100 %	15.716.683.263	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>23.580.807.152</b>		<b>13.716.973.526</b>		<b>44.364.570.000</b>		<b>34.568.030.000</b>		<b>35.000.000.000</b>	
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		84 %	4.108.859.841	85 %	3.394.983.704							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	3.547.255.143	4 unit	4.726.867.284							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91 %	726.672.046	38 %	279.892.217							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	78 Nilai	425.651.135	59 Nilai	69.042.500							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	60%	57 %	1.381.389.269	46 %	800.398.175							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	5%	9 %	3.284.817.500	17 %	1.866.898.501							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional	45%	25 %	10.106.162.218	23 %	2.578.891.145							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM						100 %	26.022.204.276	100 %	21.923.476.794	100 %	20.529.380.757	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN						20 %	18.342.365.724	25 %	12.644.553.206	30 %	14.470.619.243	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				<b>4.373.907.399</b>		<b>4.989.401.453</b>		<b>19.882.700.533</b>		<b>20.280.567.750</b>		<b>21.500.000.000</b>	
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80 %	1.238.204.841	85 %	1.268.803.028							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	459.164.742	3 unit	799.236.203							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80 %	1.025.852.957	81 %	1.417.073.943							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 BB	59 BB	170.516.200	56 BB	24.817.400							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	80 %	113.710.350	40 %	206.157.500							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	0%	70 %	419.061.341	100 %	446.535.500							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	0%	70 %	518.027.239	100 %	417.223.900							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang	0%	70 %	429.369.729	100 %	409.553.979							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		bidang sosial dan pemerintahan												
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda						95 %	16.052.227.000	97 %	17.500.000.000	98 %	16.414.249.846	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat						45 %	3.076.665.000	72 %	818.707.471	100 %	2.868.600.123	Badan Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)						27 %	430.000.000	63 %	681.292.529	100 %	717.150.031	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)						60 %	323.808.533	65 %	1.280.567.750	70 %	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
<b>5.07</b>	<b>Pengelolaan Penghubung</b>				<b>16.221.031.600</b>		<b>8.488.434.800</b>		<b>14.137.890.000</b>		<b>15.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90,65 %	2.368.242.542	93,64 %	4.090.079.223							Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	11.376.739.460	2 unit	2.938.210.688							Badan Penghubung Provinsi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80,77 %	1.188.223.903	91,3 %	777.961.253							Badan Penghubung Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	66,52 %	56.953.330	67,63 %	141.926.985							Badan Penghubung Provinsi



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	27 PD	28 PD	1.596.557.450	29 PD	169.176.500								Inspektorat
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	0 PD	17 PD	3.437.630.765	17 PD	147.089.800								Inspektorat
4.02.99	Program pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60 Nilai	66 Nilai	2.315.367.500	66 Nilai	1.094.155.279								Inspektorat
4.02.100	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (orang)	35 Orang	46 Orang	-	46 Orang	-								Inspektorat
4.02.101	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	0 Kegiatan	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	-								Inspektorat
4.02.102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	-								Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat						95 %	26.307.481.280	97 %	23.566.636.930	98 %	26.880.895.127		Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)						85 %	10.104.090.400	90 %	13.084.203.070	95 %	10.324.325.294		Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)						85 %	2.735.162.320	90 %	2.349.160.000	95 %	2.794.779.580		Inspektorat
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>				<b>7.167.077.893</b>		<b>6.121.673.607</b>		<b>19.695.186.938</b>		<b>24.834.973.600</b>		<b>21.000.000.000</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				7.167.077.893		6.121.673.607			19.695.186.938		24.834.973.600		21.000.000.000	
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59 %	802.922.347	59 %	947.810.568								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 Unit	5 Unit	186.269.280	5 Unit	438.420.370								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	60 %	1.119.718.843	60 %	532.014.749								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54.03%	56 %	322.795.645	56 %	692.935.580								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	507 Konflik	102 Konflik	668.093.038	100 Konflik	764.609.750								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	25%	5 %	683.467.980	5 %	739.158.400								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72.86%	0 %	2.606.683.077	77,3 %	1.234.663.000								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	100 Ormas	777.127.683	120 Ormas	772.061.190								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan						97 %	11.078.753.960	98 %	14.401.229.052	99 %	11.812.725.307		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Relisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Kesatuan Bangsa dan Politik													
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						6,00 %	1.098.351.368	7,00 %	1.572.669.296	8,00 %	1.171.117.532	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat						74,50 %	4.821.773.138	75 %	3.293.146.568	75,50 %	5.141.217.304	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim						27,25 %	992.426.122	32,70 %	852.945.162	40,05 %	1.058.174.702	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama						100 %	510.947.700	100 %	987.377.832	100 %	544.798.165	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur						33,66 %	1.192.934.650	33,33 %	3.727.605.690	33,00 %	1.271.966.990	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>JUMLAH</b>					4.680.055.904.295		4.615.089.756.327		11.616.186.000.001		10.806.996.675.345		11.886.763.209.156		

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu telah ditetapkan target yang harus dicapai dan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang. Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
  - b. Kesejahteraan sosial
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan
  - c. Pelayanan urusan penunjang
3. Aspek Daya Saing Daerah
  - a. Kemampuan Ekonomi
  - b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

### 8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Realisasi dan Target yang telah/harus dicapai dalam implementasi RPJMD (baik yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan) pada periode Tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut :

Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,75	77,25	77,75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6,50	6,00	5,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,09	6,87	6,81	6,75	6,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	-2,85	1,5±1	3,5±1	3,5±1
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	170	172	175
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	1,50	2,00	2,50
7	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	118	119	120
8	Indeks Gini	0,330	0,328	0,328	0,313	0,308
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,81	75,25	75,95	76,05	76,15
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	B (71,00)	B (71,50)	B (72,00)

### 8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VIII-2

## Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,83	15,07	15,04	12,92	13,00	13,50	13,50
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,96	1,03	1,06	9,52	9,67	9,91	9,91
1.3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	-	14,93	15,23	15,68	15,68
1.4	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,16	7,46	8,24	9,44	9,64	9,86	9,86
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55	0,56	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,31	0,33	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,34	4,33	4,94	5	5,2	5,3	5,3
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,48	1,52	1,67	1,68	1,7	1,72	1,72
1.9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,17	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08	1,08

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,48	9,70	9,77	9,60	9,70	9,80	9,80
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,67	13,69	13,72	14,34	14,73	14,96	14,96
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,96	74,22	74,33	73,76	73,78	73,8	73,8
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
3.1	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal (%)	17	77	150	-	-	-	-
3.2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	-	-	-	60	65	70	70
3.3	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0,36	10	35	-	-	-	-
3.4	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	-	-	-	66,60	70	80	80
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	72	80	100	150	200	233	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	30	45	55	70	86	86	86
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	68,23	68,55	73	77	82	85	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	90	90	90	-	-	-	-
1.5	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	-	-	-	95	97	100	100
1.6	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	791	9.125	28.235	19.500	26.000	31.700	31.700
1.7	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	635	4.207	2.196	2.500	2.500	2.500	2.500
1.8	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	85	85	95	97	100	100
1.9	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	0	66,26	65	75	80	85	85
2	Kesehatan							
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	34	45	55	-	-	-	-
2.2	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	-	-	-	30	40	50	50
2.3	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	76	80	85	-	-	-	-
2.4	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (Rumah Sakit)	-	-	-	88,2	88,6	88,7	88,7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	23,50	23,50	23,5	40	60	60
2.6	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,50	87,50	90	-	-	-	-
2.7	Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	7.922	7.922	-	-	-	-
3.2	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	-	-	-	73,69	76,00	78,91	78,91
3.3	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	54,30	54,59	62,64	64,64	66,64	68,64	68,64
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51.722	73.481	72.881	71.781	70.781	69.681	69.681
3.5	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	63,19	66,46	75,34	-	-	-	-
3.6	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	0,87	0,91	1	1
4	Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67,18	61,38	50	74,50	75	75,50	75,50
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60	61,33	66,67	82,67	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85	75	80	-	-	-	-
5	Sosial							
5.1	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	2.762	2.961	2.498	2.500	2.700	2.700	2.700
B.2	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	50	29,41	-0,27	33,14	35,00	40,00	40,00
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	76	75	70	70	70	70
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	-	0,09	30	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	57,53	65,65	65,54	65,63	65,64	65,70	65,70
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	70	82	88	90	90	90
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	34	37	62	50	60	70	70
2.4	Rasio KDRT	0,066	18,16	27,2	0,048	0,042	0,038	0,038
2.5	Kampung KB	154	160	175	299	315	330	330
3	Lingkungan Hidup							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	670	592	679	-	-	-	-
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	9,304 (Cemar Sedang)	5,299 (Cemar Sedang)	6,509 (Cemar Sedang)	-	-	-	-
3.3	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	5,60	25,18	50,72	27,75	28,50	29,33	29,33
3.4	Indeks Kualitas Air Sungai	-	77,09	53,70	53,75	53,80	53,85	53,85
3.5	Indeks Kualitas Udara	-	89,42	89,06	89,11	89,16	89,21	89,21
3.6	Indeks Kualitas Air Laut	-	-	83,51	83,56	83,61	83,66	83,66
3.7	Indeks Kualitas Lahan	-	72,12	79,76	79,81	79,86	79,91	79,91
3.8	Indeks Risiko Bencana	155,49	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49	150,49
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
4.1	Indeks Desa Membangun	-	0,6238	0,6752	0,6770	0,6825	0,6900	0,6900
4.2	Jumlah desa tertinggal (desa)	381	285	128	78	28	0	0
4.3	Meningkatkan jumlah Bumdesa aktif (Bumdes)	320	335	360	390	425	470	470
4.4	Desa berkembang (Desa)	289	15	329	30	30	30	30
4.5	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	15	25	30	35	45	150
4.6	Jumlah Kampung Iklim	-	-	30	35	40	45	150
5	Perhubungan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000	8.100.000
5.2	Jumlah barang yang diangkut (ton)	325.051.663	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000	370.000.000
5.3	Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (84%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)
5.4	Jumlah lakalantas (Kasus)	864	570	448	512	427	342	342
6	Komunikasi dan Informatika							
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,49	3,04	3,14	3,2	3,25	3,3	3,3
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas	-	183	-	-	-	-	-
7.2	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	-	-	-	1	1	1	1
7.3	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	-	-	-	-	10	10	10
7.4	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	-	-	-	3	3	3	3
8	Kepemudaan dan Olahraga							
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
8.2	Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan (%)	-	-	-	0,22	0,32	0,40	0,40
9	Kebudayaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	-	-	-	45	55	65	65
9.2	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	-	-	-	80	85	88	88
10	Perpustakaan							
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	137.841	469.997	199.772	206.600	208.000	209.500	209.500
B,3	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan							
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	3	3	2	3	3	3
1.2	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)	-	-	-	-	23,53	23,53	23,53
2	Pertanian							
2.1	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	-	-	-	7.100	8.100	8.700	8.700
2.2	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura (unit)	-	-	-	6	7	7	20
2.3	Jumlah produksi padi (ton)	262.773	253.820	262.430	271.356	279.681	289.846	289.846
2.4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	-	-	-	273.070	283.592	292.383	292.383
2.5	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina (orang)	-	-	-	85	330	441	441

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.6	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina (Lembaga)	-	-	-	4	4	4	12
2.7	Jumlah Miniranch yang teregister (Unit)	-	5	12	24	49	30	120
2.8	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	17,49	20,10	20,5	21	22	22
2.11	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta ton CO2eq)	-	-	2,916	4,079	4,067	4,044	4,044
2.12	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok Tani)	-	-	-	30	30	30	120
2.13	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.357.946	1.389.845	1.389.078	1.425.580	1.462.645	1.500.674	1.500.674
2.14	Produksi komoditas perkebunan (ton)	13.478.443	18.416.921	16.809.560	17.136.849.15	18.126.490.20	18.313.874.25	18.313.874.25
2.15	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	-	-	-	1	1	1	3
2.16	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	-	-	18	35	35	35	123
3	Kehutanan							
3.1	Realisasi penerimaan PNBPN sektor kehutanan (Rp. Miliar)	219,63	172,14	109,00	-	-	-	-
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	-	0,77	1,75	-	-	-	-
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	-	5,66	13,98	-	-	-	-
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118.000	31.368	38.490	32.000	32.000	32.000	165.858
3.5	Produksi Hasil Hutan Kayu (M <sup>3</sup> )	-	5.200.737,85	4.828.401,15	4.950.000	5.000.000	5.050.000	25.029.139,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.6	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	-	457,015	1.246,69	670	700	730	3.803,71
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	4,40	4,80	6,08	7,34	8,40	8,40
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	1.032.475	1.105.227	1.135.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000
5	Perdagangan							
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,45	2,04	2,23	1,57	1,72	1,89	1,89
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	-	-	-	5	5	5	5
6	Perindustrian							
6.1	Persentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,52	0,19	-2,77	-	-	-	-
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	-	2	1	-	-	-	-
6.3	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	-	-	-	2	2	2	2
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	151.918	148.197	155.000	161.216	164.441	167.730	167.730
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149.039	176.049	158.709	158.938	162.593	166.170	166.170
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)	7,64	2,5	2,54	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	1	2	-	-	-	-
7.5	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	-	-	-	289.048	297.805,90	297.805,90	297.805,90
7.6	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	-	-	-	20	20	20	60
7,5	Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	-	-	-	40	30	30	100
B.4	Fokus : Urusan Penunjang							
1	Perencanaan							
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,30	89,42	87,00	-	-	-	-
1.2	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (%)	-	-	-	75	78	80	80
2	Keuangan							
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	-	2	2	-	-	-	-
2.2	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	-	11.775	10.132	9.590	11.001	12.122	12.122
2.3	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	-	-	-	100	100	100	100
2.4	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	-	-	-	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	650	824	793	685	739	777	777
3	Pengawasan							
3.1	Hasil Penilaian Integritas	60	65	66,67	75	80	85	85
3.2	Level Kapasitas APIP	2	3	3	-	-	-	-
4	Umum/Sekretariat							
4.1	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	71,05	73,68	74	77	79	81	81
4.2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	86	84	87	92	95	97	97
4.3	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	49	13,16	61	71	79	89	89
4.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	60,53	60,53	-	-	-	-
C	ASPEK DAYA SAING							
1	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	61,45	69,77	75,02	76,15	78,27	78,27
1.2	Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan)	2	2	2	4	5	7	7
1.3	Capaian akses Air Minum Layak (%)	52,59	56,84	64,53	66,53	68,53	70,53	70,53

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	13.728,50	13.878,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50	14.778,50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	641	477	420	374	329	329
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.858.88	1.525.47	1.287.82	1.237.82	1.187.82	1.137.82	1.137.82
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,46	66,46	75,94	76,74	83,1	83,1
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	88,93	90,21	91,50	93,00	95,00	95,00
2	Fokus iklim berinvestasi							
2.1	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	-	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67	35,67
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	14	12	12	11	10	10
2.4	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	-	-	-	100	100	100	100
3	Fokus Sumber Daya Manusia							
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,55	76,60	76,65	77	78	78
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,22	81,5	82	82,3	82,50	83	83
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

## BAB IX PENUTUP

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan selama tiga tahun ke depan (2021-2023). Dokumen ini disusun dengan tujuan utama untuk mewujudkan pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yakni “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Disamping itu perubahan juga dibutuhkan seiring dengan dinamika politik, social dan ekonomi, baik pada tingkat Nasional dan Internasional, dalam kurun waktu pelaksanaan di tahun-tahun awal RPJMD 2019-2023. Adanya penyesuaian pada Tujuan dan Sasaran pembangunan yang dilakukan, kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratis, *bilateral matching (top-down, bottom-up)* dan politis.

Pada substansi makro, Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam struktur kinerja tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih terfokus dan rasional. Pada tingkatan meso, Tujuan dan Sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan yang sesuai dengan permasalahan pada tiap-tiap urusan, yang direpresentasikan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini selanjutnya perlu didukung dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah.

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yaitu :

1. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai objek dalam melakukan pengawasan pelaksanaan setiap program dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
4. Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dengan mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RENSTRA masing-masing Perangkat Daerah dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
6. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022-2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan program secara berkala (tahunan) dan melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
8. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

